

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045



RANCANGAN AKHIR

RPJPD

KOTA JAMBI

TAHUN | **2025**
2045

25
45

MEWUJUDKAN KOTA JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmatnya. Dokumen Rancangan Akhir “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045” telah dapat dirampungkan. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi ini telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Jambi selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan memperhatikan Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan mengacu kepada Rancangan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di daerah yang akan dilaksanakan.

Melalui kesempatan ini juga, kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada *stakeholder* yang telah membantu penyusunan Dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan dan perlu mendapat masukan-masukan untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045.

Pj. Wali Kota Jambi

Sri Purwaningsih, SH, M.A.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Hubungan Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	9
1.3.1 Kedudukan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045	10
1.3.2 Kedudukan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	11
1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi	12
1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi.....	15
1.4 Maksud dan Tujuan	16
1.5 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan.....	17
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH.....	1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota	1
2.1.1 Administrasi Wilayah	1
2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah.....	3
2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan	3
2.1.2.2 Kelerengannya	4
2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan	6
2.1.2.4 Jenis Tanah	7
2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah	8
2.1.2.6 Hidrologi	9
2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan..	11
2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota.....	11
2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi	16
2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan	18
2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah.....	28
2.1.4.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi	28
2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional	31
2.1.5 Kondisi Rawan Bencana	32
2.1.6 Kondisi Umum Demografi.....	36

2.1.6.1	Jumlah Penduduk Kota Jambi	36
2.1.6.2	Kepadatan Penduduk Kota Jambi	38
2.1.6.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
2.1.6.4	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur	39
2.1.6.5	Struktur Penduduk Menurut Agama	40
2.1.6.6	Ketenagakerjaan	41
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	42
2.2.1	Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	42
2.2.1.1	Struktur Ekonomi	42
2.2.1.2	Distribusi Sektor Ekonomi	44
2.2.1.3	Perkembangan Sektor Ekonomi	46
2.2.1.4	Inflasi	48
2.2.1.5	Indeks Gini Ratio	49
2.2.2	Aspek Kesejahteraan Sosial	50
2.2.2.1	PDRB Perkapita	50
2.2.2.2	Kondisi Kemiskinan	51
2.2.3	Seni Budaya dan Olahraga	52
2.3	Aspek Pelayanan Publik	
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	53
2.3.1.1	Pendidikan	53
2.3.1.2	Kesehatan	59
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98
2.3.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial	103
2.3.1.6	Sosial	104
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	106
2.3.2.1	Tenaga Kerja	106
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	110
2.3.2.3	Pangan	112
2.3.2.4	Pertanahan	114
2.3.2.5	Lingkungan Hidup	116
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	166
2.3.2.7	Peremberdayaan Masyarakat	167
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	168
2.3.2.9	Perhubungan	169
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	172
2.3.2.11	Koperasi dan UKM	176
2.3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga	179
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	180
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	180
2.4.2	Produktivitas Total Daerah	183

2.4.2.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	183
2.4.2.2 Produktivitas Total Daerah	183
2.4.3 Iklim Berinvestasi.....	186
2.4.4 Sumberdaya Manusia.....	188
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025.....	190
2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	190
2.5.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	200
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	202
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan	202
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun sampai Tahun 2025.....	205
2.6.2.1 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan ...	205
2.6.2.2 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan....	206
2.6.2.3 Perkiraan Kebutuhan Perumahan	210
2.6.2.4 Perkiraan Kebutuhan Air Bersih	219
2.6.2.5 Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan	224
2.7 Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.....	226
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	1
3.2 Isu Strategis.....	17
3.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	18
3.2.2 Infrastruktur dan Konektivitas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.....	18
3.2.3 Kualitas dan Daya Saing SDM.....	20
3.2.4 Lingkungan Hidup Berkelanjutan	20
3.2.5 Kualitas Pelayanan Publik dan Praktik <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan Daerah.....	21
BAB IV VISI MISI DAERAH.....	1
4.1. Visi	1
4.2 Misi.....	3
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	1
5.1. Arah Kebijakan.....	1
5.2. Sasaran Pokok Pembangunan	14

BAB VI	PENUTUP	1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	1
6.2	Prinsip Kerangka Kerja Dalam Perencanaan Pembangunan	2
6.3	Kerangka Pengendalian	4
6.4	Sistem Insentif	6
6.5	Mekanisme Perubahan	7
6.6	Komunikasi Publik.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	2
Tabel 2.2	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kota Jambi	4
Tabel 2.3	Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2022.....	4
Tabel 2.4	Kelerenghan Lahan di Kota Jambi	5
Tabel 2.5	Formasi Geologi di Kota Jambi	6
Tabel 2.6	Jenis Tanah di Kota Jambi.....	8
Tabel 2.7	Kedalaman Efektif Tanah di Kota Jambi	8
Tabel 2.8	Daerah Aliran Sungai yang melintasi Kota Jambi	10
Tabel 2.9	Luas Penggunaan Lahan di Kota Jambi	17
Tabel 2.10	Kejadian Bencana di Kota Jambi	32
Tabel 2.11	Rekap Data Penerima Bantuan Bencana di Kota Jambi.....	33
Tabel 2.12	Kawasan Rawan Bencana Banjir	35
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2016-2022	37
Tabel 2.14	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	39
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022	39
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Jambi Tahun 2022.....	40
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kota Jambi Tahun 2022.....	41
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama	42
Tabel 2.19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	43
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	44
Tabel 2.21	Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Jambi 2018-2022 (persen)	46
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi 2018-2022 (persen).....	47
Tabel 2.23	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022	51
Tabel 2.24	Data Kemiskinan di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	51
Tabel 2.25	Jumlah Group dan Gedung Seni Budaya	52
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2022	53

Tabel 2.27	Angka Partisipasi Murni (APM) dan . Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022	54
Tabel 2.28	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022	55
Tabel 2.29	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2018-2022	57
Tabel 2.30	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	58
Tabel 2.31	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA di Kota Jambi Tahun 2018-2022	59
Tabel 2.32	Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .	59
Tabel 2.33	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2022	61
Tabel 2.34	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik, 2022	63
Tabel 2.35	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022	66
Tabel 2.36	Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022	66
Tabel 2.37	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022	66
Tabel 2.38	Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022.....	66
Tabel 2.39	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.40	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2022.....	69
Tabel 2.41	Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi Dan Kelas Jalan Tahun 2020-2022.....	70
Tabel 2.42	Progres Penyiapan Syarat Persetujuan Substansi	73
Tabel 2.43	Implementasi Pemanfaatan Ruang PJM 2 RTRW Kota Jambi	83
Tabel 2.44	Rekapitulasi KKPR di Kota Jambi	85
Tabel 2.45	Kegiatan Pengawasan di Lapangan	86
Tabel 2.46	Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022.....	89
Tabel 2.47	Persentase Jumlah Sambungan Rumah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	89
Tabel 2.48	Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi .	93
Tabel 2.49	Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022.....	94
Tabel 2.50	Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi.....	97
Tabel 2.51	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Sanitasi Secara Aman di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	98
Tabel 2.52	Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota	101
Tabel 2.53	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022	103
Tabel 2.54	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	104
Tabel 2.55	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	

	Di Kota Jambi Tahun 2018-2022	110
Tabel 2.56	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2017-2021.....	110
Tabel 2.57	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018- 2022.....	111
Tabel 2.58	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022.....	114
Tabel 2.59	Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..	115
Tabel 2.60	Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	115
Tabel 2.61	Luas RTH Publik di Kota Jambi Tahun 2022	116
Tabel 2.62	RTH Taman di Kota Jambi.....	117
Tabel 2.63	RTH Taman Perumahan di Kota Jambi	119
Tabel 2.64	RTH Jalur Hijau Jalan	122
Tabel 2.65	RTH Pulau Jalan.....	122
Tabel 2.66	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi.....	125
Tabel 2.67	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi.....	127
Tabel 2.68	RTH Pemakaman di Kota Jambi.....	128
Tabel 2.69	Kualitas Air Sungai di Kota Jambi	145
Tabel 2.70	Kualitas Air Danau di Kota Jambi.....	153
Tabel 2.71	Kualitas Air Sumur di Kota Jambi.....	157
Tabel 2.72	Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi.....	159
Tabel 2.73	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga di Kota Jambi	161
Tabel 2.74	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga di Kota Jambi	161
Tabel 2.75	Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022.....	163
Tabel 2.76	Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022.....	164
Tabel 2.77	Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	167
Tabel 2.78	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat	167
Tabel 2.79	Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	168
Tabel 2.80	Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	170
Tabel 2.81	Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022	171
Tabel 2.82	Nilai Indeks Kematangan SPBE.....	173
Tabel 2.83	Capaian urusan komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022	174
Tabel 2.84	Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	179
Tabel 2.85	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	179
Tabel 2.86	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022	181
Tabel 2.87	Persentase Pengeluaran Perkapita Menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (persen).....	182

Tabel 2.88	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	184
Tabel 2.89	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022	185
Tabel 2.90	Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022	187
Tabel 2.91	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	187
Tabel 2.92	Jumlah Demonstrasi di Kota Jambi Tahun 2018-2022	188
Tabel 2.93	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022	189
Tabel 2.94	Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan	204
Tabel 2.95	Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan	204
Tabel 2.96	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan.....	204
Tabel 2.97	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Jambi	206
Tabel 2.98	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi	210
Tabel 2.99	Rekapitulasi Jumlah Unit Rumah Berdasarkan Data Pengesahan Site Plan Tahun 2011-2022	214
Tabel 2.100	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2030	218
Tabel 2.101	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2035	218
Tabel 2.102	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2040	219
Tabel 2.103	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2045	219
Tabel 2.104	Kriteria Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan	221
Tabel 2.105	Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Jambi Tahun 2045	223
Tabel 2.106	Perkiraan Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan Kota Jambi.....	226
Tabel 2.107	Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Jambi	244
Tabel 3.1	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi.....	1
Tabel 3.2	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumber Daya Manusia	9
Tabel 3.3	Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah	11
Tabel 3.4	Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup	14
Tabel 3.5	Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah	16
Tabel 3.6	Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan	17
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan	6
Tabel 5.2	Sasaran Visi RPJPD Kota Jambi 2025-2045	15
Tabel 5.3	Indikator Utama Pembangunan Daerah	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RPJPD Dalam Sistem Perencanaan Nasional.....	10
Gambar 1.2	Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang.....	13
Gambar 1.3	Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang.....	14
Gambar 1.4	Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan	14
Gambar 1.5	Hubungan Muatan Rencana Tata Ruang Dengan Muatan Rencana Pembangunan	15
Gambar 2.1	Grafik Komposisi Luas Kecamatan	2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Jambi	3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Jambi.....	5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kota Jambi	7
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi	11
Gambar 2.6	Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi	12
Gambar 2.7	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat.....	13
Gambar 2.8	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023	14
Gambar 2.9	Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Eksternal Kota Bagian Selatan.....	15
Gambar 2.10	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023	16
Gambar 2.11	Grafik Luas Penggunaan Lahan di Kota Jambi.....	17
Gambar 2.12	Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi.....	17
Gambar 2.13	Grafik Komposisi Guna Lahan di Kota Jambi.....	18
Gambar 2.14	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I	20
Gambar 2.15	Visualisasi Pemanfaatan Lahan BWP II.....	22
Gambar 2.16	Visualisasi Pemanfaatan Lahan BWP III.....	24
Gambar 2.17	Visualisasi Pemanfaatan Lahan BWP IV	25
Gambar 2.18	Visualisasi Pemanfaatan Lahan BWP V	27
Gambar 2.19	Visualisasi Pemanfaatan Lahan BWP VI	28
Gambar 2.20	Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi.....	30
Gambar 2.21	Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	30
Gambar 2.22	Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama Dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi.....	31
Gambar 2.23	Peta Sebaran Banjir di Kota Jambi	36
Gambar 2.24	Grafik Distribusi Penduduk Perkecamatan Tahun 2022..	37
Gambar 2.25	Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2016-2022.....	38
Gambar 2.26	Grafik Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan	

	Usaha 2018-2022 (persen)	48
Gambar 2.27	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022	49
Gambar 2.28	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	50
Gambar 2.29	Grafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..	52
Gambar 2.30	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022	54
Gambar 2.31	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022.....	56
Gambar 2.32	Kondisi Ruang Kelas SD/MITahun 2022.....	56
Gambar 2.33	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2022	57
Gambar 2.34	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022 (dalam tahun).....	60
Gambar 2.35	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	61
Gambar 2.36	Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022	62
Gambar 2.37	Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022	62
Gambar 2.38	Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022.....	63
Gambar 2.39	Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022.....	64
Gambar 2.40	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	65
Gambar 2.41	Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2022.....	69
Gambar 2.42	Peta Jaringan Jalan Kota Jambi	71
Gambar 2.43	Proses Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang	72
Gambar 2.44	Pembahasan Substansi Rancangan RTRW Bersama Pansus DPRD kota Jambi.....	74
Gambar 2.45	Klinik Rancangan RTRW di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.....	75
Gambar 2.46	Pusat Kota dan Pelayanan di Kota Jambi	77
Gambar 2.47	SubPusat Kota Kawasan Pasar Baru Talang Banjar	78

Gambar 2.48	Pusat Lingkungan di Kawasan Perumnas Aur Duri	79
Gambar 2.49	Pusat Lingkungan di Arab Melayu, Namun Belum Berfungsi	79
Gambar 2.50	Pusat Lingkungan di Mayang Mangurai	80
Gambar 2.51	Lebih Dikenal Dengan Pasar 46. Belum Ada Pasar Pengganti di Simpang Sejinjang Untuk Mengakomodir Kebutuhan.....	81
Gambar 2.52	Pasar Pasir Putih yang Belum Terwujud Penataannya...	81
Gambar 2.53	Pasar Skala Lingkungan yang Tumbuh di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo	82
Gambar 2.54	Salah Satu Kegiatan Rapat Permohonan KKPR.....	85
Gambar 2.55	Grafik Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani PDAM di Kota Jambi Tahun 2022	90
Gambar 2.56	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	91
Gambar 2.57	Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal.....	99
Gambar 2.58	Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022.....	100
Gambar 2.59	Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi.....	102
Gambar 2.60	Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022...	106
Gambar 2.61	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	107
Gambar 2.62	Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	107
Gambar 2.63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022	108
Gambar 2.64	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	109
Gambar 2.65	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022	109
Gambar 2.66	Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	112
Gambar 2.67	Taman Arena Remaja.....	117
Gambar 2.68	Taman Angrek	118
Gambar 2.69	Taman Jaksa	118
Gambar 2.70	Taman Tugu PKK	119
Gambar 2.71	Taman Perumahan	120
Gambar 2.72	Hutan Kota	121
Gambar 2.73	RTH Jalur Hijau Jalan	123
Gambar 2.74	Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai.....	126
Gambar 2.75	RTH Pemakaman	130
Gambar 2.76	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu Tahun 2022.....	131
Gambar 2.77	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah Tahun 2022.....	131
Gambar 2.78	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir Tahun 2022.....	132

Gambar 2.79	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hulu Tahun 2022.....	132
Gambar 2.80	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Tengah Tahun 2022.....	133
Gambar 2.81	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hilir Tahun 2022.....	133
Gambar 2.82	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu Tahun 2022.....	134
Gambar 2.83	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah Tahun 2022.....	134
Gambar 2.84	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir Tahun 2022.....	135
Gambar 2.85	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1 Tahun 2022.....	135
Gambar 2.86	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah Tahun 2022.....	136
Gambar 2.87	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2 Tahun 2022.....	136
Gambar 2.88	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3 Tahun 2022.....	137
Gambar 2.89	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir Tahun 2022.....	137
Gambar 2.90	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1 Tahun 2022.....	138
Gambar 2.91	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah Tahun 2022.....	138
Gambar 2.92	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2 Tahun 2022.....	139
Gambar 2.93	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir Tahun 2022.....	139
Gambar 2.94	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu Tahun 2022.....	140
Gambar 2.95	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah Tahun 2022.....	140
Gambar 2.96	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir Tahun 2022.....	141
Gambar 2.97	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu Tahun 2022.....	141
Gambar 2.98	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah Tahun 2022.....	142
Gambar 2.99	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir Tahun 2022.....	142
Gambar 2.100	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu Tahun 2022.....	143
Gambar 2.101	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Tengah Tahun 2022.....	143
Gambar 2.102	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir	

	Tahun 2022.....	144
Gambar 2.103	Alat AQMS di Kota Jambi.....	160
Gambar 2.104	Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Tahun 2022.....	166
Gambar 2.105	Jumlah surat kabar di Kota Jambi Tahun 2018-2022....	175
Gambar 2.106	Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018-2022 Kota Jambi	176
Gambar 2.107	Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	177
Gambar 2.108	Sumber Air Bersih.....	184
Gambar 2.109	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	186
Gambar 2.110	Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM Provinsi Jambi	189
Gambar 2.111	Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal Di Kota Jambi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2022.....	211
Gambar 2.112	Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal Di Kota Jambi Berdasarkan Kelurahan Tahun 2011-2022.....	213
Gambar 2.113	Peta Sebaran Perumahan di Kota Jambi	217
Gambar 2.114	Arah Keburuhan Pengembangan Jaringan Air Minum Perpipaan Kota Jambi.....	224
Gambar 2.115	Konsepsi Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.....	229
Gambar 2.116	Peta Rencana Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.....	232
Gambar 2.117	Konsepsi Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kota Jambi	236
Gambar 2.118	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	241
Gambar 2.119	Peta Rencana Pola Ruang.....	245
Gambar 2.120	Kawasan Strategis Kota Jambi	250

B A B I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh.

Karena Pembangunan adalah proses yang direncanakan, maka diperlukan sistem Perencanaan Pembangunan. Itulah mengapa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik Wilayah Perkotaan tentu sangat berbeda dengan Wilayah Perdesaan. Kawasan Perkotaan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karakteristik dan spesifikasi permasalahan yang berbeda-beda. Pasal 355 ayat (3) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berupa kawasan yang merupakan bagian daerah kabupaten ataupun bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan secara langsung. Secara umum Kota berawal dari suatu kawasan permukiman kecil yang mempunyai lokasi yang strategis secara spasial bagi kegiatan perdagangan (Sandy 1978 dalam Janthy 2014). Kota dengan segala kegiatannya akan senantiasa mengalami perkembangan secara fisik sebagai dampak perkembangan sosial dan ekonomi. Kota akan terus mengalami perubahan lebih cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan fisik yang terjadi merupakan konsekuensi spasial dari penambahan jumlah penduduk baik yang disebabkan oleh faktor alamiah (kelahiran), maupun yang disebabkan oleh urbanisasi.

Pembangunan kota memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri. Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan

budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri, sehingga dibutuhkan pola Pembangunan kota yang terencana, harmonis, efektif dan berkelanjutan melalui kerangka jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjalankan amanat tersebut maka pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, kesesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan terkoneksi dengan dokumen perencanaan lainnya. Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui rangkaian proses yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Kota Jambi merupakan pusat regional pertumbuhan wilayah di Provinsi Jambi. Sebagaimana kota-kota lain, Kota Jambi mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang cepat. Hal tersebut tentunya, mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota untuk kegiatan ekonomidan sosial. Tekanan pemanfaatan ruang fisik tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan perkotaan sebagai implikasi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang fisik perkotaan. Kompleksitas masalah dan dinamika perkotaan yang terjadi itulah yang harus dipecahkan dengan konsep perencanaan pembangunan, baik rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), seiring dengan berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan, perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan kualitas dokumen perencanaan pada satuan atau unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang dipergunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, penyusunan rencana yang dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan dan legislatif

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat mewujudkan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan muatan RPJPD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang di dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi.

Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan sasaran antara lain masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, pendapatan per kapita US\$23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritimin sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen serta sasaran prioritas nasional lainnya diperlukan kontribusi di tingkat lokal atau daerah. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Jambi yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Jambi maka perlu untuk melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045. Tujuan penyesuaian dan sinkronisasi dimaksud guna menciptakan harmonisasi dan kontribusi pembangunan secara berjenjang yang hasil agregatnya dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam jangka panjang. Penyesuaian RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial untuk mewujudkan sasaran Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Jambi 2025-2045 mengacu pada RPJPD Provinsi yang telah ditetapkan sebagai sebagai PERDA

RPJPD Kota Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Pemerintah Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kota Jambi 2025-2045 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan.

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati peta jalan (*road map*) pembangunan daerah masa depan yang akan ditempuh. Untuk itu dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun

2025-2045 disusun dan kemudian dapat diimplementasikan melalui terciptanya komitmen dan konsistensi dari segenap pemangku kepentingan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok yang termuat dalam dokumen dimaksud.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

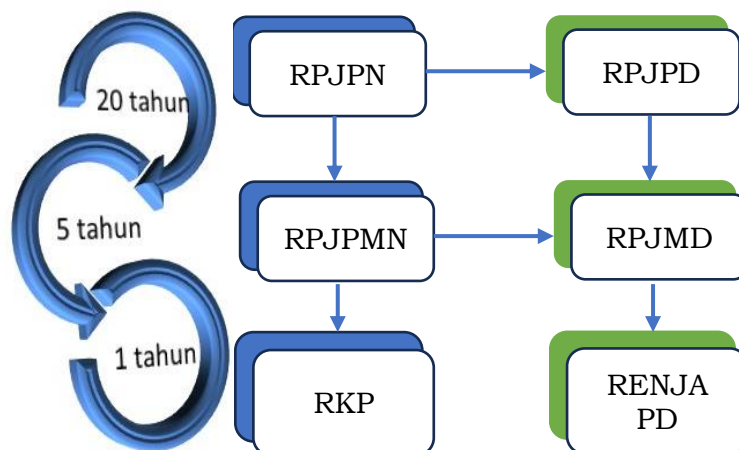
Penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2023-2043. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, RPJPD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan data dan fakta spasial yang bertujuan menghasilkan arah kebijakan dan sasaran yang realistis dan tidak mengganggu peruntukan tata ruang dan zonasi wilayah.

Seiring tekanan ekologis akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas yang melibatkan lingkungan serta daya dukung sumber daya alam maka diperlukan perencanaan yang matang dan senantiasa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keberlanjutannya.

Untuk mengintegrasikan rencana pembangunan ini, maka Dokumen Perencanaan pembangunan yang terkait dengan penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah:

- a. RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
- b. RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; dan
- c. RTRW Kota Jambi yang tentunya juga sudah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Jambi.



Gambar 1.1
Kedudukan RPJPD Kota Dalam Sistem Perencanaan Nasional

1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dirumuskan dengan memenuhi prinsip sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan

bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan dapat mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan tata ruang.

Untuk mewujudkan prinsip ini, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Tujuan mempedomani RPJPN yaitu menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Jambi dengan nasional. Keterkaitan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 merupakan bentuk integrasi perencanaan guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 sesuai dengan RPJPN Tahun 2025-2045 ditandai dengan penggunaan indikator sasaran visi dan indikator kinerja utama pembangunan pusat ke daerah yang sebagian besar sama. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok menuju Indonesia Emas Tahun 2025.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan dan mencermati dokumen RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Tujuannya untuk menjaga keselarasan pembangunan dan sinergi. *Timeline* penyusunan RPJPD provinsi dan kota berlangsung bersama dan mempedomani regulasi yang sama terkait penyelarasan dan harmonisasi dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran dari setiap satuan

pemerintahan pada dasarnya adalah agregasi dari satuan pemerintahan di bawahnya.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk melihat keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045. RPJPD Kota Jambi pada hakikatnya telah mengakomodasi kebijakan

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan 5 (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu rencana yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 (dua puluh) tahun.

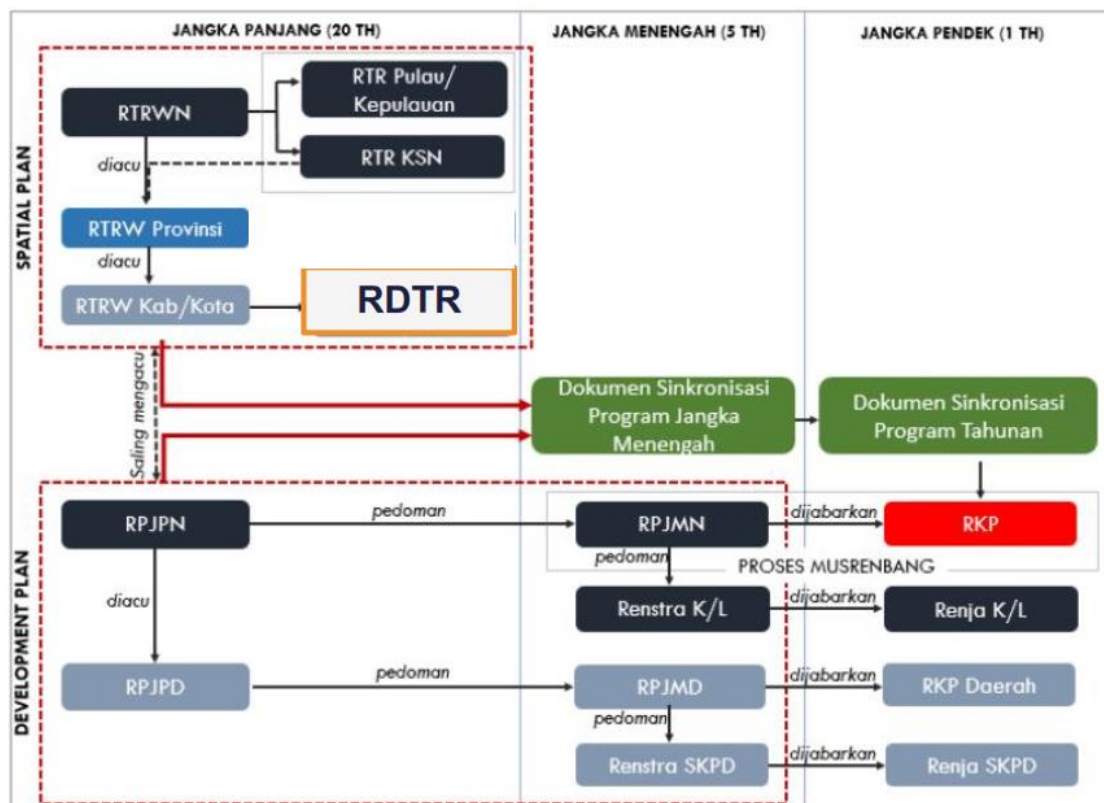
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan.

Mengingat RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen jangka panjang, maka diperlukan adanya kesatuan perlakuan terhadap pola ruang yang telah ada sesuai peruntukannya seraya membangun proyeksi-proyeksi sesuai empat tahapan periode RPJMD yang termuat di dalamnya. Harapannya, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjaga karena perencanaan jangka panjang disusun dengan pertimbangan yang holistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana keduanya sama-sama sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan

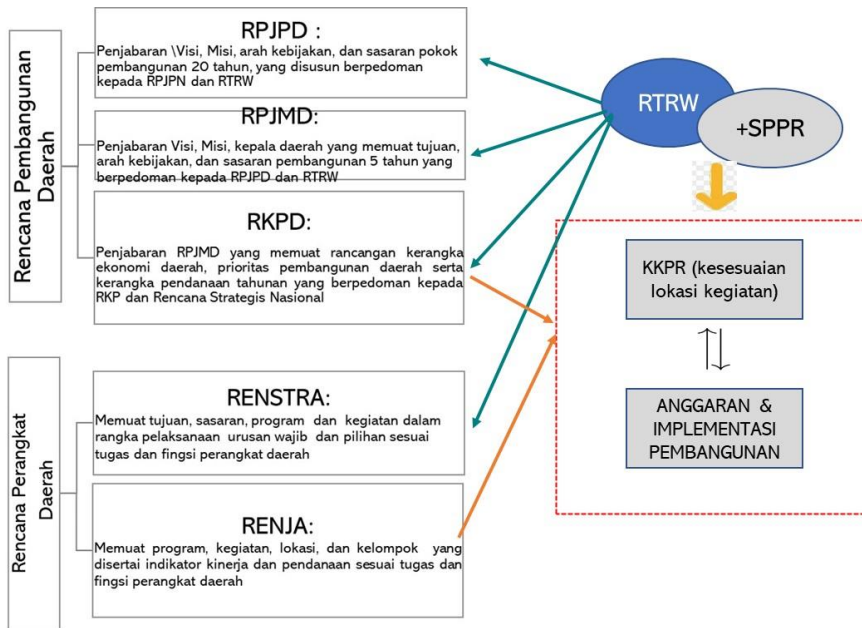
sinkronisasi atau penyesuaian antara RPJPD dan RPJMD terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani RTRW melalui proses penyesuaian. Perumusan RPJPD saat ini mengandung momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. pada periode sebelum ini, penyusunan dan penepatan RPJPD tidak berada pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi RTRW. Pada saat ini revisi RTRW Kota Jambi juga sudah berada pada proses penetapan; dan
- c. sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahami tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana tata ruang.

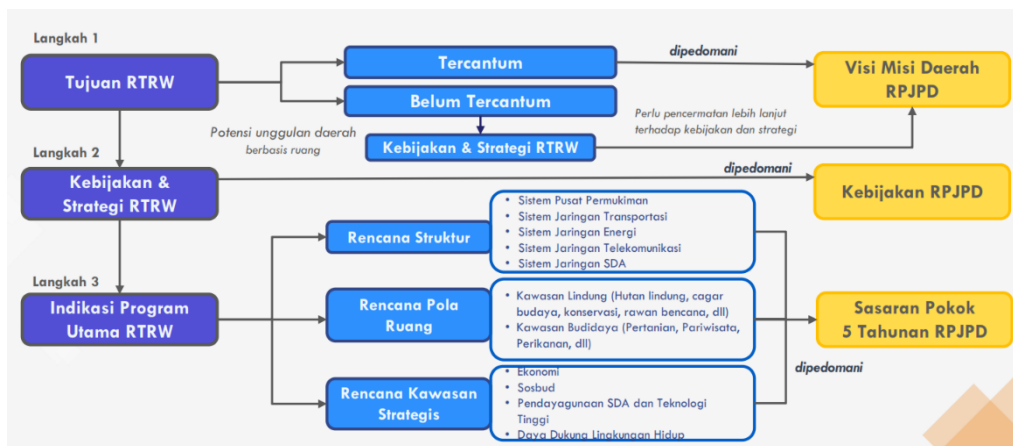


Gambar 1.2
Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah.

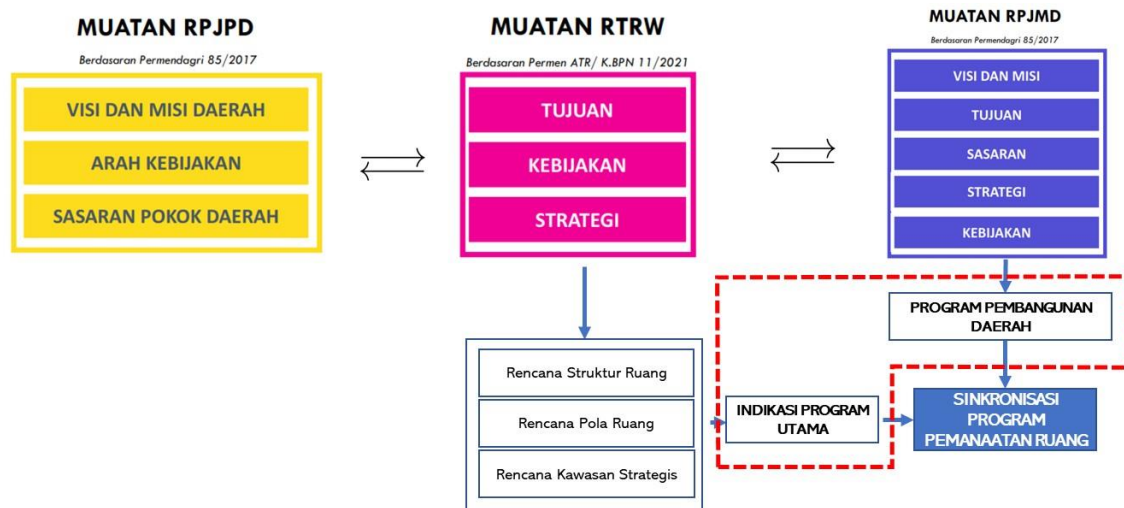


Gambar 1.3
Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang



Gambar 1.4
Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-masing dokumen rencana.



Gambar 1.5

Hubungan Muatan Rencana Tata Ruang dengan Muatan Rencana Pembangunan

1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD.

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD. RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan *forecasting* yang

menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah untuk menciptakan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan melalui rumusan tujuan pembangunan daerah yang berlandaskan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindakan yang sama.

Berdasarkan maksud penyusunan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, meliputi:

- a. Teridentifikasinya capaian pembangunan pada periode lalu sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045;
- b. Ditetapkannya Visi dan Misi Kota Jambi untuk pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045;
- c. Tersedianya arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Jambi;
- d. Tersedianya tolok ukur kinerja pembangunan jangka panjang daerah yang akan dievaluasi secara berkala;
- e. Tersedianya pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Jambi selama 4 (empat) periode mendatang;
- f. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan antar daerah, antar ruang, maupun antar fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- g. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. menciptakan efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan

1.5 PRINSIP DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Transparan:

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2) Responsif:

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

3) Efisien:

yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

4) Efektif:

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

5) Akuntabel:

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6) Partisipatif:

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

7) Terukur:

yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

8) Berkeadilan:

merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

9) Berwawasan Lingkungan:

yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

10) Berkelanjutan:

yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain berlandaskan prinsip, penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

1) Teknokratik:

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses merumuskan tantangan dan peluang pembangunan Kota Jambi pada masa depan; menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

- a) rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas
- b) kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
- c) rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah
- d) rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria sederhana, terukur, mudah dicapai, realistis, dan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

- e) rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta agenda pembangunannya.
- f) instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan.

2) Partisipatif:

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- a) pelibatan stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada tahapan perumusan dan penetapan visi, misi Pembangunan melalui kegiatan forum diskusi terbatas dan forum seminar seperti telah diuraikan di atas;
- b) kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun Lembaga non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, yang ditunjukkan pada proses partisipasi stakeholders di forum-forum diskusi terbatas;
- d) keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta lembaga penelitian/perguruan tinggi;
- e) Pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJPD akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD;
- f) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
- g) dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan kesepakatan mengenai pernyataan visi Kota Jambi.

3) Pendekatan Politis:

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kota Jambi melibatkan proses konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini dengan DPRD Kota Jambi.

Keterlibatan DPRD dalam penyusunan RPJPD melalui:

- a) Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam proses penyusunan Rancangan Awal ini mulai dilibatkan pada tahapan forum diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi Dan Pemantapan Visi, Misi Dan Arah Pembangunan Dalam Penyusunan RPJPD Kota Jambi dan Musrenbang RPJPD Kota Jambi;
- b) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD Kota Jambi;
- c) *Review* dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi;
- d) *Review*, saran, dan masukan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi;
- e) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi 2025-2045; dan
- f) Pengesahan RPJPD Kota Jambi sebagai Peraturan Daerah.

4) Perencanaan bawah ke atas (*Bottom Up*):

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya; dan
- b) Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah.

5) Perencanaan atas ke bawah (*Top Down*):

Proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis lainnya, antara lain:

- a) RPJP Nasional;
- b) RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi; dan
- c) RTRW Kota Jambi

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika rancangan awal RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan jangka panjang.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Pembahasan Bab ini diuraikan dalam 3 (tiga) sub bahasan yakni; (1) Uraian tentang visi beserta jabaran atas visi, yang memberikan penjelasan atas kata-kata kunci dalam pernyataan visi; (2) Uraian tentang misi pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Pada sub bagian diawali dengan uraian mengenai misi beserta penjelasan sasaran atau indikasi-indikasi capaian yang teruang dalam misi dan langkah-langkah pencapaian, yang menunjukkan langkah bagaimana mencapai misi yang dijalankan; (3) Uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini menguraikan tentang sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota Jambi 2025-2045.

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Pada bab ini membahas kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2025-2045.

B A B II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI WILAYAH

2.1.1 Administrasi Wilayah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}030'2,98''$ sampai dengan $01^{\circ}040'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ sampai dengan $103^{\circ}40'022''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi ± 169,85 Km² terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

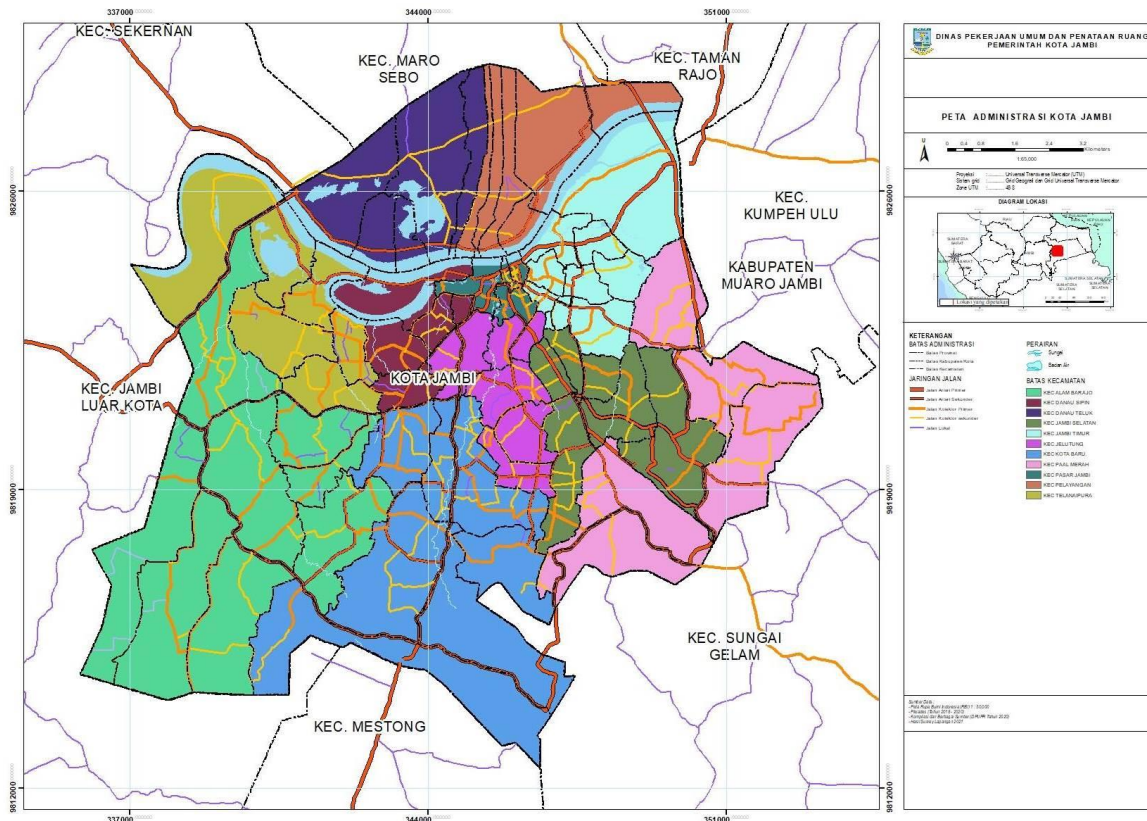
Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1.	Kota Baru	7	27,25	16,04
2.	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3.	Jambi Selatan	5	7,60	4,47
4.	Paal Merah	6	24,25	14,28
5.	Jelutung	7	7,61	4,48
6.	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7.	Telanaipura	7	20,32	11,96
8.	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9.	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10.	Pelayangan	6	10,69	6,29
11.	Jambi Timur	9	13,68	8,05
Kota Jambi		68	169,85	100

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043 dan Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021.



Gambar 2.1
Grafik Komposisi Luas Kecamatan



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Jambi

2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah

2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ber iklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat Musim Barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April – bulan Oktober, sementara pada Musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2023 rata-rata suhu di Kota Jambi adalah 27,57°C yang berkisar antara 26,50°C sampai 28,50°C. Dengan suhu maksimum 35,30°C yang terjadi pada bulan Oktober dan suhu minimum 21,80°C terjadi pada bulan Januari. Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2023 beragam antara 42,80 mm sampai 320,40 mm, dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 12 knots

hingga 17 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 75,00% - 85,70%. Selengkapnya curah hujan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2023

No.	Bulan	Suhu Udara			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	21,80	26,50	34,40	52,00	84,90	98,00
2	Februari	22,70	27,10	33,90	48,00	82,80	98,00
3	Maret	21,90	26,70	34,00	56,00	85,20	98,00
4	April	22,00	27,60	34,60	54,00	85,50	99,00
5	Mei	22,60	28,00	34,90	48,00	85,40	99,00
6	Juni	23,00	27,70	34,20	53,00	83,80	99,00
7	Juli	22,20	27,60	34,00	51,00	82,70	98,00
8	Agustus	23,00	27,90	34,00	43,00	79,10	98,00
9	September	22,20	28,30	34,80	41,00	75,00	98,00
10	Oktober	22,60	28,50	35,30	42,00	77,50	98,00
11	November	22,40	27,60	34,80	51,00	84,30	99,00
12	Desember	23,40	27,40	33,80	56,00	85,70	98,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.3
Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)
Di Kota Jambi, Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (MM)	Jumlah Hari Ujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	191,00	26	2,7
2	Februari	158,10	18	3,7
3	Maret	281,80	25	3,7
4	April	171,10	23	5,3
5	Mei	320,40	20	4,8
6	Juni	198,60	13	4,8
7	Juli	150,00	13	5,1
8	Agustus	63,40	13	6,6
9	September	77,40	6	6,7
10	Oktober	42,80	10	5,7
11	November	26,70	16	3,4
12	Desember	209,90	21	3,0

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2.2 Kelerengan

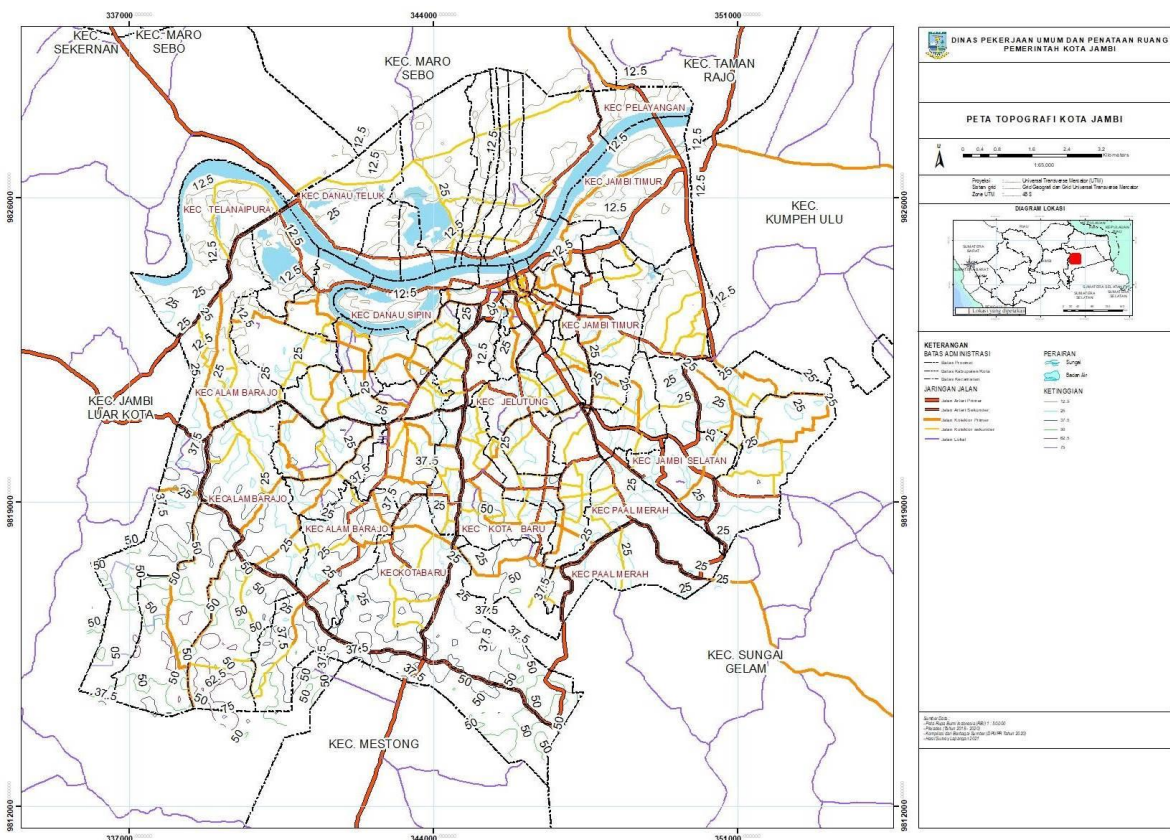
Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Citra (2021) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042 diketahui sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kelerengan antara 0 – 2% yaitu seluas 9.213,13 hektar dari luas keseluruhan Kota Jambi. Wilayah dengan kelerengan 2 – 8% seluas 4.312,54 hektar, dan kemiringan 8 – 15% seluas 2.538,07 hektar. Jika dilihat penyebarannya pada masing-masing kecamatan, kemiringan lereng 0 – 2%

tersebar di seluruh kecamatan, luas terbesar terdapat di Kecamatan Paal Merah yaitu masing-masing seluas 1.914,18 hektar. Kelerengan 2 – 8% terbesar di Kecamatan Kota Baru seluas 1.671,58 hektar, dan kelerengan 8 – 15% terbesar di Kecamatan Alam Barajo seluas 1.501,39. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.4
Kelerengan Lahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)			Danau/ Sungai (Ha)	Jumlah (Ha)
		0 - 2 %	2 - 8 %	8 - 15 %		
1	Telanai Pura	1.518,60	203,34	32,38	282,53	2.036,84
2	Jambi Selatan	557,06	165,36	37,10	-	759,53
3	Jambi Timur	1.259,19			127,85	1.387,04
4	Pasar Jambi	124,10	19,81		21,31	165,23
5	Pelayangan	879,49			90,24	969,73
6	Danau Teluk	1.189,43			248,15	1.437,58
7	Kota Baru	255,25	1.671,58	753,88	0,64	2.681,36
8	Jelutung	275,89	434,86	49,69	2,98	763,42
9	Alam Barajo	779,41	1.340,19	1.501,39	-	3.620,99
10	Danau Sipin	460,53	1,61	111,85	140,90	714,88
11	Paal Merah	1.914,18	475,78	51,78	7,02	2.448,75
Jumlah		9.213,13	4.312,54	2.538,07	921,61	16.985,35

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan

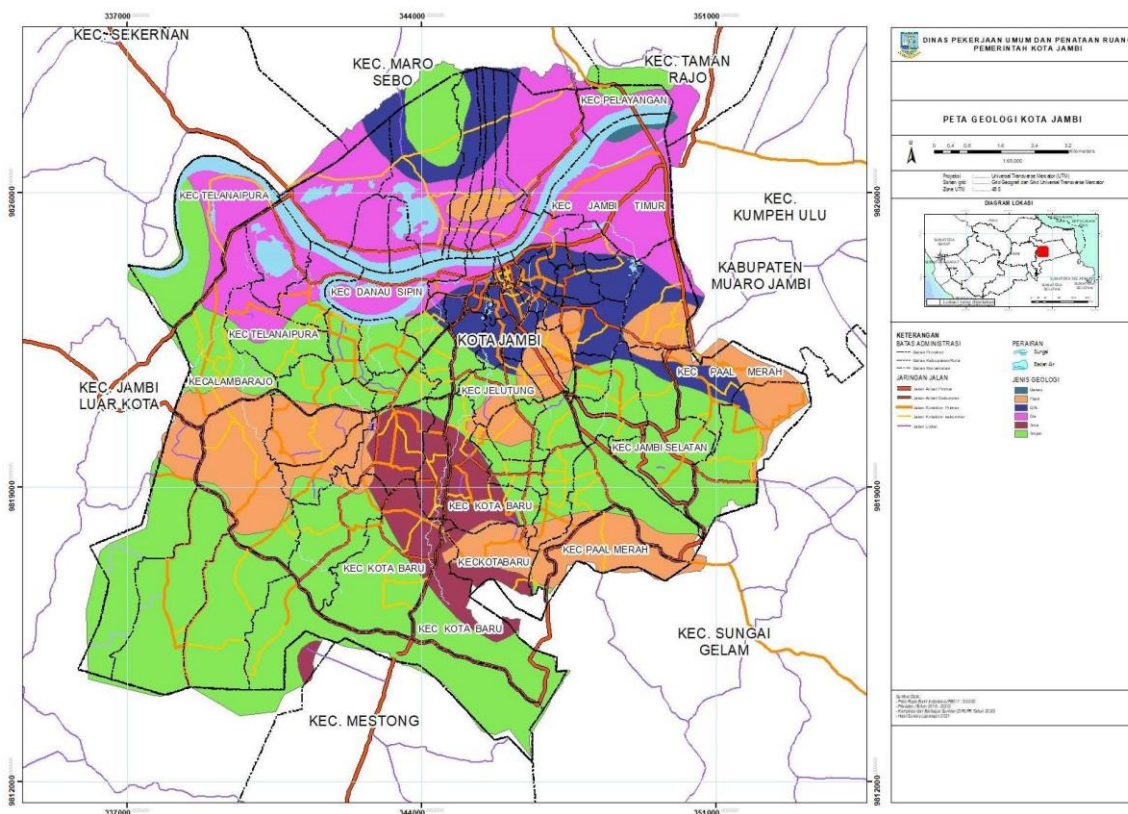
Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luas terbesar berada di jenis Tmpn sebesar 7.664,22 ha, dan yang terkecil berada di jenis Danau sekitar 57,99 ha (0,34%) dari luas total wilayah Kota Jambi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Formasi Geologi Kota Jambi

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Danau	57,99	0,34%
2	Pasir	2.784,08	16,39%
3	Qa	3.813,09	22,45%
4	Q Tk	1.561,44	9,19%
5	Tma	1.104,50	6,50%
6	Tmpm	7.664,22	45,12%
Jumlah		16.985,32	100,00%

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Jambi

2.1.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Jambi menurut Klasifikasi Tanah Nasional terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Entisol, Gleisol, Oksisol, Histosol dan Ultisol. Luas terbesar dengan jenis tanah Kompleks Latosol dan Litosol sekitar 10.453,32 Ha dan jenis tanah Podsolik sekitar 6.531,96 ha, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan tekstur tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jenis Tanah Di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Kompleks Latosol dan Litosol	Podsolik	Jumlah
1	Telanaipura	2.024,93	7,55	2.032,48
2	Jambi Selatan	737,19	22,85	760,04
3	Jambi Timur	1.367,59	-	1.367,59
4	Pasar Jambi	166,99	-	166,99
5	Pelayangan	1.068,95	-	1.068,95
6	Danau Teluk	1.344,14	-	1.344,14
7	Kota Baru	735,12	1.990,35	2.725,47
8	Jelutung	761,42	-	761,42
9	Alam Barajo	816,61	2.789,07	3.605,68
10	Danau Sipin	727,61	-	727,61
11	Paal Merah	702,77	1.722,14	2.424,91
Jumlah		10.453,32	6.531,96	16.985,28

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah

Sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm yaitu seluas 19.260 hektar atau sekitar 93,78% dari luas wilayah keseluruhan Kota Jambi. Sedangkan kedalaman efektif tanah lainnya berkisar antara 60 – 90 cm seluas 188 hektar atau sekitar 0,91% dari luas wilayah keseluruhan. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm sebagian besar terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru seluas 7.708 hektar dan Kecamatan Jambi Selatan seluas 3.378 hektar. Untuk lebih jelasnya kedalaman efektif tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kedalaman Efektif Tanah				Danau / Sungai	Jumlah (Ha)
		<30 cm	30-60 cm	60-90 cm	>90 cm		
1	Kota Baru	-	-	-	7,708	70	7,778
2	Alam Barajo	*)	*)	*)	*)	*)	*)
3	Jambi Selatan	-	-	-	3,378	29	3,407
4	Paal Merah	*)	*)	*)	*)	*)	*)
5	Jelutung	-	-	-	771	21	792
6	Pasar Jambi	-	-	-	356	46	402
7	Telanaipura	-	-	-	2,731	308	3,039
8	Danau Sipin	*)	*)	*)	*)	*)	*)
9	Danau Teluk	-	-	-	1,377	193	1,570
10	Pelayangan	-	-	188	1,295	234	1,717
11	Jambi Timur	-	-	-	1,643	190	1,833
Jumlah		0	0	188	19,259	1,091	20,538
Persentase (%)		0.00	0.00	0.92	93.77	5.31	100.00

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

*) Data masih tergabung dengan kecamatan induk

2.1.2.6 Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Kecil

Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

2. Sungai Kenali Besar

Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar.

3. Sungai Kambang

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanai.

4. Sungai Danau Teluk

Sungai ini melewati Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok.

5. Sungai Putri

Sungai ini melewati Selamat dan Sungai Putri.

6. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

7. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

8. Sungai Sijenjang

Daerah pengaliran Sungai Sijenjang meliputi Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.

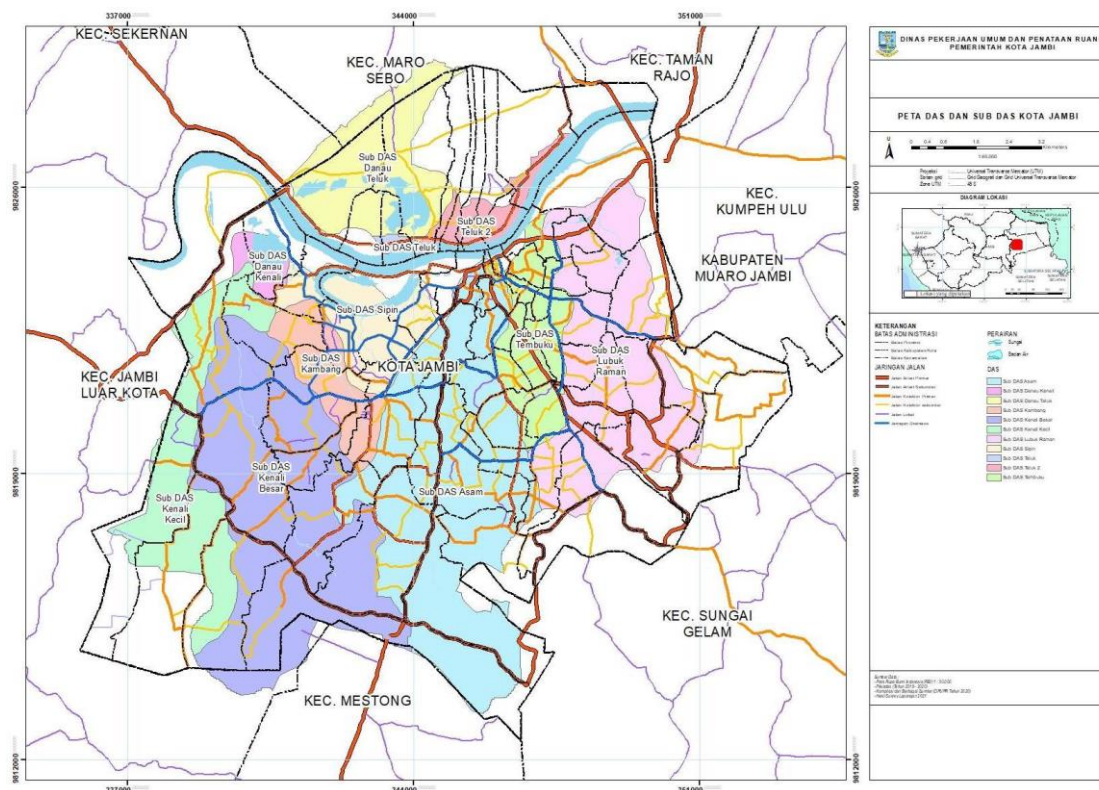
Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota

Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

Tabel 2.8
Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi

No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan Yang Dilintasi	Bwk Yang Dilintasi
1	Sungai Kenali Kecil	10,68	Perumahan Citraraya	Jembatan Buluran Pematang Sulur	Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali	BWK VI
2	Sungai Kenali Besar	13,79	Balai Benih Ikan	Danau Teluk Kenali	Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliuang, Rawasari, dan Kenali Besar	BWK V
3	Sungai Kambang	4,3	SMA 4	Danau Sipin	Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanai	BWK V dan BWK VI
4	Sungai Danau Teluk	8,79	SMA 1	Danau Sipin	Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok	BWK I dan VI
5	Sungai Putri	2,97	Lorong Diamon	Danau Sipin	Selamat dan Sungai Putri	BWK VI
6	Sungai Asam	10,68	Pertamina Kenali Asam	Pintu Air Angso Duo Sungai Batanghari	Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam	BWK IV, BWK V, dan BWK I
7	Sungai Tembuku	5,35	Thehok	Jl. Raden Pamuk	Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang	BWK I dan IV
8	Sungai Sijenjang/Lubukraman	8,37	Perumahan Parma	S. Lubuk Raman	Pasir Putih, Wijaya Pura, Talang Banjar, Payo Selincih, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya	BWK III

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi

2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan

2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota

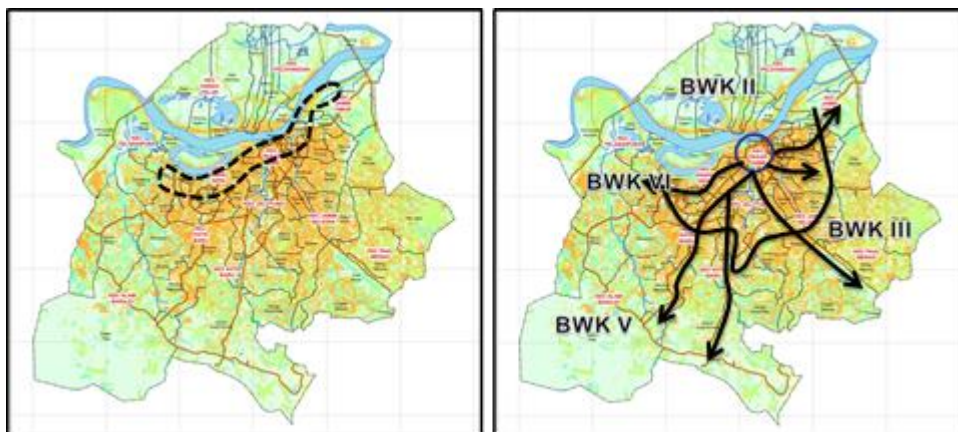
A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjarangan Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada

kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorientasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



Gambar 2.6
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.



Gambar 2.7
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023

2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesaan.



Gambar 2.8

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi *Outer Ring Road* II yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 2.9
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukkan karakter semi urban.

Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukkan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.



Gambar 2.10

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023

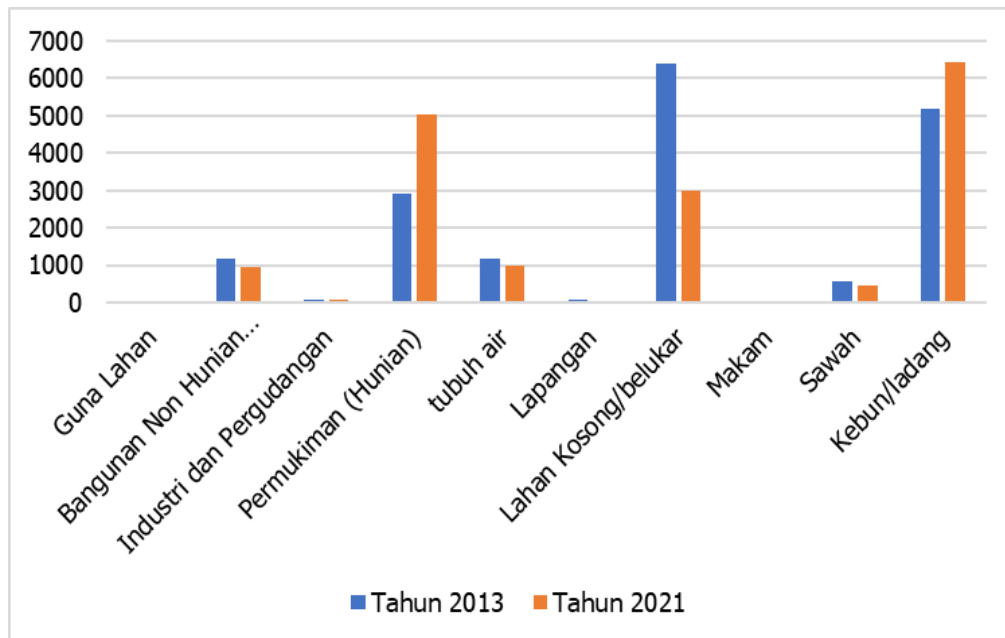
2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan menginterpretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 2.9
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

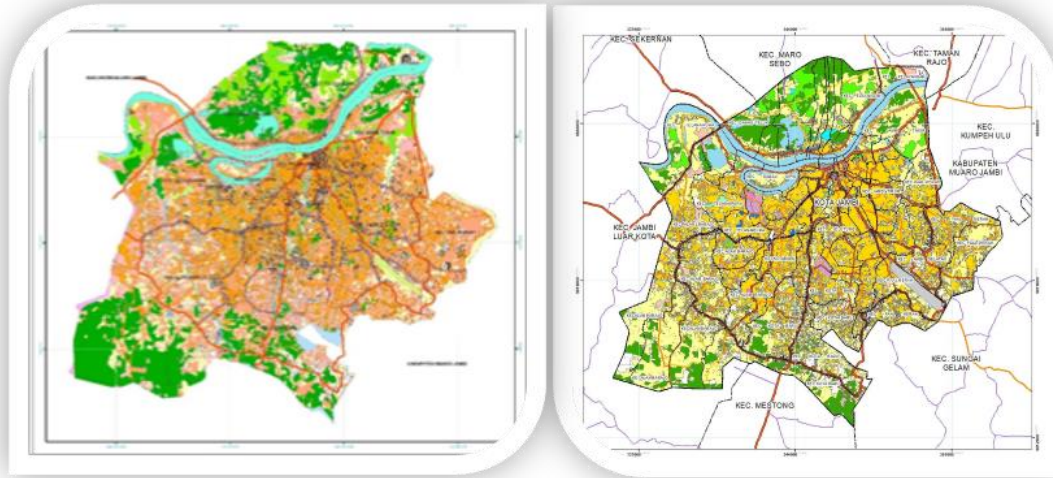
No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
Jumlah		17.683,92	16.982,56

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



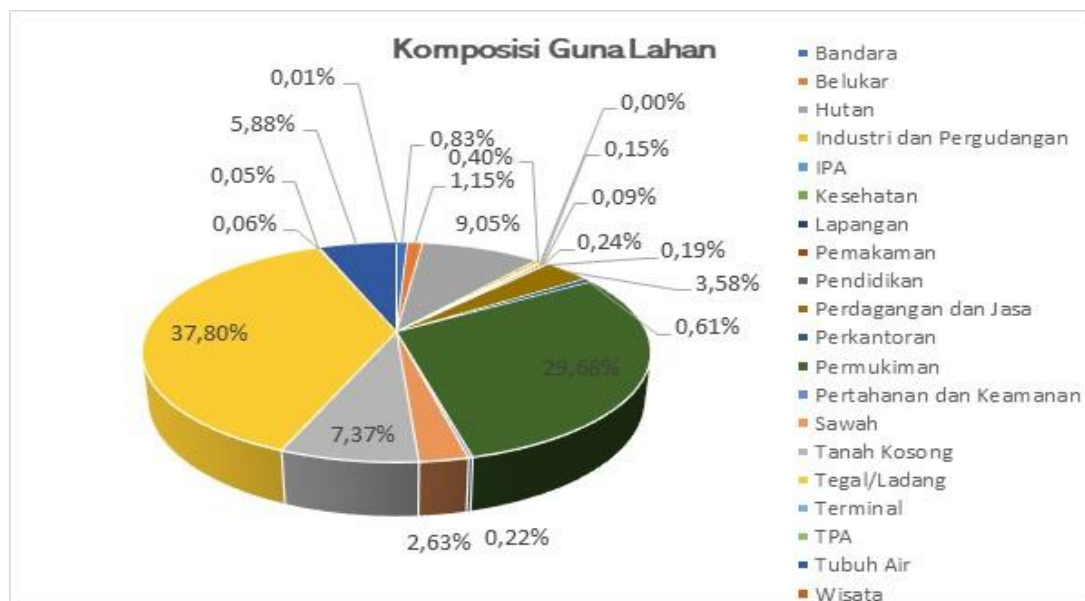
Gambar 2.11
Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

Gambar 2.12
Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi



Gambar 2.13
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan

A. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I merupakan *Central Business District* (CBD) Kota Jambi yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini terbentuk secara eksisting dan

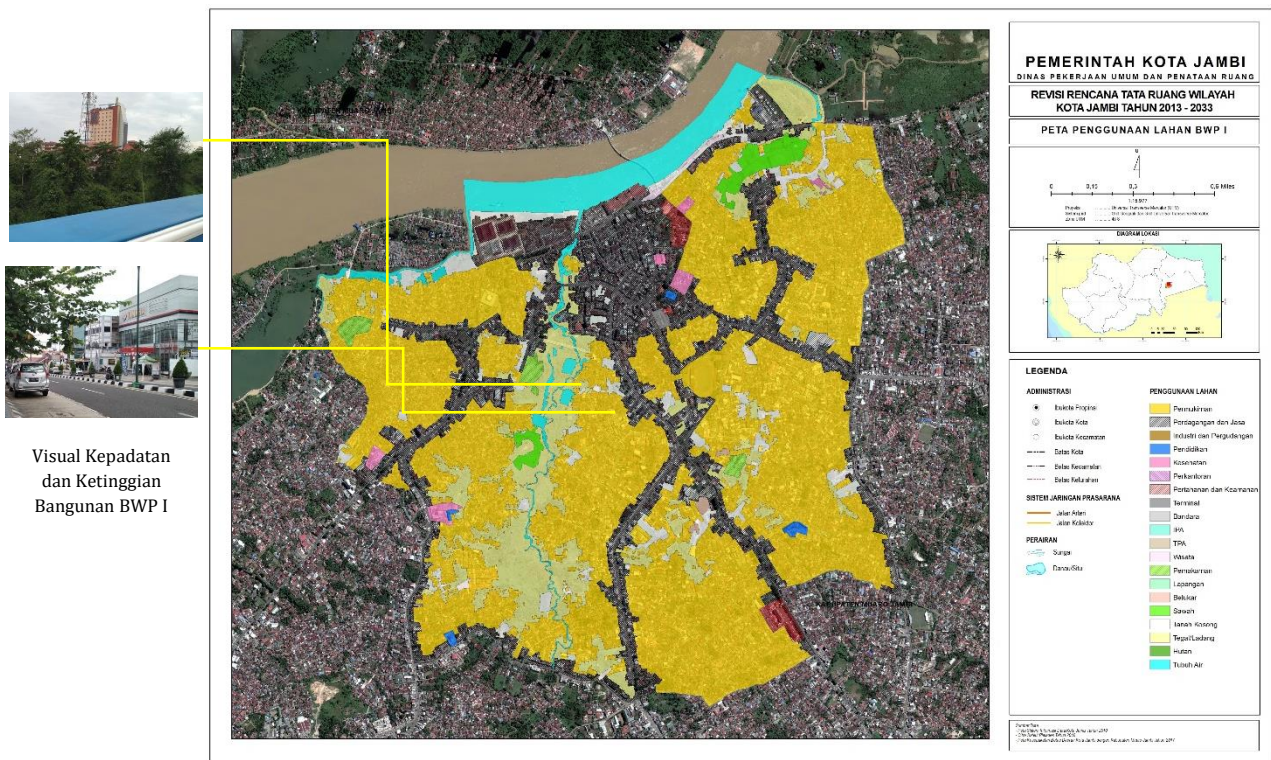
ditegaskan melalui penekanan peran dan fungsi kawasan. Dari karakter dan fungsi ini tergambar bahwa dominasi kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kota bahkan skala regional.

1) Kepadatan Bangunan

Pola perkembangan yang terjadi pada BWP ini mewakili pola perkembangan wilayah Kota Jambi secara keseluruhan yang cenderung radial konsentris. Kepadatan bangunan yang ada di BWP ini cenderung tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > 80% terutama untuk bangunan deret yang berada di koridor jalan utama kawasan. Kondisi kepadatan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada bangunan permukiman yang memang cenderung kurang tertata dan sebagian berada pada zona yang tidak sesuai dengan daya dukung karena merupakan zona yang rentan terhadap luapan yang berasal dari Sungai Batanghari dan SubDASnya.

2) Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan pada BWP I walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi umum, namun cenderung memiliki ketinggian yang berbeda. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.



Gambar 2.14
Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I

B. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II

Kawasan BWP II diarahkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Jambi. Fungsi utama yang mendominasi adalah fungsi untuk kegiatan permukiman. Fungsi pendukung lainnya yang berlangsung di BWP II meliputi fungsi perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya.

BWP II merupakan bagian wilayah Kota Jambi yang memiliki batasan fisik untuk perkembangan kegiatan terbangun, karena bagian wilayah ini cenderung rentan banjir. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bagian kawasan berfungsi sebagai pendukung kegiatan terbangun. Pola perkembangan kawasan BWP II cenderung linear mengikuti pola jaringan jalan utama, dimana pola jaringan jalan utama ini linear terhadap aliran Batanghari.

1) **Kepadatan bangunan di BWP II**

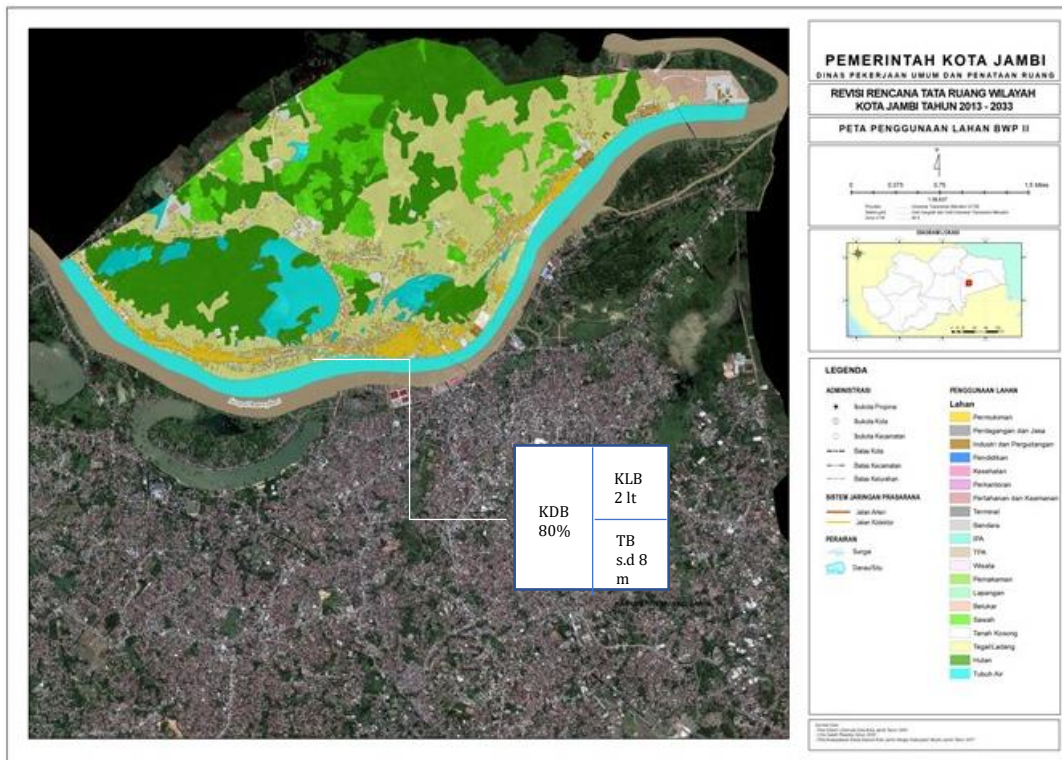
Pemanfaatan lahan pada Kawasan BWP II didominasi oleh kegiatan permukiman. Kegiatan permukiman yang berorientasi awal terhadap Batanghari telah menciptakan pola perkembangan yang linear. Pola perkembangan ini selaras dengan pola jaringan jalan utama yang juga linear menghubungkan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer di Kota Jambi. Dominasi fungsi sebagai kawasan permukiman, jika dikaitkan dengan kepadatan penduduk secara bruto dapat terlihat bahwa pada dasarnya kepadatan penduduk di BWP II cenderung rendah, namun karena karakter orientasi bermukim tersebut, menjadikan kondisi kepadatan bangunan pada kawasan terbangun di BWP II tergolong kepada kepadatan tinggi, dengan KDB bahkan >80%.

2) **Ketinggian Bangunan BWP II**

Ketinggian bangunan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 1-2 lantai.
2. Bangunan dengan ketinggian 8 hingga 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 2-3 lantai.
3. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan lebih dari 3 lantai.

Berdasarkan pengamatan, kondisi ketinggian bangunan di BWP II secara umum merupakan bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter atau tidak lebih dari 2 lantai.



Gambar 2.15
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP II

C. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP III

Kawasan BWP III diarahkan untuk fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, serta bandar udara. Sistem jaringan jalan utama yang mempengaruhi bagian wilayah ini adalah Jalan arteri primer yang berorientasi ke CBD Kota Jambi dan Jalan lingkaran. Perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan ini menunjukkan pola semakin melebar keluar dan pada beberapa bagian kawasan justru penunjukan kegiatan permukiman yang telah menyatu dengan kegiatan permukiman kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Muaro Jambi). Kegiatan perdagangan dan jasa terdistribusi pada koridor jalan utama. Kegiatan industri yang berkembang pada bagian wilayah ini telah menyatu dengan kegiatan permukiman, sehingga mulai menimbulkan konflik antar fungsi ruang, sementara kegiatan kebandarudaraan berada pada bagian terluar kawasan.

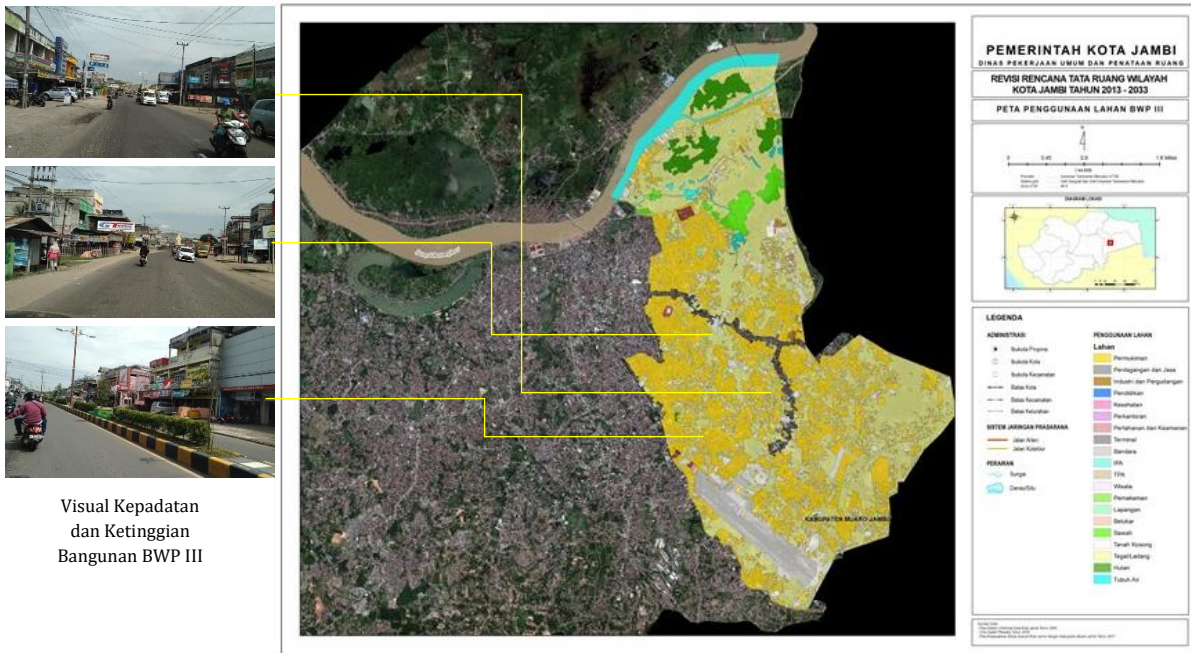
1) Kepadatan bangunan di BWP III

Kepadatan bangunan di BWP III tergolong kepada kepadatan sedang hingga tinggi. Bagian kawasan dengan KDB >60% terdistribusi pada kawasan permukiman yang berbatasan dengan BWP I. Kawasan permukiman pada bagian kawasan ini termasuk ke dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh karena kegiatan permukiman yang berorientasi kepada kegiatan komersil yang berada di BWP I (CBD Kota). Sementara KDB antara 40% hingga 60% terdistribusi pada kawasan-kawasan seperti koridor jalan utama dan kawasan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh, termasuk kawasan pengembangan permukiman yang berada dibagian terluar kawasan ini.

2) Ketinggian Bangunan di BWP III

Ketinggian bangunan pada BWP III beragam, mulai dari ketinggian bangunan rendah, sedang, hingga tinggi. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.

Kondisi ketinggian bangunan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan pada bagian wilayah ini, mengingat pada BWP ini terdapat kegiatan kebandarudaraan yang menuntut pembatasan ketinggian bangunan pada KKOP.



Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP III

Gambar 2.16
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP III

D. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP IV

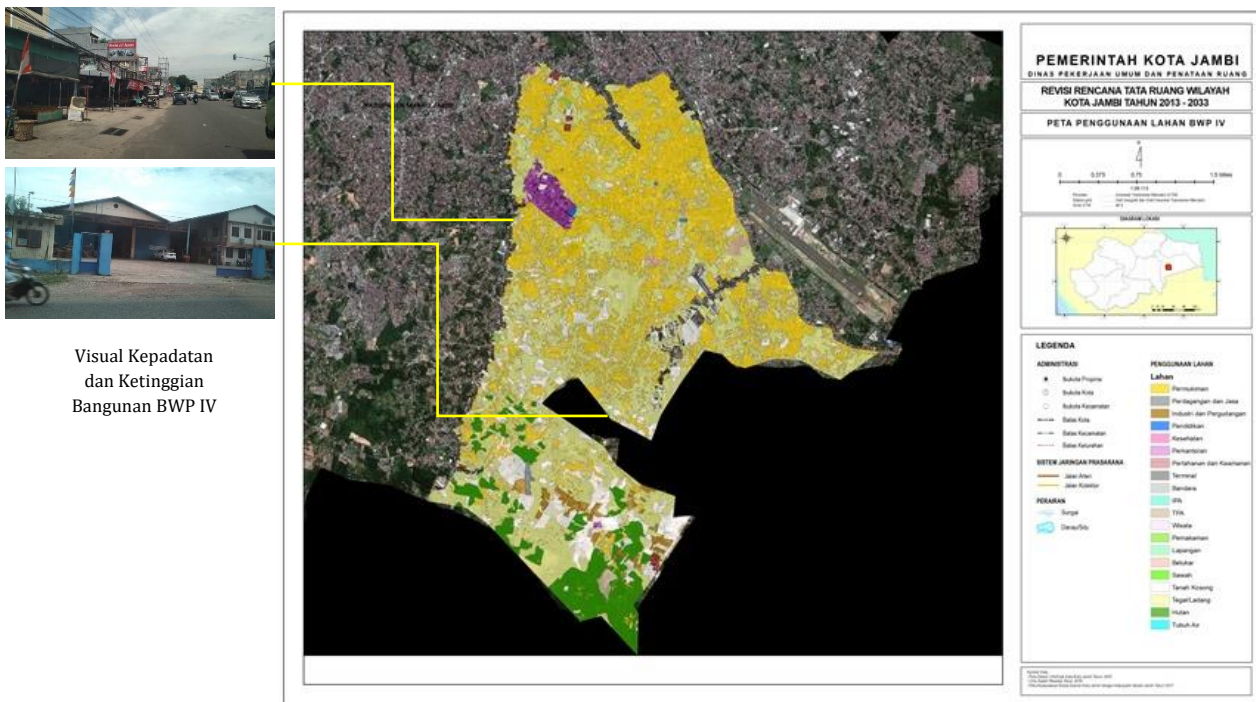
BWP IV merupakan bagian wilayah dengan fungsi dominan sebagai kawasan permukiman. BWP IV merupakan salah satu pusat kota untuk pelayanan administrasi perkantoran pemerintah Kota Jambi, sehingga pada bagian pusat ini didominasi oleh bangunan perkantoran pemerintah. Pada bagian terluar yang dipengaruhi oleh *outer ring road* kegiatan lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri, dan pergudangan.

1) Kepadatan Bangunan

Pemanfaatan ruang pada BWP ini cenderung lebih tertata dibandingkan dengan bagian wilayah yang berada di pusat kota, karena memiliki kavling bangunan yang cenderung lebih luas dibandingkan kawasan pusat kota. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-65%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar untuk fungsi industri dan pergudangan. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (non perumahan).

2) Ketinggian Bangunan

ketinggian bangunan di BWP IV didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP IV ini.



Gambar 2.17
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP IV

E. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP V

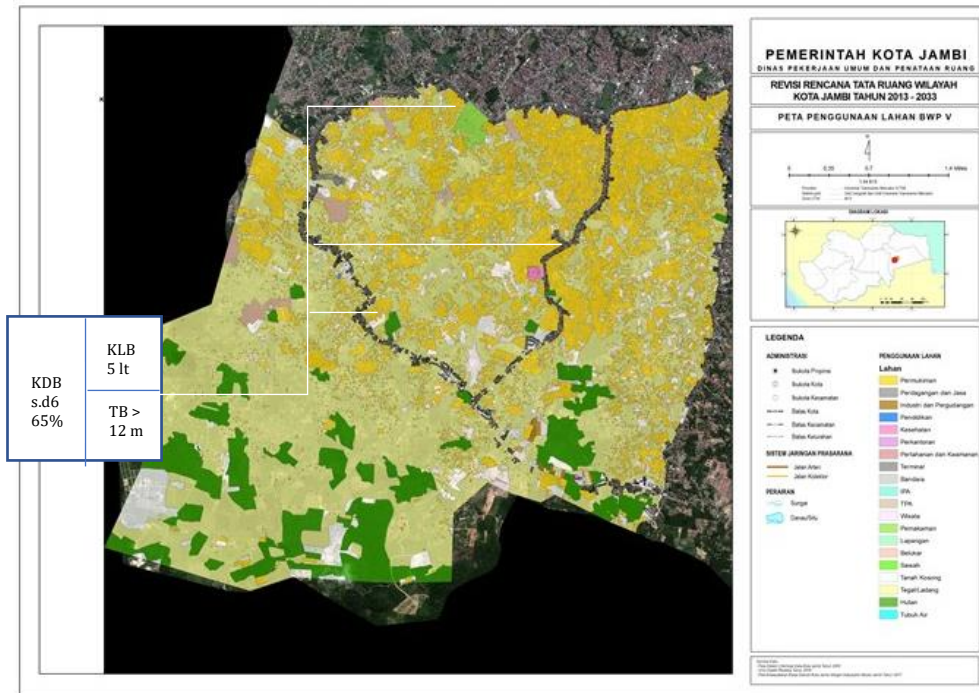
Kawasan BWP V merupakan kawasan pengembangan permukiman di Kota Jambi. Kondisi ini ditandai dengan kegiatan pengembangan lingkungan perumahan yang semakin menjalar keluar ke arah pinggiran kota.

1) Kepadatan Bangunan di BWP V

Pemanfaatan ruang pada BWP V cenderung lebih tertata dibandingkan dengan BWP II dan BWP III. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-60%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).

2) Ketinggian Bangunan di BWP V

ketinggian bangunan di BWP V didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP V ini.



Gambar 2.18
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP V

F. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP VI

Kawasan BWP VI yang berfungsi sebagai kegiatan permukiman, pusat administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi dan pusat pendidikan tinggi. Selain dipengaruhi oleh fungsi pusat-pusat kegiatan tersebut, intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik alamiah, seperti sungai dan danau.

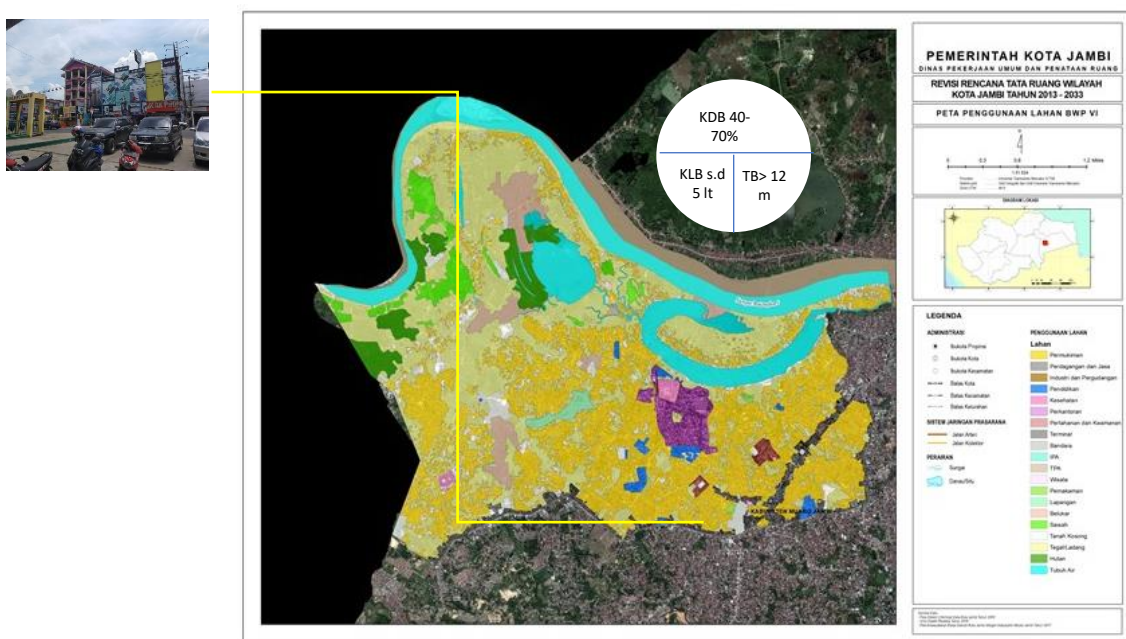
1) Kepadatan Bangunan di BWP VI

Walaupun berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan berskala regional, masih terdapat bagian-bagian kawasan dengan kepadatan rendah. Bangunan dengan KDB <40% terdistribusi terutama pada kawasan sekitar Danau, sementara bangunan dengan KDB 40-60% terdistribusi menyebar mendominasi kawasan terutama untuk bangunan dengan fungsi permukiman, perkantoran, dan perdagangan dan jasa.

2) Ketinggian Bangunan di BWP VI

Sama dengan kondisi ketinggian bangunan pada BWP V, ketinggian bangunan di BWP VI didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8

meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel dan juga bangunan untuk fungsi perkantoran pemerintah. Pada dasarnya juga belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP VI ini.



Gambar 2.19
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP VI

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

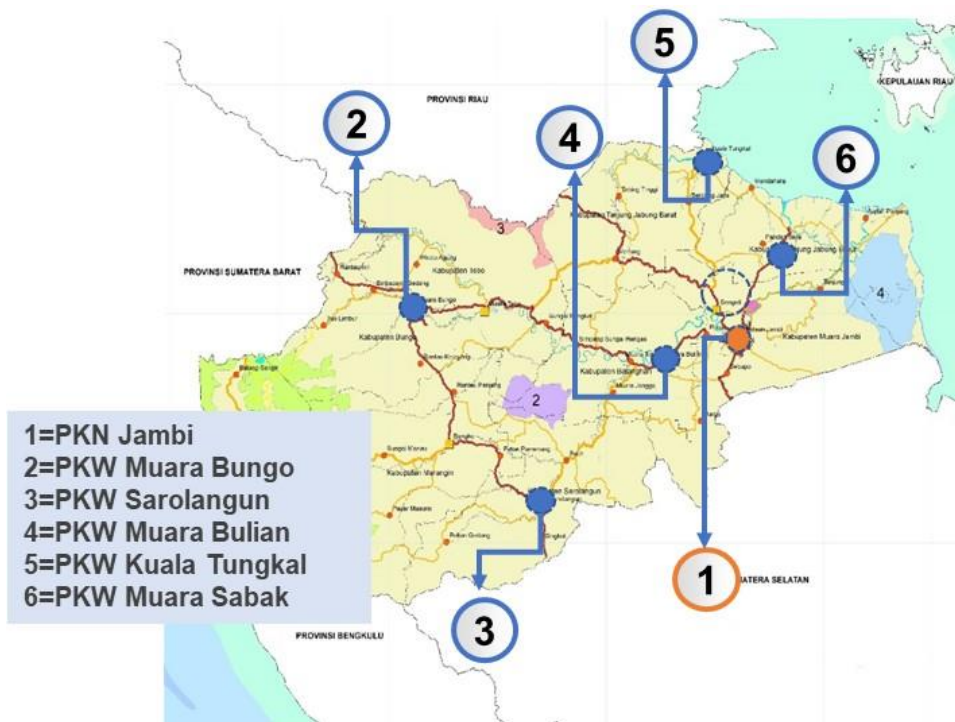
2.1.4.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

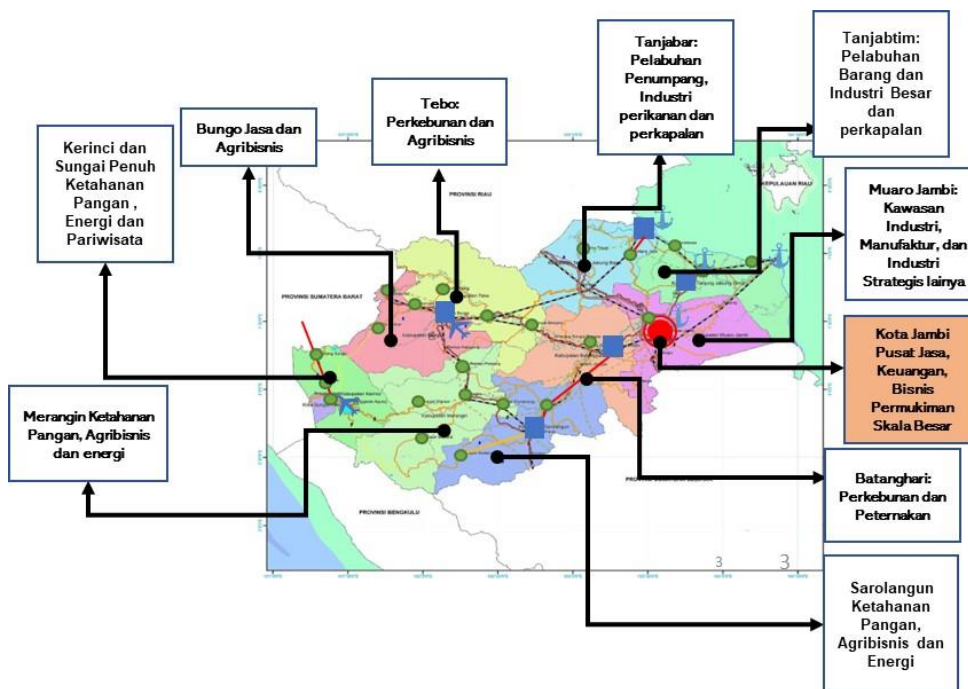
Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2024-2044. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, Peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai Pusat Jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan jangka panjang guna memastikan adanya keterhubungan dengan peran dan fungsi Kota Jambi dalam kaitannya dengan aspek kebijakan dan perencanaan berjenjang.



Gambar 2.20
Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi

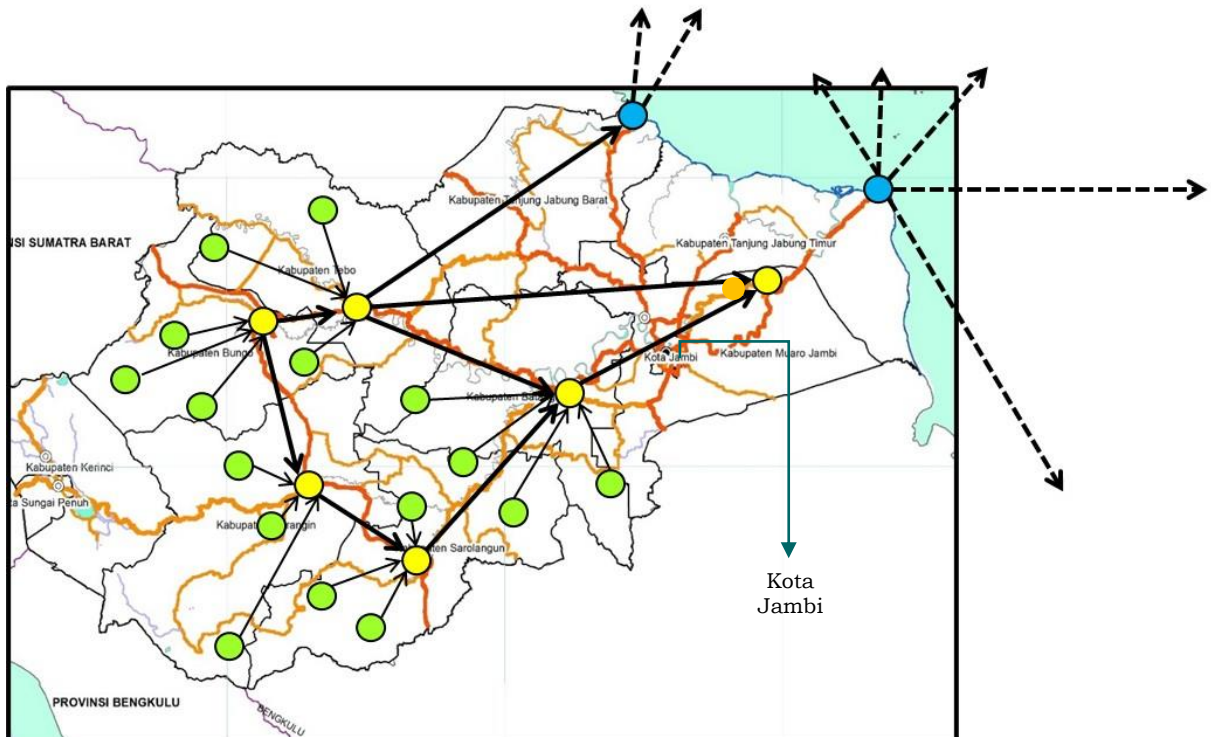


Gambar 2.21
Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

- a) Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
 1. Lintas Timur Sumatera;
 2. *Feeder* Kota Jambi-Muara Bungo;
 3. Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak
- b) Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;
- c) Terminal Tipe A.
- d) Bandar Udara Pengumpul Sekunder;
- e) Rencana jaringan rel kereta api;



Gambar 2.22
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi

2.1.5 Kawasan Rawan Bencana

A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah ada tersebut disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.10
Kejadian Bencana di Kota Jambi

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
1	Banjir	20	6	2	9.275	14.051	441	22	3	1
2	Puting beliung	8	1	2	-	-	197	-	-	-
3	Kebakaran	13	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	41	8	4	9.275	14.051	638	22	3	1

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), data kejadian tahun 2010 – 2022

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sebanyak 20 kejadian, korban meninggal sebanyak 6 orang, terluka sebanyak 2 orang, menderita akibat kejadian bencana banjir sebanyak 9.275 orang, mengungsi sebanyak 14.051 orang. Sementara kerusakan rumah yang terdata sebanyak 441 unit, fasilitas pendidikan yang tergenang banjir sebanyak 22 unit, fasilitas peribadatan yang terkena dampak banjir sebanyak 3 unit dan 1 unit perkantoran yang terkena dampak banjir.

Bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 8 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 1 orang, korban terluka sebanyak 2 orang. Sementara kerusakan yang terjadi mengakibatkan sebanyak 197 unit rumah mengalami kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 13 kejadian yang memakan korban meninggal 1 orang.

Tabel 2.11
Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2021			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
Danau Sipin	Legok	Kebakaran	6
	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
Talanai Pura	Telanai Pura	Kebakaran	1
	Buluran Kenali	Tenggelam	1
	Pematang Sulur	Rumah Roboh	1
Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran	3
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
Jumlah			41
Tahun 2022			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelam	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelam	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelam	1
Jelutung	Jelutung	Kebakaran	3
	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelam	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelam	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Talanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliuang	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
	Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
Jumlah			76

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022.

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, angin puting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

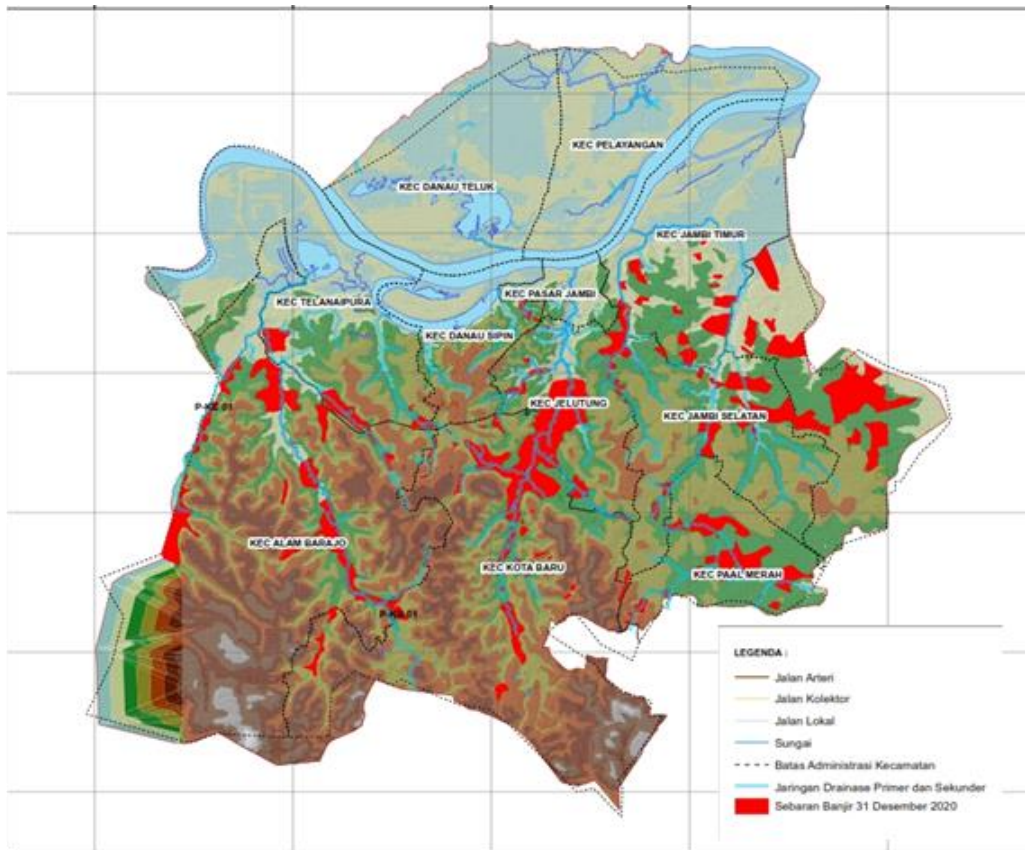
B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi

Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 daerah aliran sungai. Disamping itu, wilayah Kota Jambi telah terjadi pembangunan yang sangat signifikan sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi sosial lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga meluap kepermukaan.

Tabel 2.12
Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan Pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
	Simpang Rimbo	57,83	839
Telanaipura	Pematang Sulur	21,93	200
	Simpang IV Sipin	37,61	1049
Danau Sipin	Murni	6,68	348
	Solok Sipin	0,1	8
Jambi Selatan	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
	Wijayapura	4,03	162
Jambi Timur	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
Jelutung	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429
	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
Kota Baru	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
Paal Merah	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
Pasar Jambi	Beringin	0,15	5
Jumlah		1.301	26.240

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



Gambar 2.23
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

2.1.6 Kondisi Umum Demografi

2.1.6.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2016 adalah 583.487 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 619.553 jiwa. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,86% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

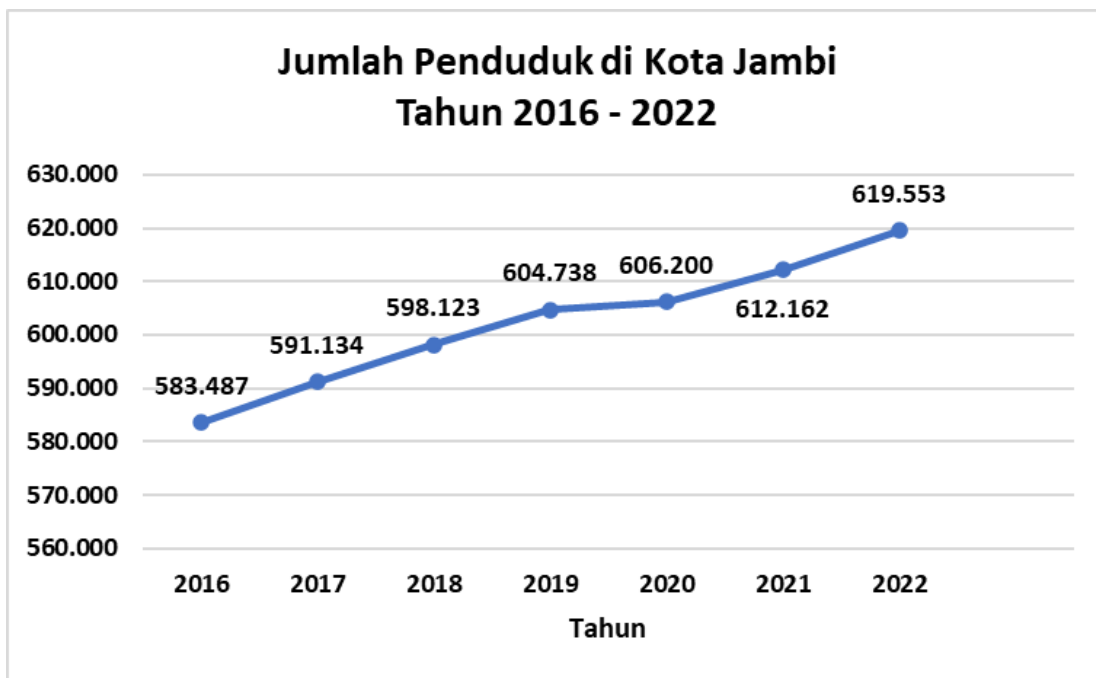
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Baru	73.513	75.384	77.049	78.620	80.062	81.525	83.381
2	Alam Barajo	94.773	97.184	99.349	101.350	108.196	110.377	113.146
3	Jambi Selatan	61.122	61.743	62.349	62.907	56.929	57.194	57.515
4	Paal Merah	89.002	89.835	90.641	91.383	105.906	106.895	108.182
5	Jelutung	62.907	63.369	63.792	64.213	59.442	59.602	59.744
6	Pasar Jambi	12.557	12.532	12.498	12.465	11.193	11.182	11.147
7	Telanaipura	49.970	50.482	50.966	51.451	49.212	49.456	49.720
8	Danau Sipin	47.738	48.228	48.689	49.152	43.375	43.561	43.734
9	Danau Teluk	12.036	12.083	12.123	12.160	12.822	12.907	13.009
10	Pelayangan	13.469	13.585	13.694	13.803	12.939	12.994	13.050
11	Jambi Timur	66.400	66.709	66.973	67.234	66.124	66.469	66.925
Total		583.487	591.134	598.123	604.738	606.200	612.162	619.553

Sumber: BPS Kota Jambi, Tahun 2023



Gambar 2.24
Grafik Distribusi Penduduk Per Kecamatan
di Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.25
Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022

2.1.6.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Alam Barajo sebanyak 113.146 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pasar Jambi yakni sebanyak 11.147 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk tahun 2022 maka kepadatan per km² menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut
Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kota Baru	27,25	83.381	3.059,85
2	Alam Barajo	36,06	113.146	3.137,71
3	Jambi Selatan	7,6	57.515	7.567,76
4	Paal Merah	24,25	108.182	4.461,11
5	Jelutung	7,61	59.744	7.850,72
6	Pasar Jambi	1,67	11.147	6.674,85
7	Telanaipura	20,32	49.720	2.446,85
8	Danau Sipin	7,28	43.734	6.007,42
9	Danau Teluk	13,44	13.009	967,93
10	Pelayangan	10,69	13.050	1.220,77
11	Jambi Timur	13,68	66.925	4.892,18
Jumlah		169,85	619.553	3.647,65

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

2.1.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 311.616 jiwa dan berjenis perempuan dengan jumlah 307.937 jiwa, dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Pelayangan sebesar 103,11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan,
Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Kota Baru	41.762	41.619	83.381	101,92
2	Alam Barajo	56.712	56.434	113.146	101,35
3	Jambi Selatan	29.121	28.394	57.515	100,06
4	Paal Merah	54.658	53.524	108.182	102,22
5	Jelutung	29.992	29.752	59.744	99,24
6	Pasar Jambi	5.696	5.451	11.147	97,50
7	Telanaipura	24.910	24.810	49.720	100,45
8	Danau Sipin	21.898	21.836	43.734	101,15
9	Danau Teluk	6.529	6.480	13.009	102,07
10	Pelayangan	6.795	6.255	13.050	103,11
11	Jambi Timur	33.543	33.382	66.925	101,81
Jumlah		311.616	307.937	619.553	101,19

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

2.1.6.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Jambi tahun 2022 secara keseluruhan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 20-24 tahun pada jenis kelamin perempuan yang mana pada

usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	27.773	26.657	54.430
2	5 - 9	26.467	25.266	51.733
3	10 - 14	25.499	23.964	49.463
4	15 - 19	25.283	24.078	49.361
5	20 - 24	25.840	25.079	50.919
6	25 - 29	26.541	25.654	52.195
7	30 - 34	25.199	24.327	49.526
8	35 - 39	23.521	24.291	47.812
9	40 - 44	22.831	23.226	46.057
10	45 - 49	21.354	21.982	43.336
11	50 - 54	18.535	19.030	37.565
12	55 - 59	15.437	15.453	30.890
13	60 - 64	11.522	11.448	22.970
14	65 - 69	8.011	8.478	16.489
15	70 - 74	4.464	4.682	9.146
16	+75	3.339	4.322	7.661
Jumlah		311.616	307.937	619.553

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.6.5 Struktur Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2022, agama Islam merupakan agama dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Jambi yakni sebesar 553.711 jiwa dari total jumlah penduduk. Sedangkan agama atau kepercayaan lainnya merupakan agama yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sebesar 5.539 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kota Baru	72.577	3.086	2.690	25	3.730	404
2	Alam Barajo	95.253	7.250	6.624	637	1.240	704
3	Jambi Selatan	55.013	984	799	441	457	192
4	Paal Merah	105.059	844	1.026	541	400	314
5	Jelutung	51.216	2.316	3.036	2.888	4	861
6	Pasar Jambi	7.775	1.145	640	37	1.714	6
7	Telanaipura	42.780	3.199	2.082	851	765	375
8	Danau Sipin	42.543	784	304	53	335	67
9	Danau Teluk	13.063	0	0	0	0	0
10	Pelayangan	13.140	11	0	0	0	0
11	Jambi Timur	55.292	2.059	3.323	1.668	2.315	2.616
Jumlah		553.711	21.678	20.524	7.141	10.960	5.539

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.6.6 Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, kemudian pada pasal 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah angkatan kerja di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 276.359 jiwa, sedangkan yang masih pengangguran sebanyak 27.158 jiwa. Kemudian penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain pribadi. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kota Jambi sebanyak 166.898 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam dalam periode survei, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, persentase TPAK pada tahun 2022 sebesar 64,52% dan persentase TPT sebesar 8,95%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas Menurut Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Jumlah
1	Bekerja	276.359
2	Pengangguran	27.158
3	Angka Kerja	303.517
4	Bukan Angka Kerja	166.898

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.

Struktur perekonomian Kota Jambi dapat dilihat dari PDRB Kota Jambi berdasarkan lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Terdapat 17 lapangan usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi Tahun 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	342,17	341,08	344,91	312,08	331,28
B	Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,316	477,45	654,55
C	Industri Pengolahan	2.981,19	3.112,50	3.195,60	3.515,91	3.954,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61,12	66,74	69,02	75,26	85,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73	84,21	92,81
F	Konstruksi	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75	3.148,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.896,46	9.712,78	9.496,73	10.427,11	11.999,96
H	Transportasi dan Pergudangan	3.570,37	3.707,78	2.588,22	2.545,57	3.523,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,67	735,07	683,77	707,96	883,71
J	Informasi dan Komunikasi	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1.740,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.582,39	1.646,67	1.815,00	2.020,52	2.184,70
L	Real Estate	715,29	785,76	792,09	835,79	923,53
M,N	Jasa Perusahaan	860,37	931,78	894,5	974,47	1.290,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.503,89	2.632,52	2.696,63	2.684,85	2.617,75
P	Jasa Pendidikan	1.289,00	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1.567,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,5	898,32	902,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	199,92	210,6	206,54	208,94	239,89
Produk Domestik Regional Bruto		28.797,41	30.636,17	29.511,69	31.908,14	36.141,97

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 11.999,96 Milyar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 85,70 Milyar.

Tabel 2.20
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	195,98	190,88	189,62	166,65	169,69
B	Pertambangan dan Penggalian	432,13	425,97	441,94	453,18	452,49
C	Industri Pengolahan	2.200,32	2.272,93	2.214,91	2.263,00	2.343,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,65	35,61	36,70	39,24	43,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,13	46,50	45,05	46,16	49,29
F	Konstruksi	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40	1.999,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.120,19	5.505,78	5.237,95	5.454,19	5.751,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2.481,60	2.530,30	1.979,23	1.970,64	2.319,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,02	476,26	444,85	458,85	565,96
J	Informasi dan Komunikasi	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88	1.282,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.079,09	1.104,82	1.197,91	1.270,63	1.260,13
L	Real Estate	474,67	510,07	508,43	524,67	547,62
M,N	Jasa Perusahaan	531,25	558,90	522,44	534,68	619,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1.374,43	1.315,30
P	Jasa Pendidikan	858,39	924,88	955,41	956,96	984,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486,04	534,36	571,30	656,73	659,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	148,78	155,35	149,94	151,21	166,12
Produk Domestik Regional Bruto		18.667,87	19.561,13	18.918,89	19.515,50	20.530,61

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 5.751,44 Milyar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 43,32 Milyar.

2.2.1.2 Distribusi Sektor Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh

setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Berdasarkan Informasi dari BPS Kota Jambi, selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (33,20%); Transportasi dan Pergudangan (9,75%); Industri Pengolahan (10,94%); Konstruksi (8,71%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,24%). Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 33.20% (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 30,83%).

Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75% (penurunan dari 12,33% di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,94% (menaik dari 10,23% di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,71% (menurun dari 8,87% di tahun 2018) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,24% (menurun dari 8,68% di tahun 2018).

Tabel 2.21
Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,19	1,11	1,17	0,98	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,79	1,25	1,50	1,81
C	Industri Pengolahan	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26
F	Konstruksi	8,87	9,15	9,49	9,50	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,83	31,17	31,31	32,72	33,20
H	Transportasi dan Pergudangan	12,33	12,03	8,59	8,12	9,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,40	2,32	2,22	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,63	4,69	5,29	5,10	4,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	5,50	6,24	6,34	6,04
L	Real Estate	2,48	2,56	2,69	2,62	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	3,04	3,01	3,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,68	8,59	8,99	8,26	7,24
P	Jasa Pendidikan	4,48	4,57	4,95	4,66	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,30	2,60	2,85	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,69	0,69	0,70	0,66	0,66
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.2.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

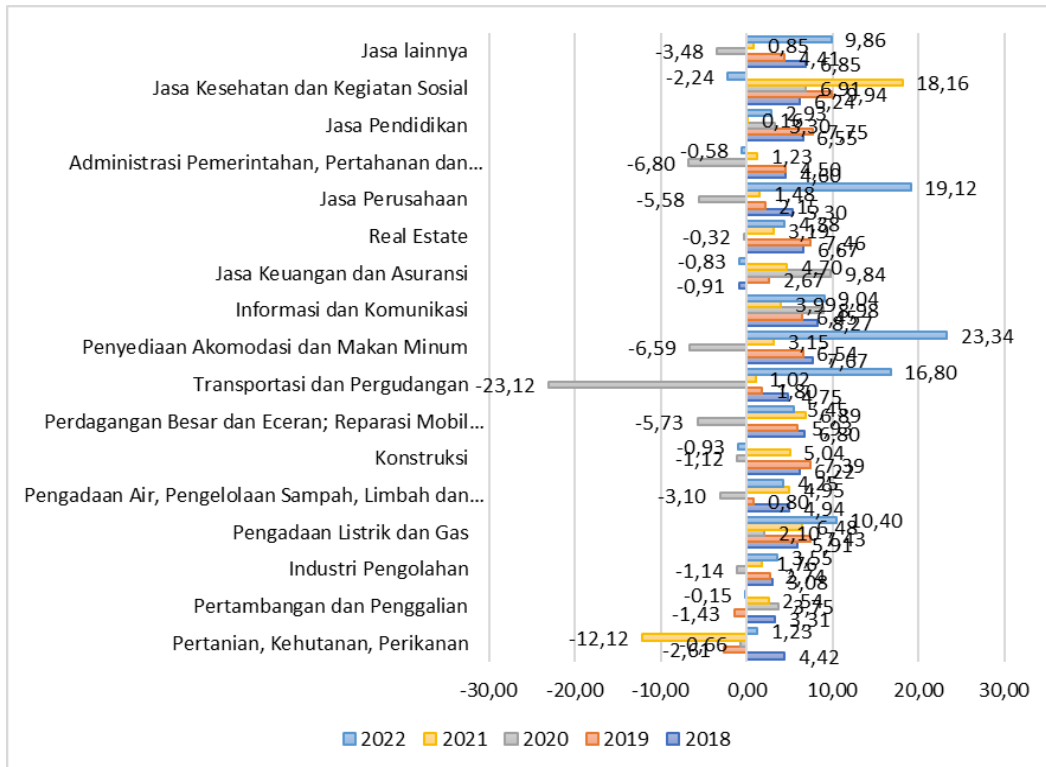
Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 terjadi kenaikan sekitar 5,36% (dari 4,08% di tahun 2021). Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2022, mencapai 20.529,73 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36%, dari tahun 2021 sekitar 4,08%.

Berdasarkan informasi dari BPS Kota Jambi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 23,34% dan katagori terkecil berada di kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sekitar -2,24% (mengalami penurunan dari 18,16% di tahun 2021).

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,42	-2,61	-0,66	-12,12	1,23
B	Pertambangan dan Penggalian	3,31	-1,43	3,75	2,54	-0,15
C	Industri Pengolahan	3,08	2,74	-1,14	1,76	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	7,43	2,10	6,48	10,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	0,80	-3,10	4,95	4,25
F	Konstruksi	6,22	7,39	-1,12	5,04	-0,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	5,93	-5,73	6,89	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,75	1,80	-23,12	1,02	16,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	6,54	-6,59	3,15	23,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,27	6,45	8,98	3,99	9,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,91	2,67	9,84	4,70	-0,83
L	Real Estate	6,67	7,46	-0,32	3,19	4,38
M,N	Jasa Perusahaan	5,30	2,15	-5,58	1,48	19,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,50	-6,80	1,23	-0,58
P	Jasa Pendidikan	6,55	7,75	3,30	0,16	2,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	9,94	6,91	18,16	-2,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,85	4,41	-3,48	0,85	9,86
Produk Domestik Regional Bruto		5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

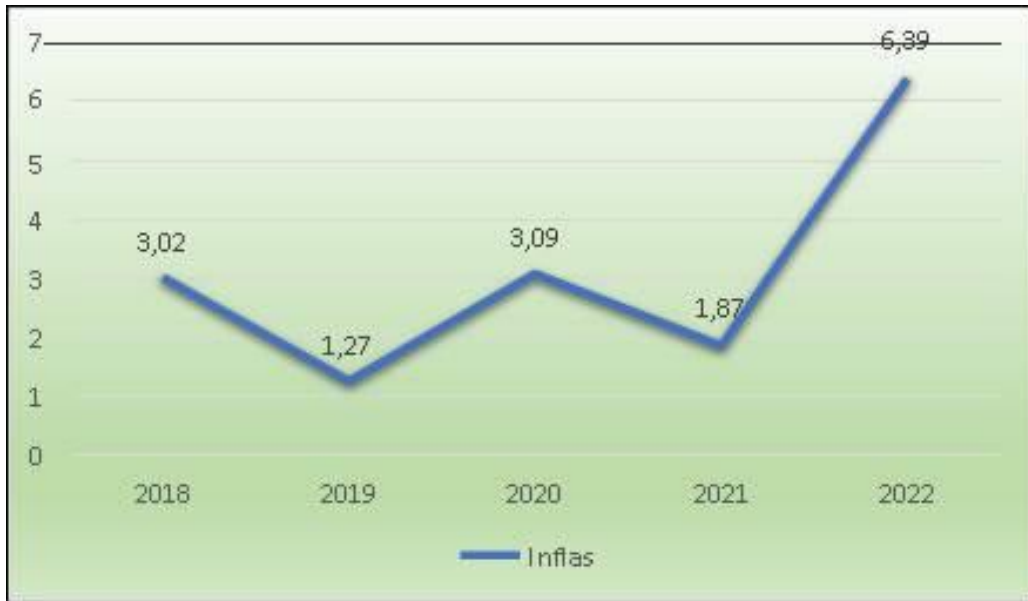
Gambar 2.26
Grafik Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)

2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Jambi sebesar 6,39% berada di atas inflasi nasional 2020 sebesar 5,51%.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS,2023.

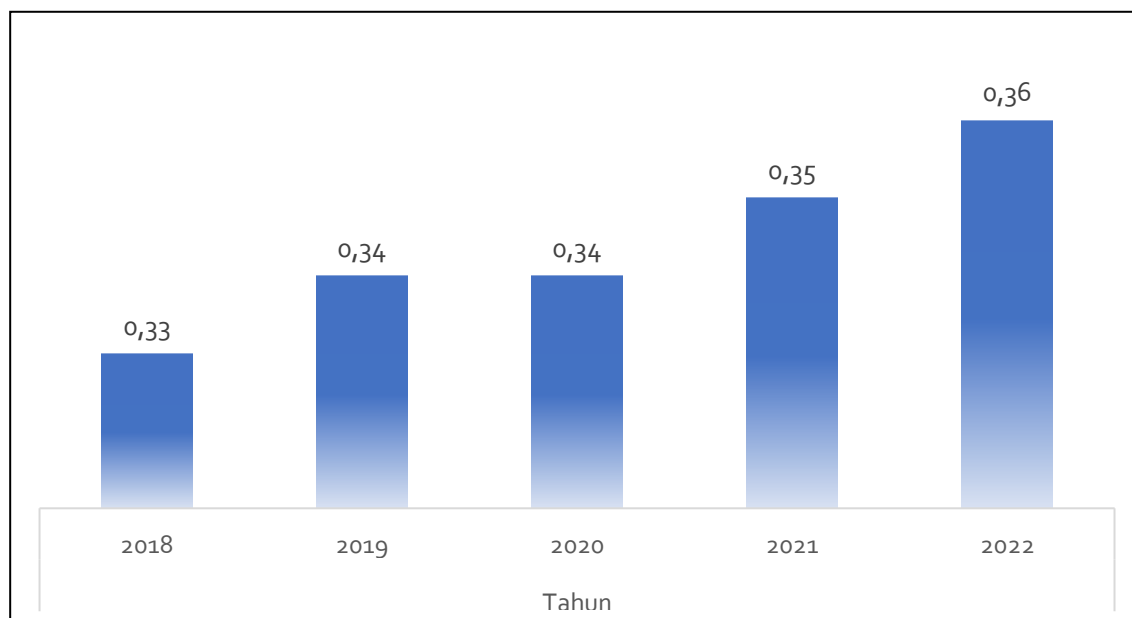
Gambar 2.27
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen.

2.2.1.5 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2022 mencapai sebesar 0,36 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,35. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan

kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber: BPS,2023

Gambar 2.28
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 PDRB perkapita

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.479,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan

bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 2.23
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (milyar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	28,797.41	30,636.93	29,465.15	31,893.58	36,141.96
2	Atas Dasar Harga Konstan	18,667.87	19,550.81	18,721.13	19,484.47	20,529.73
PDRB Perkapita (ribu Rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48,147.91	50,661.66	48,196.62	52,099.90	58,335.54
2	Atas Dasar Harga Konstan	31,211.80	32,329.50	30,622.46	31,828.94	33,136.36

Sumber : BPS Kota Jambi, 2023

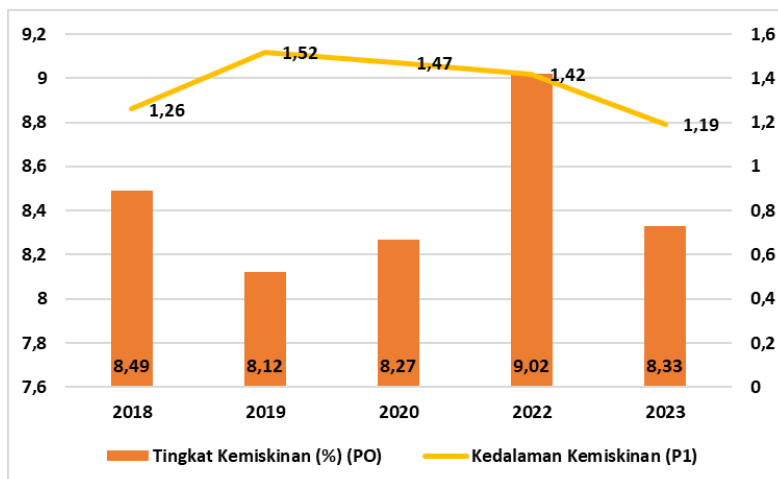
2.2.2.2 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,33 % pada Tahun 2022. Dengan tingkat kemiskinan 8,83% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,04% perTahun.

Tabel 2.24
Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Miskin (Ribu)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,4
2	Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
5	Keparahan Kemiskinan	0,28	0,42	0,4	0,34	0,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Jambi tahun 2017 – 2023, Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2017–2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023.



Gambar 2.29
Grafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.25
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022, Namun 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

2.3 ASPEK PELAYANAN PUBLIK

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12) dan usia SMP (13–15). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2022 untuk usia SD/MI sebesar 99,70 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,70 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,87 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2018 mengalami fluktuasi, walaupun mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk
Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	66.212	61.106	57.383	56.088	67.937
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	66.234	58.300	58.097	56.675	68.133
3	APS SD/MI, Paket A	99.99	100.48	98.77	100,48	99.70
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	29.698	26.651	26.900	25.478	31.427
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.795	30.754	29.097	31.786
3	APS SMP/MTS, Paket B	95.07	83.00	87,46	98,48	98.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

B. Angka Partisipasi Murni

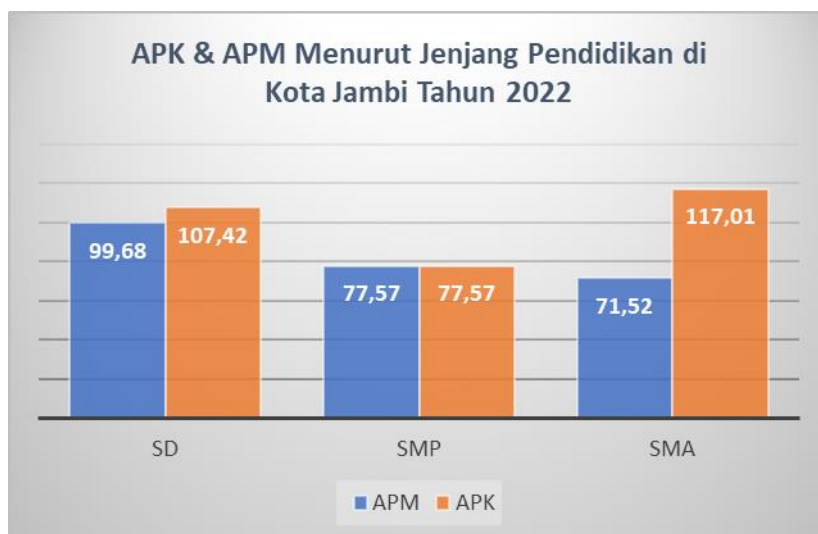
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka partisipasi penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2022 sebesar 99,68, Perhitungan realisasi ini

diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. APK SMP pada tahun 2022 sebesar 77,57 perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Terakhir, APM SMA pada tahun 2022 sebesar 117,01.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APM			
SD	99,36	100,00	99,68
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	78,55	63,22	71,52
APK			
SD	107,32	107,52	107,42
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	111,94	122,99	117,01

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.30
Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

C. Ketersediaan Sekolah

Pada Tabel 2.27. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2018-2022. Secara umum, sampai dengan

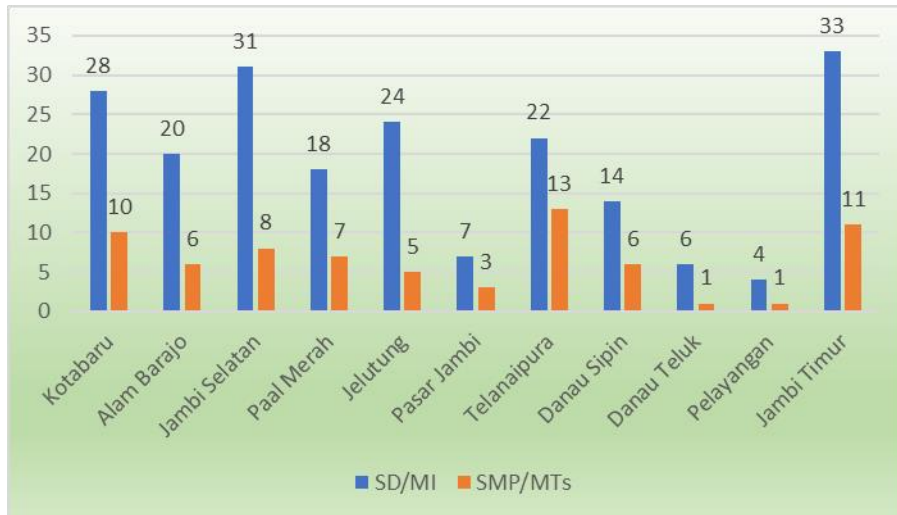
tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.28
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.602	2.625	2.632	2.635	2.388
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	58.300	58.097	57.799	56.675	56.799
1.3.	Rasio	0,044	0,045	0,045	0,047	0.042
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	1.131	1.135	1.236	1.237	1.239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.795	26.900	30.737	29.097	22.482
2.3.	Rasio	0,037	0.042	0.040	0,045	0.055

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

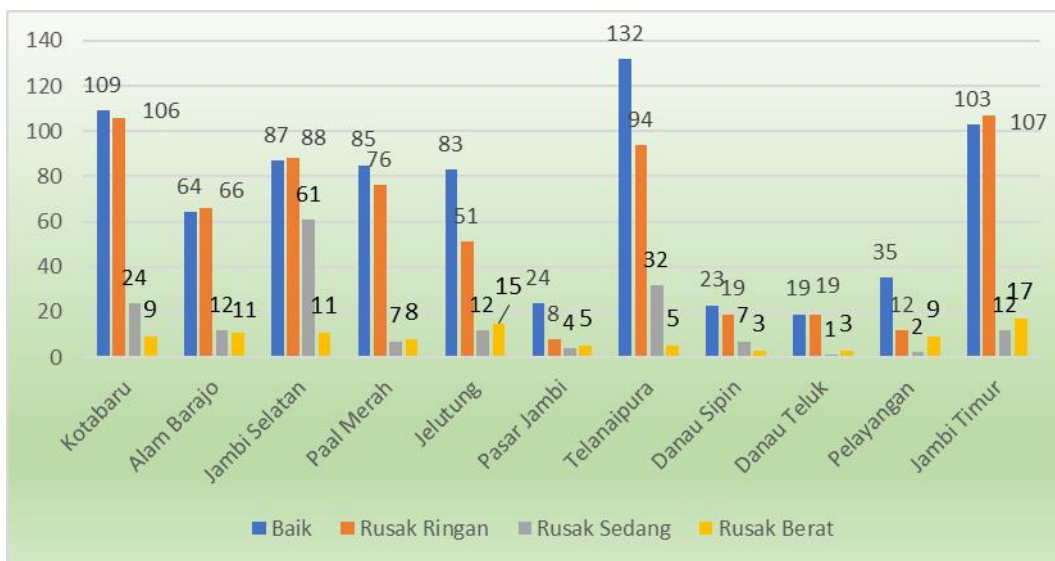
Untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid. Untuk tingkat SD/MI sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur sebanyak 33 sekolah, sedangkan sekolah yang paling sedikit ada di kecamatan Pelayangan sebanyak 4 sekolah. Untuk tingkat SMP/MTs sekolah paling banyak di kecamatan Telanaipura, sedangkan yang sedikit ada di kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan sebanyak 1 sekolah. Sebaran gedung sekolah perkecamatan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.31
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022

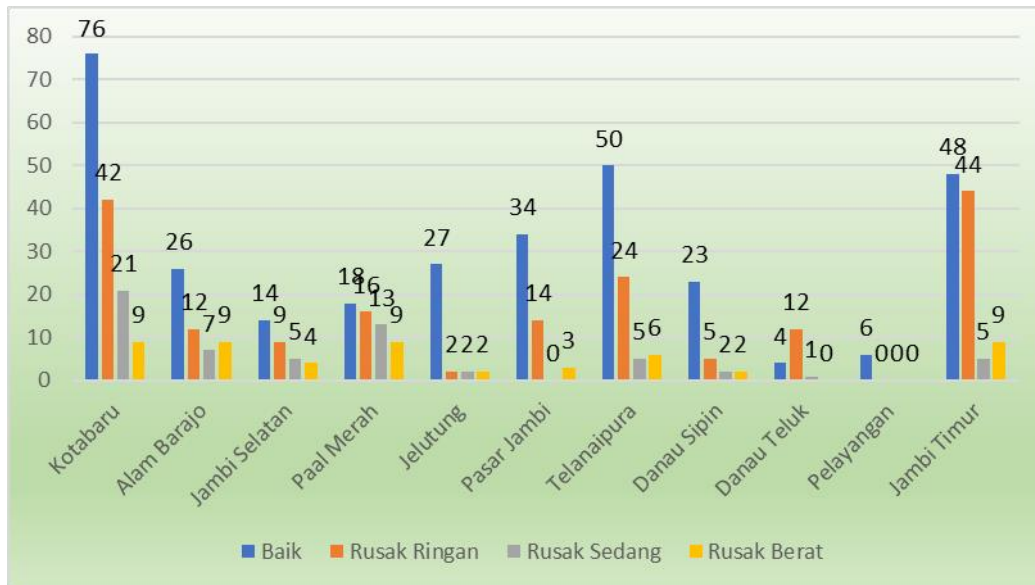
Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.32
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2022

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.33
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2023

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.29
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.206	3.184	3.232	3.116	3.105
1.2.	Jumlah Murid	62.336	60.976	59.616	60.594	57.293
1.3.	Rasio	0,051	0,052	0,067	0,051	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.557	1.558	1.621	1.741	1.634
2.2.	Jumlah Murid	26.350	26.442	29.817	27.204	26.403
2.3.	Rasio	0,059	0,058	0,061	0,064	0,062

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	385	7,539	0.051	157	2,697	0.058
2	Kec. Danau Sipin	233	3,577	0.065	132	1,902	0.069
3	Kec. Danau Teluk	63	1,056	0.060	22	262	0.084
4	Kec. Jambi Selatan	443	8,218	0.054	122	2,437	0.050
5	Kec. Jambi Timur	447	7,525	0.059	281	4,049	0.069
6	Kec. Jelutung	326	5,703	0.057	119	1,925	0.062
7	Kec. Kota Baru	399	8,092	0.049	287	4,298	0.067
8	Kec. Paal Merah	264	6,103	0.043	131	2,190	0.060
9	Kec. Pasar Jambi	69	969	0.071	112	1,718	0.065
10	Kec. Pelayangan	63	1,061	0.059	8	65	0.123
11	Kec. Telanai Pura	413	7,417	0.056	263	4,160	0.063
Jumlah		3.105	57.260	0.054	1.634	25.703	0.064

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
2	Jumlah Siswa SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
3	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

2.3.1.2 Kesehatan

A. Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2018 - 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

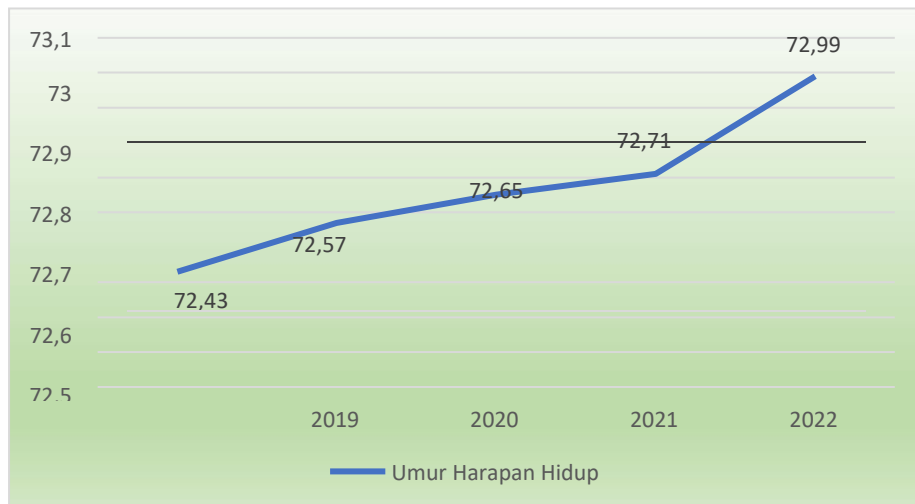
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	72,43	72,57	72,65	72,71	72,71
2	Angka Kematian Ibu	2	5	3	6	4
3	Angka Kematian Bayi	7	7	11	4	2
4	Jumlah Kelahiran Hidup	10.205	10.104	10.489	10.211	9.734

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

B. Usia Harapan Hidup (UHH)

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Usia Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota

Jambi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



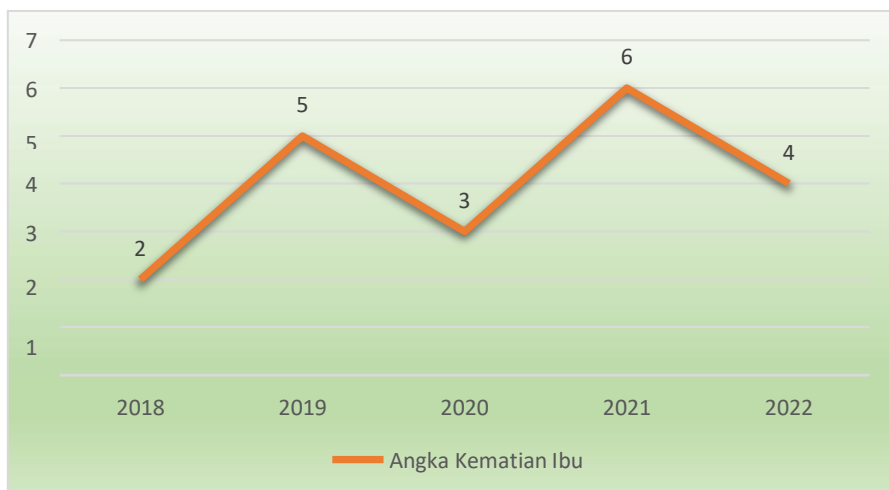
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.34
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2018-2022, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,43 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 2022, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

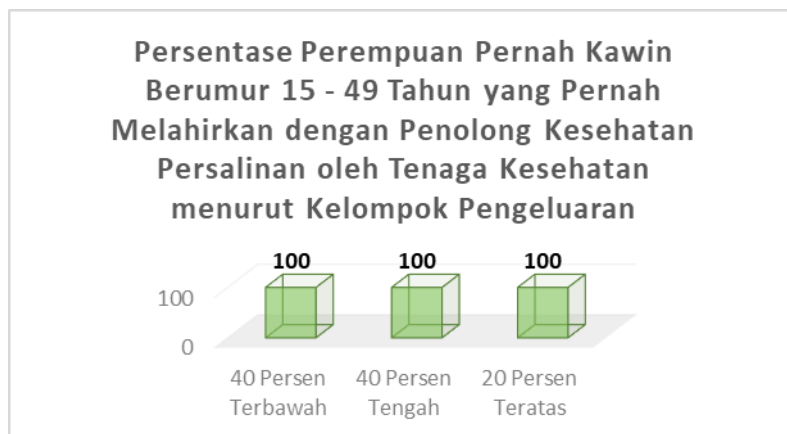
Gambar 2.35
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan AKI terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 2 orang dan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6 orang. Proporsi perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 100 %.

Tabel 2.33
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

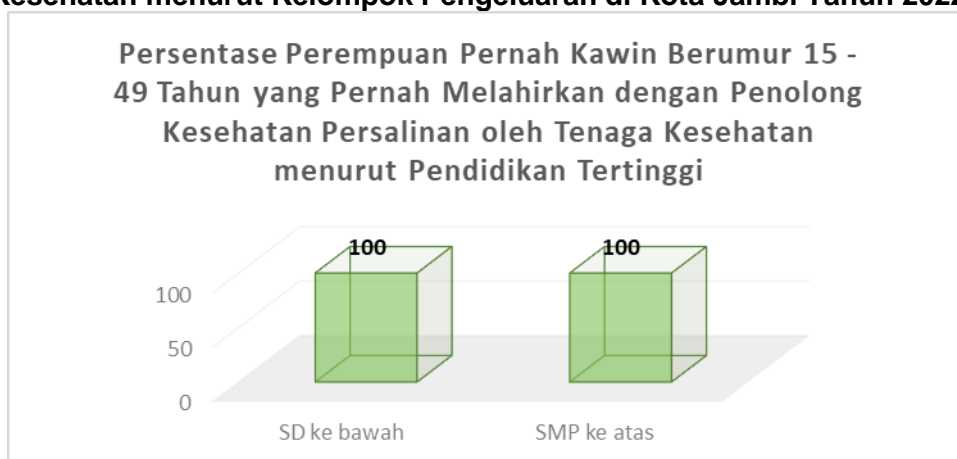
Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	100,00
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	100,00
Kota Jambi	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



Gambar 2.36

Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.37

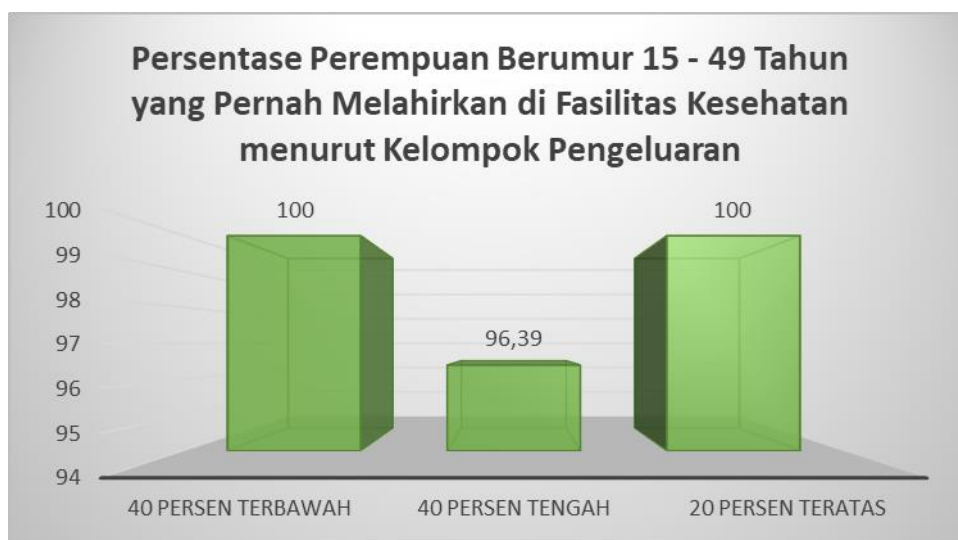
Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kota Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan Kota Jambi sebesar 98,77%.

Tabel 2.34
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

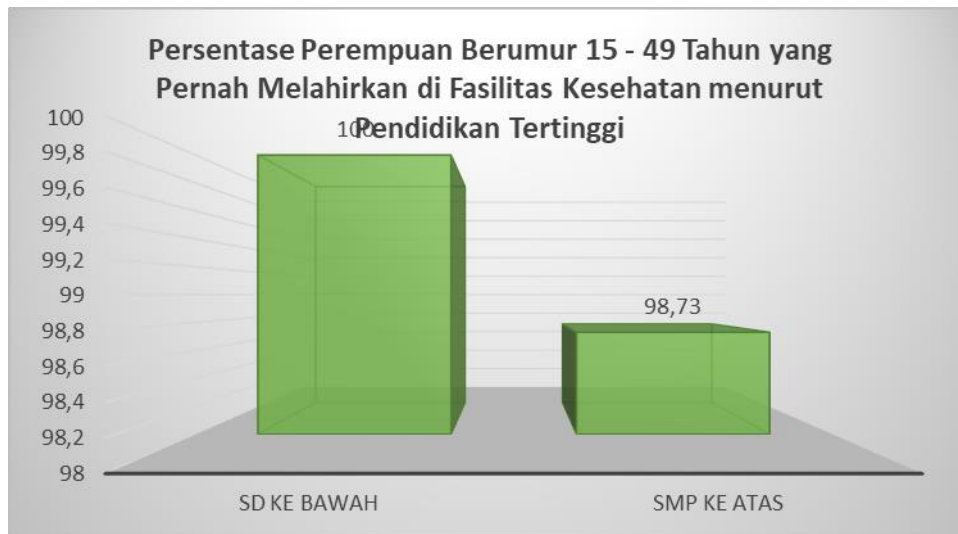
Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	96,39
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	98,73
Kota Jambi	98,77

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



Gambar 2.38

Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022



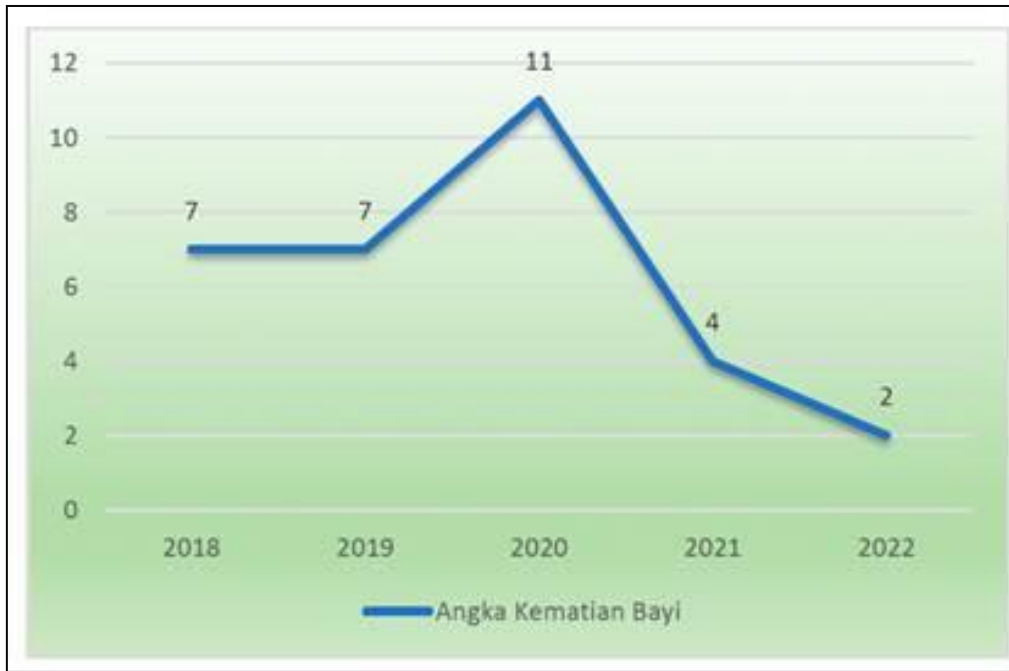
Gambar 2.39

Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

D. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

Gambar 2.40
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dengan menurunnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2018-2022.

Indikasi penurunan angka kematian berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka *Stunting* (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 orang menjadi 25 di tahun 2022. Sedangkan Angka *Stunting* juga mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 14 di tahun 2022.

Tabel 2.35
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	43	25
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio PBGB (%)	0.01	0,01	0,01	0,16	0.06
4	Angka Stunting	26,2	18,62	17,4	17,4	14

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

E. Capaian Umum Layanan Fasilitas Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	460	460	467	468	469
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio RPPB (%)	0,962	1,003	1,337	1,653	1,229

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Tabel 2.37
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio RSPP (%)	0,0028	0,0028	0,0027	0,0028	0,0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Tabel 2.38
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,009	0,009	0,0094	0,0093

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Tabel 2.39
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	326	868	398	399	506
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio DPP (%)	0,053	0,014	0,064	0,065	0,081

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas sebanyak 20 unit terdiri dari Puskesmas perawatan 4 unit, Puskesmas Pembantu 38 unit dan puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 20 Puskesmas. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 265 orang, dokter spesialis 195 orang, dokter gigi 46 orang, bidan 437 orang, dan perawat sebanyak 391 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah

terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, Upaya pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dan RSUD juga memfokuskan pada pelayanan terhadap penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), bekerja sama dengan lintas sektor yaitu masyarakat dan swasta. Saat ini jumlah suspek malaria di Kota Jambi mengalami penurunan dari 6.619 pada tahun 2020 menjadi 1942 pada tahun 2022. Sedangkan Kasus TB paru mengalami peningkatan sebanyak 921 kasus sejak tahun 2020, dari jumlah 1.021 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.942 kasus pada tahun 2022, begitu pula pada kasus kumulatif penderita AIDS yang mengalami peningkatan dari 683 kasus pada tahun 2020 menjadi 730 kasus pada tahun 2022.

Untuk menanggulangi penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) ini diperlukan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan Fasilitas Kesehatan pemerintah dalam melayani masyarakat.

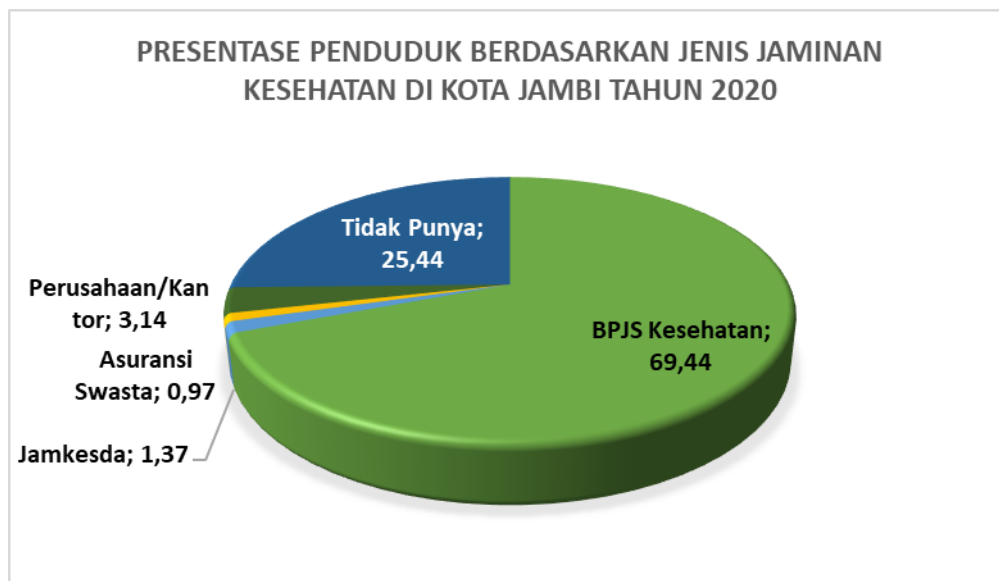
F. Kepesertaan Jaminan Sosial

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022 Presentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%.

Tabel 2.40
Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2022

Kabupaten/Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	41,60	50,16	0,00	0,34	10,83
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,75
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
Kota Jambi	69,44	1,37	0,97	3,14	25,44
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022.



Gambar 2.41
Grafik Presentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan
di Kota Jambi Tahun 2022

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian karena dapat memperlancar arus

perdagangan dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut Kota Jambi Dalam Angka tahun 2022, Panjang jalan di Kota Jambi telah mencapai 510,452 Km. Rincian dari masing-masing jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

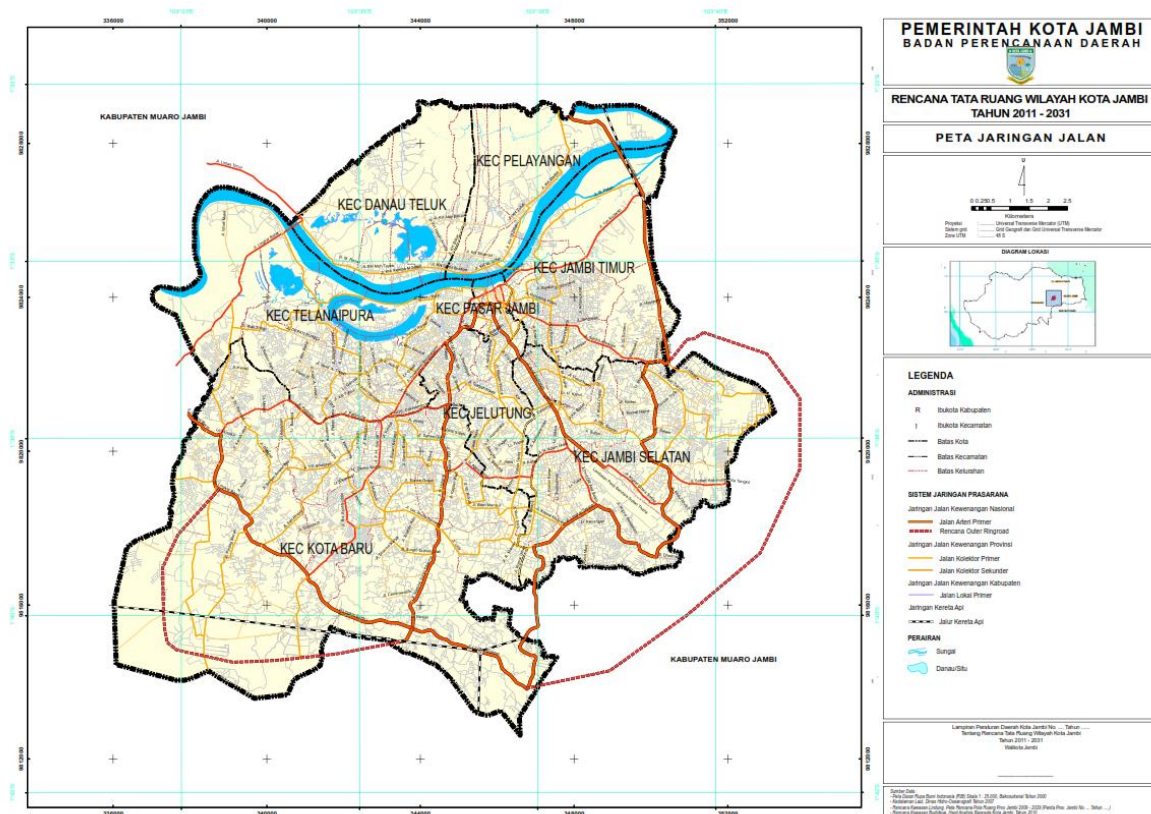
Tabel 2.41
Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2020 – 2022

No	Rincian	Panjang Jalan (Km)		
		2020	2021	2022
1	Permukaan			
	Aspal	465.408	473.127	475.693
	Kerikil	8.924	4.766	5.565
	Tanah	36.120	32.559	29.194
	Tidak Terinci	-	-	-
	Total	510.452	510.452	510.452
2	Kondisi Jalan			
	Baik	371.910	366.587	412.814
	Sedang	40.241	35.350	43.914
	Rusak	54.337	71.027	47.825
	Rusak Berat	43.964	37.488	5.899
	Total	510.452	510.452	510.452

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota yang meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal yang membentuk pola perkembangan dari kota itu sendiri.

Jaringan jalan Kota Jambi terbentuk dengan pola yang radial konsentris, dimana jaringan jalan primer terfokus pada orientasi 1 (satu) titik utama, yaitu terhadap CBD pada BWP I yang berkembang dengan kombinasi setengah cincin dengan keberadaan ruas jalan arteri yang melingkar dari timur hingga ke wilayah bagian barat kota. Sistem jaringan jalan Kota Jambi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.42
Peta Jaringan Jalan Kota Jambi

B. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Aspek Perencanaan Tata Ruang

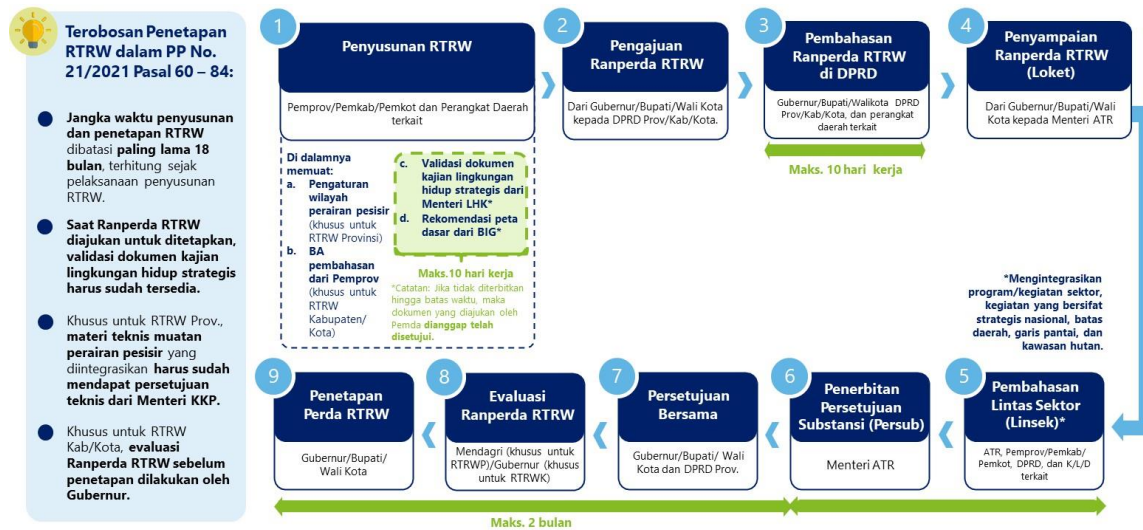
Sebagaimana diketahui, bahwa untuk aspek rencana tata ruang di Kota Jambi, rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai sejauh ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan perubahan dinamika pembangunan secara umum dan secara khusus bidang penyelenggaraan penataan ruang yang berdampak

terhadap kebutuhan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut sedang dalam proses perubahan dengan arahan utama, mencabut Peraturan Daerah yang berlaku pada saat ini. Pada dasarnya proses revisi RTRW sudah dimulai sejak Tahun 2019 melalui penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diikuti dengan Penyusunan Materi Teknis dan Raperda RTRW pada Tahun 2020. Namun demikian, karena ada dinamika pembangunan dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, maka Pemerintah Kota Jambi menyusun kembali Dokumen Materi Teknis dan Raperda di Tahun 2021 berikut dengan penyiapan pemenuhan syarat Persetujuan Substansi.

Proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang menjadi peraturan daerah harus melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit mulai dari harmonisasi sektoral di tingkat kota, pembahasan di tingkat provinsi, dan permohonan persetujuan substansi di tingkat pusat. Untuk melalui alur proses ini, Pemerintah Kota setidaknya harus memenuhi 13 (tigabelas) item persyaratan.



Gambar 2.43
Proses Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Terkait dengan syarat-syarat persetujuan substansi ini, dapat dilaporkan bahwa seluruh persyaratan sudah dapat dinyatakan siap. Untuk proses Tahun 2022, sudah sampai pada tahap pembahasan dengan DPRD Kota Jambi melalui Pansus RTRW Kota Jambi, dan pada Tahun 2023 sudah sampai pada

tahap asistensi (pra loket) dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN. Kondisi pemenuhan syarat persetujuan substansi dan dokumentasi proses yang dilalui sampai saat ini dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi kegiatan berikut ini:

Tabel 2.42
Progres Penyiapan Syarat Persetujuan Substansi

No	Dokumen Kelengkapan	Keterangan
1	Berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda	Nomor : HKM.01/532/PUPR/IV/2022 Nomor : PD.03.02/10/DPRD/2022 Tanggal 1 April 2022
2	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy)	√
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi	√
4	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, dan album peta yang sudah meintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana.	√
5	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	√
6	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota	√
7	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	KP 1 : Dilaksanakan Pada Hari Kamis, 30 Juli 2020 KP 2 : Dilaksanakan Pada Hari Senin, 8 Desember 2020
8	Berita Acara dengan provinsi/kab/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kab/kota lain) -Muaro Jambi	Dilaksanakan Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021
9	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar Untuk Penyusunan RTRW Kota Jambi Nomor : 1.11/KA-BIG/IGT.02.04/8/2023
10	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033 Nomor : S.1136/DLH-2.1/VIII/2022 31 Agustus 2022
11	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Berita Acara TKPRD Kota Jambi Pada Hari Kamis, 7 September 2021
12	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Berita Acara Kegiatan Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Nomor : 603/DPUPR-3.2/XII/2021 24 Desember 2021

No	Dokumen Kelengkapan	Keterangan
13	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Rekomendasi Atas peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Nomor : PB.01/367-200/III/2023 17 Maret 2023

Salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan substansi rancangan rencana tata ruang dari pemerintah pusat adalah Berita Acara Kesepakatan Substansi antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Untuk mendapatkan kesepakatan ini, proses yang dilalui adalah pembahasan substansi bersama unsur/perangkat DPRD, yang membahas pasal demi pasal yang terkandung dalam rancangan RTRW Kota Jambi.

Proses ini pada dasarnya sudah dimulai sejak Tahun 2021, yaitu melalui proses harmonisasi dengan Bapemperda DPRD Kota Jambi, dan dilanjutkan pembahasan pasal per pasal dengan Pansus RTRW Kota Jambi. Dalam proses pembahasan, dapat dikatakan berjalan lancar dan banyak mendapatkan masukan dari forum Pansus untuk penyempurnaan substansi RTRW Kota Jambi.

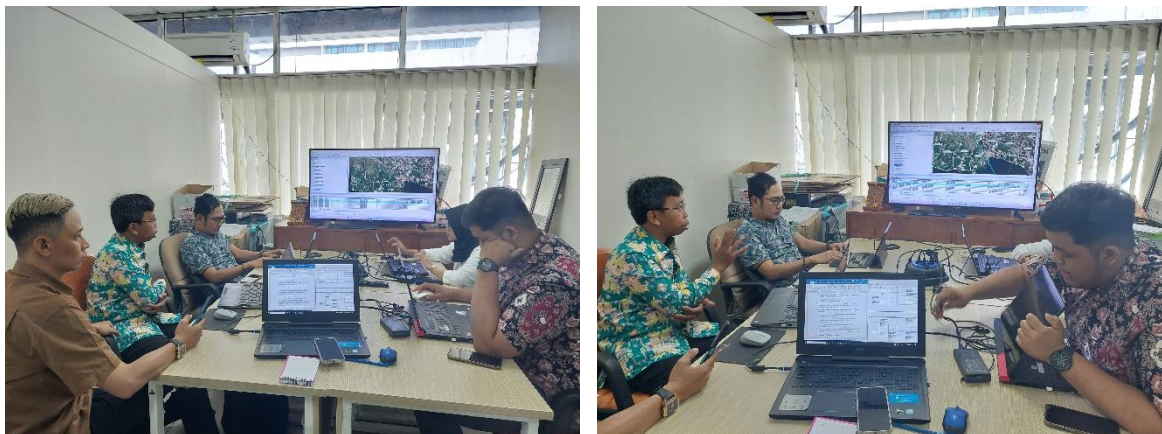


Gambar 2.44

Pembahasan Substansi Rancangan RTRW bersama Pansus DPRD Kota Jambi

Tahapan untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Pemerintah Pusat adalah harus melalui proses Rapat Lintas Sektor. Namun sebelum Rapat Lintas Sektor tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Subditnya memastikan terlebih dahulu kesesuaian vertikal dan horizontal dari rancangan RTRW yang dimohonkan. Tahap ini melalui proses klinik. Pada Tahun 2022, pelaksanaan klinik dilaksanakan pada Bulan April dan Bulan Agustus Tahun

2022 di Kantor Kementerian ATR/BPN. Akhirnya, pada tahun 2024, telah terbit Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044.



Gambar 2.45

Klinik Rancangan RTRW di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta

Aspek Pemanfaatan Ruang Kota

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam arti lain, kesesuaian pemanfaatan ruang adalah kesesuaian program Pembangunan dalam umur rencana RTRW terhadap program-program yang sudah tertuang dalam indikasi program yang bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang kota.

I. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Secara Umum

Terdapat beberapa rencana perwujudan struktur ruang yang belum terakomodasi pada kondisi faktual dilapangan, terutama kebijakan-kebijakan yang muncul setelah Perda RTRW Kota Jambi ditetapkan, seperti fungsi sistem perkotaan, pembangunan jalur kereta api, dan lain sebagainya.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan, serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan

ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu:

- Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
- Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
- Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
- Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas

Struktur ruang memiliki sifat yang mapan, tidak berubah dalam jangka pendek atau dapat diprediksi dalam jangka panjang, sedangkan bentuk kota memiliki sifat yang sesuai dengan bentukan alam, pertumbuhan karakteristik sosioeko, serta mengakomodasi kegiatan penduduk dengan efisien.

1) Pusat Pelayanan Yang Sudah Terbentuk

Rencana sistem pusat-pusat pelayanan Kota Jambi ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah kegagalan perwujudan rencana struktur ruang yang tertuang didalam RUTR Kota Jambi Tahun 2000, dan strategi mereduksi peran pusat Kota Jambi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana sistem pusat kegiatan ditetapkan dengan mengakomodir beberapa pusat yang sudah ada dan juga rencana pengembangan pusat baru yang berperan sebagai Subpusat Kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pusat Kota adalah pusat yang telah terbentuk sebelumnya dengan fungsi sebagai Pusat Ekonomi, dan Pusat Administrasi Pemerintahan baik Pemerintahan Provinsi Jambi maupun Pemerintahan Kota Jambi.



Pusat Ekonomi Kota Jambi



*Pusat Administrasi Pemerintahan
Provinsi Jambi*



*Pusat Administrasi Pemerintahan Kota
Jambi*

Gambar 2.46
Pusat Kota dan Pelayanan di Kota Jambi

Subpusat Kota, yaitu: Kawasan Olak Kemang, Kawasan Pasar Baru Talang Banjar, Kawasan Kebun Handil, dan Kawasan Sipin. Semua pusat ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dengan skala pelayanan minimal adalah Bagian Wilayah Perkotaan masing-masing.



Gambar 2.47
SubPusat Kota Kawasan Pasar Baru Talang Banjar

Pusat-pusat lain yang sudah terwujud pengembangannya adalah pusat dengan skala lingkungan, seperti pusat di Arab Melayu, Pusat di Perumnas Aur Duri, dan Pusat di Mayang Mengurai.



*Gambar 2.48
Pusat Lingkungan di Kawasan Perumnas Aur Duri*



*Gambar 2.49
Pusat Lingkungan di Arab Melayu, namun belum berfungsi*



*Gambar 2.50
Pusat Lingkungan di Mayang Mangurai*

2) Pusat Yang Belum Terbentuk

Saat ini baru 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kota Jambi dari 20 (duapuluh) tahun rencana, sehingga masih terdapat beberapa pusat yang direncanakan belum terwujud. Pusat-pusat yang belum terwujud tersebut didominasi oleh Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu pusat lingkungan di Kawasan Persimpangan Jl.Yos Sudarso dan Ruas Lingkar Timur Kelurahan Sejinjang, Jalan R B Siagian Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Talang Bakung dengan daerah pelayanan Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Thehok, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali Pematang Sujur. Pusat pelayanan lingkungan ditetapkan selain untuk pelayanan juga untuk menggantikan peran aglomerasi pedagang informal, seperti yang terjadi di Jalan Lingkar Timur (Pasar 46), Pasar Perumnas Aur Duri, dan beberapa pusat lingkungan lainnya, namun belum semua terwujud.



*Gambar 2.51
Lebih dikenal dengan Pasar 46. Belum ada pasar pengganti di Simpang Sejinjang
untuk mengakomodir kebutuhan*



*Gambar 2.52
Pasar Pasir Putih yang belum terwujud penataannya*

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Jambi terkait dengan pusat-pusat skala lingkungan adalah pertumbuhan pasar-pasar skala lingkungan secara

swadaya yang cenderung kurang tertata dan memiliki kualitas lingkungan yang rendah, seperti yang terjadi di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Lokasi pasar ini tidak sesuai dengan arahan perwujudan pusat skala lingkungan untuk sekitar kawasan tersebut. Di BWP V tersebut memang diarahkan pusat lingkungan, yaitu di Kelurahan Bagan Pete, yang sekaligus bertujuan menarik perkembangan permukiman kota.



Gambar 2.53

Pasar Skala Lingkungan yang tumbuh di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam

II. Pemanfaatan Ruang Tahun 2022

Pemanfaatan ruang Tahun 2022 adalah sebagai salah satu bentuk laporan implementasi indikasi program RTRW Kota yang berlaku pada saat ini. Telaah pemanfaatan ruang Tahun 2022 ini di fokuskan kepada rencana-rencana program yang diarahkan perwujudannya pada PJM 3. Telaah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Implementasi Pemanfaatan Ruang PJM 2 RTRW Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
1	Pembangunan Pusat aglomerasi parkir di Kecamatan Pasar Jambi		V	Masih terkendala dari pelaku pedangan informal yang berada pada bangunan eksisting pada saat ini
2	Peningkatan dan Pengembangan Event Kepariwisata	V		Atraksi wisata menyambut hari-hari besar keagamaan dan nasional
3	Pembangunan pusat perdagangan di ex.Terminal Rawasari	V		Bangunan terealisasi, namun operasional belum optimal
4	Pembangunan Pasar Rakyat di Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Kenali Asam	V		
5	Rehabilitasi dan Peningkatan Dimensi Jalan:			
	Jl. Marsekal Surya Dharma –Jl. Pangeran Hidayat – Jl. R.M. Marzuki		V	
	Jl. Prof. M.Yamin, SH;		V	
	Jl. Sultan Agung		V	
	Jl. Husni Thamrin		V	
	Jl. Gatot Subroto	V		
	Jl. Jend. Sudirman	V		
	Jl. Sukarno Hatta	V		
	Jl.Amir Hamzah-Jl.R.E Martadinata	V		
	Jl.Rd.Mataher		V	
	JlKol Pol M.Taher-Jl.Djamin Datuk Bagido-Jl.Brigjen Katamso		V	
	Jl.Rangkayo Hitam-Rangkayo Pinggai-Jl.Sentot Ali Basya		V	
	Jl. Prof. DR. Abd. Saleh - Jl. Adam Malik - Jl. Agus Salim - Jl. Basuki Rahmat	V		
	Jl. Multatuli - Jl. Let. Muda Sarniem - Jl. Lirik - Jl. Dharma Wangsa		V	
	Jl. K.H. Ahmad Dahlan - Jembatan Makalam		V	
	Jl. Sumbiyono - Jl. Dr. Mawardi		V	
	Jl. T.P. Sriwijaya - Jl. Sersan Anwar Bay		V	
Jl.Depati Parbo		V		
Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Yoenis Sanis - Jl. Roni Sani		V		
Jl. Purnama - Jl. Sunan Drajat -	V			

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
	Jl. Sunan Gunung Jati			
	Jl. Sari Bhakti		V	
6	Pembangunan Jalan Lingkar Utara		V	Sedang proses pematangan lahan
7	Pembangunan Fly Over Soedirman		V	
8	Perluasan Bandar Udara STS	V		
9	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel dan Tower Bersama	V		
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan DAS	V		Terlaksana namun belum optimal
11	Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Tanjung Sari	V		
12	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase	V		Terlaksana namun belum optimal
13	Pengembangan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Arteri dan Kolektor	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
14	penghijauan dan pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai		V	
15	pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Primer yang berfungsi sebagai RTH Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
16	Pengembangan taman kota	V		Baru sebatas penataan, belum menambah ruang baru
17	Pengembangan Hutan Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruh target
18	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kepadatan Tinggi	V		
19	Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	V		
20	Pembangunan Kolam Retensi di Jambi Timur, Telanaipura, Kota Baru		V	Masih terkendala pengadaan lahan

Aspek Pengendalian Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dapat juga diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara umum lebih ditekankan pada tahap pra Pembangunan fisik, dalam hal ini adalah konteks perizinan. Untuk mewujudkan kesesuaian ruang dengan regulasi yang diatur dalam rencana tata ruang, pasca terbitnya undang-undang Cipta Kerja, perizinan harus terlebih dahulu melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

I. Pengendalian Melalui KKPR

Untuk Kota Jambi, dikarenakan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terkoneksi dengan *Online Single Submission (OSS)*, maka KKPR yang dilaksanakan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR dilaksanakan terhadap permohonan KKPR melalui rapat pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi.

Jumlah permohonan KKPR di Kota Jambi sebanyak 75 permohonan, terdapat 27 permohonan belum divalidasi dan yang sudah selesai baru 19 permohonan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Rekapitulasi KKPR di Kota Jambi

Permohonan	Belum di Validasi	Permohonan Dikembalikan	Menunggu Pembayaran	SPS Expired	SPS sudah dibayar	Sudah Inspoksi Lapangan	Sudah selesai
75	27		2	12	2	13	19

Sumber: GISTARU, 2023.










Gambar 2.54
Salah satu kegiatan rapat permohonan KKPR










II. Pengendalian Melalui Kegiatan Pengawasan









Selain melalui KKPR, kegiatan pengendalian tentu perlu ditunjang dengan kegiatan pengawasan dilapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kesesuaian dokumen rencana Pembangunan dengan implementasi

pembangunan di lapangan, juga untuk pengawasan terhadap bangunan yang tidak didahului dengan perizinan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.45
Kegiatan Pengawasan di Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
1	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL. Marsda Surya Dharma RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah	
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL. Marsda Surya Dharma Kelurahan Kenali Asam Bawah	
3	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	Jl.Adam Malik	
4	Hunian	JL.Depati Purbo Kel.Pematang Sulur Kec.Telanaipura	
5	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL.Yulius Usman Kel.Pematang Sulur Kec.Telanaipura	
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Pattimura Simp.IV Sipin Kel.Simp.IV Sipin Kec.Telanaipura	
7	Rumah Deret	JL.Kenali Jaya Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
8	Hunian	JL.Kebun Daging RT.33 Kel.Mayang Mangurai	
9	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Syailendra Kel.Rawa Sari Kec.Kota Baru	
10	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Letmud Saraniem Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru	
11	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Singadikane RT.22 Kel.Sungai Putri Kec.Danau Sipin	
12	Hunian	JL.Gajah Mada RT.36 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung	
13	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Simp.Surya Kel.Kebun Handil Kec.Jelutung	
14	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.H.Adam Malik RT. 19 Kel.The Hok Kec.Jambi Selatan	
15	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Widuri II RT.31 Kel.Paal Lima Kec.Kota Baru	
16	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.H.Kamil RT 10 Kelurahan Wijaya Pura Kec.Jambi Selatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
17	Hunian	Lorong Komerling Jaya	
18	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Patimura RT.02 Kel.Kenali Besar Kec.Alambarajo	
19	Penertiban/pembongkaran	Pasar Paal IX Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru	
20	Penertiban/pembongkaran	Jl.RB.Siagian Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan	
21	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Slamet Riyadi RT 20 Kel.Legok Kec.Danau Sipin	
22	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Jendral Sudirman Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung	
23	Hunian	JL.Platur Purnama Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru	
24	Hunian	JL.RD.Abdurrahman RT.34 Kel.Kenali besar Kec.Alam Barajo	

C. Penyediaan Air Minum

1. Jaringan Perpipaan

Sistem penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Kota Jambi memiliki sistem penyediaan air minum yang menyebarkan air minum ke beberapa kecamatan, dan pelayanan ini didominasi dan dikelola oleh PDAM Tirta Mayang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pelanggan (SR)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)*	Persentase (%)**
1	Telanaipura	49.720	9.483	47.415	95%
2	Kota Baru	83.381	17.043	76.694	92%
3	Jelutung	59.744	11.995	59.975	100%
4	Pasar Jambi	11.147	3.529	10.587	95%
5	Jambi Timur	66.925	10.569	52.845	79%
6	Jambi Selatan	57.515	7.431	37.155	65%
7	Danau Teluk	13.009	2.021	10.105	78%
8	Pelayangan	13.050	2.121	10.605	81%
9	Danau Sipin	43.734	8.089	40.445	92%
10	Alam Barajo	113.146	15.720	78.600	69%
11	Paal Merah	108.182	6.005	30.025	28%
12	PKS.Sei Gelam		150		
Jumlah		619.553	94.156	454.451	79,45%

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023

*)Asumsi 1 SR = 5 Jiwa

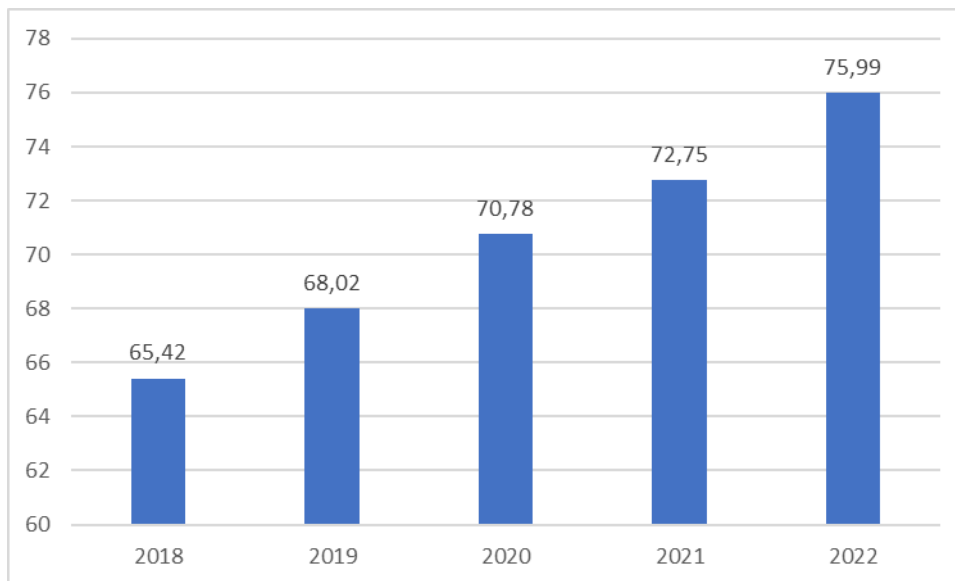
***)Hasil Pengolahan Data

Persentase jumlah sambungan rumah air minum di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,45%. Apabila dibandingkan dengan target nasional (91,05%), realisasi persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelola secara aman masih terdapat gap sebesar 15,06%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Persentase Jumlah Sambungan Rumah Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Sambungan Rumah (Jiwa)	Persentase (%)
2018	78.259	65,42
2019	82.269	68,02
2020	85.809	70,78
2021	89.066	72,75
2022	94,156	75,99

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023



Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

Gambar 2.55
Grafik Persentase Sambungan Rumah yang terlayani PDAM
di Kota Jambi Tahun 2022

Saat ini, kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah 1.900 l/detik, sedangkan Kapasitas operasional saat ini sebesar 1.303 l/detik yang dioperasikan secara kombinasi dengan pemompaan dan gravitasi, dan 597 L/dt lainnya belum terpakai.

- **Unit Air Baku**

Sumber air baku yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi berasal dari Sungai Batanghari terbagi menjadi 4 zona pelayanan:

- a) Zona 1 untuk pelayanan Kec Danau Teluk dan Pelayanan dengan titik penyadapan air baku berlokasi di intake pasir panjang dan intake tanjung johor dengan pengolahan di IPA Pasir Panjang dan Tanjung Johor.
- b) Zona 2 untuk pelayanan Kec Alam Barajo, Telanipura dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Aurduri dengan pengolahan di IPA Aurduri 2, IPA Aurduri 3, dan IPA Perumnas Aurduri.
- c) Zona 3 untuk pelayanan Kec Danau Sipin, Jambi Selatan, Jelutung, Kota baru, Paal Merah, dan Pasar Jambi dengan titik penyadapan air

baku di *intake* Pulau Pandan dengan pengolahan di IPA Broni 1 dan IPA Broni 2.

- d) Zona 4 untuk pelayanan Kecamatan Jambi Timur dengan titik penyadapan air baku berlokasi di *intake* Sijinjang dengan pengolahan di IPA Tanjung sari 1 dan 2.

- **Unit Produksi**

Penyelenggaraan penyediaan air minum perpipaan di Kota Jambi dimulai sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1928. *Staadfonds* atau Pemerintah Kota pada waktu itu mendirikan *waterleiding* bedrijf dengan kapasitas 7 liter/detik, selanjutnya dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi No. 25/X/1974 tanggal 27 Maret 1974 ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).



IPA Benteng, 1953



Gambar 2.56

IPA Benteng, 2023

- a. Tahun 1975-1976, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng (1928) yang dibangun dengan kapasitas 7 liter/detik ditingkatkan secara bertahap dari kapasitas 26 liter/detik menjadi 42 liter/detik.
- b. Tahun 1978–1983, Proyek Lima Kota yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia membangun SPAM di Kota Jambi. Salah satu kegiatan proyek tersebut membangun IPA Broni dengan kapasitas 300 liter/detik dan mulai dioperasikan tahun 1982, dan membangun IPA Jambi Seberang dengan kapasitas 10 liter/detik. Sejak saat itu IPA Benteng dihentikan operasinya, karena

kelebihan produksi dari IPA Broni, selain kondisi teknis IPA Benteng yang sudah rusak.

- c. Tahun 1989–1993, Proyek *Sumatera Secondary Cities Urban Development Project* (SSC-UDP) yang didanai dari pinjaman RDI dan sebagian hibah APBN, ditujukan untuk mengoperasikan kembali IPA Benteng dengan *up-rating* menjadi 220 liter/detik dan mengembangkan jaringan distribusi untuk melayani wilayah Tengah dan Timur Kota Jambi diantaranya kecamatan Jelutung, Pasar, Jambi Timur dan Jambi Selatan.
- d. Tahun 1997–1998, proyek kerjasama/kemitraan PDAM dengan Pihak Swasta mengembangkan SPAM di Wilayah Barat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Telanaipura dan Kota Baru dengan membangun IPA Aurduri kapasitas 100 liter/detik dan jaringan pipa induk distribusi.
- e. Tahun 1997–2000, Proyek *Sumatera Urban Development Sector Project* (SUDSP) merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas IPA Broni menjadi 600 liter/detik, dan pembangunan reservoir kapasitas 750 m³ yang berlokasi di Jl. M. Kukuh Kecamatan Kota Baru.
- f. Tahun 2005, pembangunan *booster pump* kapasitas 10 liter/detik yang berlokasi di Tanjung Pasir Jambi Kota Seberang ditujukan untuk memperbaiki pendistribusian air kepada pelanggan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- g. Tahun 2006, pembangunan pipa induk di Jambi Kota Seberang dan Kota Baru (daerah Mayang Mengurai) melalui bantuan proyek APBD 2006 Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pelayanan air minum.
- h. Tahun 2007, pembangunan reservoir kapasitas 500 m³ pada lokasi Mayang Mengurai yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan di wilayah Kecamatan Kota Baru. Tahun 2009, pembangunan reservoir dengan kapasitas 150 m³. Tahun

2013, pembangunan *Intake* Sijinjang dan IPA Tanjung Sari dengan kapasitas 100 liter/detik.

Saat ini kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang sebesar 1.900 liter/detik dengan kebutuhan pelanggan sebesar (130-140) liter/orang/hari atau rata-rata (23-25) m³/bulan/SR, sedangkan kapasitas produksi nyata saat ini 1.303 liter/detik. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Mayang adalah Sungai Batanghari, diolah melalui 7 unit IPA .

Proses pengolahan yang ada pada seluruh IPA tersebut merupakan proses pengolahan lengkap yakni:

- Koagulasi (proses pencampuran bahan kimia)
- Flokulasi (proses pengikatan koloid (butir-butir penguruh) oleh bahan kimia)
- Sedimentasi (proses pemisahan koloid (butir penguruh))
- Filtrasi (proses penyaringan)
- Klorinasi (proses penghilangan bakteri dari air terolah)

Tabel 2.48
Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

No.	Unit	Kap. Terpasang (L/S)	Kap. Produksi (Kemampuan) (MAX) (L/S)	Kap. Belum Terpakai (L/S)	Ket.
1	IPA Broni 1	600	300	300	Rusak
2	IPA Broni 2	600	600	0	
3	IPA Benteng	220	0	220	Rusak
4	IPA Tanjung Sari 1	100	80	20	
5	IPA Tanjung Sari 2	100	100	0	
6	IPA Aur Duri 1	100	50	50	Usia Teknis /Rusak
7	IPA Aur Duri 2	100	100	0	
8	IPA Aur Duri 3	100	100	0	
9	IPA Perumnas Aur Duri	20	20	0	
10	IPA Pasir Panjang	40	40	0	
11	IPA Tanjung Johor	20	14	6	
Total		2.000	1.404	596	

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

- **Unit Distribusi**

Tahun 2022, sistem perpipaan distribusi air bersih di yang dimiliki PERUMDA AIR MINUM Air Minum Kota Jambi Kota Jambi memiliki total sepanjang 1.373.899 m.

Tingkat kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW) PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sampai tahun 2022 masih sangat besar yaitu sekitar 38,51 %.

Tabel 2.49
Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022

No	Uraian	Volume	Sat
1	Produksi Air	31.789.771	M ³
2	Distribusi Air	30.866.001	M ³
3	Konsumsi Air	19.003.603	M ³
4	NRW	11.862408	M ³
5	NRW	38,51	%

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

Permasalahan Pelayanan Air Minum Kota Jambi

a) Sumber

- Kekerusuhan air baku cenderung meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikasi adanya pencemaran air sungai.
- Intake sering mengalami kesulitan dalam penyadapan air baku. Khususnya di Intake Sijinjang yang masih menggunakan jenis intake saluran, yaitu terganggunya pengaliran ke pintu masuk (inlet) intake, terutama pada musim kemarau karena terjadinya penumpukan sedimentasi.
- Kualitas dan tinggi muka air Sungai Batanghari fluktuatif, sehingga menyebabkan tingkat kesulitan yang relatif tinggi dalam mengolah air.

b) Pengolahan

- Menurunnya kinerja dan kapasitas operasi Instalasi Pengolahan Air.
- Kerusakan pada klariflokulator dan filter, serta menurunnya efisiensi dan debit pompa.

c) Transmisi – Distribusi

- Tingkat kehilangan air sebesar 38,51% pada tahun 2022.
- Cakupan pelayanan mencapai 80% untuk daerah perkotaan.

Penyebab Permasalahan

- 1) Adanya penambangan emas tanpa izin (Peti) di Hulu Sungai Batanghari.
- 2) Fluktuasi muka Sungai Batanghari yang mencapai 1 m pada saat musim kemarau dan 8 meter pada hujan.
- 3) Sedimentasi Sungai Batanghari cukup tinggi.
- 4) Bila terjadi kemarau, di beberapa unit pengolahan mengalami penurunan kapasitas produksi.
- 5) Usia teknis peralatan mekanikal, elektrikal, peralatan pengolahan (tube settler keropos, filter), perpompaan dan pipa.
- 6) Kontinuitas operasi pelayanan yang belum mencapai 24 jam.
- 7) Unit pengolahan yang menggunakan sistem pengolahan lengkap belum dilengkapi/didukung oleh sarana yang lengkap.
- 8) Suhu air pada unit produksi tidak konstan.
- 9) Kapasitas pengolahan lengkap saat ini masih terbatas.
- 10) Jaringan pipa yang sudah melebihi umur ekonomis (sudah tua, rata-rata >20 tahun).
- 11) Kondisi jaringan pipa sudah banyak yang berada di badan jalan dan di bawah bangunan, sehingga kebocoran pipa tidak dapat terdeteksi.
- 12) Meter air pelanggan banyak yang sudah melebihi umur ekonomis (> 5 tahun), 15013 SR yang meter airnya belum diganti.
- 13) Belum adanya sistem zoning di daerah pelayanan yang menggunakan alat ukur.
- 14) Pemakaian air pada hidran kebakaran tidak dapat dideteksi karena tidak dilengkapi dengan *water meter*.
- 15) Adanya indikasi pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air.
- 16) Adanya indikasi sambungan ilegal terutama pada sambungan yang sudah dicabut.
- 17) Belum dimilikinya sarana pendeteksi kebocoran pipa.
- 18) Pada saat penggantian meter pelanggan, masih ditemukan meteran buram sehingga stan meter sulit terbaca.
- 19) Sebagian pipa asbes (ACP) masih dioperasikan.

Selain mengandalkan air minum perpipaan sebanyak 75,87% atau setara 94.006 SR, sisanya penduduk Kota Jambi mengandalkan air minum dari sistem nonperpipaan.

- a. Sistem non perpipaan eksisting, terdiri dari:
 - ❖ Sumur Gali dan Sumur Pompa,
 - ❖ Sumur Bor
 - ❖ Mobil Tangki Air
 - ❖ Air Hujan
- b. Permasalahan air minum sistem non perpipaan
 - Kontinuitas sumur gali didaerah selatan terganggu pada musim kemarau.
 - +30% sumur gali tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologi karena tercemar.
 - *Lifetime* (usia pakai) sumur bor pendek, karena potensi air tanah dalam kecil.
 - Mobil tangki terbatas.

2. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Kota

Berdasarkan Permen PU Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dimaksudkan dengan sistem bukan jaringan perpipaan kota adalah hidran umum, terminal air, mobil tangki air, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur dalam, sumur pompa tangan, sumur gali, IPA sederhana, saringan rumah tangga, destilator surya atap kaca dan IPA *reverse osmosis*. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang ada di Kota Jambi saat ini Sumur Gali Terbuka (SGL), Terminal Air (TA)/Hidran Umum (HU), Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT dk), Sumur Pompa Tangan Dalam (SPT dl), Penampungan Air Hujan (PAH) dan lainnya.

Tabel 2.50
Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per
Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Parameter			
			Jenis	Jumlah	Jumlah Kk Terlayani	Tingkat Pelayanan (%)
1	Telanaipura	Putri Ayu	SGL	1.171	1.321	14,54
		Penyengat Rendah	SGL	198	224	4,78
		Simpang IV Sipin	SGL	2.854	3.218	37,69
2	Jambi Timur	Tanjung Pinang	SGL	3.127	3.526	40,48
		Payo Selincah	SGL	9.340	10.532	194,35
			TA/HU	6	7	0,13
Talang Banjar	SGL	965	1.089	13,15		
	TA/HU	1	2	0,02		
3	Jambi Selatan	Pakuan Baru	SPT dk	330	373	3,92
			SGL	1.563	1.763	18,52
		Talang Bakung	SGL	10.388	11.713	91,73
		Paal Merah	SPT dl	115	130	1,14
SGL	4.810		5.424	53,60		
Lingkar Selatan	SGL	16	19	0,43		
4	Danau Teluk	Olak Kemang	SGL	113	128	3,92
5	Pelayangan	Tatul Yaman	SPT dl	323	365	10,96
			SGL	99	112	3,36
			PAH	53	60	1,80
6	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	SPT dl	14	16	0,30
			SGL	2.787	3.143	59,08
			PAH	22	25	0,41
			Lainnya	2	4	0,08
Rawasari	SPT dk	3.974	4.481	32,31		
7	Jelutung	Lebak Bandung	SPT dk	9	11	0,08
			SGL	1.835	2.069	15,54

Sumber : RISPAM Kota Jambi, 2020

Keterangan : SGL (Sumur Gali Terbuka)

TA/HU (Terminal Air/Hidran Umum)

SPT dk (Sumur Pompa Tangan Dangkal)

SPT dl (Sumur Pompa Tangan Dalam)

PAH (Penampungan Air Hujan)

Lainnya (Jenis sarana air bersih selain daripada yang telah dijabarkan)

D. Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah merupakan infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan. Kota Jambi memiliki beberapa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data Strategi Santiasi Kota (SSK) Kota Jambi dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki persentase sanitasi layak sebesar 67,85% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di kota Jambi masih minim dalam sanitasi yang dikelola secara aman. Untuk itu

masih dibutuhkan perhatian khusus Upaya meningkatkan sanitasi yang dikelola secara aman di Kota Jambi melalui program pemerintah.

Tabel 2.51
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Sanitasi Secara Aman di Kota Jambi Tahun 2018-2022

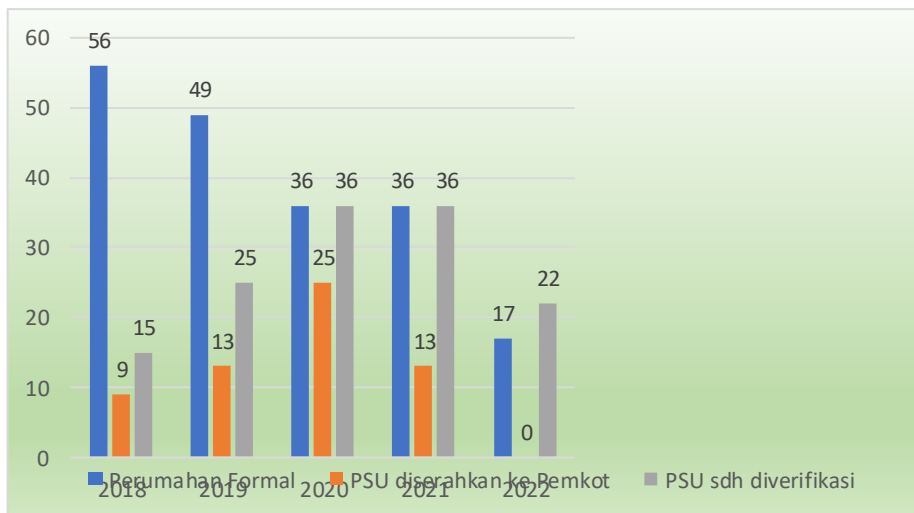
Tahun	Persentase (%)
2018	NA
2019	NA
2020	NA
2021	5,53
2022	5,75

Sumber: Laporan Tahunan DPUPR Kota Jambi, 2023.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

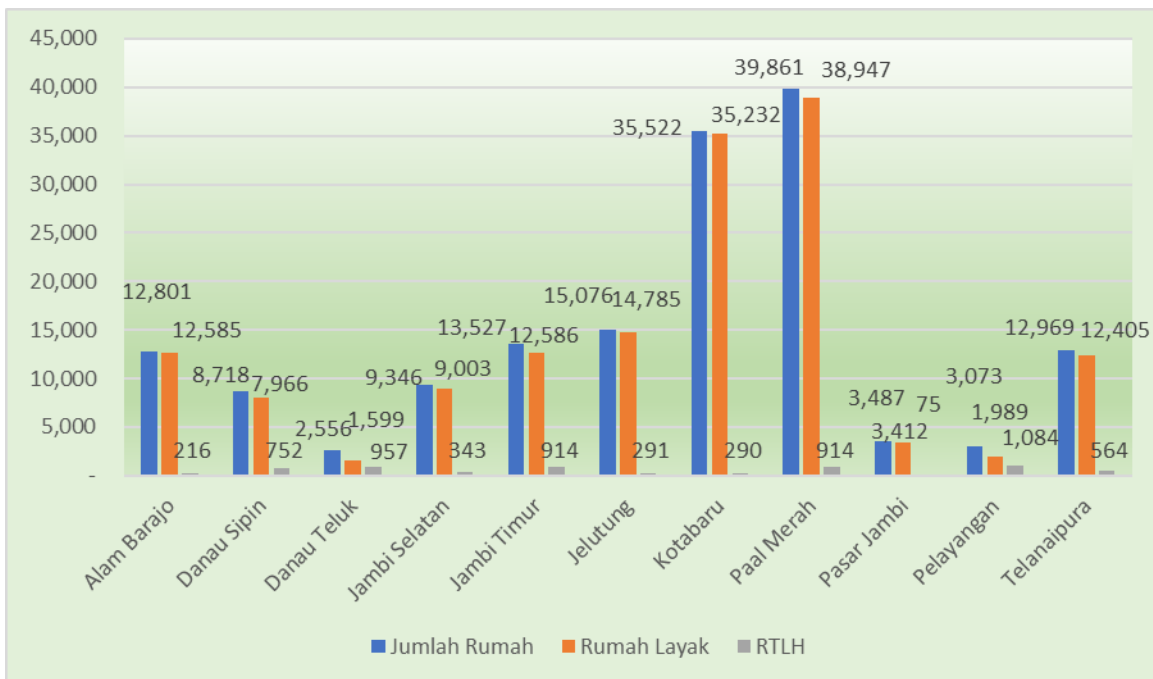
Gambar 2.57
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.58
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.59
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2022 jumlah RTLH sebanyak 6.427 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun. Prioritas lain dalam

pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2022 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 147,7 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

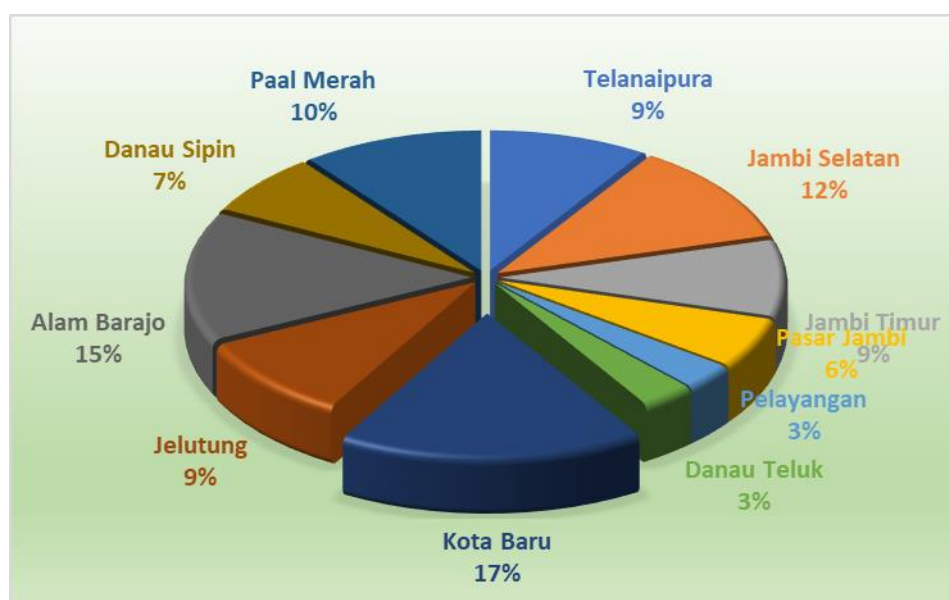
Tabel 2.52
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,00
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincih	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sujur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	0,00
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0,00
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0,00
38	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0,00
TOTAL			986,57	147,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini persentase titik lampu jalan yang telah terpasang pada tahun 2022 di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.59
Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi

Dari total sebanyak 22.375 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energi (LED) kapasitas 120 watt sebanyak 274 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.350 titik. Untuk jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kota Jambi yang merupakan tanggung jawab

urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2022 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 87.544 M².

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2022, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2022 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3.

Tabel 2.53
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	350 orang 606.200 jiwa	0,06
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran Perda	20	25	31		
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	25	31		
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100		
Jumlah Pelanggaran K3	621	579	109		
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	621	579	109		
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

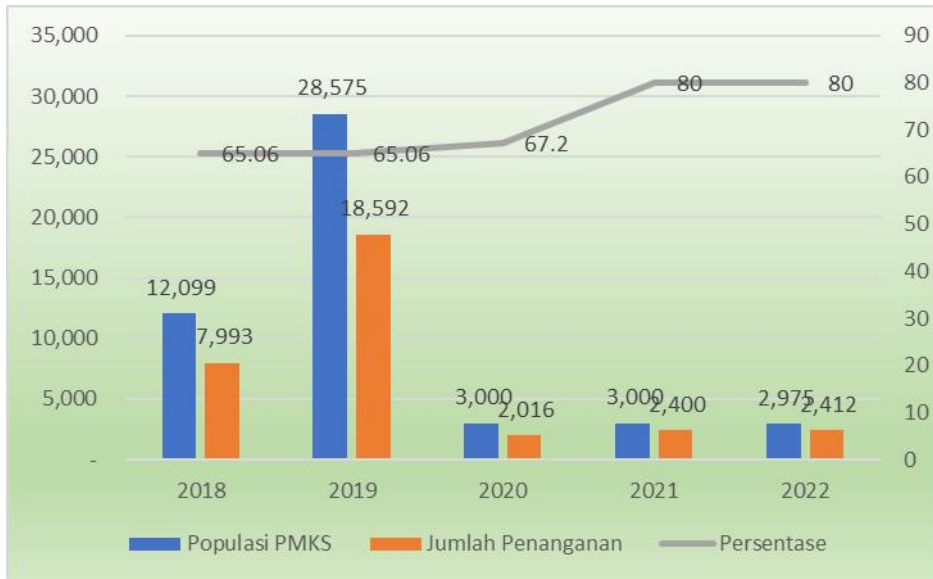
2.3.1.6 Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada

tahun 2022 sebanyak 1.699 orang lansia terlantar dan 1.489 lansia miskin, untuk tahun 2022 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 181 orang lansia mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.412 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang di dalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2018-2022 berfluktuasi cenderung menurun dimana tahun 2018 sebanyak 12.099 orang menurun menjadi 2.975 orang pada tahun 2022, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 2.412 orang atau sekitar 80%.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

Gambar 2.60
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

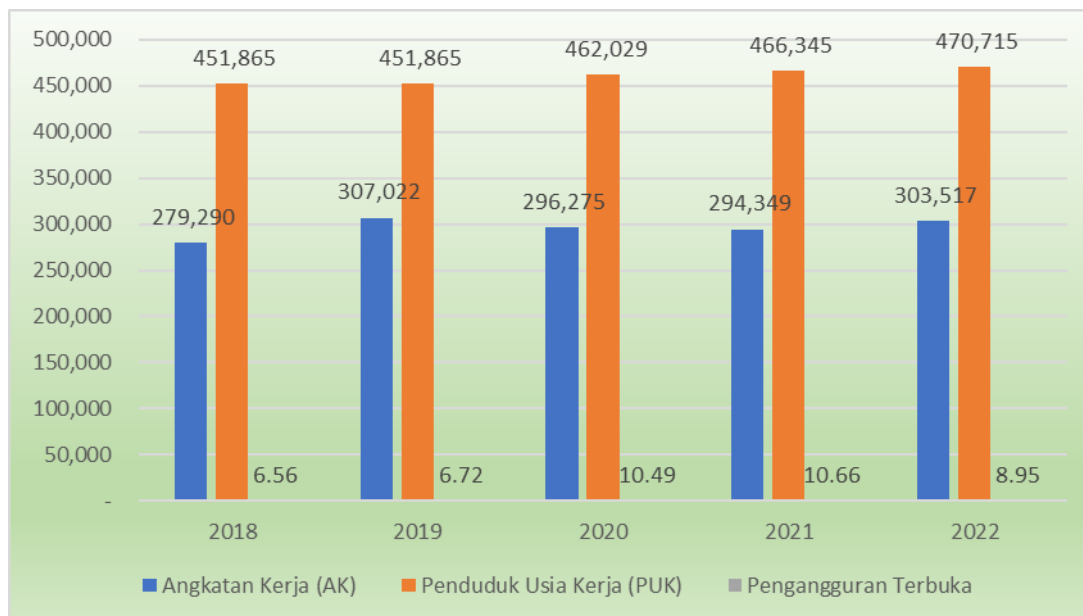
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2014-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.61
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 2.62
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022.

Gambar 2.63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2022 TPAK di Kota Jambi sebesar 64,52% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 63,12%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2022.

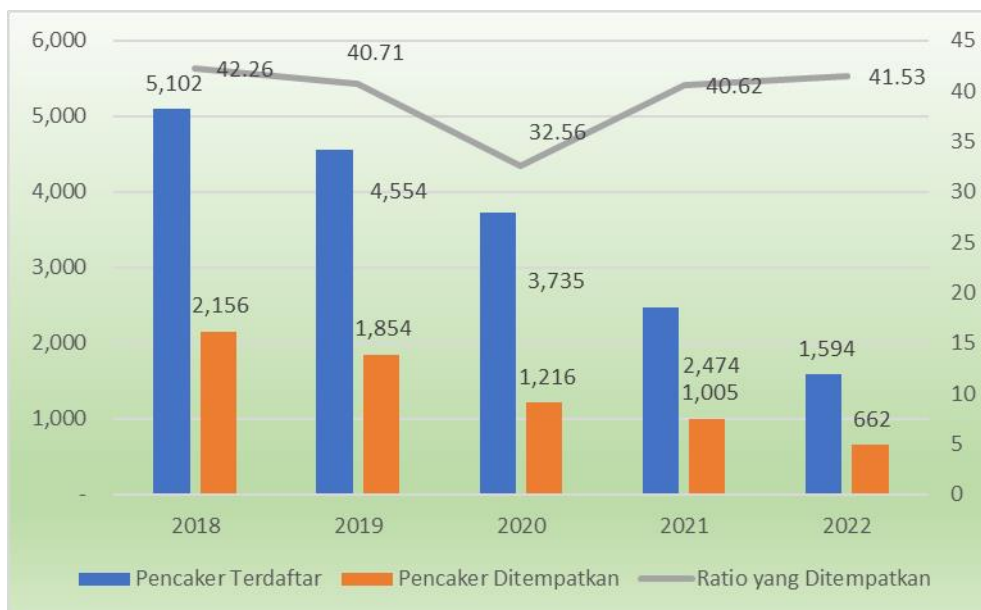
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2022 sekitar 8,95 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi kembali membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga tenaga kerja bisa diserap.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.64
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftarkan di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.65
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Dari data tersebut tahun 2022 di Kota Jambi, rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 41,53 mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 40,62, Membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19 sehingga terbukanya kembali lapangan pekerjaan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.315	4.376	4.020	3.893	3.643
3	Persentase	3,80 %	-	4,03%	3,86%	3,73%

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023 - BPS Kota Jambi 2023.

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.56
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	53.065	Dta	49.521	8.045	7.183
3	Persentase	46.77 %	Dta	49,74	8,34	7,35

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2018-2022, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan.

Tabel 2.57
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	Dta	Dta	112.475	111.801	108.671
2	Jumlah Pekerja perempuan	Dta	Dta	99.556	100.767	97.667
3	Persentase	-	-	88,51%	90,13%	89,87%

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dimana tahun 2018 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi 111 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat kemudian menurun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.66
Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.3.2.3 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun

jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 dibuktikan dari segi ketersediaan Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari dari AKE yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari. Segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Survey Ekonomi Nasional. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut diasumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian panganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut

disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.58
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.005	100,0	95,5	11,5	106,1	101,3	100	93,1

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2022, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini menunjukkan telah beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

2.3.2.4 Pertanian

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 subbidang yaitu: 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin

membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.59
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023.

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	1.401	2.365	2.180	4.409	7.727
2.	Hak Guna Bangunan	341	720	1.560	1.656	1.533
3.	Hak Pakai	4	4	51	128	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. Ketersediaan RTH Publik

RTH yang terdapat di Kota Jambi tersebar hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada. Secara umum, luas RTH publik di Kota Jambi diidentifikasi melalui interpretasi peta. Total luas RTH Publik di Kota Jambi hanya sekitar 12,67%, yang terdiri dari RTH Taman, RTH Pemakaman, dan RTH Hutan Kota. Luas masing-masing RTH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Luas RTH Publik di Kota Jambi

No.	Program	Luas RTH Publik (ha)	Perhitungan IHBI berdasarkan Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha)	%
1	RTH Tipologi A sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Rimba kota; b. Taman Kota; c. Taman Kelurahan;	266,41	679,65	4,01%
2	RTH Tipologi B sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Kawasan Perlindungan Setempat b. Kawasan Tanaman Pangan	2.633,49	1.111,91	6,54%
3	RTH Tipologi C sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 berupa ruang terbuka biru (ha)	949,91	189,98	1,12%
5	RTH Publik melalui kewajiban Penyediaan RTH Taman dan Pemakaman oleh pengembang perumahan		33,61	0,19%
6	Jalur Hijau Jalan		21,40	0,13%
7	Pemakaman		92,31	0,54%
Jumlah			2.128,56	12,67%

Sumber: Instansi Teknis Terkait dan Interpretasi Peta Citra Satelit, 2023.

1) RTH Taman

RTH taman adalah merupakan RTH buatan dengan skala pelayanan kota ataupun kawasan. Sebaran RTH taman di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
RTH Taman di Kota Jambi

No	Nama Taman	Luas (M ²)	Lokasi
1	Taman Tugu Makalam	38,46	Kec.Telanaipura
2	Taman PKK Murni	263	Kec.Telanaipura
3	Taman Simpang Pulai	464	Kec.Telanaipura
4	Taman Jaksa I	728	Kec.Telanaipura
5	Taman Jaksa li	735	Kec.Telanaipura
9	Taman Ade Irma Suryani	120	Kec.Telanaipura
10	Taman Simpang Bi	388	Kec.Telanaipura
11	Taman Simpang Tanjung	210	Kec.Telanaipura
12	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	82	Kec.Telanaipura
13	Taman Anggrek	25.056	Kec. Telanaipura
14	Taman Kirab Remaja	47	Kec. Kota Baru
15	Taman Arena Remaja	20.086	Kec. Kota Baru
16	Taman Tugu Juang	431,78	Kec. Kota Baru
17	Taman Batas Kota	160	Kec. Kota Baru
18	Taman Adipura	1298	Kec. Jambi Selatan
19	Taman Sekapur Sirih	68	Kec. Jambi Selatan
20	Taman PKK The Hook	1.210,25	Kec. Jambi Selatan
21	Taman Anjungan Kota	4000	Kec. Jambi Selatan
22	Taman Simpang Beringin	248	Kec. Jambi Selatan
23	Taman Simpang Tanjung Lumut		Kec. Jambi Selatan
24	Taman Simpang Jelutung	66	Kec. Pasar Jambi
25	Taman TP. Sriwijaya	452,16	Kec. Pasar Jambi
26	Taman Aur Duri	140,87	Kec. Danau Teluk
27	Taman Sanggar Batik	1.147,13	Kec. Pelayangan
28	Taman Lingkungan Perumnas	1.554	Kec. Jelutung
Total		32.345,19	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.



Gambar 2.67
Taman Arena Remaja



Gambar 2.68
Taman Anggrek



Gambar 2.69
Taman Jaksa



Gambar 2.70
Taman Tugu PKK

Selain taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota seperti yang tertuang didalam tabel diatas, juga banyak terdapat taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh swasta terutama oleh developer. Taman ini diwujudkan melalui taman perumahan. Beberapa taman perumahan yang telah diinventaris oleh Pemerintah Kota Jambi melalui instansi teknis terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
RTH Taman Perumahan di Kota Jambi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Total Unit Rumah				Luas Lahan Efektif Perumahan	Luas Kavling Efektif	PSU Luas RTH (M ³)
		MBR	NON MBR	Toko / Ruko	Total			
1	Alam Berajo	7,308	2,205	119	9,632	1,781,834.47	1,131,337.48	134,345.19
2	Danau Sipin	12	32		44	8,911.00	6,020.07	535.83
3	Danau Teluk				0			
4	Jambi Selatan	352	285	25	662	119,058.00	82,529.14	5,418.90
5	Jambi Timur		14		14	1,909.00	1,091.00	416.00
6	Jelutung		78		78	14,984.00	10,939.50	522.00
7	Kota Baru	4,986	1,989	165	7,14	1,210,497.08	779,389.14	91,059.33
8	Paal Merah	2,151	944	218	3,313	557,120.10	368,062.68	37,174.90
9	Pasar Jambi				0			
10	Pelayangan				0			
11	Telanaipura	574	359	57	990	170,728.00	117,770.80	10,477.20
Total		15,383.00	5,906.00	584	21,873.00	3,865,041.65	2,497,139.81	279,949.35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2021.



Gambar 2.71
Taman Perumahan

2) RTH Rimba Kota

Rimba kota disediakan dengan tujuan sebagai peyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk: memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Saat ini, terdapat 2 (dua) hutan kota dan 1 (satu) areal lahan yang direncanakan untuk difungsikan sebagai hutan kota di Kota Jambi. 1 (satu) hutan kota yang sudah terbentuk dan berfungsi pada saat ini di Kota Jambi adalah Hutan Kota M.Sabki yang terdapat di Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru dengan luas sekitar 11 (sebelas) hektar dan Hutan Kota (Hutan Pinus) di Kelurahan Bagan Pete. 1 (satu) areal lagi akan difungsikan sebagai RTH Hutan Kota ketiga ini memiliki luas sekitar 41 ha dari 90 ha luas lahan yang direncanakan, areal ini terdapat di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru.



Gambar 2.72
Hutan Kota

3) Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, kebisingan, pemecah angin, pembatas pandangan, dan dapat juga berfungsi sebagai penahan lampu kendaraan bagi kendaraan yang berlawanan arah. Ruas jalan jalan yang memiliki jalur hijau jalan di Kota Jambi secara umum adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.

Tabel 2.64
RTH Jalur Hijau Jalan

No	Nama Jalan	Lokasi	Panjang (M)
1	Jln. Soekarno Hatta	Kec. Jambi Selatan	1.450,00
2	Jln. Jend. Sudirman	Kec. Jambi Selatan	2.244,00
3	Jln. Pangeran Diponegoro	Kec. Jelutung	1.235,00
4	Jln. KH. Hasyim Asyari	Kec. Jambi Timur	680,00
5	Jln. Sultan Thaha	Kec. Jambi Timur	1.450,00
6	Jln. Rd. Pamuk	Kec. Jambi Timur	1.234,00
7	Jln. Slamet Riyadi	Kec. Telanaipura	2.057,00
8	Jln. Yusuf Singadikane	Kec. Telanaipura	800,00
9	Jln. RE. Marta Dinata	Kec. Telanaipura	430,00
10	Jln. Jend. Ahmad Yani	Kec. Telanaipura	770,00
11	Jln. Bakarudin	Kec. Telanaipura	680,00
12	Jln. Patimura	Kec. Kotabaru	3.437,00
13	Jln. Hutan Kota	Kec. Kotabaru	1.500,00
14.	Jln. MTQ	Kec. Jambi Selatan	860,00
15.	Jln. Jend. Basuki Rahmat	Kec. Kota Baru	620,00
16.	Jln. Arief Rahman Hakim	Kec. Telanaipura	1.100,00
17.	Jln. Abdul Manaf	Kec. Telanaipura	600,00
18.	Jln. Mayjen Sutoyo	Kec. Telanaipura	250,00
Total			21.397

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.

Tabel 2.65
RTH Pulau Jalan

No	Nama Jalan	Lokasi	Luas (M ²)
1	Sekapur Sirih	Kec. Jambi Selatan	68
2	Simpang Jelutung	Kec. Jelutung	66
3	Tp. Sriwijaya	Kec. Pasar Jambi	452,16
4	Taman Simpang Ppt	Kec. Telanaipura	52
5	Taman Honda	Kec. Telanaipura	125
6	Taman Tugu Juang	Kec. Telanaipura	200
7	Taman Kirab Remaja	Kec. Jelutung	47
8	Taman Tugu Jam	Kec. Jelutung	1074,66
Total			2.085

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.



Gambar 2.73
RTH Jalur Hijau Jalan

4) Jalur Hijau Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Jambi adalah Batanghari dan 7 (tujuh) SubDAS, meliputi :

1. DAS Kenali Kecil dengan panjang sungai 10,68 Km
2. DAS Kenali Besar dengan panjang sungai 13,79 Km
3. DAS Kambang dengan panjang sungai 43,04 Km
4. DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km
5. DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km
6. DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km
7. DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km

Pertimbangan penetapan jalur hijau sempadan sungai di Kota Jambi antara lain:

- a. Seluruh aliran sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Jambi termasuk dalam kriteria sungai di kawasan perkotaan.
- b. Tanggul sungai hanya terdapat di aliran Sungai Batanghari dan panjang tanggul yang ada tersebut tidak sampai 10% dari panjang badan sungai sehingga dianggap tidak ada tanggul.
- c. Distribusi kedalaman Sungai Batanghari adalah lebih dari 3 (tiga) meter.
- d. Dengan demikian untuk aliran Sungai Batanghari secara keseluruhan dianggap sebagai aliran sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 m – 20 m sehingga penetapan sempadan sungai sekurang – kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam dan diluar kawasan perkotaan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Berdasarkan intepretasi peta citra satelit, tidak seluruh area yang seharusnya berfungsi lindung disempadan sungai terjaga dari kegiatan pembangunan fisik. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kota Jambi.

Tabel 2.66
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Sungai	Belukar	4,00
	Hutan	2,86
	Industri dan Pergudangan	0,20
	Pemukaman	1,66
	Pendidikan	0,06
	Perdagangan dan Jasa	4,22
	Perkantoran	0,41
	Permukiman	50,43
	Pertahanan dan Keamanan	0,04
	Sawah	8,40
	Tanah Kosong	16,36
	Tegal/Ladang	103,20
	Tubuh Air	19,60
	Wisata	0,03
	Total	

Sumber: Intepretasi Peta Citra Satelit, 2023.





Gambar 2.74
Pemanfaatan ruang di sempadan sungai

5) RTH Sempadan Danau

Setidaknya terdapat 4 (empat) danau diwilayah Kota Jambi, yaitu Danau Sipin, Danau Teluk Kenali, Danau Teluk, dan Danau Kiambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan danau ditetapkan 50 (limapuluh) meter dari tepi danau yang diukur pada kondisi muka air tertinggi. Jika berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam PP 38/2011 tersebut, maka luas sempadan danau di Kota Jambi seharusnya adalah sekitar 360 ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kawasan sempadan Danau Sipin dengan luas 161 Ha (seratus enam puluh satu hektar)
- b. Kawasan sempadan Danau Teluk Kenali dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
- c. Kawasan sempadan Danau Teluk dengan luas 54 Ha (lima puluh empat hektar)
- d. Kawasan sempadan Danau Kiambang dengan luas 40 Ha (empat

puluh hektar).

Sama halnya dengan sempadan sungai, lahan disempadan danau juga tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau non terbangun. Penggunaan lahan disempadan danau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Danau	Belukar	4,98
	Hutan	59,78
	Kesehatan	0,01
	Perdagangan dan Jasa	0,97
	Perkantoran	0,04
	Permukiman	24,95
	Sawah	0,24
	Tanah Kosong	20,87
	Tegal/Ladang	55,64
	Tubuh Air	43,54
	Total	211,02

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042, dan Interpretasi Peta Citra Satelit.

6) RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Luas lahan pemakaman di Kota Jambi saat ini sekitar 76,11 Ha. Luas ini merupakan luas terhadap lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lahan pemakaman yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Secara umum, lahan pemakaman yang ada merupakan lahan yang sudah diperuntukan untuk pemakaman dari waktu yang sudah cukup lama.

Tabel 2.68
RTH Pemakaman di Kota Jambi

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M ²)
	Kelurahan Sukakarya	RT. 1 Bumi Ayu I	3.000
		RT. 5 Bumi Ayu II / Bumi Ikhlas	12.282
		RT. 8 TPU Bumi Ayu	2.000
	Kel. Mayang Mangurai	RT. 35 TPU Pusara Agung	30.575
		RT. 22 Keluarga H. Jamari	5.000
		RT. 10 TPU Kebon Daging	10.000
		RT. 28 TPU Sakintang Dayo	16.800
	Kel. Bagan Pete	RT. 8 TPU Masyarakat Bagan Pete	5.000
		RT. 9 TPU Jln. Sari Bakti	2.500
		RT. 22 TPU Perum Permata Biru dan Pinang Merah	700
		Pemakaman dari Pengadaan Lahan Perumahan	1.500
	Kel. Kenali Besar	RT. 6 TPU Jln. Bersama	5.000
		RT. 8 TPU Jln. Pertamina	5.000
		RT. 25, 16 Perum Bougenville	10.000
		RT. 10 Jln. Anwar Bay	5.000
		Rt. 1 Jln. Yang. Raya	2.700
		RT. 16 TPU Amuntai	10.000
	Kel. Kenali Asam Atas	RT. 21 KEBON BOHOK	15.000
	Kel. Paal V	RT. 14 PAAL V	8.962
	Kel. Rawasari	RT. 13 TPU Kuburan Cina Jln. Patimura	24.000
		RT. 25 TPU Syailendra	100
		RT. 20 TPU Bagan Pete	10.000
	Kel. Kenali Asam Bawah	RT. 1 TPU Bumi Ayu	75.000
		RT. 5 TPU Wisma Loyo	50.000
		RT. 24 TPU Mutiara Hijau	20.000
	Kec. Telanaipura		
	Kel. Sungai Putri	TPU Putri Ayu	60.000
	Kel. Teluk Kenali	TPU RT. 3 Teluk Kenali	15.000
	Kel. Buluran Kenali	TPU RT. 5	8.000
		TPU RT. 7	3.000
		TPU RT. 12	7.000
		TPU RT. 13	2.000
		TPU RT. 14	10.000
	Kel. Penyengat Rendah	TPU RT. 1 Penyengat Rendah	10.000
		TPU Alsaihun RT. 3 Kampung Bugis	5.000
		TPU RT. 8 (TPU RT.3 – RT.10)	15.000
		TPU RT. 9 (Habib)	
		TPU RT. 11, 12 Kasang Gelagang	10.000
		TPU Kasang Gelagang (Rt.13,14,15,16,17, 19, 20, 26, 27,28)	2.000
		TPU RT. 24 Kampung Bugis	1.500
	Kel. Selamat	TPU Kel. Selamat	10.000
	Kel. Solok Sipin	TPU Singkawang	20.000
	Kec. Jambi Timur		
	Kel. Kasang Jaya	TPU RT. 1 Kasang Jaya	20.000
		TPU RT. 6 Kasang	500
	Kel. Tanjung Sari	TPU RT. 6 JL. Kerajaan Melayu	20.000
	Kel. Sijenjang	TPU RT. 2 Sijenjang	500
		TPU RT. 3 Jl. Rd. Fatah	1.500
		TPU RT. 6	500
		TPU RT. 8 Jl. Rd. Fatah	500

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M ²)
	Kel. Payo Selincah	TPU RT. 20	975
		TPU RT. 24 JL. Gunung Semeru	500
	Kel. Talang Banjar	TPU RT. 32 JL. Pangeran Antasari	10.000
	Kel. Tanjung Pinang	TPU RT. 33 Tanjung Pinang	500
		TPU RT. 13 Tanjung Pinang	500
	Kel. Thehok	TPU RT. 9 Sukorejo	20.060
		TPU RT. 25 Thehok	1.700
	Kel. Talang Bakung	TPU RT. 20 Talang Sari	20.000
		TPU RT. 10 Lrg. Makmur	10.000
		TPU Lrg. RT. 34 Mahkamah 1	10.000
		TPU Lrg. RT. 36 Mahkamah 2	10.000
	Kel. Palmerah	TPU RT. 6 Jl. AR. Saleh	2.232
		TPU RT. 16 Komplek YUKA	1.989
		TPU Lrg. Anugerah	603
		TPU RT. 33 Sri Rahayu	12.000
	Kel. Lingkar Selatan	TPU RT. 22 Lrg. Mustika	500
		TPU RT. 12 Lrg. Pengadilan	10.000
		TPU RT. 1	500
	Kec. Jelutung		
	Kel. Jelutung	TPU RT. 50 Puncak	4.500
	Kel. Talang Jauh	TPU RT. 30 Talang Jauh	4.000
	Kel. Handil Jaya	TPU Kebon Jahe	5.232
	Kec. Pasar Jambi		
	Kel. Beringin	TPU Kebon Jahe	20.000
	Kec. Danau Teluk		
	Kel. Pasir Panjang	TPU RT. 2 Pasir Panjang	7000
		TPU RT. 3 Pasir Panjang	5000
		TPU RT. 5 Pasir Panjang	3000
	Kel. Tanjung Raden	TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.330
		TPU RT. 8 Tanjung Raden	1.500
		TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.200
	Kel. Tanjung Pasir	TPU RT. 3 Tanjung Pasir	1.200
	Kel. Olak Kemang	TPU RT. 10 Olak Kemang	4.500
		TPU RT. 8 Olak Kemang	2.000
	Kel. Ulu Gedong	TPU RT. 10	4.000
	Kel. Tengah	TPU RT. 4 Kampung Tengah	10.000
	Kel. Jelmu	TPU RT. 5 Jelmu	5.000
	Kel. Mudung Laut	TPU RT. 8 Datuk Sintai	5.000
	Kel. Arab Melayu	TPU RT. 7 Arab Melayu	25.000
	Kel. Tahtul Yaman	TPU RT. 1 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 2 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 3 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 4 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 5 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 6 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 7 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 8 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 9 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 10 Tahtul Yaman	10.000
	Kel. Tanjung Johor	TPU RT. 5 Raudatul Janah	8.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.

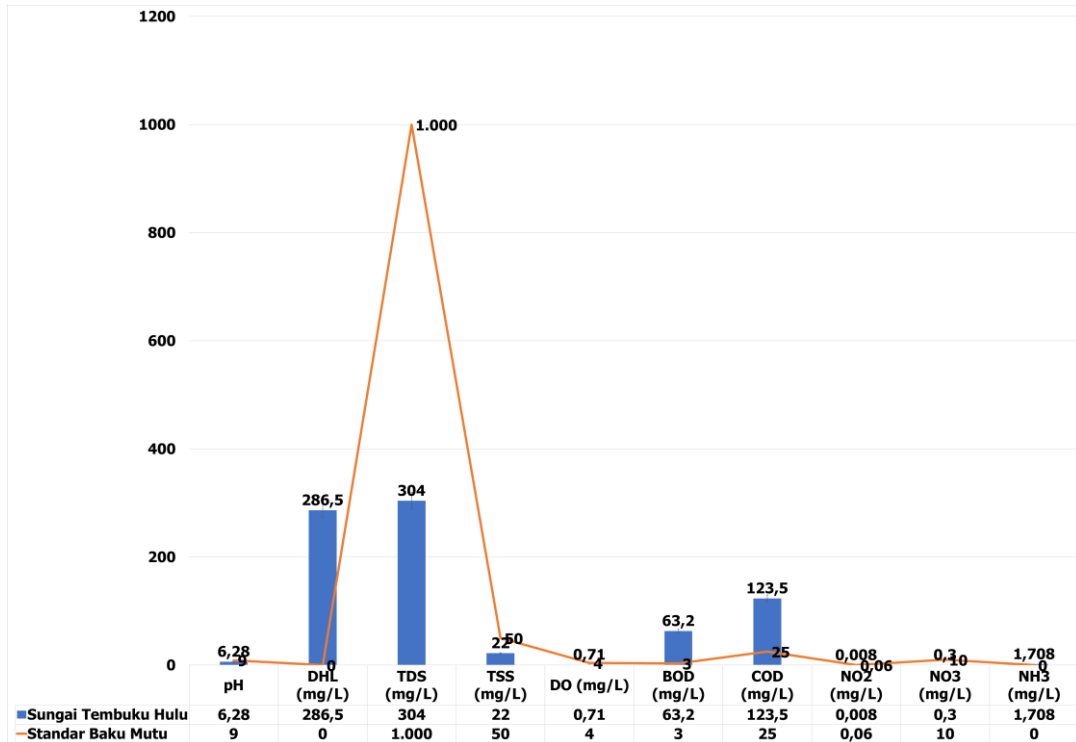


Gambar 2.75
RTH Pemakaman

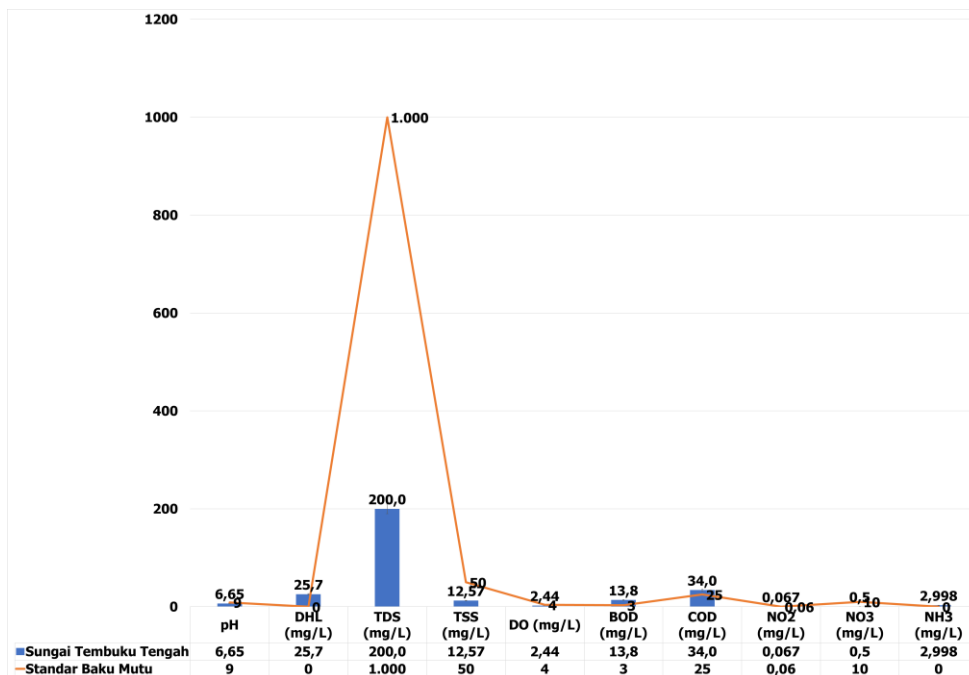
B. KUALITAS AIR

Sumberdaya air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumberdaya air sungai, sumberdaya air danau, dan sumberdaya air tanah. Sumberdaya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumberdaya air Sungai Batanghari dan sumberdaya air SubDAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumber daya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah sumberdaya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

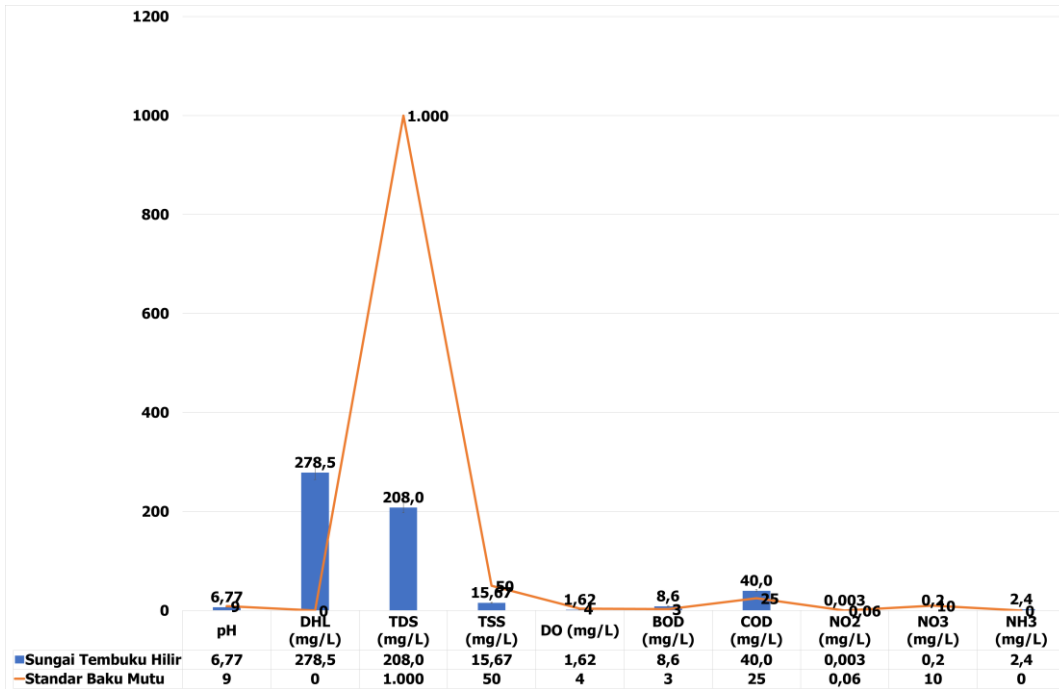
Berdasarkan kegiatan pemantauan kualitas air dimana beberapa informasi kualitas air dapat dilihat sebagai berikut:



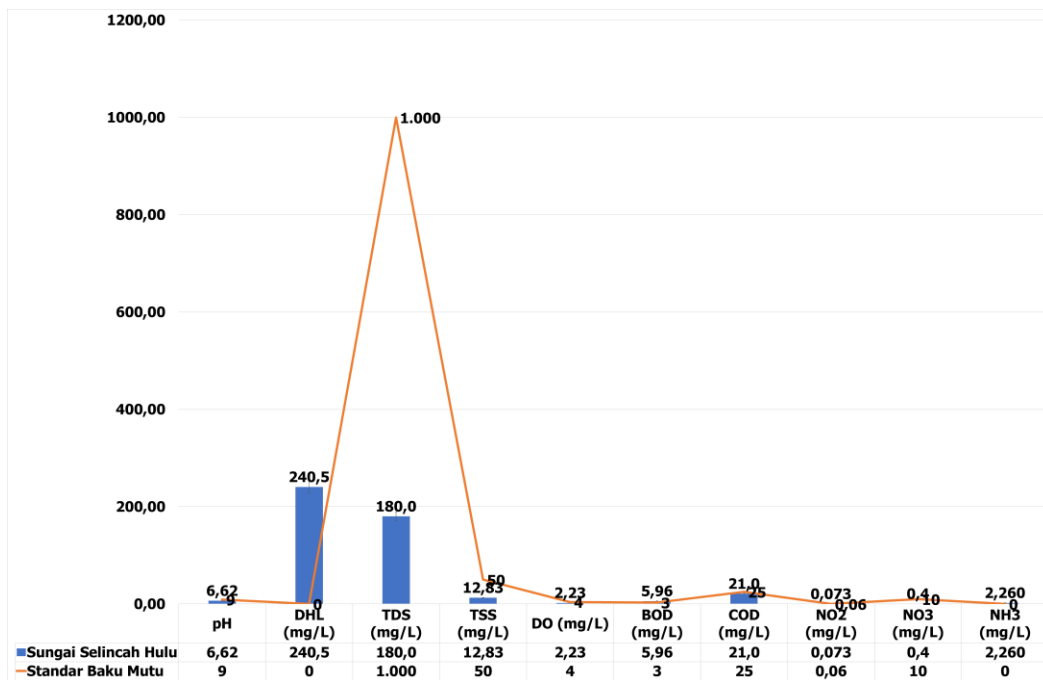
Gambar 2.76
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu, Tahun 2022



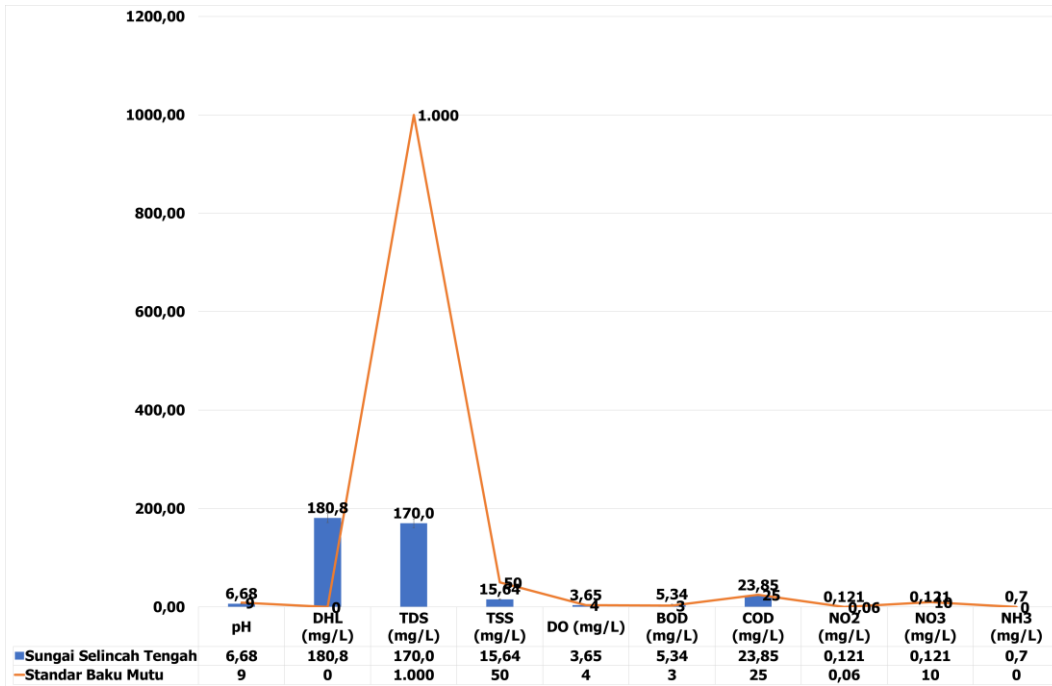
Gambar 2.77
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah, Tahun 2022



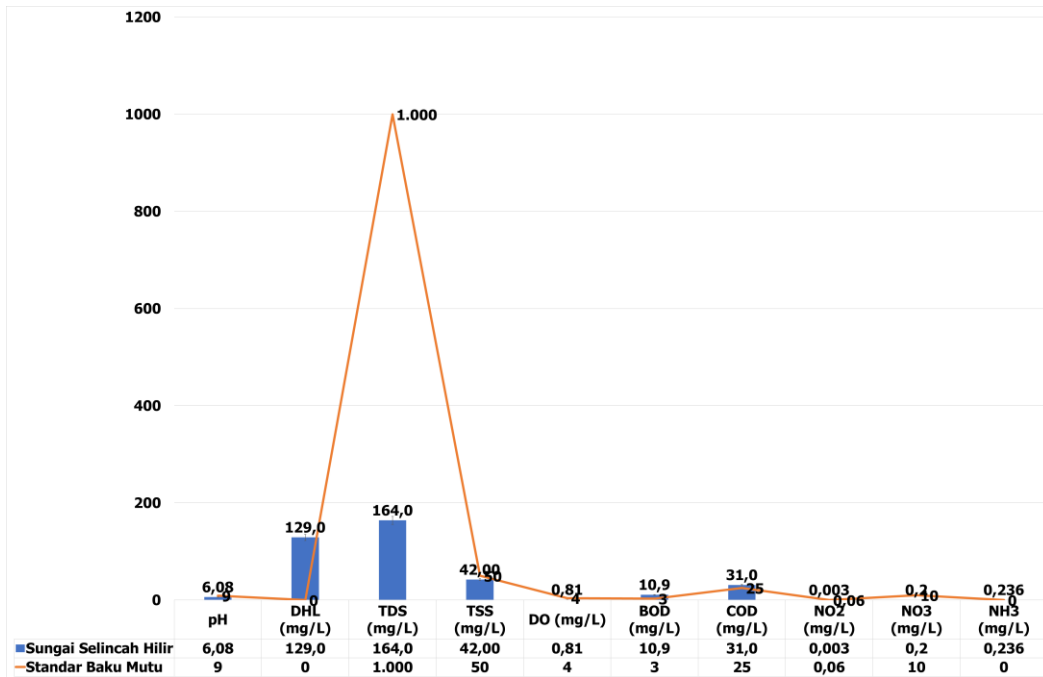
Gambar 2.78
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir, Tahun 2022



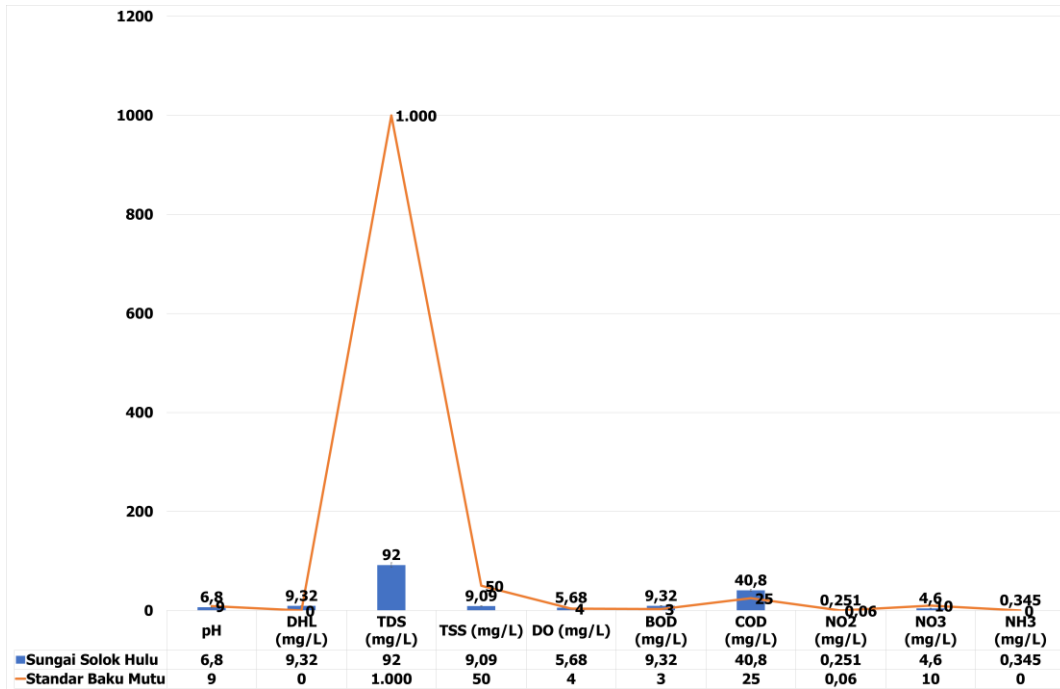
Gambar 2.79
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincih Hulu, Tahun 2022



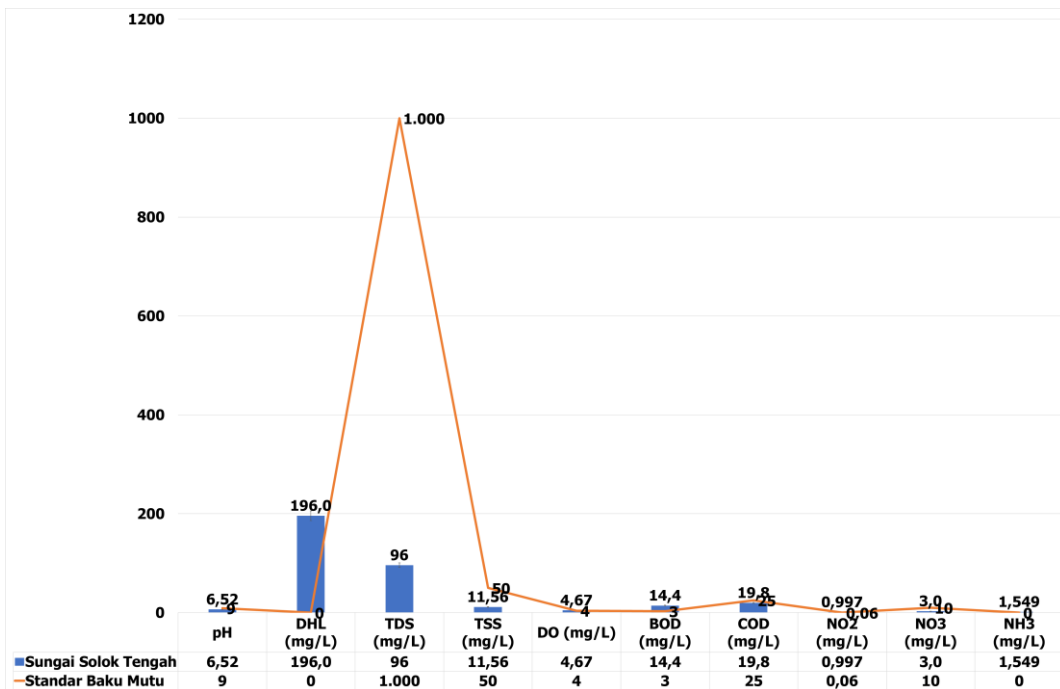
Gambar 2.80
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincih Tengah, Tahun 2022



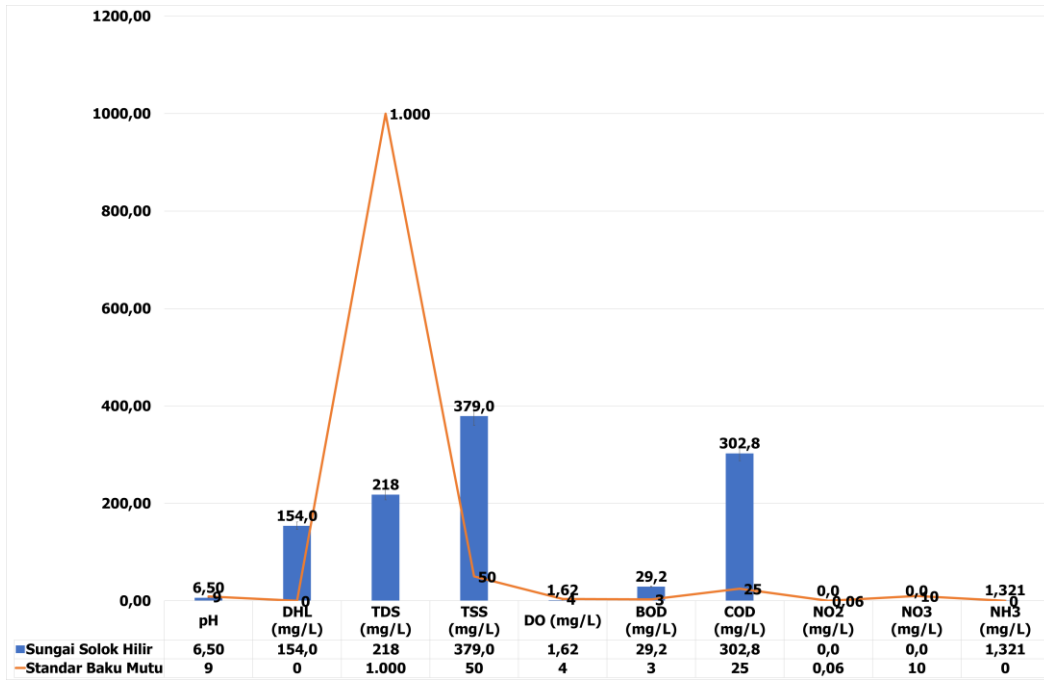
Gambar 2.81
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincih Hilir, Tahun 2022



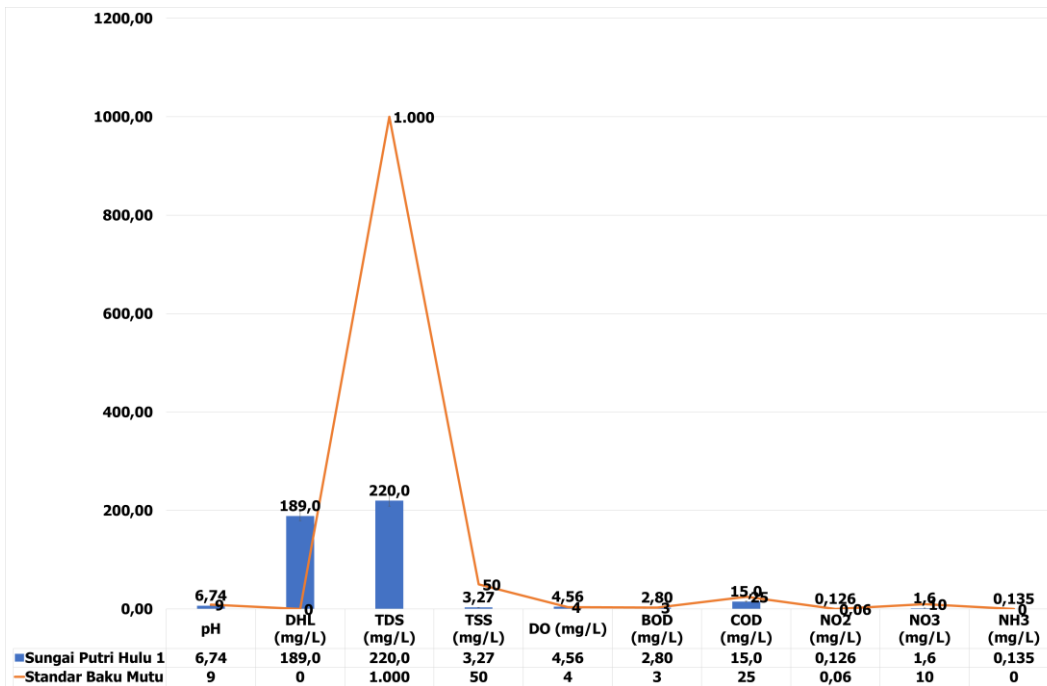
Gambar 2.82
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu, Tahun 2022



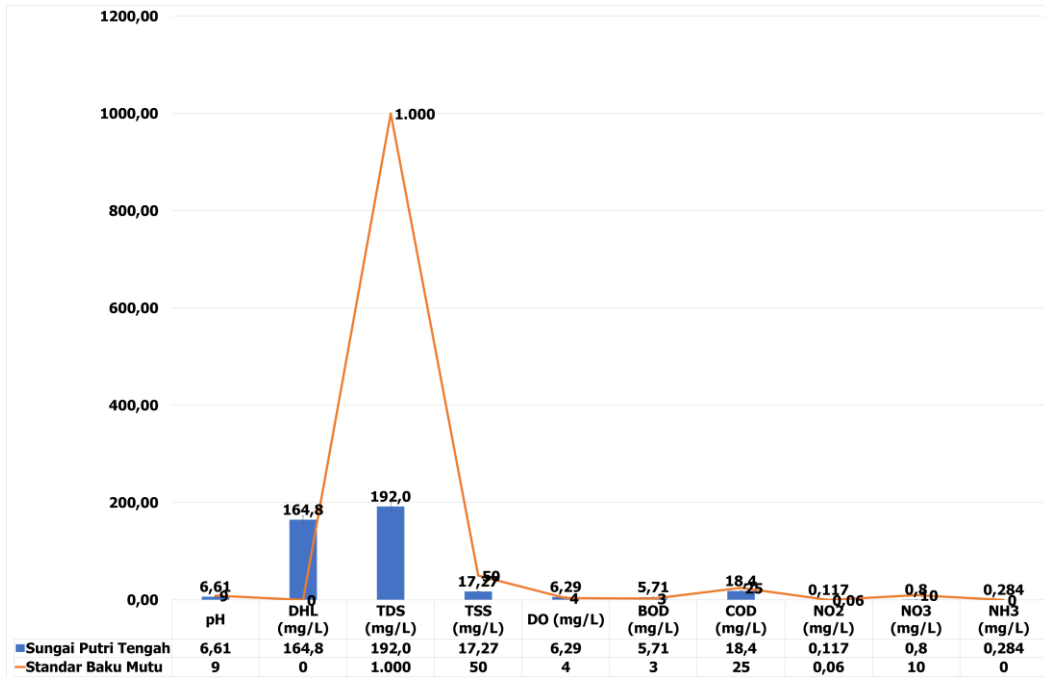
Gambar 2.83
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah, Tahun 2022



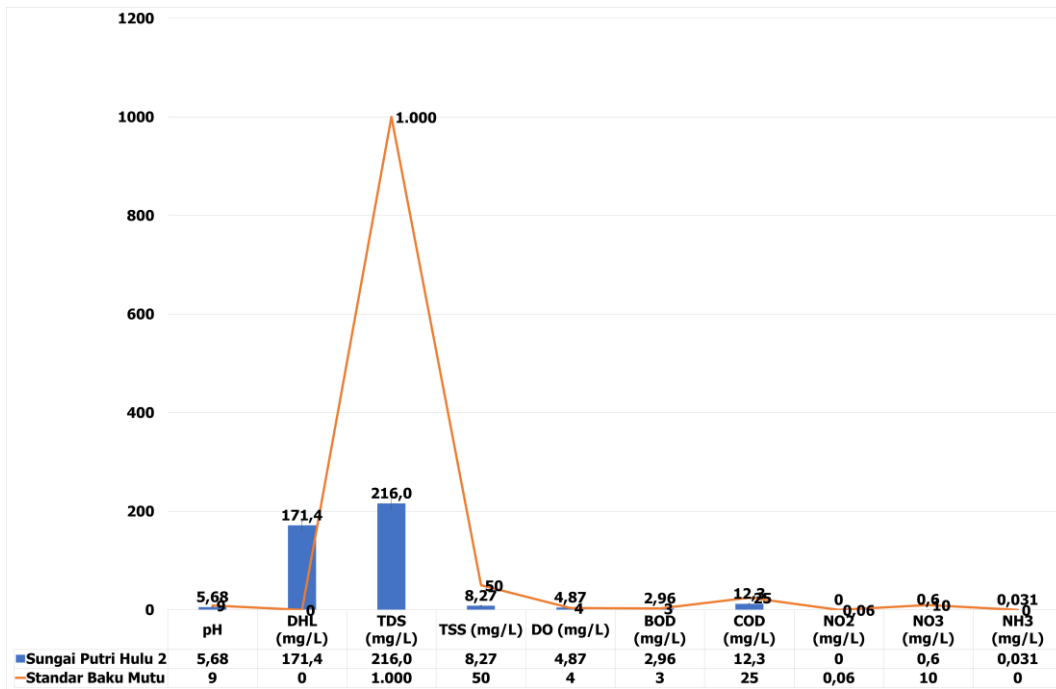
Gambar 2.84
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir, Tahun 2022



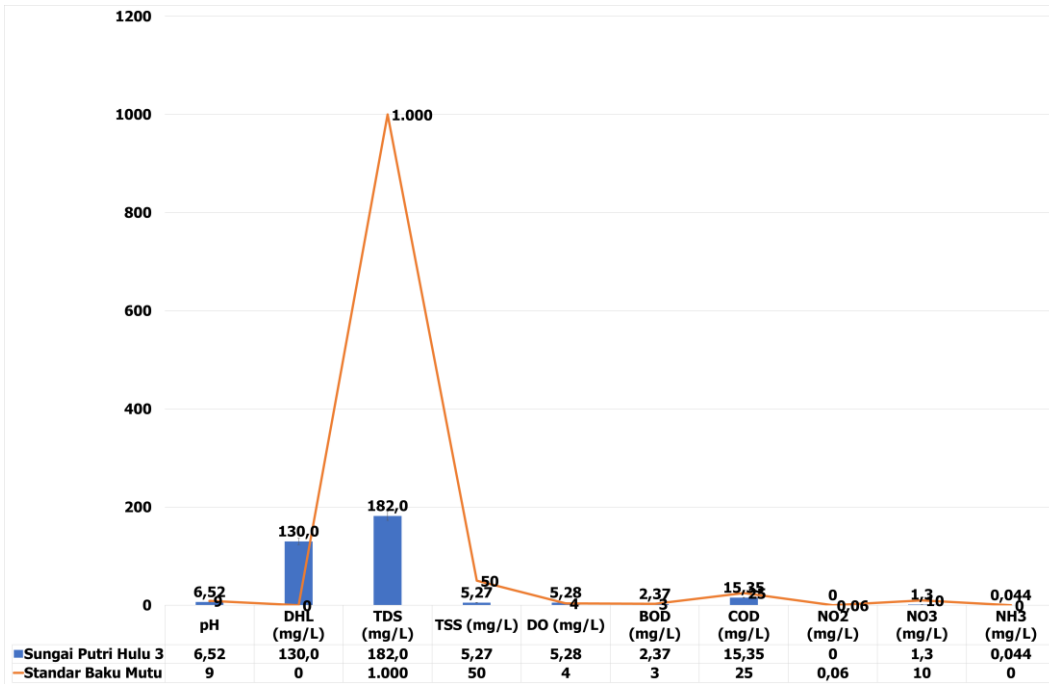
Gambar 2.85
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1, Tahun 2022



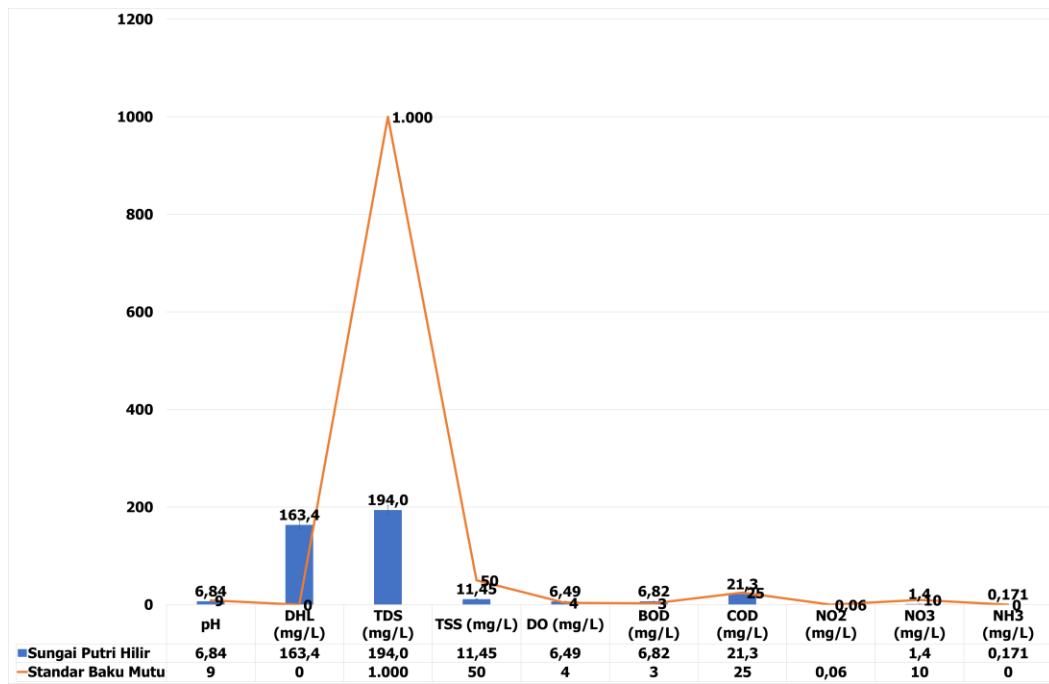
Gambar 2.86
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah, Tahun 2022



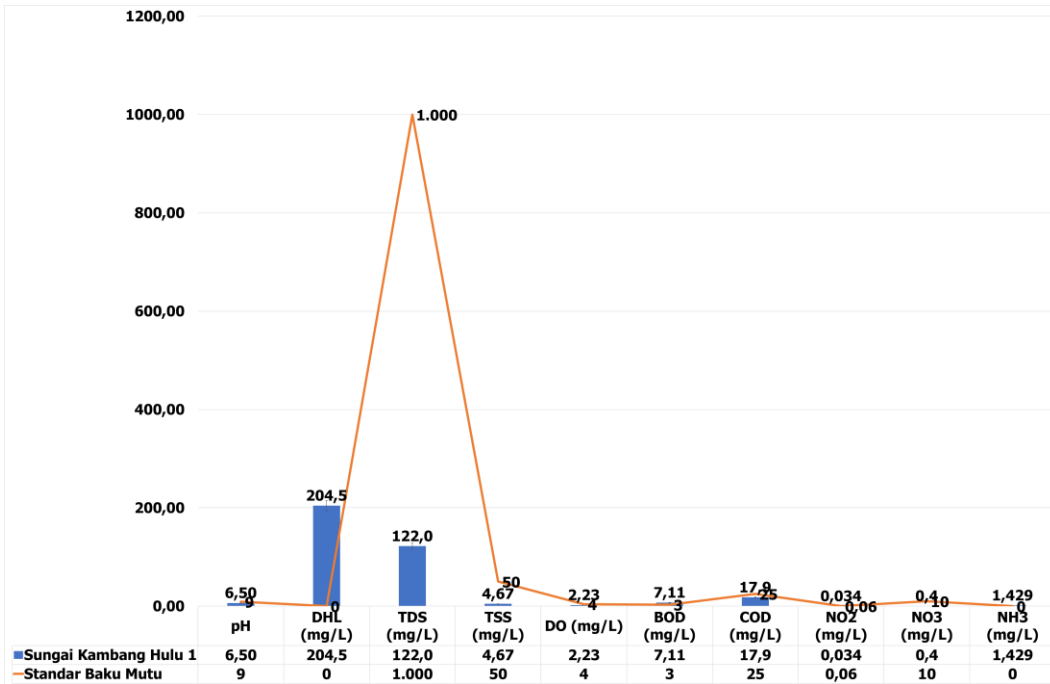
Gambar 2.87
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2, Tahun 2022



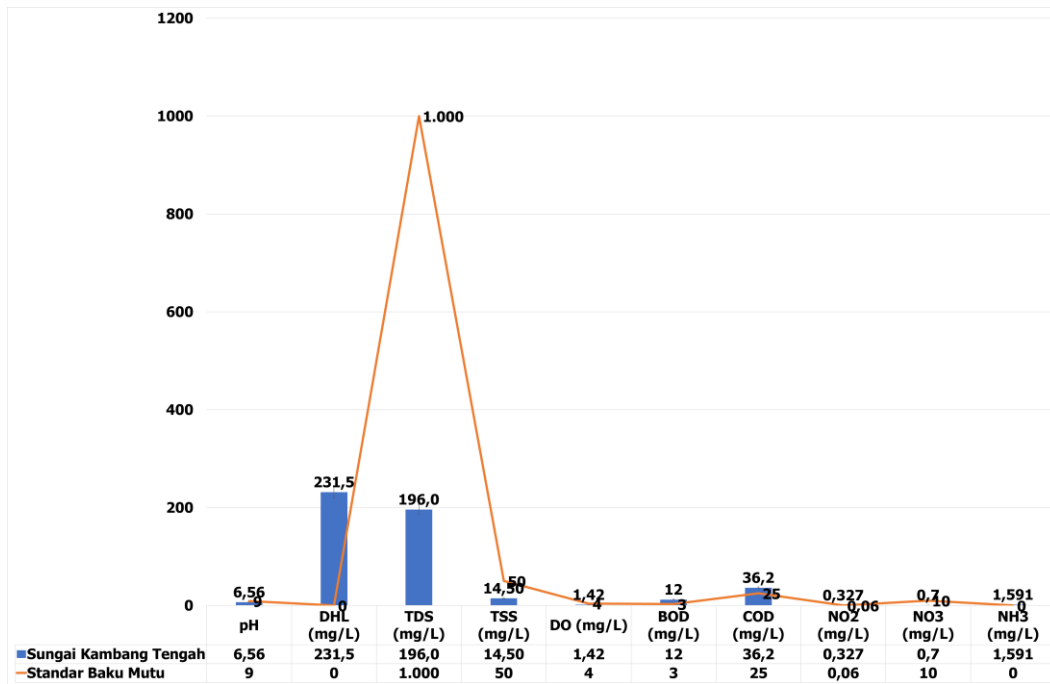
Gambar 2.88
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3, Tahun 2022



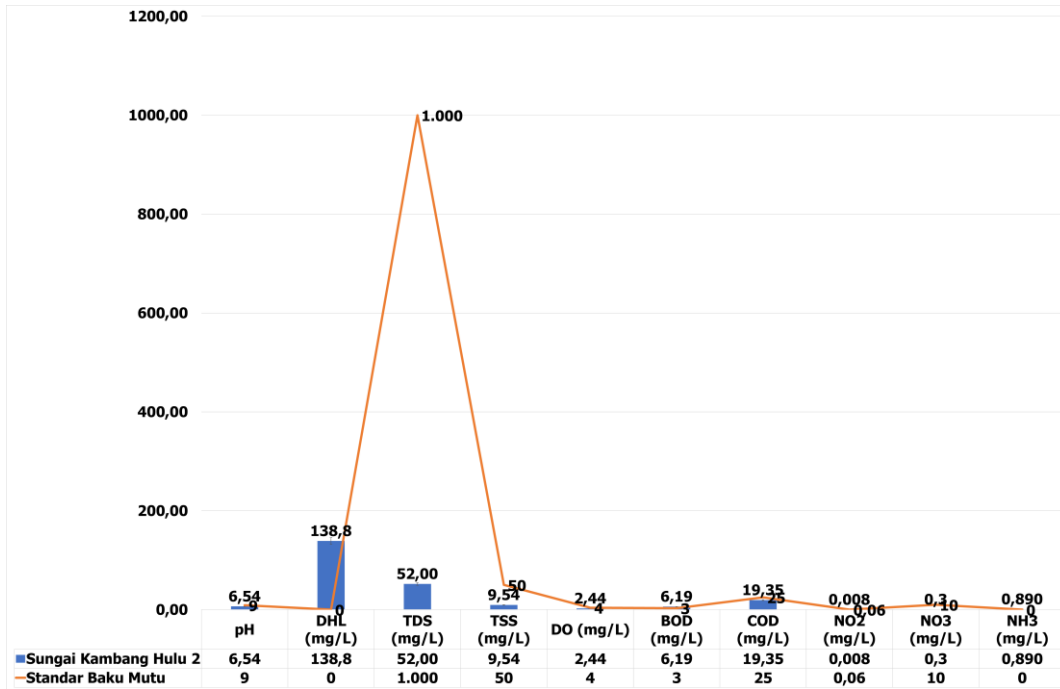
Gambar 2.89
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir, Tahun 2022



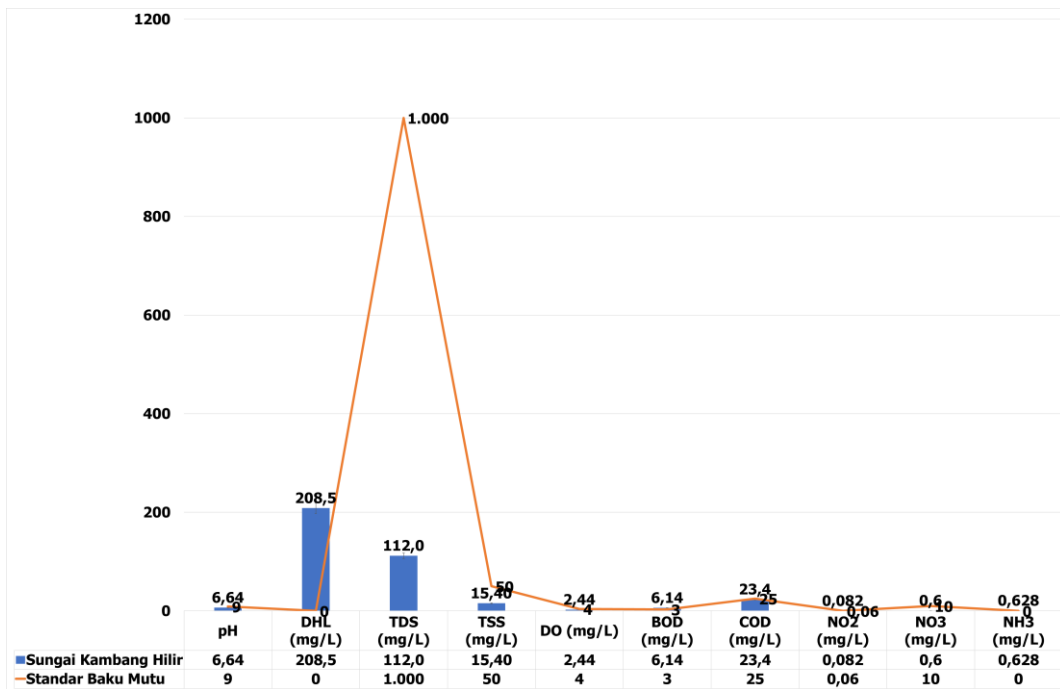
Gambar 2.90
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1, Tahun 2022



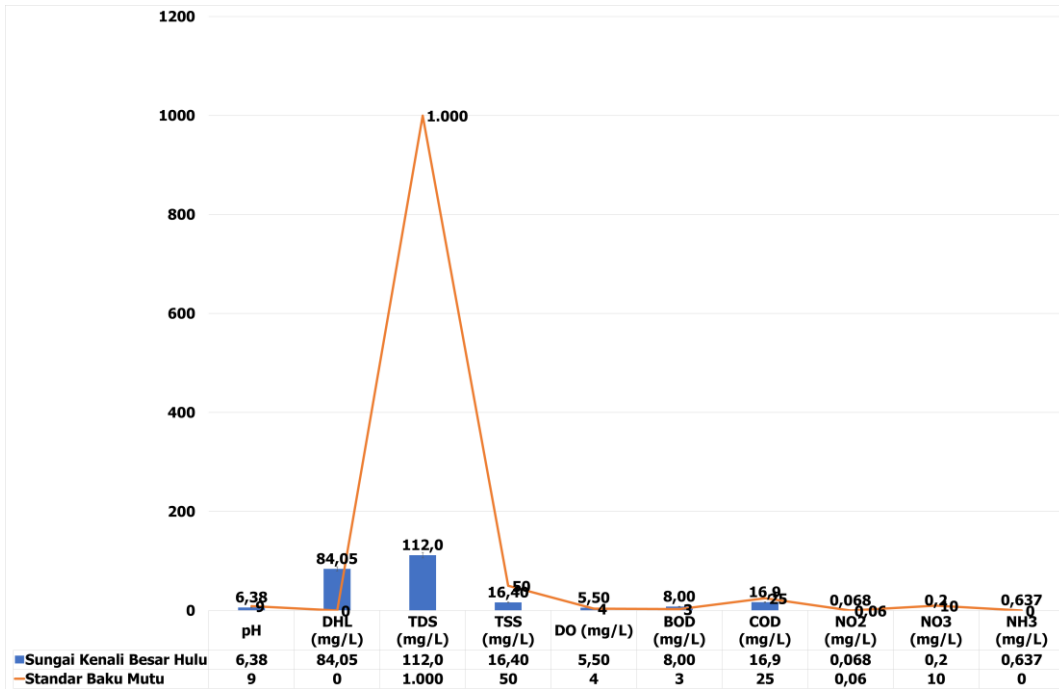
Gambar 2.91
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah, Tahun 2022



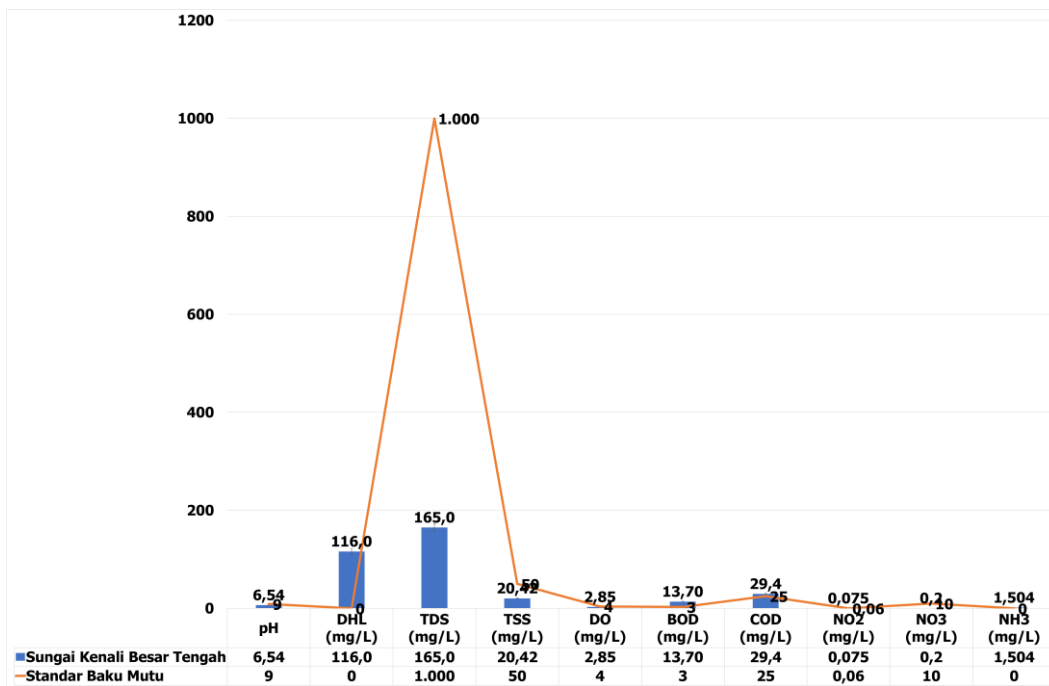
Gambar 2.92
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2, Tahun 2022



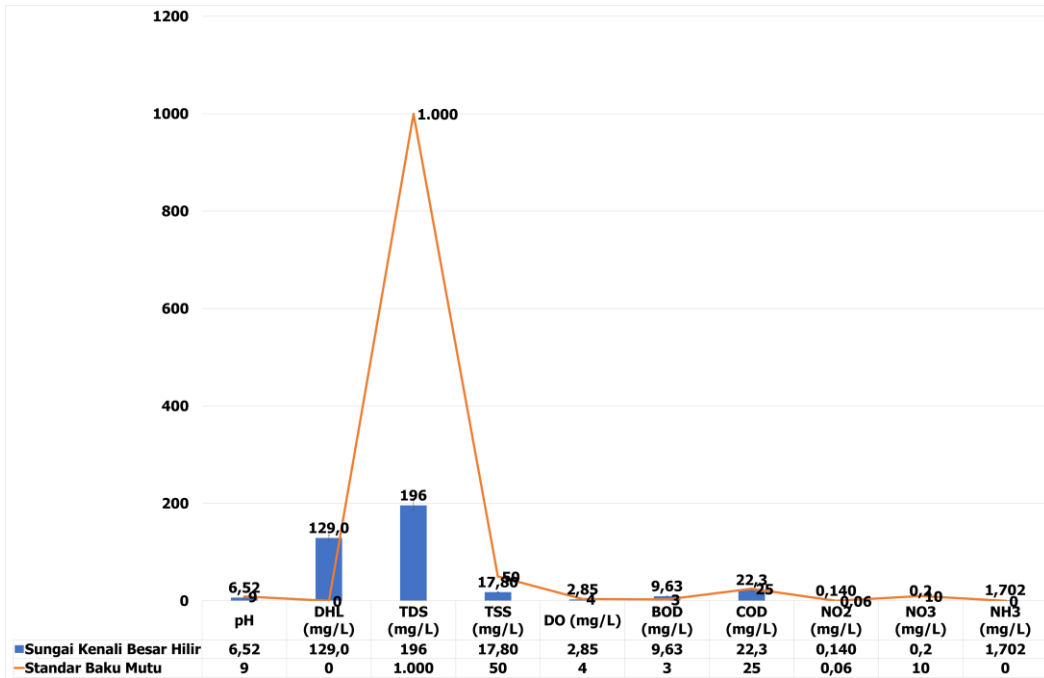
Gambar 2.93
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir, Tahun 2022



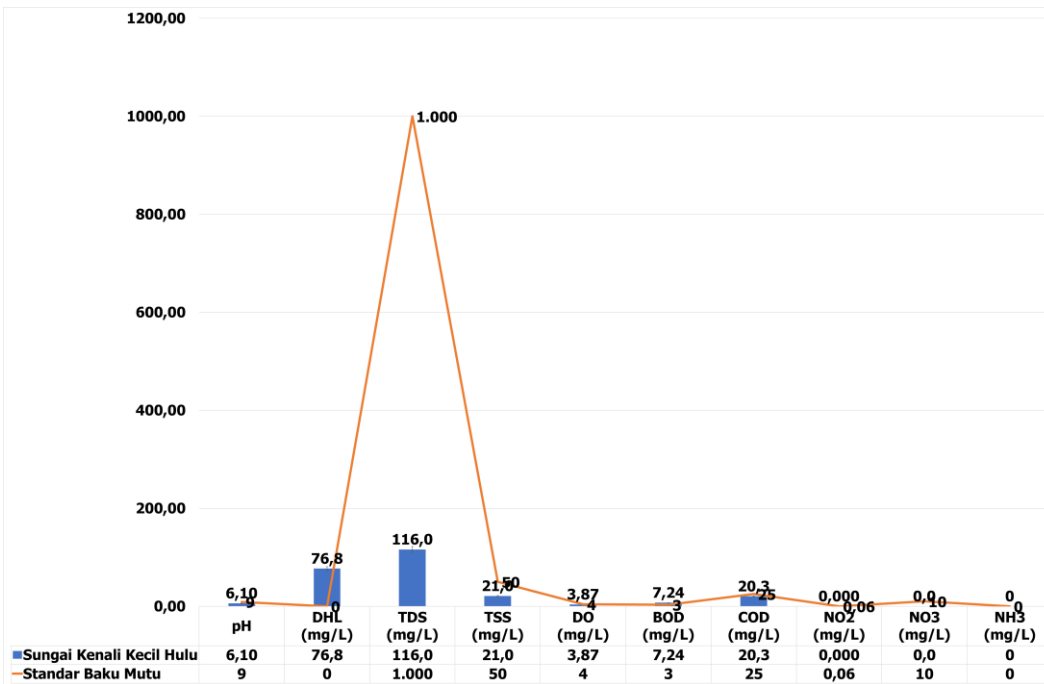
Gambar 2.94
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu, Tahun 2022



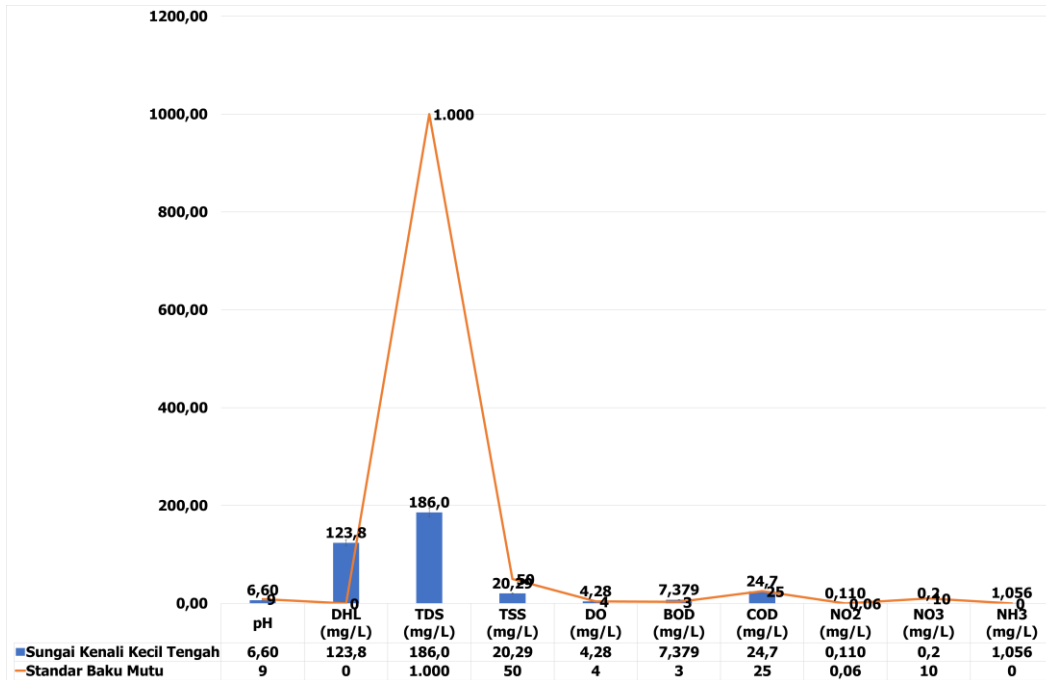
Gambar 2.95
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah, Tahun 2022



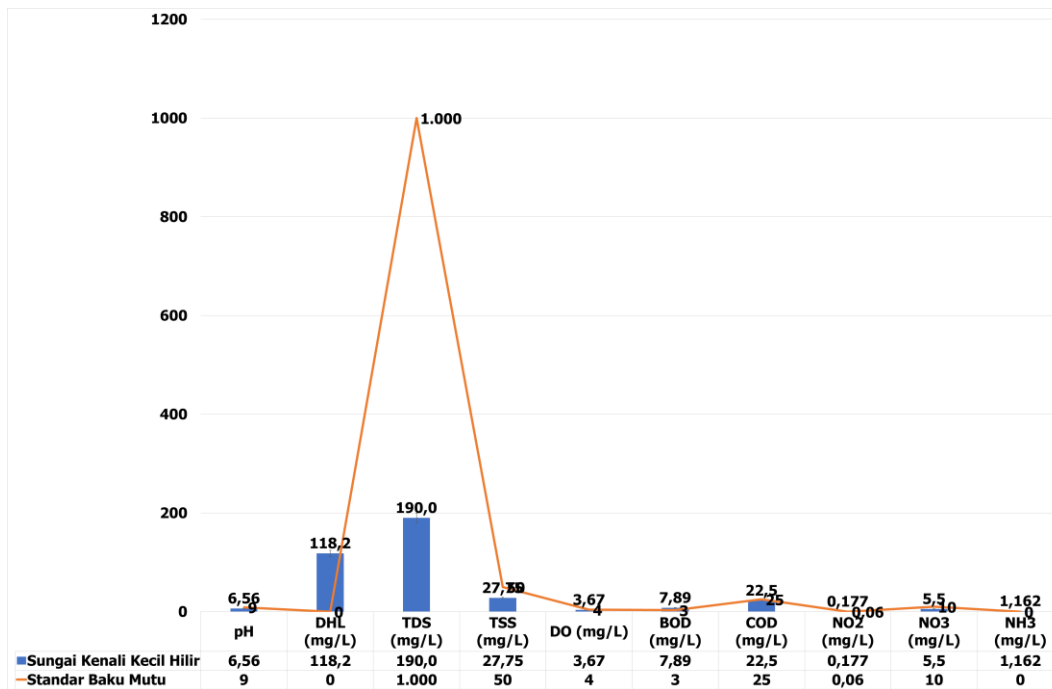
Gambar 2.96
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir, Tahun 2022



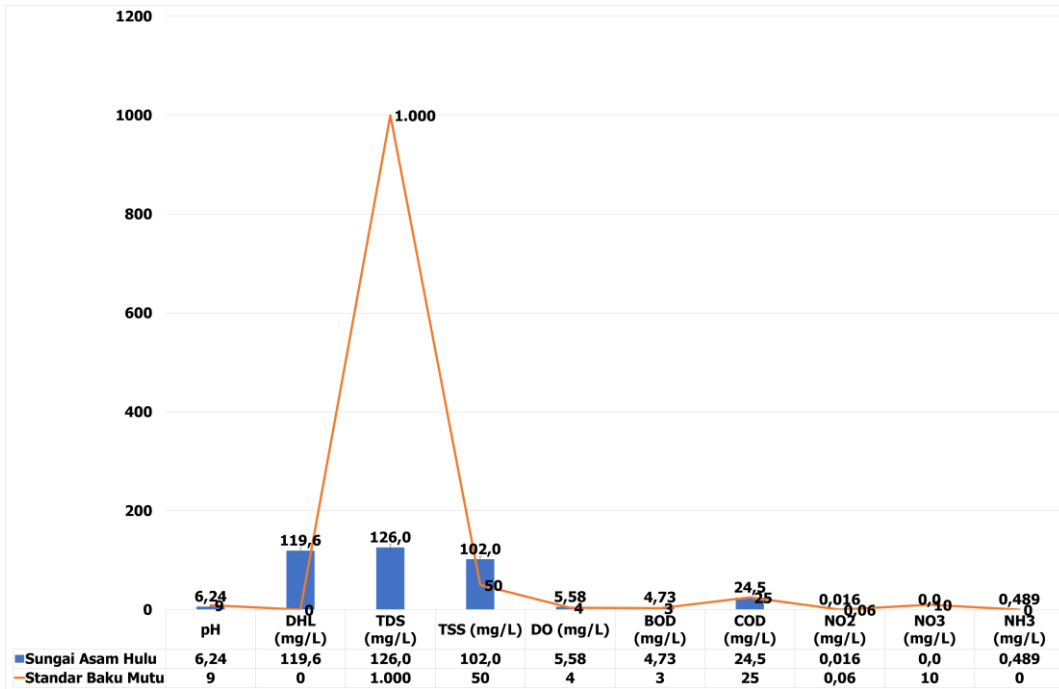
Gambar 2.97
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu, Tahun 2022



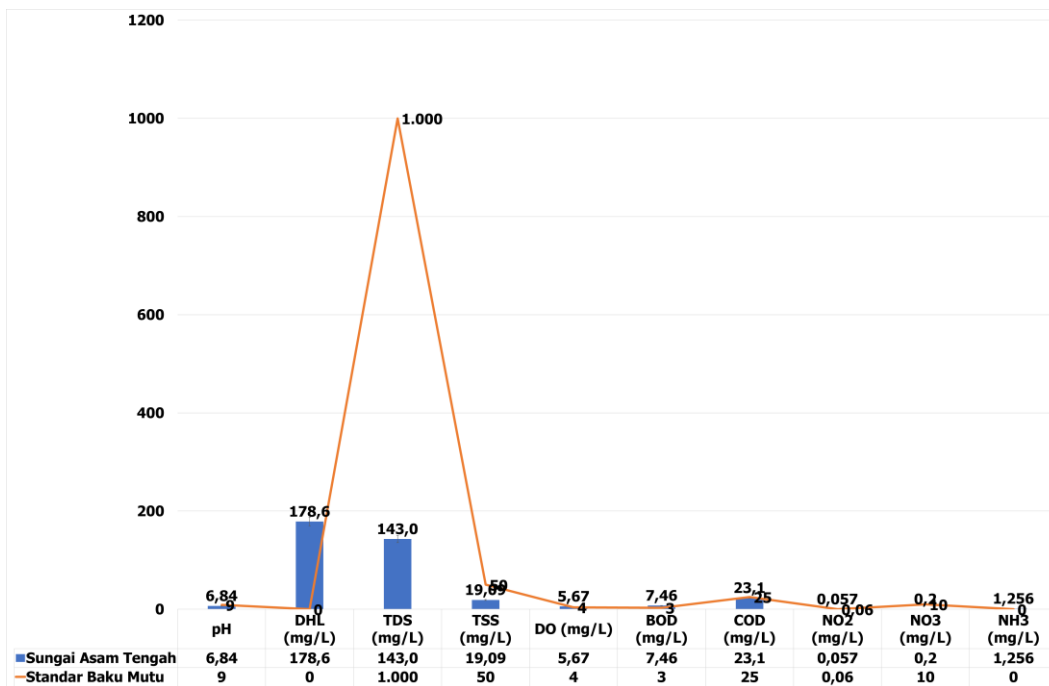
Gambar 2.98
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah, Tahun 2022



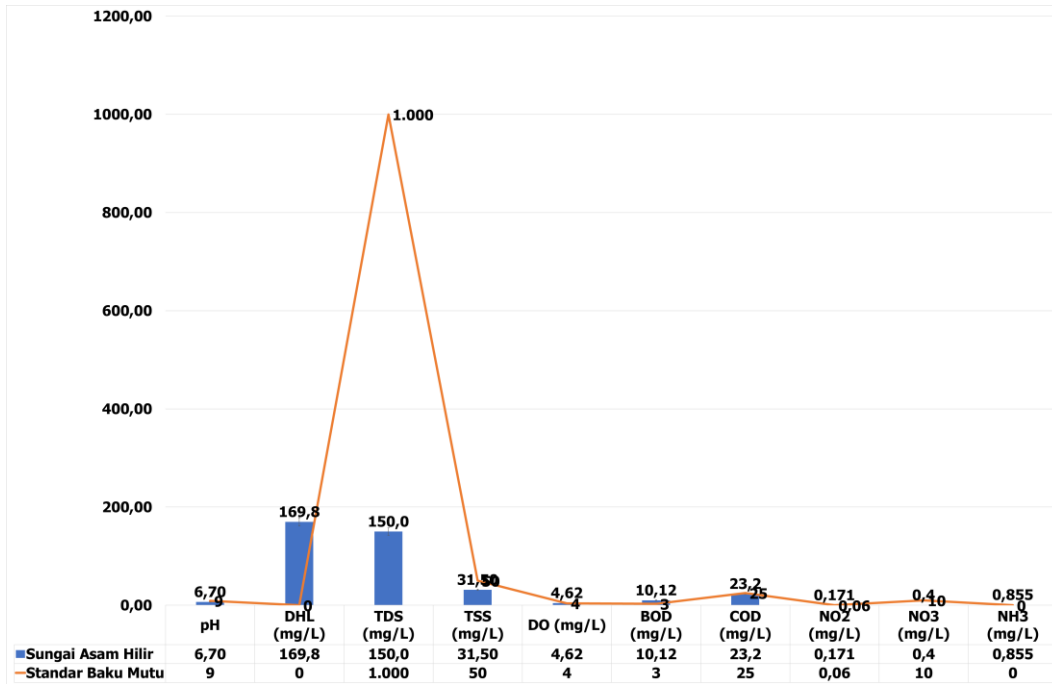
Gambar 2.99
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir, Tahun 2022



Gambar 2.100
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu, Tahun 2022



Gambar 2.101
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Tengah, Tahun 2022



Gambar 2.102
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir, Tahun 2022

Tabel 2.69
Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Anak Air Sungai Tembuku	Perbatasan RT.05 & RT.06, Sukarejo, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hulu	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	31,5/29,2	6,58	335	186	14,57	0,20	77,1	195,2	0,008	-	4,496	2200000	5400000
			Sungai Tembuku Hulu			Mei	30,1/28,8	6,24	-	332,0	27,71	0,91	79,3	463,4	0,030	0,0	0,209	1300000	230000
			Sungai Tembuku Hulu			Oktober	32,8/28,8	6,12	247,5	252	33,6	0,40	65,9	208,3	0,037	0,4	2,058	-	230000
			Sungai Tembuku Hulu			November	32,1/28,0	6,28	286,5	304,0	22,00	0,71	63,2	123,5	0,008	0,3	1,708	240000	540000
			Sungai Tembuku Tengah	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	32,4/29,4	7,02	352,5	210	20,18	0,20	20,9	46,1	0,014	-	4,736	2400000	3500000
			Sungai Tembuku Tengah			Mei	32,3/31,2	6,46	-	158	8,77	2,23	24,0	55,9	0,017	0,2	7,94	230000	330000
			Sungai Tembuku Tengah			Oktober	33,5/29,1	6,50	190,2	186	10	1,62	10,6	34,1	0,215	0,8	1,11	-	230000
			Sungai Tembuku Tengah			November	29,5/28,3	6,65	25,7	200,0	12,57	2,44	13,8	34,0	0,067	0,5	2,998	130000	130000
		Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hilir	01° 35' 06,1"	103° 37' 31,9"	Maret	36,5/31,5	6,79	315,5	122	14,18	0,20	33,7	44,35	0,006	-	6,472	230000	310000
			Sungai Tembuku Hilir			Mei	35,1/30,6	6,30	-	86,00	93,95	2,43	16,4	45,0	0,022	0,5	0,132	1900000	1900000
			Sungai Tembuku			Oktober	34,4/28,9	6,30	96,0	196	29,8	0,40	21,2	48,5	0,029	1,5	0,604	-	790000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Hilir																
			Sungai Tembuku Hilir			November	31,8/29,0	6,77	278,5	208,0	15,67	1,62	8,6	40,0	0,003	0,2	2,4	790000	2400000
2	Anak Sungai Selincah	Jalan Kapten. RB. Siagian, RT 21, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Selincah Hulu	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,2/29,2	6,68	244,5	112	4,53	1,01	9,35	22,0	0,278	-	2,90	490000	490000
			Sungai Selincah Hulu			Mei	35,1/30,4	6,52	-	86,00	6,00	1,62	7,7	29,1	0,004	0,5	4,967	230000	2300000
			Sungai Selincah Hulu			Oktober	33,2/29,2	6,0	3,16	178	5,2	2,02	5,35	24,5	0,199	0,2	4,369	-	23000
			Sungai Selincah Hulu			November	34,5/29,0	6,62	240,5	180,0	12,83	2,23	5,96	21,0	0,073	0,4	2,260	700000	540000
			Sungai Selincah Tengah	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	0,517	-	35000	54000
			Sungai Selincah Tengah			Mei	36,1/31,2	6,52	-	132,0	13,17	1,01	15,2	47,2	0,003	0,003	0,0	13000	17000
			Sungai Selincah Tengah			Oktober	33,6/29,4	6,22	285,5	156	14	1,82	6,47	23,8	0,234	0,234	0,5	-	28000
			Sungai Selincah Tengah			November	31,2/28,4	6,68	180,8	170,0	15,64	3,65	5,34	23,85	0,121	0,121	0,7	33000	49000
		Jalan Raden Pattah - Jembatan Sijenjang, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Selincah Hilir	01° 34' 59,7"	103° 37' 32,8"	Maret	35,9/31,2	6,30	134,6	64	75,6	0,69	12,9	29,2	0,038	-	0,636	30000	30000
			Sungai Selincah Hilir			Mei	37,3/32,1	6,28	-	170,0	16,75	0,61	41,8	71,7	0,019	0,9	2,374	3400	4000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Selincah Hilir			Oktober	37,6/32,8	6,76	29,6	122	81,33	4,45	7,63	14,9	0,373	0,5	2,904	-	2300
			Sungai Selincah Hilir			November	31,8/28,8	6,08	129,0	164,0	42,00	0,81	10,9	31,0	0,003	0,2	0,236	4900	24000
3	Anak Sungai Solok Sipin	Jalan Prof. Dr. Soedewi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hulu	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	36,0/30,0	6,20	16,5	52	31,4	3,33	16,5	15,45	0,367	-	0,590	17000	22000
			Sungai Solok Hulu			Mei	33,1/29,5	6,12	4,87	86	14,5	3,24	4,87	16,4	0,076	1,2	0,330	7900	7900
			Sungai Solok Hulu			November	28,9/27,8	6,8	9,32	92	9,09	5,68	9,32	40,8	0,251	4,6	0,345	-	92000
			Sungai Solok Tengah	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	34,5/31,5	6,60	205,5	66	8,36	0,59	15,2	31,2	0,049	-	3,228	35000	160000
			Sungai Solok Tengah			Mei	35,0/33,1	6,30	-	102	4,31	1,22	10,0	31,4	0,057	1,6	0,247	24000	24000
			Sungai Solok Tengah			November	32,5/28,5	6,52	196,0	96	11,56	4,67	14,4	19,8	0,997	3,0	1,549	-	300000
		Jalan Slamet Riyadi, RT.29, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Maret	35,6/31,6	6,54	240,5	132	535	0,61	22,9	65,8	0,027	-	3,704	350000	170000
			Sungai Solok Hilir			Mei	34,4/32,2	6,34	-	108	50,29	2,03	23,3	38,6	0,07	0,8	3,135	170000	170000
			Sungai Solok Hilir			November	31,1/28,4	6,50	154,0	218	379,0	1,62	29,2	302,8	0,0	0,0	1,321	-	540000
4	Anak Sungai Putri	Jalan Abunjani, Lorong Diamond, RT.16, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin,	Sungai Putri Hulu 1	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"	Januari	30,5/28,5	6,60	190,2	148	6,53	2,92	27,1	45,85	0,570	5,9	1,65	240000	350000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kota Jambi																	
			Sungai Putri Hulu 1			Mei	28,2	6,34	177,4	154	12,18	3,82	12,7	47,1	0,189	1,3	1,906	79000	79000
			Sungai Putri Hulu 1			Oktober	34,6/28,8	5,82	178,4	146	4,33	3,48	10,7	26	0,319	0,9	0,263	-	790
			Sungai Putri Hulu 1			Desember	30,8/28,4	6,74	189,0	220,0	3,27	4,56	2,80	15,0	0,126	1,6	0,135	13000	13000
			Sungai Putri Tengah	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"	Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	-	1,489	35000	54000
			Sungai Putri Tengah			Mei	29,2	6,82	129	170	23,09	5,23	6,26	23,0	0,117	0,7	1,411	35000	35000
			Sungai Putri Tengah			Oktober	32,6/28,8	6,15	166,5	147	70,425	5,66	5,94	39,80	0,337	1,4	0,156	-	33000
			Sungai Putri Tengah			Desember	31,1/28,1	6,61	164,8	192,0	17,27	6,29	5,71	18,4	0,117	0,8	0,284	540000	540000
		Jalan Gotong Royong, RT.26, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 2	01° 36' 53,8"	103° 35' 23,0"	Januari	31,7/28,4	5,64	180,6	170	13,28	4,59	3,43	31,9	0,064	6,2	0,2	3300	3300
			Sungai Putri Hulu 2			Mei	28,0	6,46	130,4	124	4,91	4,43	3,94	15,9	0,011	4,0	0,076	200	200
			Sungai Putri Hulu 2			Oktober	36,7/28,5	5,30	160,7	140	26,36	5,46	3,68	13,7	0,002	1,2	0,056	-	33
			Sungai Putri Hulu 2			Desember	31,4/28,3	5,68	171,4	216,0	8,27	4,87	2,96	12,3	-	0,6	0,031	2400	9200
		Jalan Bungo Tanjung, RT.01, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 3	01° 36' 48,9"	103° 35' 09,1"	Januari	31,9/28,2	5,84	134,6	127	3,88	5,63	2,17	2,8	0,695	6,8	0,202	200	200
			Sungai Putri Hulu 3			Mei	28,2	6,80	127,8	102	1,45	5,64	2,84	19,55	0,018	0,9	0,056	200	200
			Sungai Putri Hulu 3			Oktober	34,3/28,6	6,60	129	110	4,18	5,56	3,22	17,35	0,029	0,8	0,071	-	230
			Sungai Putri Hulu 3			Desember	30,7/28,0	6,52	130,0	182,0	5,27	5,28	2,37	15,35	-	1,3	0,044	2300	3300
		Jembatan Sungai Putri, RT.03/-5,	Sungai Putri Hilir	01° 36' 10,8"	103° 35' 10,1"	Januari	30,9/28,1	6,30	190,8	118	8,15	4,80	15,6	23,95		5,0	0,011	79000	240000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi																	
			Sungai Putri Hilir			Mei	28,4	6,98	129,2	150	9,47	5,64	11,7	19,2		1,6	0,208	160000	160000
			Sungai Putri Hilir			Oktober	34,7/29,1	6,12	164,4	128	15,6	6,06	7,74	19,70		1,3	0,580	-	110000
			Sungai Putri Hilir			Desember	30,1/27,8	6,84	163,4	194,0	11,45	6,49	6,82	21,3		1,4	0,171	230000	230000
5	Anak Sungai Kambang	Jalan Sunan Giri, RT.20, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kambang Hulu 1	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Januari	28,0/27,2	6,96	190,0	130	8,15	2,71	11,0	13,6	0,074	1,9	2,766	350000	350000
			Sungai Kambang Hulu 1			Mei	27,8	6,56	155,2	116	12,57	3,02	9,53	18,9	0,139	2,3	1,274	23000	46000
			Sungai Kambang Hulu 1			Oktober	32,9/28,4	6,10	237,5	180	8,84	2,02	12,4	29,65	0	0,1	1,704	-	41000
			Sungai Kambang Hulu 1			November	33,0/28,4	6,50	204,5	122,0	4,67	2,23	7,11	17,9	0,034	0,4	1,429	240000	350000
			Sungai Kambang Tengah	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Mei	28,6	6,78	172,6	160	11,82	2,42	12,5	34,4	0,350	2,7	0,751	350000	540000
			Sungai Kambang Tengah			Oktober	33,7/28,6	6,44	233,5	172	6,75	1,21	13,2	34,6	0	0,2	2,414	-	240000
			Sungai Kambang Tengah			November	31,9/29,0	6,56	231,5	196,0	14,50	1,42	12	36,2	0,327	0,7	1,591	540000	540000
		Jalan H. Juanda Mayang, Lorong Tegat Sari 1, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kambang Hulu 2	01° 37' 48,2"	103° 35' 04,8"	Januari	27,8/28,5	6,18	161,4	124	7,54	1,88	11,9	21,6	0,041	1,8	3,036	140000	140000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kambang Hulu 2			Mei	28,7	6,76	147,0	118	4,40	4,02	7,47	19,0	0,068	2,3	0,659	110000	140000
			Sungai Kambang Hulu 2			Oktober	32,8/29,2	5,82	139,4	148	8	1,62	14,7	45,0	0	0,2	0,998	-	240000
			Sungai Kambang Hulu 2			November	33,9/29,3	6,54	138,8	52,00	9,54	2,44	6,19	19,35	0,008	0,3	0,890	79000	79000
		Jalan Dr. Siwabesy Jembatan Buluran, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi	Sungai Kambang Hilir	01° 35' 57,9"	103° 34' 39,3"	Januari	29,4/28,2	6,42	195,4	124	5,60	3,75	9,53	12,4	0,267	1,5	4,671	240000	240000
			Sungai Kambang Hilir			Mei	28,4	5,98	194,4	130	4,00	5,23	13,2	18,2	0,303	2,9	0,617	240000	240000
			Sungai Kambang Hilir			Oktober	33,1/28,8	6,44	189,2	162	9,60	3,03	7,78	18,5	0,121	0,5	3,565	-	23000
			Sungai Kambang Hilir			November	31,1/28,8	6,64	208,5	112,0	15,40	2,44	6,14	23,4	0,082	0,6	0,628	240000	240000
6	Anak Sungai Kenali Besar	Jalan Thayib Fahrudin Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hulu	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	30,4/28,0	6,22	103,2	126	51,39	3,45	11,6	21,6	0,067	1,3	0,443	240000	300000
			Sungai Kenali Besar Hulu			Juni	32,0/29,8	6,14	79,0	104	20,6	4,66	11,21	13,4	0,058	1,0	1,042	79000	130000
			Sungai Kenali Besar Hulu			September	33,7/28,9	6,97	95,60	122	25,43	4,46	7,81	13,9	0,010	1,5	0,512	920000	16000000
			Sungai Kenali Besar Hulu			Desember	32,9/28,0	6,38	84,05	112,0	16,40	5,50	8,00	16,9	0,068	0,2	0,637	2300000	2300000
			Sungai Kenali Besar Tengah	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	29,9/27,3	6,30	85,6	118	59,00	3,04	11,9	18,2	0,060	0,3	0,353	110000	170000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kenali Besar Tengah			Juni	31,1/28,5	6,62	115	62	19,0	4,46	9,75	29,3	0,055	0,5	0,346	450000	450000
			Sungai Kenali Besar Tengah			September	34,5/28,6	7,33	99,8	167	45,66	3,04	13,7	18,85	0,008	1,8	0,581	1600000	1600000
			Sungai Kenali Besar Tengah			Desember	31,7/27,2	6,54	116,0	165,0	20,42	2,85	13,70	29,4	0,075	0,2	1,504	13000000	13000000
		Jalan Walisongo, RT. 13 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hilir	01° 36' 06,9"	103° 33' 20,0"	Februari	28,8/26,6	6,52	137,4	182	96,50	2,03	16,8	28,1	0,114	4,3	0,996	540000	540000
			Sungai Kenali Besar Hilir			Juni	32,1/29,5	6,40	121,0	108	18,86	3,65	9,83	22,9	0,046	0,00	2,268	130000	130000
			Sungai Kenali Besar Hilir			September	33,8/28,4	6,56	96,2	74	17,83	4,06	9,15	14,5	0,000	1,2	1,503	240000	540000
			Sungai Kenali Besar Hilir			Desember	36,1/28,4	6,52	129,0	196	17,80	2,85	9,63	22,3	0,140	0,2	1,702	490000	1300000
7	Anak Sungai Kenali Kecil	Jalan Lingkar Barat, RT.31, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hulu	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	31,5/25,0	6,38	98,8	116	11,00	4,16	6,81	12,5	0,005	0,9		1000	5000
			Sungai Kenali Kecil Hulu			Juni	31,2/29,0	6,14	106,4	114	14,89	4,56	5,61	23,1	0,0412	1,5		1700	1700
			Sungai Kenali Kecil Hulu			September	35,1/27,5	6,12	53,2	32	19	5,18	5,32	8,10	0,000	1,1		200	200
			Sungai Kenali Kecil Hulu			Desember	27,8/27,0	6,10	76,8	116,0	21,0	3,87	7,24	20,3	0,000	0,0		1800	1800
			Sungai Kenali Kecil Tengah	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	30,9/28,0	6,38	165,6	176	23,69	2,84	12,8	21,0	0,261	1,8	1,092	160000	160000
			Sungai			Juni	31,1/28,2	6,64	191,4	134	23,10	3,45	9,81	49,7	0,300	1,1	1,291	49000	49000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bin/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Kenali Kecil Tengah																
			Sungai Kenali Kecil Tengah			September	32,3/27,8	6,62	978	76	23,26	5,48	5,86	11,5	0,008	1,2	0,990	150000	150000
			Sungai Kenali Kecil Tengah			Desember	30,9/27,1	6,60	123,8	186,0	20,29	4,28	7,379	24,7	0,110	0,2	1,056	410000	410000
		Jalan Walisongo, RT. 03 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hilir	01° 36' 06,8"	103° 33' 18,4"	Februari	28,5/26,7	6,26	144,2	158	69,38	4,87	17,5	31,1	0,193	2,8	1,446	240000	240000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Juni	32,2/30,0	6,58	156,2	124	19,0	4,79	9,27	34,1	0,225	1,3	0,722	7800	7800
			Sungai Kenali Kecil Hilir			September	34,9/28,4	6,7	112,8	640	21,82	4,06	11,80	17,7	0,008	1,5	0,880	34000	130000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Desember	32,6/28,2	6,56	118,2	190,0	27,75	3,67	7,89	22,5	0,177	5,5	1,162	130000	230000
8	Anak Sungai Asam	Jalan lingkaran Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Asam Hulu	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	30,0/29,4	6,54	146,4	154	64,84	4,46	10,9	34,4	0,006	2,0	0,898	3300	4900
			Sungai Asam Hulu			Juni	30,0/26,6	6,28	143,6	138	28,86	6,53	8,99	25,3	0,150	0,2	1,87	3300	3300
			Sungai Asam Hulu			November	32,0/28,2	7,04	78,0	74	64,0	2,94	10,6	16,0	0,000	0,0	0,212	-	54000
			Sungai Asam Hulu			Desember	29,1/29,0	6,24	119,6	126,0	102,0	5,58	4,73	24,5	0,016	0,0	0,489	13000	13000
			Sungai Asam Tengah	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	31,9/28,0	6,74	273,5	262	19,28	3,25	11,3	22,4	0,228	1,9	3,045	54000	92000
			Sungai Asam Tengah			Juni	32,0/29,8	6,86	350,5	208	7,00	2,43	7,94	24,3	0,352	0,7	5,439	160000	160000
			Sungai Asam			November	31,6/28,0	7,16	146,0	110	20,91	1,62	6,07	20,2	0,045	0,6	1,088	-	160000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Tengah																
			Sungai Asam Tengah			Desember	30,7/27,8	6,84	178,6	143,0	19,09	5,67	7,46	23,1	0,057	0,2	1,256	240000	240000
		Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi	Sungai Asam Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Februari	26,8/26,8	6,52	197,2	220	161,8	1,83	24,0	38,3	0,236	2,4	2,518	240000	350000
			Sungai Asam Hilir			Juni	32,8/30,8	6,74	257,5	168	23,70	3,25	14,30	26,0	0,168	0,2	2,988	49000	49000
			Sungai Asam Hilir			November	32,5/28,3	6,92	182,0	104	11,20	6,92	15,4	25,9	0,224	1,2	1,462	-	920000
			Sungai Asam Hilir			Desember	29,0/27,3	6,70	169,8	150,0	31,50	4,62	10,12	23,2	0,171	0,4	0,855	2300000	2300000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

Tabel 2.70
Kualitas Air Danau di Kota Jambi

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Danau Sipin	Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Muara)	01°35'55,9"	103°34'45,9"	Jan	32,8/29,5	6,17	70,88	89	66,96	4,69	7,14	23,1	0,027	0,5	0,366	450	4900
			Danau Sipin (Muara)			Mar	38,4/30,1	6,62	124,8	116	16,6	7,18	5,435	23,9	0,027	0,6	0,393	4900	4900
			Danau Sipin (Muara)			Jun	35,0/31,0	6,42	107,4	166	17,14	4,04	6,44	28,9	0,013	0,2	0,397	1300	2300
			Danau Sipin (Muara)			Agust	31,1/30,03	6,00	86,2	86	11,45	5,88	4,8	21,9	0,062	0,9	0,146	2300	3300
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane,	Danau Sipin (Non)	01°36'01,6"	103°34'57,6"	Jan	33,1/29,0	6,48	70,29	100	59,50	4,02	5,06	14,7	0,032	1,5	0,332	3400	13000

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Komersil)																
			Danau Sipin (Non Komersil)			Mar	33,5/30,0	6,36	119,6	138	28,5	6,67	5,488	22,3	0,030	0,7	0,326	7900	7900
			Danau Sipin (Non Komersil)			Jun	42,7/31,0	5,82	115	134	29,5	8,18	5,85	32,6	0,01	0,8	0,437	200	450
			Danau Sipin (Non Komersil)			Agust	29,4/29,8	6,00	85,2	116	15,75	6,09	5,27	18,1	0,066	2,1	0,175	4900	7900
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Komersil)	01° 36' 02,8"	103° 35' 19,5"	Jan	33,7/28,2	6,54	112	112	50,00	2,61	7,34	29,4	0,035	0,0	0,493	2200	35000
			Danau Sipin (Komersil)			Mar	33,1/30,1	6,50	134	134	23,33	5,46	7,64	20,4	0,032	2,1	0,488	24000	24000
			Danau Sipin (Komersil)			Jun	37,9/31,0	5,96	134	134	19,00	4,04	5,51	23,35	0,027	1,4	0,558	1700	3300
			Danau Sipin (Komersil)			Agust	32,5/30,2	6,20	106	106	12,73	5,07	4,31	26,1	0,065	2,2	0,182	1300	4900
2	Danau Teluk Kenali	Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Muara)	01°35'17,4"	103°34'03,9"	Jan	34,1/30,2	6,54	65,87	100	53,20	2,82	5,15	35,85	0,045	0,2	0,5	1700	7900
			Danau Teluk Kenali (Muara)			Mar	34,2/31,8	6,87	112,8	112	28,6	6,27	7,43	24,5	0,06	9,3	0,481	15000	15000
			Danau Teluk			Jun	36,0/32,8	6,22	116,6	176	26	4,04	5,38	39,5	0,018	1,2	0,534	2800	2800

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Kenali (Muara)																
			Danau Teluk Kenali (Muara)			Agust	31,6/32,2	6,28	78,6	106	9,85	7,61	6,23	23,5	0,075	0,6	0,090	1300	1300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	01°36'21,0"	103°34'09,9"	Jan	32,9/29,6	6,82	65,48	98	48,80	5,10	5,75	41,9	0,038	1,1	0,391	1700	1700
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Mar	34,6/30,6	6,61	115,0	110	7,8	6,87	6,75	26,45	0,045	7,1	0,353	17000	17000
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Jun	35,0/31,4	6,2	101,0	110	16,4	8,08	5,09	32,1	0,014	1,1	0,134	780	13000
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Agust	32,4/30,4	6,38	80,0	124	11,82	5,88	5,55	23,2	0,082	0,9	0,123	450	2300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Komersil)	01°36'12,9"	103°35'57,5"	Jan	33,4/30,6	6,94	65,38	94	44,40	7,92	5,29	54,2	0,035	1,7	0,288	4900	4900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Mar	35,3/37,1	6,98	114,0	90	8,57	6,47	8,72	28,6	0,042	0,6	0,288	4900	7900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Jun	36,8/31,4	6,4	104,0	102	20	8,79	6,61	32,7	0,017	1,8	0,231	4900	17000
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Agust	32,2/29,4	6,16	79,4	146	10,00	5,28	6,23	20,8	0,074	2,2	0,170	2300	2300
3	Danau Teluk	Kelurahan Olak kemang	Danau Teluk	01°34'36,2"	103°35'56,2"	Jan	33,0/29,6	6,34	41,0	70	12,28	1,04	5,86	27,4	0,000	0,5	0,04	330	330

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	(Muara)																
			Danau Teluk (Muara)			Mar	34,0/32,0	6,52	50,6	72	12,5	8,49	5,0	15,4	0,013	0,6	0,04	18	180
			Danau Teluk (Muara)			Jun	33,7/30,8	5,74	49,0	80	11,5	8,08	5,16	26,4	0,007	0,3	0,220	240	920
			Danau Teluk (Muara)			Agust	36,5/30,8	6,00	42,8	70	9,71	5,48	3,67	14,3	0,01	0,8	0,04	130	230
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Non Komersil)	01°34'38,2"	103°35'49,9"	Jan	32,7/29,0	6,18	40,98	64	11,43	2,82	5,73	14,7	0,013	0,4	0,04	330	330
			Danau Teluk (Non Komersil)			Mar	38/37,2	6,44	53,4	78	8,6	8,69	4,58	17,6	0,01	1,0	0,04	18	20
			Danau Teluk (Non Komersil)			Jun	37,4/30,8	5,88	51,1	70	20	7,28	4,39	28,25	0,014	1,2	0,22	130	240
			Danau Teluk (Non Komersil)			Agust	37,5/30,2	6,09	43,6	72	14,18	4,46	3,48	24,0	0,003	0,5	0,04	230	330
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Komersil)	01°34'40,1"	103°35'541,8"	Jan	33,1/29,7	6,63	40,78	52	11,14	2,08	3,46	39,5	0,000	0,4	0,04	330	490
			Danau Teluk (Komersil)			Mar	34,8/31,8	6,30	52,6	70	8,0	8,69	4,58	14,1	0,009	1,0	0,04	330	300
			Danau Teluk (Komersil)			Jun	37,0/30,2	5,64	51,2	86	15,45	6,87	3,1	26,2	0,024	0,6	0,04	1300	9200
			Danau Teluk (Komersil)			Agust	41,2/31,4	7,20	44,6	66	9,22	6,29	3,31	15,5	0,013	0,4	0,04	7900	7900

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

Tabel 2.71
Kualitas Air Sumur di Kota Jambi

No.	Lokasi Sumur/ Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Bau	TDS	Mangan (mg/L)	Seng (mg/L)	Sianida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Total coliform (jml/100 ml)
			Lintang	Bujur																	
1	Sumur Kawasan Industri	Januari	01°35'44,1"	103°37'29,5"	29,2/27,7	8,28	2	24	Tidak Berbau	140,5	0,392	0,05	0,006	0,005	2	0,3	2,87	0,02	0,32	0,35	-
		April	01°35'44,1"	103°37'29,5"	30,6/29,2	5,86	4	33	Tidak Berbau	272	0,022	0,03	0,001	0,02	7	3,9	0,134	0,02	0	1,92	-
		Juli	01°35'44,1"	103°37'29,5"	31,7/29	6,04	4	5	Tidak Berbau	238	0,014	0,02	0,005	0,002	6	0	0,03	0,04	0,35	3,3	11000
		November	01°35'44,1"	103°37'29,5"	30,4/29,4	6,12	5	12	Tidak Berbau	281	0,016	0	-	0,022	5	5,9	0,1612	0,02	0,44	1,54	180
2	Sumur Kawasan Perkantoran	Januari	01°37'35,5"	103°36'23,0"	32/29,1	7,74	0	4	Tidak Berbau	195	0,096	0,07	0,001	0,002	10	0,7	0,093	0,04	1,05	2,4	-
		April	01°37'35,5"	103°36'23,0"	28,6/27,3	6,18	26	405	Tidak Berbau	220,5	0,086	0	0,001	0	2	0	1,153	0,01	0	3,3	-
		Juli	01°37'35,5"	103°36'23,0"	33,3/27,6	6,42	35	363	Berbau	233	0,114	0	0,009	0,002	2	4,2	0,676	0,07	0,22	3,3	7000
		November	01°37'35,5"	103°36'23,0"	27,5/27,4	6,84	39	394	Tidak Berbau	203,5	0,041	0,01	0,004	0,083	2	2,8	5,184	0	0,7	0,91	54000
3	Sumur Kawasan Pemukiman	Januari	01°39'36,1"	103°36'05,6"	9,14	9,14	0	7	-	360	0,23	0,1	0,014	0,002	6	1,4	0,206	0,206	0,3	3,07	-
		April	01°39'36,1"	103°36'05,6"	29,4/28,7	5,22	0	6	-	335	0,181	0,03	0,002	0,003	2	6,6	0,035	0,035	0,02	2,64	-
		Juli	01°39'36,1"	103°36'05,6"	27,1/27	5,454	1	9	-	132	0,013	0,09	0,003	0,005	3	5	0,011	0,011	0,36	3,3	490
		November	01°39'36,1"	103°36'05,6"	31,7/28,6	4,92	3	8	-	265	0,036	0,19	0,002	0,004	1	10,2	0,1498	0,1498	0,61	1,51	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.

C. Kualitas Udara

Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi, udara tidak kasat mata, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Udara hanya dapat dirasakan dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Peningkatan kebutuhan *supply* oksigen di wilayah kota jambi akibat kualitas udara yang semakin menurun, dengan pantauan terhadap kualitas udara guna mengetahui trend tingkat pencemaranan udara secara *up to date* serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengendalian pencemaranan udara di Kota Jambi. Terkait Kualitas Udara Ambien pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas di wilayah Kota Jambi yang lokasinya mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi Tahun 2022

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
		Latitude	Longitude			
1	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,61583	103,616419	26 APRIL 2022 pukul 09.39 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.13 WIB	4,97	20,58
2	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,3896	103,628226	26 APRIL 2022 pukul 10.02 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.40 WIB	6,86	9,08
3	Perumahan Villa Kenali	-1,645444	103,585694	26 APRIL 2022 pukul 10.42 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 10.14 WIB	5,38	11,66
4	Komplek Walikota Jambi	-1,629584	103,607389	26 APRIL 2022 pukul 09.20 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 08.58 WIB	4,27	12,01
5	Blank Sample				<2,57	<0.41
6	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,58525	103,618416	5 JULI 2022 pukul 08.58 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.51 WIB	5,06	25,38
7	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,636000	103,635694	5 JULI 2022 pukul 09.15 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.07 WIB	6,38	13,01
8	Perumahan Villa Kenali	-1,618444	103,63175	5 JULI 2022 pukul 09.48 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.37 WIB	3,05	12,17
9	Komplek Walikota Jambi	-1,585805	103,61925	5 JULI 2022 pukul 08.40 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.36 WIB	6,4	12,55
10	Blank Sample				<2,57	<0.41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2023.



Gambar 2.103
Alat AQMS di Kota Jambi

Tingginya emisi karbon di Kota Jambi salah satunya dipicu oleh perkembangan kendaraan bermotor milik pribadi yang menggunakan bahan bakar Bensin sekitar 863.607 unit, bahan solar sekitar 47.912 unit dan yang menggunakan bahan bakar gas sekitar 18 unit. Kondisi ini potensial akan terus terjadi jika Pemerintah Kota Jambi tidak mengambil kebijakan dan mendorong hadirnya moda transportasi umum yang berkualitas.

Tabel 2.73
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Sepeda Motor	771.783	771.709	60	14
2	Mobil Penumpang	93.525	80.841	12.684	0
3	Mobil Bus	845	11	834	0
4	Mobil Barang	45.277	11.032	34.241	4
5	Kendaraan Khusus	107	14	93	0
Total		911.537	863.607	47.912	18

Sumber: Samsat Kota Jambi, Tahun 2023.

Tingginya penggunaan bahan bakar minyak tanah, LPG, kayu bakar, bensin dan solar untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan dan rumah tangga yang menyebabkan pencemaran udara. Bahan bakar yang menggunakan LPG pada industri kecil sebanyak 34.912 buah, dan yang menggunakan LPG pada rumah tangga sebanyak 298.464 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	LPG	Briket	Kayu Bakar	Bensin	Solar
A	Industri :								
1	Industri Kecil	-	-	-	34.912	-	-	-	-
2	Industri Sedang	-	-	-		-	-	-	-
3	Industri Besar	-	-	-		-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	298.464	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	333.376	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi, Tahun 2023.

E. Pengelolaan Persampahan

Kota Jambi, dengan jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2022 adalah 619.553 jiwa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan atau 68 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 0,70 kilogram per orang per hari, maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 433.687,10 kg/hari. Dengan timbulan sampah terbesar ada Kecamatan Alam Barajo sebesar 79.202,20 kg/hari, sedangkan timbulan sampah terkecil ada di Kecamatan Pasar Jambi yang hanya sebesar 7.802,90

kg/hari. Untuk lebih detail mengenai data timbulan sampah dikota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Massa Sampah (Kg /Orang /Hr)	Total Sampah (Kg/Hari)	Perlakuan				Massa Sampah Terangkut Ke Tpa (Kg/Hari)	Massa Sampah Terolah Di TPS 3R dan Bank Sampah/Hari (Kg/Hari)	Massa Sampah Terkurangi (kg/Hari)	Sampah Yang Terkelola/Hr (Kg)	Persentase Sampah Yang Terkelola (%)
					TPA	Tps3r /Bs	Pembatasan Kantong Belanja	Tanpa Akses					
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8	9	10 = 5*6	11 = 5*7	12=5*8	13=10+11+12	14=(13/5)*100
1	Kota Baru	83.381	0,7	58.366,70	75%	5%	0,10%	19,90%	43.775,03	2.918,34	58,37	46.751,73	80,10%
2	Alam Barajo	113.146	0,7	79.202,20	73%	7%	0,10%	19,90%	57.817,61	5.544,15	79,20	63.440,96	80,10%
3	Jambi Selatan	57.515	0,7	40.260,50	73%	5%	0,10%	21,90%	29.390,17	2.013,03	40,26	31.443,45	78,10%
4	Paal Merah	108.182	0,7	75.727,40	73%	4%	0,10%	22,90%	55.281,00	3.029,10	75,73	58.385,83	77,10%
5	Jelutung	59.744	0,7	41.820,80	80%	1%	0,10%	18,90%	33.456,64	418,21	41,82	33.916,67	81,10%
6	Pasar Jambi	11.147	0,7	7.802,90	91%	6%	0,20%	2,80%	7.100,64	468,17	15,61	7.584,42	97,20%
7	Telanaipura	49.720	0,7	34.804,00	76%	7%	0,10%	16,90%	26.451,04	2.436,28	34,80	28.922,12	83,10%
8	Danau Sipin	43.734	0,7	30.613,80	72%	1%	0,10%	26,90%	22.041,94	306,14	30,61	22.378,69	73,10%
9	Danau Teluk	13.009	0,7	9.106,30	70%	1%	0,05%	28,95%	6.374,41	91,06	4,55	6.470,03	71,05%
10	Pelayangan	13.050	0,7	9.135,00	70%	2%	0,05%	27,95%	6.394,50	182,70	4,57	6.581,77	72,05%
11	Jambi Timur	66.925	0,7	46.847,50	75%	4%	0,10%	20,90%	35.135,63	1.873,90	46,85	37.056,37	79,10%
Jumlah		619.553		433.687,10					323.218,59	19.281,07	432,37	342.932,03	79,07%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi 2023.

Berdasarkan Komposisinya timbulan sampah di Kota Jambi terdiri dari 2 Komposisi yaitu sampah Organik dan sampah Anorganik. Sampah Organik merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah di Kota Jambi, timbulan sampah yang dihasilkan oleh komposisi ini sebesar 95.030,09 m³/hari atau sebesar 61,9 % dari total timbulan sampah. Sedangkan sisanya merupakan komposisi timbulan sampah An Organik. Berikut ditampilkan data komposisi timbulan sampah di Kota Jambi.

Tabel 2.76
Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Komposisi Sampah	Prosentase (%)	Jumlah Timbulan Sampah M ³ /Hari
1	ORGANIK	61,9	95.030,09
2	AN ORGANIK	38,1	
	a. Plastik	12,3	18.883,20
	b. Kaca	1,2	1.842,26
	c. Logam	0,3	460,57
	d. Limbah berbahaya	0,2	307,04
	e. Kertaskardus/karton	7,2	11.053,58
	f. Kain	2,1	3.223,96
	g. Karet	0,6	921,13
	h. Tulang belulang	0,1	153,52
	h. Lain-lain	14,1	21.646,59
	Jumlah	100,0	153.521,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Tahun 2023.

1) Sistem dan Infrastruktur

Kebijakan prasarana dan sarana persampahan dalam Rencana Induk ditinjau dari pengembangan wilayah berdasarkan RTRW adalah:

- a. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Perencanaan sistem persampahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok kebijakan, yaitu: peningkatan layanan cakupan persampahan, dan perubahan pola sistem TPA menjadi *Sanitary Landfill*.

Saat ini, tengah dilakukan proses peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo dari sistem open dumping menjadi *Sanitary Landfill* yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, dan

juga sedang dibangun *Waste to Energy* (WTE) yang berlokasi di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.

Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertugas dalam hal pengumpulan sedangkan untuk pengangkutan sampah terutama dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

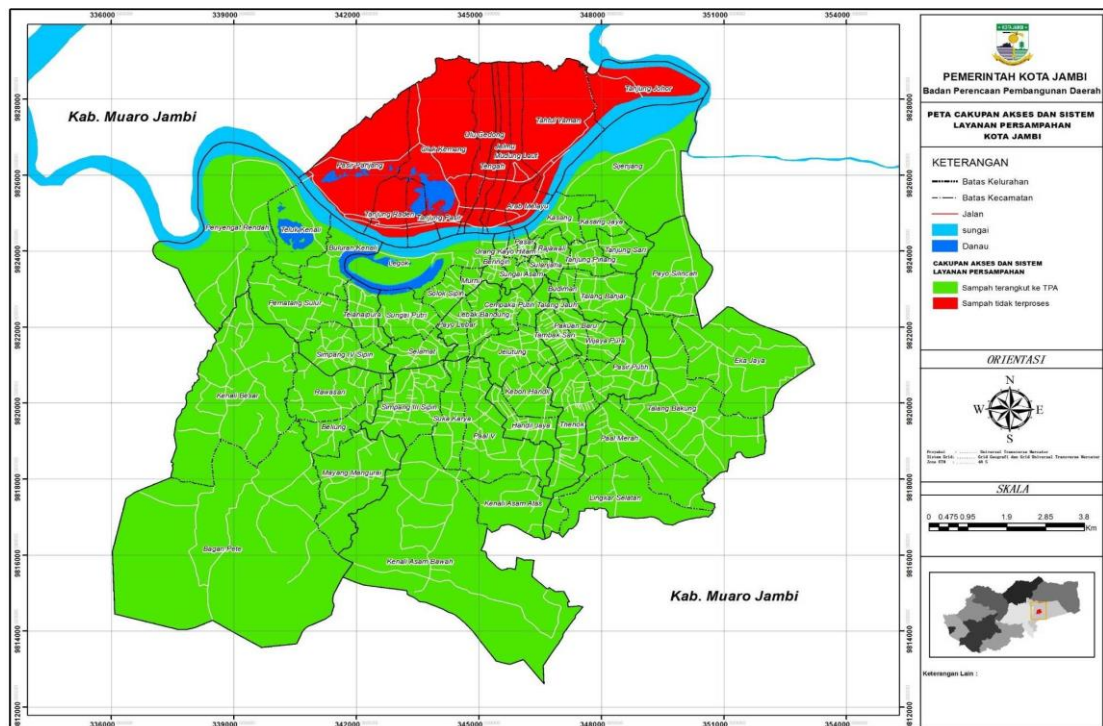
2) Kelembagaan dan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi sesuai dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru; Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan persampahan karena ditangani oleh 2 (dua) OPD dimana tugasnya merupakan satu kesatuan. Peraturan terkait pengelolaan sampah berupa peraturan mengenai retribusi sampah dan kebersihan, secara khusus peraturan mengenai pengelolaan sampah belum ada.

Kendala operasional yang terjadi adalah dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tugas dan fungsi Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Sementara peralatan berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi masih berupa penyediaan sarana pewadahan sampah di sumber sampah (seperti tong sampah pada sekolah/perkantoran) dan melakukan pemilahan sampah oleh kolektor sampah yang sekiranya memiliki nilai ekonomis. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi berupa penyediaan sarana pewadahan sampah untuk kebutuhan rumah tangga, mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dan melakukan pemilahan sampah.



Gambar 2.104
Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan
Persampahan Kota Jambi

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, dilaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 442.317 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk yang memiliki KTP-el telah mencapai 99,03%. Kondisi ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,68%

Tahun 2022 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 5.805 bayi dengan jumlah bayi lahir 7.080. Kondisi ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	229.944	254.387	7.998	5.900	5.805
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	614.329	616.359	8.286	6.131	7.080
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	446.304	437.164	444.205	450.989	446.641
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	427.041	218.832	443.049	450.376	442.317
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	95,68%	50,06%	98,74%	99,86%	99,03%
6.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	281.998	286.265	287.910	290.067	293.268
7.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	90.755	123.449	152.370	184.130	216.112

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2023.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.78
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	73	73	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	73	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
7.	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	310	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: DPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2023.

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok. Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salah satunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.79
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,3	2,4	2,01	2,08
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	0,41 : 0,59
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73.50	61.06	61.06	55,20	59,52
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67.513	66.948	66.833	4.295	7,780*
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	69.99	59.31	59.31	42,50	55,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2023.

2.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	2	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	746	796	151	63	220
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	138	21	140	63	157
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	700	60	140	100	200
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	76%	80%	85%	90%	92%
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan quadrill (%))	61%	-	69,69%	90%	92%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	2.292	2.218	10.000	2.794	2.627
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)		--	24	17	16
7.	Jumlah ATCS (unit)	5	3	6	7	1
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	1.243	841	658	369	509
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	455	457	202	364	560
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	53	45	31	44	51
	b. Luka Berat	1	1	0	1	2
	c. Luka Ringan	723	661	291	502	666
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun dari tahun 2018 dimana jumlah 1.241 kasus hingga 2021 sebanyak 369 kasus namun meningkat di tahun 2022 menjadi 509 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran

masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi telah tinggi.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.81
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	34,14	22,43	10,70	9,30	12,59
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	504.657	248.445	77.048	55.800	64.200
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	0,34	0,17	0,10	0,10	0,10
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	0,99	0,97	0,90	0,91	0,94
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	81	113	60	28	22
	b. Mobil Bus	Unit	813	617	458	354	293
	c. Mobil Barang	Unit	28.700	25.664	30.438	33.510	22.717
	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	62	70	60	25	22
	b. Mobil Bus	Unit	489	498	395	287	158

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	c. Mobil Barang	Unit	18.928	20.707	23.838	20.660	24.210
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	20	30	30	20
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	-	-
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah			-	-	-
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan

informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *egovernment*, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*Maturity Level*) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti:

Tabel 2.82
Nilai Indeks Kematangan SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 35 Indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2022 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,79 (Baik).

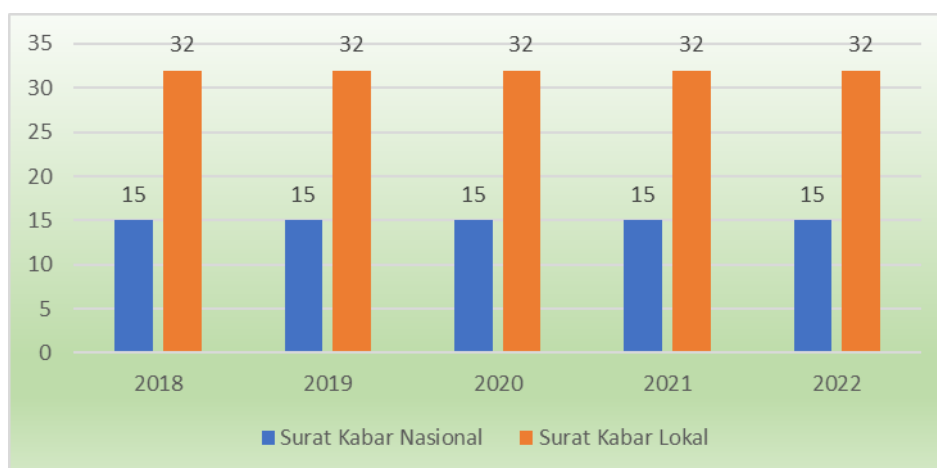
Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (*media online*); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.83
Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	28	40	40	43	43
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	51,85	74,07	74,07	79,63	79,63
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (<i>media online</i>).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.105
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan karena tidak bertambahnya siaran TV baik nasional maupun lokal. Masifnya perkembangan internet membuat perkembangan TV/Radio mengalami stagnasi.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.106
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Jambi

2.3.2.11 Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2022 koperasi aktif berjumlah 220 unit, jumlahnya tetap sama dengan tahun lalu. Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasanya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.107
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, dimana pada tahun 2018 terdapat 10.763 unit meningkat menjadi 60.000 unit tahun 2022. Hal ini membuktikan kalau UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukti tetap bisa bertahan saat pandemi.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan dimana hingga tahun 2022 UMKM yang telah memiliki perizinan/sertifikat sebanyak 10.763 unit, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9.887 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan tahun 2022 sebanyak 225 atau 0,0209% pelaku UMKM telah mendapatkan kesempatan mengikuti pameran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 105 UMKM.

Tabel 2.84
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang dibina)	Unit	10.763	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	10.763	12.847	35.145	48.496	60.000
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0078	0,0088	0,0088	0,0097	0,0209
		Unit	95	95	95	105	225
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	5 kel	102 kel
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	539	1.200	6.517	9.887	10.763
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	77,61	49,00	50,39	50,39	52,51

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah klub olahraga (buah)	30	218	218	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	30	32	2	1	4
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	30	35	40	46	62
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	4	8	7

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2023.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi, bahan minuman dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berdasarkan Hukum Engel (*Engel Law*) bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 total konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.86
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah
Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,00	57,40	60,00	59,14	57,36
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	27,45	29,08	28,92	30,81	33,46
ADHK 2010 (JutaRp)	19,20	19,95	19,66	20,48	21,09
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	1,05	2,43	-2,75	1,83	1,83
Perkapita	2,51	3,89	-1,42	4,16	3,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yaitu 27,45 persen pada tahun 2018 menjadi 33,46 persen pada tahun 2022 menurut Atas dasar Harga Berlaku. Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan yaitu 19,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,09 di tahun 2022.

Pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 16.145 milyar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 20.730 milyar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010).

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi rumahtangga berkisar antara 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,16 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada pengeluaran perkapita di Kota Jambi, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Makanan, Minuman, dan Rokok	44,20	44,62	43,68	43,99	44,64
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,08	25,81	28,83	29,77	30,11
Aneka Barang dan Jasa	12,15	12,64	13,75	13,17	13,99
Pakaian, Alas Kaki dan tutup kepala	3,33	3,27	2,94	2,49	2,80
Barang Tahan Lama	-	-	5,49	5,23	3,41
Pajak, pungutan dan asuransi	-	-	3,58	4,51	4,65
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	-	-	1,73	0,84	0,39
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d 2022, nampak pada pengeluaran perkapita perkomoditas di Kota Jambi, dimana konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,20 pada tahun 2018 dan 44,64 Pada tahun 2022.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, barang tahan lama dan sebagainya.

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

2.4.2.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2022 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Aksebilitas Daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

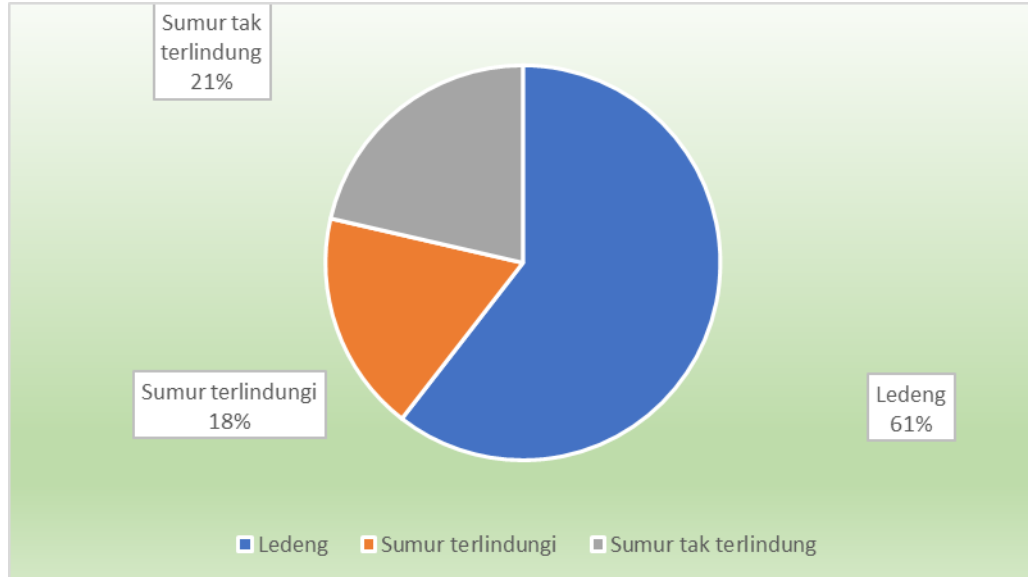
Tabel 2.88
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (KM)	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



Gambar 2.108
Sumber air bersih

Tabel 2.89
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ledeng (Perpipaan)	164.489	237.858	85.820	86.982	86.990
2.	Sumur Lindung	40299	60.734	23.183	25.132	26.012
3.	Sumur Tidak Terlindung	34144	37.385	29.506	30.756	31.820
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	337.604	459.993	138.509	142.870	142.917
5..	Jumlah Rumah Tangga	557.435	688.113	144.281	145.786	145.824
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	60,56	66,85	96	98	99

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 488.187 pelanggan. Adapun pada tahun 2022, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 238.165. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.109
Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	OSS	-	-
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	OSS	-	-
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	-	-
4.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	-	-
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 Hari Kerja	22	Tergantung Ukuran Luas Bangunan
6.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR)	28 Hari Kerja	11	Tergantung Ukuran Reklame
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	12	Tergantung jenis usaha
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS	-	-

Sumber : DPMPSTSP Kota Jambi, 2023.

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 320.380.000.000 atau tercapai sebesar 92,20% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 301.796.809.124 selain pajak daerah terdapat retribusi dimana pada tahun 2022 sebesar Rp. 50.544.550 atau tercapai target sebesar 79,57% atau sebesar Rp. 40.216.623.270. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.91
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah					
	Target	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000	297.860.000.000	320.380.000.000
	Realisasi	215.444.433.999	256.028.625.688	216.815.393.479	244.726.978.039	301.796.809.124
	Persentase	105,87%	105,76%	93,43%	82,16%	94,20%
2	Junlah Retribusi					
	Target	44.012.000.000	45.066.647.000	36.618.000.000	55.312.900.000	50.544.550.000
	Realisasi	40.389.059.087	38.541.261.596	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270
	Persentase	91,77%	85,22%	110,55%	93,73%	79,57%

Sumber: BPPRD, BPKAD Kota Jambi, 2023.

c. Angka Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi pada tahun 2022 hanya 1 yaitu demonstrasi ekonomi. Berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Demonstrasi Politik	6	-	-	1	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	-	5	2	2	1
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	1	-	-	-
Jumlah		6	6	2	3	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi, 2023.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

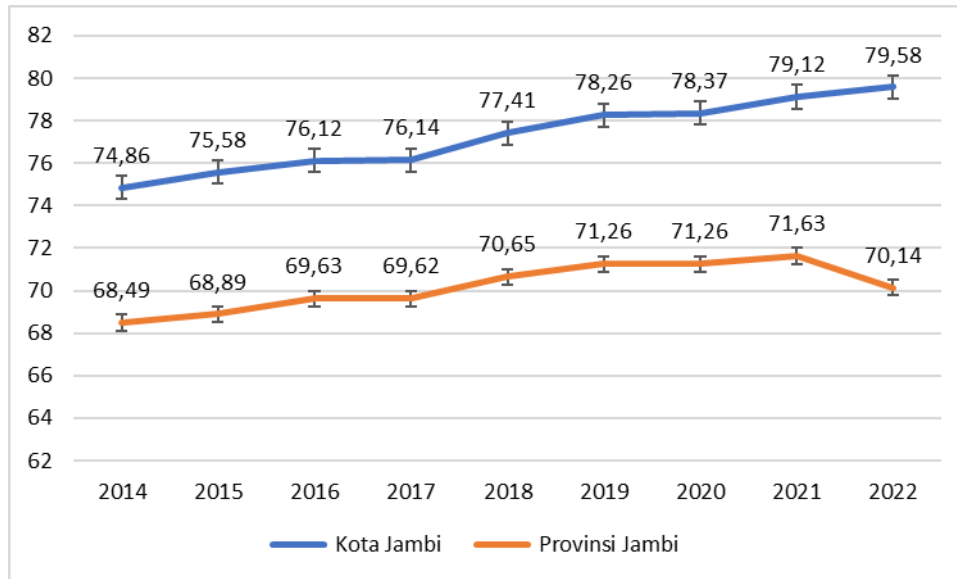
Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Mulai Tahun 2014, telah dipakai IPM metode baru sesuai dengan rekomendasi PBB. Perbedaan metode baru dengan metode lama ini adalah dimensi pendidikan dimana angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas.

IPM Kota Jambi pada tahun 2014 sampai 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Dibandingkan dengan Provinsi Jambi, capaian IPM Kota Jambi selalu lebih tinggi. IPM Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,58 lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi yaitu 70,14. Nilai IPM Kota Jambi lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM di Kota/Kabupaten Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93
Indek Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	68,45	68,89	69,67	69,68	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	67,25	67,15	67,86	67,86	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	67,67	68,1	68,79	68,73	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	67,99	68,05	68,91	68,7	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muara Jambi	66,12	66,66	67,58	67,55	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjab Timur	60,86	61,12	61,86	61,88	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjab Barat	64,22	65,03	66	65,91	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	67,33	67,29	68,04	68,05	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	68,08	68,34	68,73	68,77	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
Kota Jambi	74,86	75,58	76,12	76,14	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58
Kota Sungai Penuh	73,67	73,03	73,38	73,35	74,67	75,36	75,42	75,7	76,17
Provinsi Jambi	68,49	68,89	69,63	69,62	70,65	71,26	71,26	71,63	70,14

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.

Gambar 2.110
Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM
Provinsi Jambi

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD KOTA JAMBI TAHUN 2005-2025

2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025 yaitu “Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”. Visi tersebut mengarah pada kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun dapat mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa yang penduduknya religius dan berbudaya luhur. Religius mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang beragama. Berbudaya berarti kemuliaan moral, etika dan menjamin keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama.

Dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, diharapkan pembangunan diarahkan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk industri kecil, menengah dan besar sehingga dapat menjadi pusat perdagangan barang dan jasa. Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi juga memiliki peran sebagai pusat berbagai

kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 diwujudkan melalui misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksanaan pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.

9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui Kerjasama regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan yang tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Untuk pelaksanaan evaluasi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, BAPPEDA Kota Jambi melakukan penghimpunan dan telaah dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi;
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Jambi; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sampai satu tahun sebelum pelaksanaan evaluasi.

Terhadap dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan/penelitian, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dengan sumber-sumber data lain yang tervalidasi.

Melalui hasil penghimpunan dan telaah terhadap RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Jambi Periode 1, 2, 3 dan 4 maka selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja RPJPD pada akhir periode atau dalam hal ini satu tahun sebelum evaluasi yaitu tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Makro (IKM) Kota Jambi.

I. RPJMD Kota Jambi Periode 1 (2008-2013)

Dalam RPJMD Kota Jambi 2008-2013, terdapat 4 (empat) misi, 9 (sembilan) tujuan dan 46 (empat puluh enam) sasaran. Tujuan yang termuat adalah; (1) Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Kota Jambi yang religius adalah membenahi dan menertibkan regulasi (2) Menjadikan masyarakat Kota Jambi yang religious dan berbudi pekerti luhur (3) Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa serta menjaga ketahanan pangan masyarakat dengan mengutamakan sumber daya dan potensi daerah (4) Menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang mampu mendukung aktivitas masyarakat (5) Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (6) Mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel (7) Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi (8) Mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel (9) Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut terdapat 46 (empat puluh enam) sasaran. Alat ukur yang dipergunakan untuk menilai hal tersebut antara lain penurunan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Pada prinsipnya alat ukur tersebut sejalan dengan Indikator Makro yang pencapaiannya dalam Periode 1 sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi mencapai 75,47. Nilai IPM Kota Jambi pada akhir periode RPJMD ke-1 mencapai 74,21 atau mengalami penurunan 1,26. Penurunan ini lebih disebabkan adanya metode perubahan penghitungan IPM. Pada penghitungan model lama, indikator yang dipergunakan adalah angka melek huruf dan PDRB Per kapita. Selain itu penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan pencapaian yang rendah di suatu dimensi pengukuran dapat ditutupi capaian tinggi di dimensi yang lain. Sejak tahun 2010, metode penghitungan IPM berubah dengan mempergunakan Angka harapan Sekolah dan Produk Nasional Bruto Per kapita. Metode penghitungan aritmatik diganti dengan metode penghitungan geometrik. Pada saat itu, IPM Kota Jambi sebesar 72,23. Artinya sejak perubahan metode penghitungan pada tahun 2010 hingga akhir periode yaitu tahun 2013 terjadi peningkatan IPM sebanyak 1,98 poin.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2008, angka kemiskinan di Kota Jambi sebesar 11.63 %. Pada tahun 2013, Angka kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9.96 %. Artinya terdapat penurunan tingkat kemiskinan 1.67 poin dalam rentang waktu 2008 – 2013. Penurunan angka kemiskinan di Kota Jambi dalam periode 1 RPJMD terjadi konstan setiap tahunnya dengan pengecualian pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan. Angka kemiskinan terendah pada RPJMD periode 1 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9.27 %.

c. Angka Pengangguran

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan salah satunya diukur dari tingkat pengangguran atau angka pengangguran. Dalam RPJMD periode 1, tingkat pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 7.13 %. Pada tahun 2013,

tingkat pengangguran mencapai 7,44 %. Terdapat kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,31 poin dari kondisi awal. Tingkat pengangguran terendah dalam RPJMD Periode ke-1 adalah pada tahun 2011 sebesar 3,60 % dan pada tahun 2012 sebesar 4,89 %. Terkait tingkat pengangguran yang rendah pada tahun 2011 dan 2012 berhubungan dengan booming komoditi tambang Batubara dan komoditi perkebunan karet yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan selama dua tahun tersebut. Tingkat pengangguran yang cenderung naik meski kecil pada akhir RPJMD periode 1, menunjukkan bahwa kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja masih belum maksimal.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter paling umum untuk melihat perkembangan suatu wilayah. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,14 %. Pada akhir tahun RPJMD periode 1, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 8,50 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada periode hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,67 % dan sebelumnya 7,79 % pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa pada RPJMD Periode 1, kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mengalami peningkatan pertumbuhan terjadi di Kota Jambi.

e. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok di tengah masyarakat. Ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan menggunakan koefisien gini atau lebih dikenal sebagai rasio gini dengan skala antara 0-1. Semakin besar rasio gini menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2011, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,30. Pada akhir periode RPJMD 1, tahun 2013, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,34.

f. PDRB Per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. RPJMD Periode 1, pada tahun 2008 PDRB Per kapita Kota Jambi sebesar Rp. 14.772.762,22. Pada akhir RPJMD periode 1, tahun 2013, Pendapatan Per Kapita Kota Jambi mencapai Rp. 22.182.674,00.

II. RPJMD Kota Jambi Periode 2 (2013-2018)

RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 atau periode 2 memuat 5 (lima) misi, mengedepankan 6 (enam) prioritas pembangunan, memuat 11 (sebelas) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran. Adapun 11 (sebelas) tujuan tersebut yaitu: (1) Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (2) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman (3) Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan (4) Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah (5) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata (6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan (7) Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama (8) Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja (9) Peningkatan Kesejahteraan Gender di Semua Aspek Pembangunan (10) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) (11) Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal. Untuk mengetahui pencapaian RPJMD Kota Jambi 2013-

2018 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Makro pada kurun waktu periode kedua RPJPD Kota Jambi 2005-2025 yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

RPJMD Periode 2 berlangsung dari tahun 2013-2018. Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi sebesar 74,86. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi mencapai 78,26. Sejak dilakukannya perubahan metodologi penghitungan, pada periode ke-2 RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 terjadi peningkatan IPM sebesar 3,4 poin atau ekuivalen dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,68 dalam pencapaian IPM Kota Jambi.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2013, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9,80 %. Pada akhir RPJMD periode 2 atau tahun 2018, Angka Kemiskinan Kota Jambi berada di kisaran 8,49 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Kemiskinan di Kota Jambi adalah sebesar 9,10 %. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2013 dan 2015 belum berhasil untuk menurunkan Angka Kemiskinan namun pada 3 (tiga) tahun terakhir dalam periode tersebut terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar 8,5 %. Angka Pengangguran pada tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode 2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebesar 5,55 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Pengangguran di Kota Jambi mencapai 6,55 %. Kinerja penurunan Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,68 %.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal tahun RPJMD Kota Jambi 2013-2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi menyentuh angka 8,50 %. Tahun 2018 atau tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode 2, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,30 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,43 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada

tahun 2013 sebesar 8,50 % dan terendah pada tahun 2017 sebesar 4,68 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2013, ketimpangan pendapatan di Kota Jambi yang digambarkan melalui koefisien gini atau gini rasio mencapai 0,34. Tahun 2018, gini rasio Kota Jambi ada pada angka 0,33. Artinya terjadi keberhasilan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi dalam periode 2, RPJPD Kota Jambi tahun 2013-2018.

f. PDRB Per kapita

Tahun 2013, PDRB Per Kapita Kota Jambi sebesar Rp. 26.546.800,00. Pada akhir RPJPD periode 2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018, Pendapatan Per kapita menyentuh angka Rp. 31.264.700,00. Selama kurun waktu 2013-2018 terdapat peningkatan PDRB Per kapita setiap tahunnya. Kinerja peningkatan PDRB Per Kapita terjadi pada tahun 2016 dan 2018.

III. RPJMD Kota Jambi Periode 3 (2018-2023)

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat 5 (lima) misi dan 6 (enam) tujuan. Tujuan yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu: (1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun (2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (3) Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (4) Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (5) Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (6) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,

Indeks Pembangunan Gender, Kriteria Kota Layak Anak, Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Persentase Penduduk Miskin.

Adapun capaian Indikator Makro dalam kurun waktu penyelenggaraan RPJMD 2018-2023, hanya diuraikan sampai tahun 2022 sebagaimana ketentuan evaluasi terkait RPJPD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023. Pencapaian indikator makro Kota Jambi diuraikan seperti di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2018 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Periode 3 dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi adalah 77,41. Pada tahun 2022, IPM Kota Jambi telah mencapai 79,58. Dalam kurun waktu 2018-2022, IPM Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif. Secara akumulasi terdapat pertumbuhan IPM sebesar 2,17 poin dibandingkan posisi IPM awal pada tahun 2018.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 8,49 %. Tahun 2022, Angka Kemiskinan di Kota Jambi menyentuh 8,33 %. Selama Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020, trend Angka Kemiskinan Kota Jambi cukup terpengaruh. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 9,02 % dan merupakan persentase tertinggi selama pandemi terjadi. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2022 berhasil menekan penurunan sebesar 0.69 poin atau menjadi 8,33 %.

c. Angka Pengangguran

Tahun 2018, angka pengangguran Kota Jambi mencapai 6,41 %. Tahun 2022, angka pengangguran Kota Jambi menyentuh angka 8,33. Masih terkait dengan Pandemi Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor perekonomian, angka pengangguran di Kota Jambi sempat menyentuh 10,49 % dan 10,66 % pada tahun 2020 dan 2021. Tingginya angka pengangguran pada tahun dimaksud dikarenakan banyak sektor usaha yang tutup dan tak mampu bertahan di tengah pandemi.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,30 %. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,36 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi juga mengalami tekanan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan luar ruangan, banyaknya pelaku dunia usaha yang tak bisa bertahan dan mensiasati pandemi dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sempat terdeapresiasi atau mengalami penurunan hingga -3,96 % pada tahun 2020. Seiring waktu pada tahun 2021, sejalan dengan program pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi kembali mengalami apresiasi positif sebesar 3,94 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi tergambar melalui gini rasio sebesar 0,33. Tahun 2022, gini rasio di Kota Jambi mencapai 0,36. Peningkatan gini rasio tersebut menunjukkan bertambahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dalam Kota Jambi. Salah satu utamanya adalah efek dari pelambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memukul sektor perekonomian di Kota Jambi.

f. PDRB Per kapita

Pada tahun 2018, PDRB Per kapita Kota Jambi berada di kisaran Rp. 31.264.700,00. Pada tahun 2022, PDRB Kota Jambi mencapai Rp. 31.921.081,00. Terdapat peningkatan PDRB Per kapita pada akhir tahun Periode RPJMD 2018-2023 dibandingkan dengan tahun awal tahun periode. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan salah satunya dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 dan mulai melandai pada tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pelambatan perekonomian.

2.5.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Uraian hasil capaian RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 secara umum menunjukkan adanya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pokok dan implementasi kebijakan. Capaian-capaian tersebut menjadi dasar untuk

menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian-capaian tersebut maka disusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan. Dan mengacu pada Permendagri Nomo 86 Tahun 2017.
2. Perlu dipertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah antara lain berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata/kalimat, tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja pada setiap pentahapan RPJPD.
3. Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.
4. Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan.
5. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.
6. Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2045.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Analisis Proyeksi kependudukan

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Perkembangan kehidupan dan semua aktivitas merupakan hal yang penting dalam perumusan KRP, termasuk KRP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data–data penduduk sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pertambahan penduduk seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan lain–lain. Populasi berubah dengan angka–angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi faktor–faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi.

Adapun cara–cara yang diambil untuk menghitung proyeksi penduduk tergantung oleh beberapa hal berikut, diantaranya:

- Keadaan dan jenis wilayah.
- Rencana pengembangan wilayah
- Data kependudukan yang ada.

Metode yang digunakan dalam memproyeksikan penduduk Kota Jambi adalah Metode Arithmatik, Geometrik, dan Metode Tren Exponensial (*Least Square*).

a. Metode Arithmatik

Biasanya digunakan untuk :

- Untuk kota-kota tua, tidak berkembang dan luas.
- Untuk kota-kota yang memiliki Industri.

Persamaan yang digunakan dalam metode ini adalah :

$$P_n = P_o + K_a .x$$

$$K_a = (P_n - P_o) / t$$

dimana :

- P_n = Jumlah penduduk di tahun akhir data
- P_o = Jumlah penduduk di tahun awal data
- t = Interval waktu tahun data
- x = Jumlah tahun proyeksi
- K_a = Angka pertumbuhan penduduk

b. Metode Geometrik

Biasanya digunakan untuk :

- Untuk kota-kota muda yang cenderung ke industri yang sedang berkembang.
- Untuk kota-kota tua yang sudah tidak berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk 20–30 % per tahun.

Persamaan yang digunakan dalam metode geometrik adalah :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

$$K_a = (P_t / P_o)^{1/t}$$

dimana :

P_n = Jumlah populasi pada tahun yang diinginkan.

P_o = Jumlah populasi pada tahun awal data.

P_t = Jumlah penduduk ada tahun akhir data.

t = Jumlah data

n = Interval atau selang waktu

r = Rasio penambahan penduduk

c. Metode Tren Exponensial/Least Square

Biasanya digunakan untuk :

- Untuk kota-kota tua berukuran atau luas.
- Pertumbuhan ekonomi.
- Sistem transportasi.

Persamaan yang digunakan dalam metode *least square* :

$$P_n = P_o e^{r \cdot n}$$

dimana :

P_n = Jumlah populasi pada tahun yang diinginkan.

P_o = Jumlah populasi pada tahun awal data

e = Bilangan eksponensial (2,7182818)

r = Angka pertumbuhan penduduk

n = Interval/Jangka waktu

Kota Jambi yang terdiri dari 11 kecamatan akan diproyeksikan jumlah penduduknya sampai dengan tahun 2045. Setiap kecamatan diuji kecocokan terhadap metode yang akan digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk masing-masing kecamatan tersebut.

Tabel 2.94
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun			
	2030	2035	2040	2045
Kota Baru	97.269	107.190	118.122	130.170
Alam Barajo	150.227	178.547	212.205	252.208
Jambi Selatan	60.083	61.688	63.293	64.898
Paal Merah	167.108	215.711	278.451	359.439
Jelutung	60.920	61.655	62.390	63.125
Pasar Jambi	15.883	18.843	21.803	24.763
Telanaipura	51.832	53.152	54.472	55.792
Danau Sipin	46.494	48.219	49.944	51.669
Danau Teluk	15.398	17.024	18.821	20.807
Pelayangan	16.010	17.860	19.710	21.560
Jambi Timur	70.573	72.853	75.133	77.413
Jumlah	751.798	852.742	974.344	1.121.845

Sumber : Analisis, Tahun 2023

Tabel 2.95
Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Distribusi (%)			
		2030	2035	2040	2045
1	Kota Baru	13,00	12,65	12,22	11,71
2	Alam Barajo	19,78	20,76	21,62	22,35
3	Jambi Selatan	8,15	7,38	6,64	5,92
4	Paal Merah	21,64	24,66	27,91	31,34
5	Jelutung	8,28	7,40	6,56	5,78
6	Pasar Jambi	2,08	2,20	2,24	2,22
7	Telanaipura	7,03	6,36	5,72	5,09
8	Danau Sipin	6,29	5,76	5,23	4,71
9	Danau Teluk	2,06	2,01	1,95	1,87
10	Pelayangan	2,13	2,10	2,04	1,94
11	Jambi Timur	9,56	8,71	7,88	7,06
	Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Analisis, Tahun 2023

Kepadatan penduduk Kota Jambi tentu juga akan mengalami peningkatan dan diperkirakan dapat mencapai 75.680 jiwa/km² pada tahun 2045. Untuk Kepadatan penduduk yang tertinggi di tahun 2045 diperkirakan masih berada di Kecamatan Pasar Jambi sekitar 14.474 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Paal Merah sekitar 14.084 jiwa/km². Untuk kepadatan penduduk paling kecil berada di Kecamatan Danau Teluk sekitar 1.517 jiwa/km² dan Kecamatan Pelayangan sekitar 1.982 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.96
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
			2030	2035	2040	2045
1	Kota Baru	27,25	3.570	3.934	4.335	4.777
2	Alam Barajo	36,06	4.166	4.951	5.885	6.994

3	Jambi Selatan	7,6	7.906	8.117	8.328	8.539
4	Paal Merah	24,25	6.891	8.895	11.483	14.822
5	Jelutung	7,61	8.005	8.102	8.198	8.295
6	Pasar Jambi	1,67	9.511	11.283	13.056	14.828
7	Telanaipura	20,32	2.551	2.616	2.681	2.746
8	Danau Sipin	7,28	6.387	6.623	6.860	7.097
9	Danau Teluk	13,44	1.146	1.267	1.400	1.548
10	Pelayangan	10,69	1.498	1.671	1.844	2.017
11	Jambi Timur	13,68	5.159	5.326	5.492	5.659
Jumlah			56.788	62.784	9.562	77.322

Sumber: Analisis, Tahun 2023

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per lima tahun sampai 2045

2.6.2.1 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Penyediaan fasilitas pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi kota yang didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Asumsi asumsi dalam memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
2. Pertimbangan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
3. Pertimbangan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yaitu dengan memperhatikan jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan, optimasi daya tampung dengan satu shift, efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu, pemakaian sarana dan prasarana pendukung, keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Penggolongan jenis sarana pendidikan ini meliputi :

1. Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
2. sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;

3. sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
4. sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Perkiraan jumlah kebutuhan sarana pendidikan di kawasan perencanaan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan terhadap standar penduduk pendukung. Hasil analisa didapatkan sampai dengan akhir tahun perencanaan terdapat penambahan terhadap jumlah fasilitas pendidikan untuk masing-masing tingkat pendidikan hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada Kota Jambi cenderung meningkat setiap tahunnya. Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.97
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Jambi

No	Jenis Sarana	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas Lahan Minimal	Jumlah eksisting	Perkiraan Kebutuhan				Perkiraan Kebutuhan Penambahan			
					2030	2035	2040	2045	2030	2035	2040	2045
1	SMA/ sederajat	4.800,00	12.500,00	103	157	178	203	234	54	75	100	131
2	SMP/ sederajat	4.800,00	9.000,00	111	157	178	203	234	46	67	92	123
3	SD/ sederajat	1.600,00	2.000,00	248	470	533	609	701	222	285	361	453
4	TK/PAUD	1.250,00	500,00	190	601	682	779	897	411	492	589	707

Sumber: Analisis, Tahun 2023

2.6.2.2 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga

akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah :

- a) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA/Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Sumber: Standar Minimal Pelayanan Berdasarkan SNI 03-1733-2004

Ketentuan mengenai asumsi dan kebutuhan sarana kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Posyandu

Penempatan balai pengobatan harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 1.250 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 60 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 500 m. Letak Posyandu sebaiknya di tengah permukiman warga, tidak menyeberang jalan raya.

2. Balai Pengobatan

Penempatan balai pengobatan harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 2.500 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 1.000 m. Letak Balai Pengobatan sebaiknya di tengah permukiman warga, tidak menyeberang jalan raya.

3. Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan

Untuk penempatan Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan dengan jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 300 m², dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

4. BKIA /Klinik Bersalin

Penempatan BKIA/Klinik Bersalin harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 30.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 4.000 m. Letak BKIA/Klinik Bersalin dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

5. Puskesmas dan Balai Pengobatan

Untuk penempatan Puskesmas dan Balai Pengobatan dengan jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 1.000 m², dengan radius maksimal pencapaian 3.000 m. Letak Puskesmas dan Balai Pengobatan dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

6. Tempat Praktek Dokter

Penempatan Tempat Praktek Dokter harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 5.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan tidak ditentukan oleh SNI tersebut, dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Tempat Praktek Dokter dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

7. Apotik / Rumah Obat

Untuk penempatan Apotik/Rumah Obat dengan jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 250 m², dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Tempat Praktek Dokter dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

8. Rumah Sakit

Untuk penempatan Rumah Sakit dengan jumlah penduduk pendukung minimal 240.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 86.400 m². Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang tenang dengan radiusnya merata dengan daerah yang dilayani.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan beberapa pertimbangan, berikut ini adalah hasil proyeksi jumlah kebutuhan sarana kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel setelah ini:

Tabel 2.98
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi

No	Jenis Sarana	Penduduk Pendukung (Iiwa)	Luas Lahan Minimal	Jumlah eksisting	Perkiraan Kebutuhan				Perkiraan Kebutuhan Penambahan			
					2030	2035	2040	2045	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	240.000,00	86.400	16	3	4	4	5	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
2	Puskesmas	120.000,00	1.000	20	6	7	8	9	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
3	Pustu	30.000,00	300	35	25	28	32	37	mencukupi	mencukupi	mencukupi	2
4	Apotik	30.000,00	250	43	25	28	32	37	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi

Sumber: hasil analisis 2023

2.6.2.3 Perkiraan Kebutuhan Perumahan

Perumahan merupakan salah satu sektor yang paling berkembang di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Jambi. Pola perkembangan perumahan di Kota Jambi perlu dicermati sebagai nutrisi tambahan untuk perumusan kebijakan pengelolaan Kota Jambi.

Pada Tahun 2015 dan 2016 Dinas Tata Ruang dan Perumahan (Distarum) Kota Jambi telah melaksanakan pendataan perumahan berbasis kecamatan dengan sasaran Kecamatan Kota Baru yang kemudian ditindaklanjuti ke Kecamatan Jambi Timur, Jambi Selatan dan Paal Merah. Pada Tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Distarum berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) kegiatan tersebut dilanjutkan di Kecamatan Telanaipura. Sasaran dari kegiatan pendataan tersebut didominasi kepada perumahan – perumahan formal yang secara prinsip lebih mudah dikenali dibandingkan rumah – rumah swadaya.

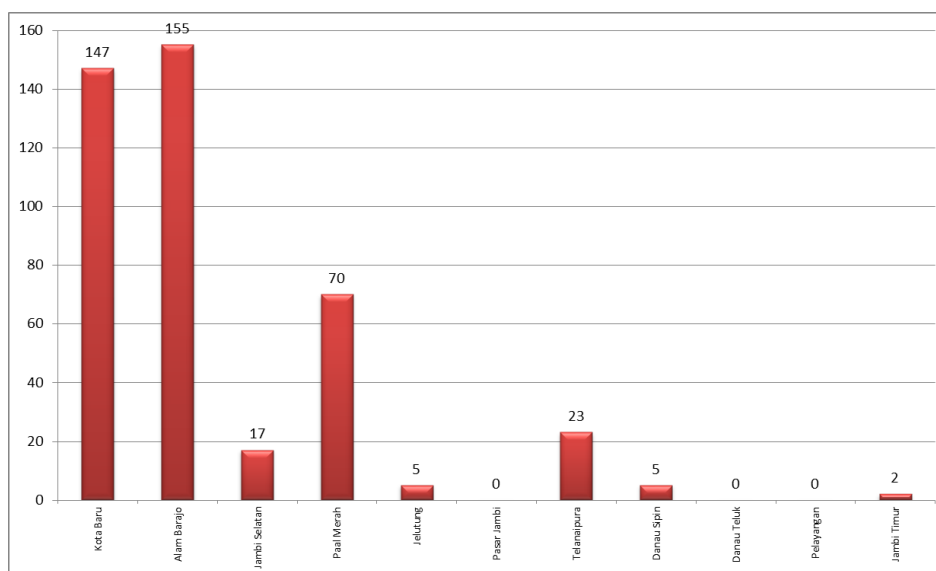
Secara umum upaya mengidentifikasi pola perkembangan perumahan berorientasi kepada pola geografis dan pola spesifikasi atau identifikasi terhadap jenis rumah komersial atau subsidi. Sementara tipikal bangunan seperti kios dan rumah toko (ruko) tetap diinventaris namun bukan menjadi salah satu acuan atau referensi untuk mengidentifikasi pola perkembangan perumahan karena eksistensinya tidak cukup dominan.

a. Pola Geografis

Penjelasan lebih jauh terkait proses pendataan yang lebih dinominasikan hanya ke beberapa kecamatan di Kota Jambi adalah disebabkan oleh adanya kecenderungan yang memang terjadi. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota

Jambi, kecenderungan pertumbuhan perumahan formal memang hanya terjadi di sekitar 7 (Tujuh) kecamatan saja yakni Kecamatan Kota Baru, Alam Barajo, Telanaipura, Danau Sipin, Jambi Selatan, Paal Merah dan Jambi Timur. Berdasarkan rekaman data pengesahan site plan perumahan dari Bidang Perumahan DPRKP Kota Jambi dari Tahun 2011 sampai dengan November 2022, diketahui bahwa total populasi perumahan formal adalah sebanyak 424 lokasi perumahan. Kecamatan dengan lokasi perumahan terbanyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan 155 lokasi dan diikuti oleh Kecamatan Kota Baru dengan 147 lokasi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengajuan pengesahan site plan di Kecamatan Danau Teluk, Pelayangan dan Pasar Jambi sama sekali tidak ada pada rentang waktu tersebut. Sementara itu di Kecamatan Jelutung dan Danau Sipin setidaknya masing – masing masih ada 5 lokasi perumahan sementara di Kecamatan Jambi Timur terdapat 2 lokasi perumahan.

Gambar 2.112
Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal
di Kota Jambi Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2011 - 2022



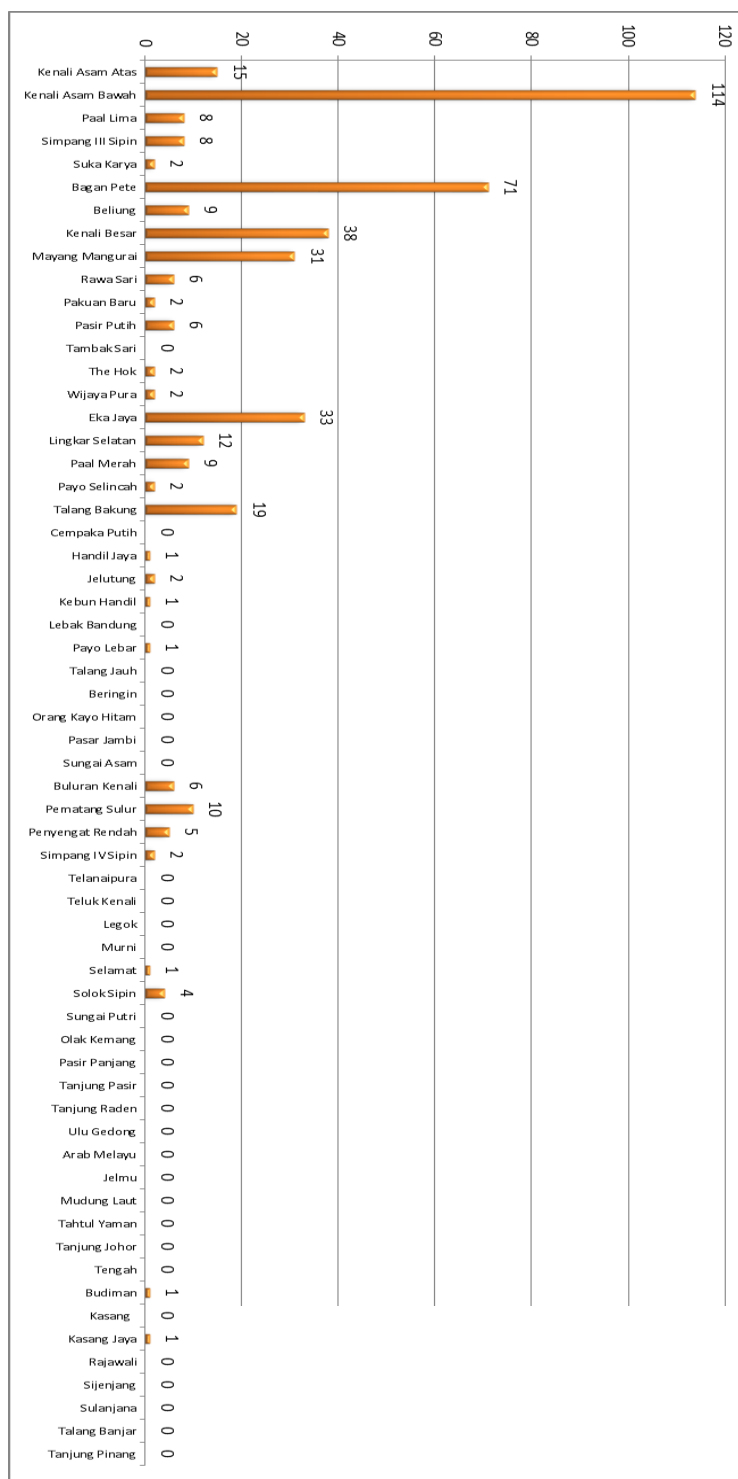
Sumber : Database DPRPP, 2022

Untuk Kecamatan Pasar Jambi perkembangan perumahan formal tidak terjadi karena harga lahan yang sudah sangat tinggi. Di kecamatan tersebut merupakan salah satu kutub pertumbuhan perekonomian utama di Kota Jambi

sehingga perbandingan harga lahan yang sudah berkembang sudah tidak sebanding dengan potensi perolehan keuntungan dari nilai jual rumah. Atau jikapun dipaksakan pembangunan unit rumah tentu saja relatif sulit dijual karena harganya yang sudah sangat tidak terjangkau atau dengan kata lain segmentasinya tidak berkembang. Pelaku pembangunan cenderung lebih mempertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan rumah toko yang lebih bersifat komersial. Sementara itu di Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan pertumbuhan populasi perumahan formal cenderung terhambat oleh kondisi geografis kawasanya yang cenderung masih memiliki kerawanan terhadap bencana banjir. Alasan lainnya adalah struktur sosialnya yang relatif belum cukup terbuka terhadap proses asimilasi sosial dari calon penghuni dari kawasan perumahan tersebut.

Kedalaman data tabulasi pengesahan site plan perumahan yang tersedia untuk dianalisa adalah sampai dengan tingkat kelurahan, untuk itu lebih jauh lagi diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2022 di Kelurahan Kenali Asam Bawah terdapat 114 lokasi perumahan dimana jumlah ini sangat dominan dibandingkan dengan peringkat ke-2 yakni Kelurahan Bagan Pete dengan 71 lokasi perumahan. Kelurahan lain yang termasuk dalam 5 besar (Top 5) lokasi perumahan terbanyak adalah Kelurahan Kenali Besar dengan 38 lokasi, Kelurahan Eka Jaya dengan 33 lokasi dan Kelurahan Mayang Mangurai dengan 31 lokasi. Dari total 62 Kelurahan yang ada di Kota Jambi, dalam rentang waktu Tahun 2011 – 2022 sebanyak 30 Kelurahan diantaranya sama sekali tidak terdapat pengajuan pengesahan site plan perumahan dan tentu saja karakteristik ini linear dengan uraian penjelasan terkait dengan distribusi pengesahan site plan di tingkat kecamatan di Kota Jambi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Uraian data diatas terkait sebaran pengesahan *site plan* perumahan formal di tingkat kecamatan dan kelurahan pada dasarnya hanya menjelaskan lokasi (lokus) dari perkembangan kawasan perumahan dan belum membicarakan skalabilitas pengembangannya karena hal ini terkait dengan karakteristik data yang berbeda sehingga perlu diuraikan lebih jauh pada bagian lain dari pembahasan ini.



Gambar 2.111
Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal
di Kota Jambi Berdasarkan Kelurahan
Tahun 2011 - 2022

b. Pola Skalabilitas

Berdasarkan rekaman data yang tersedia, dari Tahun 2011 sampai dengan 2022 total jumlah unit rumah dan atau kios yang dibangun oleh pengembang adalah sebanyak 25.863 unit rumah. Dari total jumlah unit tersebut 18.127 unit atau 70,09% diantaranya adalah rumah type 36 yang sebagian besar diantaranya adalah rumah subsidi. Sementara type rumah 37 – 49 dikembangkan sejumlah 3.220 unit rumah (12,45%), type rumah 50 – 69 dibangun sebanyak 2.959 unit (11,44%) dan type 70 atau lebih besar dibangun sebanyak 937 unit (3,62%). Sebagian lokasi perumahan juga melakukan pembangunan kios sebanyak 620 unit atau 2,40%.

Tabel 2.99
Rekapitulasi Jumlah Unit Rumah Berdasarkan Data Pengesahan *Site Plan*
Tahun 2011 – 2022

Tahun	Tipe Rumah				Kios	Total
	T.36	T.37-49	T.50-69	T.70+		
2011	566	347	282	111	91	1.397
2012	379	270	776	128	109	1.662
2013	454	443	432	282	60	1.671
2014	230	46	179	24	15	494
2015	1.929	892	577	43	64	3.505
2016	1.355	10	63	117	12	1.557
2017	2.376	79	40	160	32	2.687
2018	3.228	33	79	35	20	3.395
2019	3.680	98	294		181	4.253
2020	2.134	45	31	11		2.221
2021	1.148	957	206	26	36	2.373
2022	648					648
Jumlah	18.127	3.220	2.959	937	620	25.863

Sumber: Database DPRPP, 2022

c. Pola Pelaku Pengembangan

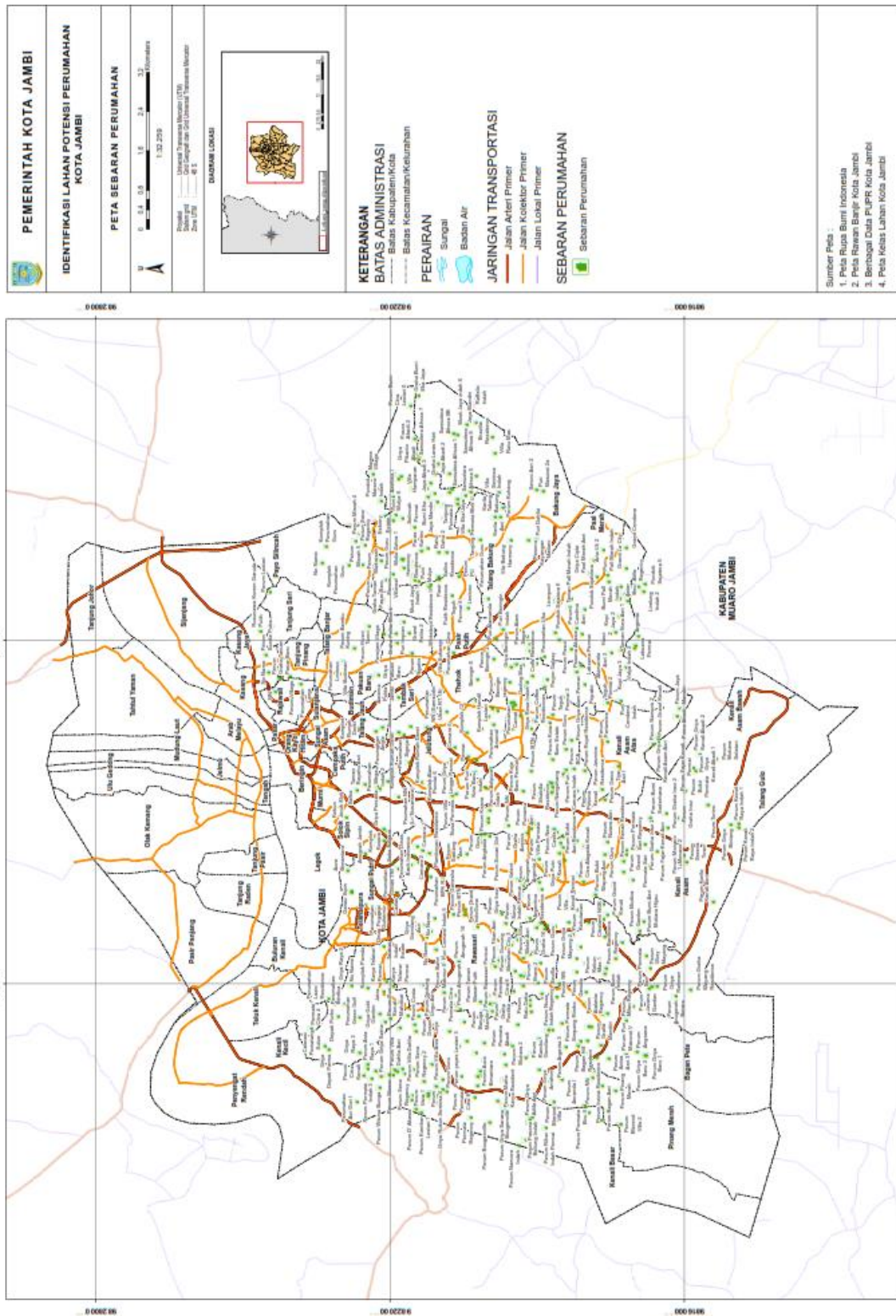
Pembangunan perumahan formal pada prinsipnya dilaksanakan dengan badan usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), namun sebelumnya paling tidak sampai dengan Tahun 2018 masih ada pengajuan perumahan dengan atas nama pribadi dari pengembang. Kondisi ini mengakibatkan populasi pengajuan perumahan atas nama pribadi terakumulasi menjadi yang terbanyak yaitu 62 lokasi perumahan dari total 188 lokasi perumahan yang sudah pengesahan site plan dalam periode 2011 – 2022. Dalam perjalanannya pemohon atas nama pribadi tersebut bertransformasi menjadi badan usaha diantaranya pemohon atas nama Ramon Fauzan, Hasyim Ali, Rasidin dan beberapa pemohon lainnya.

Sampai dengan November 2022 beberapa perusahaan dengan jumlah pengesahan terbanyak adalah PT. Niaga Guna Kencana dengan 12 lokasi perumahan, PT. Multi Nutara Prima dengan 12 lokasi, PT. Pikantok Berkah Abadi dengan 12 lokasi dan PT. Javana Intermedia dengan 9 lokasi perumahan. Pelaku usaha juga memiliki kecenderungan melaksanakan pembangunan perumahan dengan grup usahanya misal PT. Fajar Kaysan Perkasa yang dimotori oleh Sdr. Abror berafiliasi dengan PT. Fajar Kaysan Persada dengan total 15 lokasi perumahan, PT. Jingga Dirga Puspita yang dimotori oleh Sdri. Anifah terafiliasi dengan PT. Bintang Muda Abadi dan PT. Marwa Hani Jaya dengan total 9 lokasi perumahan, sementara itu PT. Prima Sakti Agung yang dimotori oleh Sdr. Romi terafiliasi dengan PT. Habaya Nur Agung dan PT. Andhitira Cahaya Asia dengan 14 lokasi perumahan.

Fakta menarik lainnya adalah bahwa badan usaha berbentuk CV terakhir kali mengajukan pengesahan site plan adalah pada Tahun 2020 yakni CV. Arinji Succes Grub yang mengajukan Perumahan Almahyra Resident. Kondisi ini dimungkinkan karena lembaga pembiayaan mempersyaratkan legalitas minimum yang harus dimiliki adalah perseroan terbatas. Konteks ini memperlihatkan bahwa salah satu parameter yang memiliki peranan penting dalam siklus pengembangan perumahan adalah lembaga pembiayaan karena mereka memiliki produk pembiayaan yang mensupport dalam berbagai

rangkaian kegiatan yang antara lain pembelian lahan, pematangan lahan, produksi dan pemasaran.

Total jumlah pengesahan site plan terbanyak terjadi pada Tahun 2015 dengan yakni sebanyak 57 lokasi dan jumlah pengesahan paling sedikit terjadi pada Tahun 2014 dengan 12 lokasi perumahan. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dari jumlah pengesahan Tahun 2022 yang sampai saat ini masih berjalan yakni sebanyak 14 lokasi perumahan.



Gambar 2.112
Peta Sebaran Perumahan di Kota Jambi

Analisis perkiraan kebutuhan unit hunian dan kebutuhan lahan pengembangan perumahan di Kota Jambi dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah penduduk untuk setiap unit adalah 5 jiwa;
2. Luas kapling rumah mewah 500 m²
3. Luas kapling rumah sedang 300 m²
4. Luas kapling rumah sederhana 100 m²
5. Proporsi rumah mewah: menengah: sederhana = 1:2:3

Dari pendekatan tersebut, jumlah kebutuhan rumah dan lahan pengembangan sampai dengan Tahun 2045 di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2030

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2030 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2030	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	83.381	97.269	13.888	278	138.880	833	249.984	1.667	166.656
2	Alam Barajo	113.146	150.227	37.081	742	370.810	2.225	667.458	4.450	444.972
3	Jambi Selatan	57.515	60.083	2.568	51	25.680	154	46.224	308	30.816
4	Paal Merah	108.182	167.108	58.926	1.179	589.260	3.536	1.060.668	7.071	707.112
5	Jelutung	59.744	60.920	1.176	24	11.760	71	21.168	141	14.112
6	Pasar Jambi	11.147	15.883	4.736	95	47.360	284	85.248	568	56.832
7	Telanaipura	49.720	51.832	2.112	42	21.120	127	38.016	253	25.344
8	Danau Sipin	43.734	46.494	2.760	55	27.600	166	49.680	331	33.120
9	Danau Teluk	13.009	15.398	2.389	48	23.890	143	43.002	287	28.668
10	Pelayangan	13.050	16.010	2.960	59	29.600	178	53.280	355	35.520
11	Jambi Timur	66.925	70.573	3.648	73	36.480	219	65.664	438	43.776
	Jumlah	619.553	751.797	132.244	2.645	1.322.440	7.935	2.380.392	15.869	1.586.928

Sumber: hasil analisis 2023

Tabel 2.101
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2035

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2035 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2035	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	83.381	107.190	23.809	476	238.090	1.429	428.562	2.857	285.708
2	Alam Barajo	113.146	178.547	65.401	1.308	654.010	3.924	1.177.218	7.848	784.812
3	Jambi Selatan	57.515	61.688	4.173	83	41.730	250	75.114	501	50.076
4	Paal Merah	108.182	215.711	107.529	2.151	1.075.290	6.452	1.935.522	12.903	1.290.348
5	Jelutung	59.744	61.655	1.911	38	19.110	115	34.398	229	22.932
6	Pasar Jambi	11.147	18.843	7.696	154	76.960	462	138.528	924	92.352
7	Telanaipura	49.720	53.152	3.432	69	34.320	206	61.776	412	41.184
8	Danau Sipin	43.734	48.219	4.485	90	44.850	269	80.730	538	53.820
9	Danau Teluk	13.009	17.024	4.015	80	40.150	241	72.270	482	48.180
10	Pelayangan	13.050	17.860	4.810	96	48.100	289	86.580	577	57.720
11	Jambi Timur	66.925	72.853	5.928	119	59.280	356	106.704	711	71.136
	Jumlah	619.553	852.742	233.189	4.664	2.331.890	13.991	4.197.402	27.983	2.798.268

Sumber: hasil analisis 2023

Tabel 2.102
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2040

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2040 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2040	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	97.269	118.122	20.853	417	208.530	1.251	375.354	2.502	250.236
2	Alam Barajo	150.227	212.205	61.978	1.240	619.780	3.719	1.115.604	7.437	743.736
3	Jambi Selatan	60.083	63.293	3.210	64	32.100	193	57.780	385	38.520
4	Paal Merah	167.108	278.451	111.343	2.227	1.113.430	6.681	2.004.174	13.361	1.336.116
5	Jelutung	60.920	62.390	1.470	29	14.700	88	26.460	176	17.640
6	Pasar Jambi	15.883	21.803	5.920	118	59.200	355	106.560	710	71.040
7	Telanaipura	51.832	54.472	2.640	53	26.400	158	47.520	317	31.680
8	Danau Sipin	46.494	49.944	3.450	69	34.500	207	62.100	414	41.400
9	Danau Teluk	15.398	18.821	3.423	68	34.230	205	61.614	411	41.076
10	Pelayangan	16.010	19.710	3.700	74	37.000	222	66.600	444	44.400
11	Jambi Timur	70.573	75.133	4.560	91	45.600	274	82.080	547	54.720
Jumlah		751.797	974.344	222.547	4.451	2.225.470	13.353	4.005.846	26.706	2.670.564

Sumber: hasil analisis 2023

Tabel 2.103
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2045

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2045 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2045	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	97.269	130.170	32.901	658	329.010	1.974	592.218	3.948	394.812
2	Alam Barajo	150.227	252.208	101.981	2.040	1.019.810	6.119	1.835.658	12.238	1.223.772
3	Jambi Selatan	60.083	64.898	4.815	96	48.150	289	86.670	578	57.780
4	Paal Merah	167.108	359.439	192.331	3.847	1.923.310	11.540	3.461.958	23.080	2.307.972
5	Jelutung	60.920	63.125	2.205	44	22.050	132	39.690	265	26.460
6	Pasar Jambi	15.883	24.763	8.880	178	88.800	533	159.840	1.066	106.560
7	Telanaipura	51.832	55.792	3.960	79	39.600	238	71.280	475	47.520
8	Danau Sipin	46.494	51.669	5.175	104	51.750	311	93.150	621	62.100
9	Danau Teluk	15.398	20.807	5.409	108	54.090	325	97.362	649	64.908
10	Pelayangan	16.010	21.560	5.550	111	55.500	333	99.900	666	66.600
11	Jambi Timur	70.573	77.413	6.840	137	68.400	410	123.120	821	82.080
Jumlah		751.797	1.121.844	370.047	7.401	3.700.470	22.203	6.660.846	44.406	4.440.564

Sumber: hasil analisis 2023

2.6.2.4 Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/kota). Namun, mengingat masih sangat terdaerah tingkat dua (kabupaten/kota), maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah. Penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggaraannya.

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, dan wajib untuk dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggaraannya.

Walaupun pada dasarnya pemenuhan air minum masih memungkinkan secara non perpipaan, namun demikian sistem perpipaan tetap menjadi pertimbangan yang sangat mempengaruhi minat bermukim ataupun sebagai gambaran upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pengembangan jaringan distribusi sebagai lingkup kerangka pengembangan permukiman. Untuk itu, jangkauan pelayanan sistem air minum perpipaan yang ada saat ini tidak kalah penting untuk dilihat sebagai pendukung identifikasi lahan potensial pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Jambi.

Penyediaan air bersih penduduk sangat bergantung kepada ketersediaan sumber air baku ataupun kondisi hidrologi suatu wilayah. Syarat air bersih penduduk tersebut antara lain:

- Syarat fisik: Air minum harus jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna
- Syarat Kimia: sumber air baku tidak mengandung zat-zat kimia yang merugikan tubuh, merugikan dalam pengaliriran di pipa-pipa, dalam penggunaan sehari-hari untuk mandi, mencuci, dan lain-lain.
- Syarat Bakteriologi: Bakteri-bakteri yang harus dihindarkan adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan sakit perut/usus dan kuman-kuman lain yang tahan asam perut.

Agar kebutuhan air bersih dimasa datang dapat terakomodir, baik menyangkut wilayah pelayanan maupun kapasitasnya, maka perhitungan perlu dilakukan secara cermat dan matang. Untuk itu perkiraan kebutuhan air bersih akan didasarkan pada standar yang berlaku dari Direktorat Pekerjaan Umum. Lebih jelas Bersih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Kriteria Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan

No	Uraian	Satuan	Status Kota				
			Metro (>1.000.000 jiwa)	Besar (500.000-1.000.000 jiwa)	Besar (100.000-500.000 jiwa)	Sedang (20.000-100.000 jiwa)	Kecil (3.000-20.000 jiwa)
1	Konsumsi unit SR	Liter/org/hari	>150	120-150	100-150	90-100	60-100
2	Konsumsi unit HU	Liter/org/hari	30	30	30	30	30
3	Konsumsi Unit Non Domestik *)	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
4	Kehilangan Air	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
5	Faktor Maksimum Day	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6	Faktor Peak Hour	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7	Jumlah jiwa per SR	Jiwa	5	5	5	5	5
8	Jumlah Jiwa per HU	Jiwa	100	100	100	100	100
9	Sisa Tekan di Jaringan Distribusi	Mka	10	10	10	10	10
10	Jam Operasi	Jam	24	24	24	24	24
11	Volume Reservoir dari <i>maxday demand</i>	%	20	20	20	20	20
12	Perbandingan SR/HU	-	50:50 - 80:20	50:50 - 80:20	80:20	70 :30	70:30
13	Cakupan pelayanan	%	90 **)	90 **)	90 **)	90 **)	70 ***)

Sumber : Direktorat Pekerjaan Umum, Tahun 2001

Keterangan : *) tergantung survey sosek **) 60% perpipaan, 30% non perpipaan

***) 25% perpipaan, 45% non perpipaan

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen (*Unaccounted for Water*) sesuai dengan yang tercatat di meter-meter air pelanggan. Kebocoran air diperkirakan sebesar 10% dari kebutuhan total dapat terjadi pada saat pendistribusian air pada konsumen. Kehilangan air/kebocoran air, ada dua macam:

1. Kehilangan teknis, hal ini terjadi karena adanya perbedaan angka pemakaian air (volume) yang diukur dari meter air pelanggan atau terjadi karena kebocoran pipa- pipa.
2. Kehilangan non teknis, hal ini terjadi karena kesalahan pembacaan meter air, ada kerjasama antara petugas dan konsumen, maupun karena penyambungan air yang ilegal.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan kebutuhan air bersih juga akan meningkat. Standard kebutuhan akan air bersih didasarkan pada:

1. Kebutuhan Air Domestik = Σ Penduduk x Kebutuhan Air Perkapita. Sesuai standart, kebutuhan air perkapita Kawasan Perkotaan Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 80 - 120 lt/org/hr.
2. Kebutuhan Non Domestik
Kebutuhan Total = Kebutuhan Domestik + Kebutuhan Non Domestik
3. Kebutuhan Rata-rata Harian = Kebutuhan Domestik + Kebutuhan Non Domestik + Hidran + Kehilangan Air
4. Kebutuhan Harian Maksimum = 1,15 x Kebutuhan Rata-rata Harian.

Berdasarkan hasil proyeksi sampai tahun 2033, dapat diketahui tiap tahun kebutuhan air bersih meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari kebutuhan air minum tersebut pada akhir perencanaan diperkirakan masih terdapat kekurangan akan kebutuhan air bersih sehingga diperlukan penambahan kapasitas, penambahan cakupan daerah pelayanan, pengurangan angka tingkat kebocoran. Berikut ditampilkan tabel hasil analisis kebutuhan air bersih pada wilayah perencanaan.

Tabel 2.105**Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Jambi Tahun 2045**

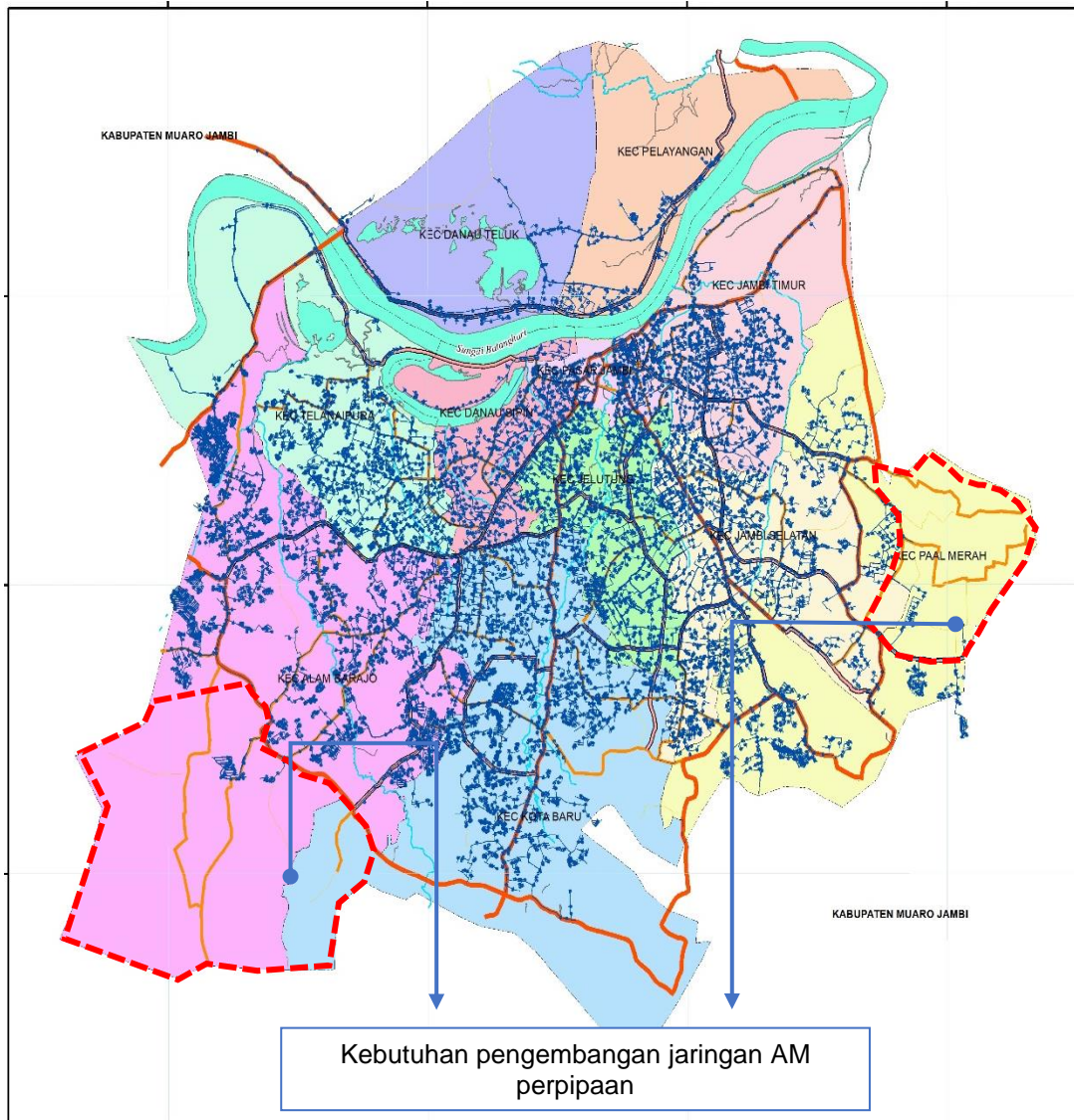
No	Keterangan	Perkiraan Kebutuhan			
		2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (jiwa)	751.798	852.742	974.344	1.121.845
2	Tingkat pelayanan (%)	75%	80%	85%	90%
3	Penduduk terlayani (jiwa)	563.849	682.194	828.192	1.009.661
4	Standar Kebutuhan Air (L/Org/H)	100	100	100	100
5	Kebutuhan Air (L/Org/H)	56.384.850	68.219.360	82.819.240	100.966.050
6	Standar Kebutuhan Non Domestik (L/H) (30%)	16.915.455	20.465.808	24.845.772	30.289.815
7	Kebutuhan Non Domestik 20% (L/Hr)	5.074.637	693.820	789.209	910.963
8	Kebutuhan Fasilitas Umum 20% (L/Hr)	11.276.970	13.643.872	16.563.848	20.193.210
9	Total Kebutuhan (L/H)	89.651.912	103.022.860	125.018.069	152.360.038
10	Kebutuhan air rata - rata perhari (L/dt)	1.038	1.192	1.447	1.763
11	Kebutuhan air maksimal (L/dt)				
	a. Hari (1,1%) L/dt	1.141	1.312	1.592	1.940
	b. Jam (1,5%) L/dt	1.556	1.789	2.170	2.645

Sumber: hasil analisis 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan akan air bersih sampai tahun 2045, dapat diketahui tiap tahun kebutuhan air bersih meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari kebutuhan air minum tersebut pada akhir perencanaan diperkirakan masih terdapat kekurangan akan kebutuhan air bersih sehingga diperlukan penambahan kapasitas, penambahan cakupan daerah pelayanan, dan pengurangan angka tingkat kebocoran.

Dari tabel analisis kebutuhan air bersih diatas dapat diketahui kebutuhan air bersih sampai dengan peningkatan kebutuhan air bersih perlima tahunnya sampai dengan akhir tahun perencanaan.

Selain itu, yang tidak kalah penting dalam pemenuhan kebutuhan air minum bukannya hanya terkait dengan peningkatan kapasitas produksi, melainkan kebutuhan peningkatan jangkauan pelayanan dari air minum perpipaan itu sendiri. Kebutuhan peningkatan jangkauan pelayanan tersebut terkait juga dengan kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan permukiman perkotaan yang saat ini belum terjangkau layanan air minum perpipaan.



Gambar 2.113
Arah Keburuhan Pengembangan Jaringan Air Minum Perpipaan Kota Jambi

2.6.2.5 Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan

Penanganan sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi penduduk perkotaan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Standar yang dipergunakan dalam memperkirakan produksi sampah pada wilayah perencanaan didasarkan pada buku standar umum Perkotaan untuk timbunan sampah yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Subdin Cipta Karya. Berdasarkan standar panduan tentang volume sampah berikut pembuangan dan pengangkutannya adalah sebagai berikut.

- a. Produksi sampah diasumsikan 2,5 L/Org/Hr
- b. Tempat sampah setidaknya melayani 8-10 jiwa atau 50 liter tiap tong
- c. Tempat pembuangan sampah semetara (TPS) diambil asumsi 1.000 liter tiap TPS
- d. Pengangkutan menggunakan gerobak melayani 1.000-1.500 jiwa, diasumsikan setiap 1.000 liter sampah membutuhkan 5 buah gerobak
- e. Truk sampah melayani minimal 6.000 jiwa

Tabel 2.106
Perkiraan Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan
Kota Jambi

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	751.798	852.742	974.344	1.121.845
2	Rata - Rata Timbulan Sampah 2,5 l/o/h	1.879.495	2.131.855	2.435.860	2.804.613
3	Timbulan Sampah Domestik m ³ /h	1.879	2.132	2.436	2.805
4	Timbulan Sampah Non Domestik m ³ /h (20%)	376	426	487	561
5	Total Timbulan Sampah	2.255	2.558	2.923	3.366
6	Jumlah Pengurangan Sampah di Tingkat Sumber m ³ /h (50%)	1.128	1.279	1.462	1.683
7	Sisa Sampah ke TPA (m ³ /h)	1.128	1.279	1.462	1.683
8	Perkiraan Kebutuhan Sarana				
	a. Tong Sampah (50 Liter)	37.590	42.637	48.717	56.092
	b. Gerobak Sampah (1 M ³ / 4X)	564	640	731	841
	c. Becak Motor (2 M ³ / 1X)	1.128	1.279	1.462	1.683
	d. Truk Sampah (4 M ³ / 3X)	94	107	122	140
	e. TPS (8m ³)	282	320	365	421

Sumber: hasil analisis 2023

2.7 ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Namun demikian, dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang mengandung perubahan terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berikut dengan peraturan-peraturan turunannya, menuntut pemerintah daerah untuk merevisi RTRW yang berlaku saat ini. Begitu juga dengan RTRW Kota Jambi yang saat ini sudah memasuki tahap akhir (evaluasi Menteri Dalam Negeri). Revisi RTRW Kota Jambi, disusun dengan memperkirakan perkembangan yang akan datang, berdasarkan pertimbangan daya dukung lahan, potensi

sumber daya yang ada serta batasan dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, Revisi RTRW diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang sehingga perkembangan sosial ekonomi dapat berjalan secara efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Revisi RTRW Kota Jambi saat ini memiliki momentum yang sangat pas, mengingat RTRW saat ini dapat bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), mengingat kedua pedoman perencanaan pembangunan di daerah ini memiliki umur rencana yang sama (20 tahun). Oleh karena itu, rumusan rencana penataan ruang Kota Jambi yang akan diselaraskan adalah muatan yang terkandung dalam Revisi RTRW Kota Jambi terbaru.

A. Tujuan Penataan Ruang Kota Jambi

Tujuan penataan ruang Kota Jambi adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang Kota Jambi ini diwujudkan dengan beberapa kebijakan penataan ruang, yaitu:

- a. perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal, regional, dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b. peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional;
- e. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta terintegrasi antar masing-masing fungsi;
- f. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

B. Rencana Struktur Ruang Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat – pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota, berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat – pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;
2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya dan menunjang keterkaitan antar pusat – pusat pelayanan kota;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun

Beberapa Dinamika Pembangunan dalam lingkup struktur ruang yang terjadi selama kurun waktu semenjak ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 silam, meliputi:

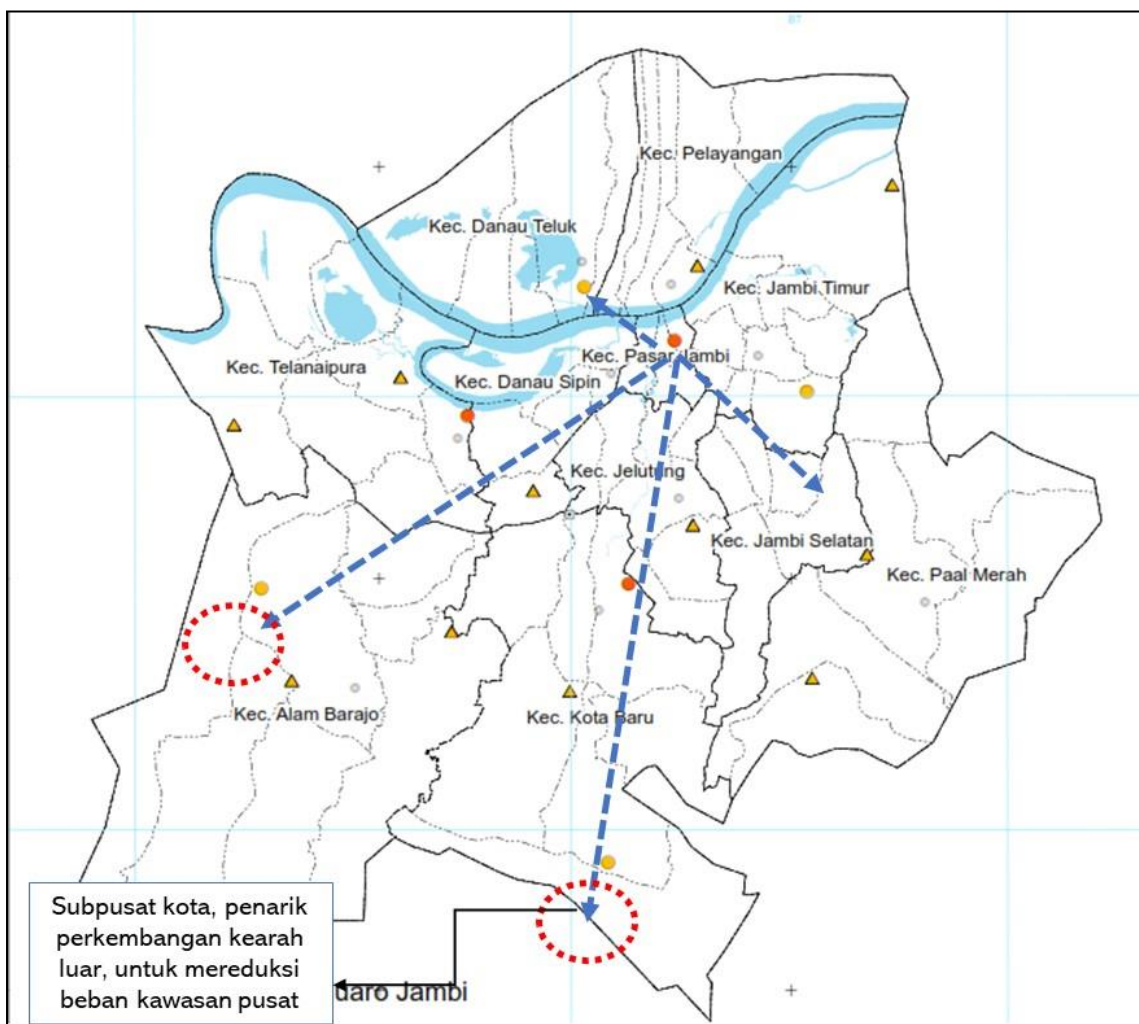
- a. beberapa pusat lingkungan yang tidak terealisasi, baik secara utuh maupun secara besaran;
- b. trase Tol Sumatera dan trase rel kereta api yang tidak lagi melintasi wilayah administrasi Kota Jambi;
- c. kebutuhan restrukturisasi fungsi-fungsi jaringan jalan;
- d. rumusan baru rencana pengembangan jaringan kelistrikan;
- e. perkembangan realisasi *city gas*; dan
- f. perkembangan kawasan permukiman yang berimplikasi terhadap kebutuhan pengembangan jaringan utilitas.

1. Rencana Sistem Pusat-pusat Kegiatan

Pusat – pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional. Dalam pembagian orde perkotaan dalam wilayah Provinsi Jambi. Tidak ada arahan yang berubah terkait peran dan fungsi Kota Jambi dalam rumusan revisi RTRWN dan Revisi RTRW Provinsi Jambi, dimana Kota Jambi masih merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Jambi, Pusat Perdagangan dan jasa regional, Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, Pusat

Industri, Simpul Transportasi Regional, Pusat Pendidikan tinggi, Pusat Perumahan skala besar.

Secara makro, konsepsi yang diusung dalam penetapan sistem pusat-pusat kegiatan di Kota Jambi adalah bagaimana mendistribusikan beban pusat kegiatan utama yang diikuti dengan beban pergerakan pada ruas jalan utama, serta menarik perkembangan ke arah luar, untuk menciptakan perkembangan di arah luar sebagai kawasan pengembangan permukiman, dan menjaga pergerakan dari luar kota, mengingat Kota Jambi berperan sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jambi.



Gambar 2.114
Konsepsi Sistem Pusat-pusat Kegiatan

Dari konsepsi diatas, rencana sistem pusat-pusat kegiatan di Kota Jambi selanjutnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota merupakan suatu pusat layanan yang memiliki wilayah pelayanan satu kota ataupun wilayah regional yang lebih luas. Secara umum, Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh kegiatan nonpertanian terutama perdagangan dan jasa, perkantoran, serta permukiman. Oleh karena ini, penetapan pusat-pusat pelayanan Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh skala pelayanan dari aspek-aspek kegiatan perkotaan tersebut.

Kegiatan yang terdapat di Kota Jambi yang memiliki skala pelayanan meliputi seluruh bagian kota ataupun regional adalah kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan administrasi pemerintahan provinsi, serta pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota. Oleh karena itu, pusat pada orde pertama ini ditetapkan di:

- 1) kelurahan Pasar dan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional;
- 2) kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura, sebagai pusat pemerintahan provinsi; dan
- 3) kelurahan Paal V Kecamatan Jelutung, sebagai pusat pemerintahan kota.

b. Subpusat Pelayanan Kota

Kawasan subpusat merupakan kawasan yang memiliki skala pelayanan terhadap sub-wilayah kota. Tujuan penetapan kawasan sub pusat pelayanan diantaranya adalah untuk mendukung fungsi Kota Jambi sebagai pusat regional yang diharapkan mampu mereduksi beban yang ditanggung kawasan pusat kota. Penentuan kawasan subpusat ini didasari oleh kondisi fungsional kawasan yang mampu memberikan pelayanan terhadap bagian wilayah kota yang didukung oleh aksesibilitas yang memadai baik terhadap Kawasan Pusat Pelayanan Kota maupun pusat-pusat lingkungan yang dilayani. Rencana penetapan kawasan sub pusat pelayanan kota di Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

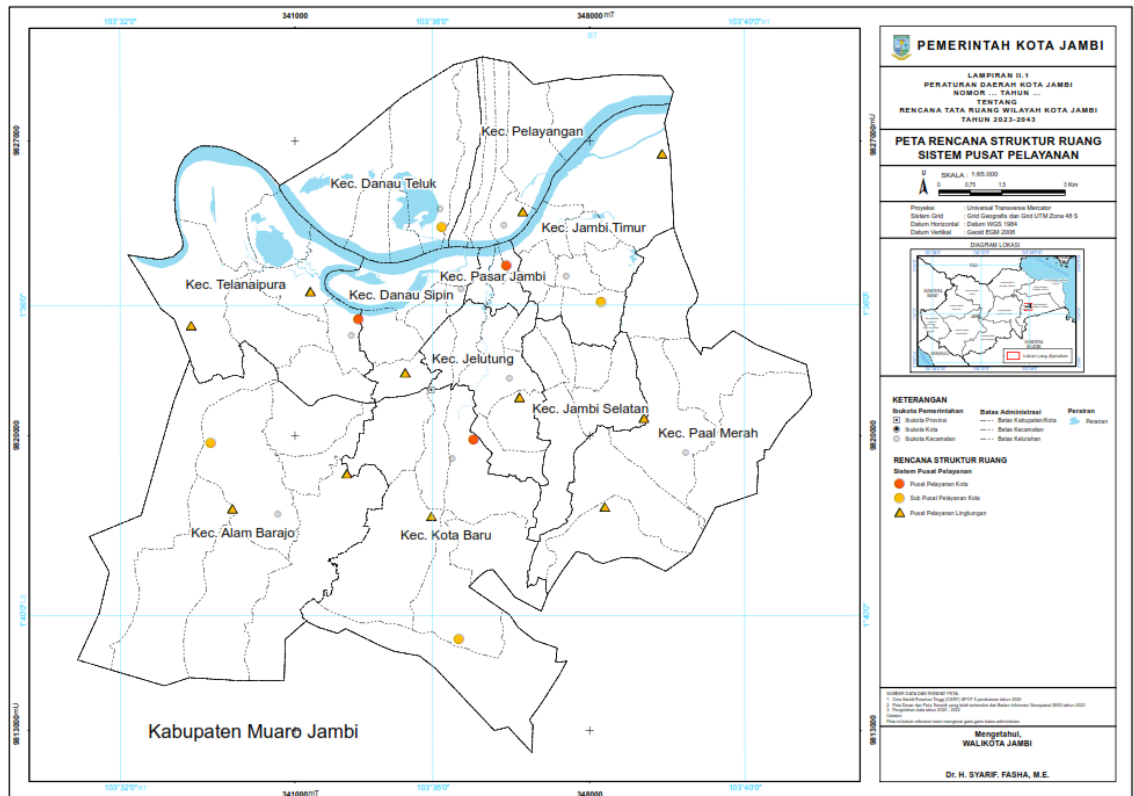
- 1) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Olak Kemang;

- 2) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Talang Banjar;
- 3) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kenali Besar; dan
- 4) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kenali Asam Bawah.

c. Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan untuk melayani kegiatan dengan skala wilayah lingkungan kota. Keberadaan pusat lingkungan salah satunya berfungsi untuk mendukung keberadaan subpusat pelayanan kota melalui reduksi terhadap beban dari subpusat pelayanan kota itu sendiri. Penetapan pusat lingkungan didasarkan kepada gejala fungsional kawasan secara eksiting. Pusat-pusat lingkungan di Kota Jambi yang direncanakan tersebar disetiap SWP terkecuali SWP I, pusat-pusat lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Arab Melayu.
- 2) Kelurahan Sijenjang
- 3) Kelurahan Pasir Putih
- 4) Kelurahan Lingkar Selatan
- 5) Kelurahan Mayang Mangurai
- 6) Kelurahan Bagan Pete
- 7) Kelurahan Penyengat Rendah
- 8) Kelurahan Kenali Asam.



Gambar 2.115
Peta Rencana Sistem Pusat-pusat Kegiatan

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi (Prasarana Jaringan Jalan)

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi dirumuskan untuk mendukung perwujudan peran Kota Jambi sebagai PKN. Rencana pengembangan sistem transportasi darat di Kota Jambi diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan, simpul transportasi (terminal) bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana sistem transportasi di Kota Jambi ini, adalah sebagai berikut :

- keseimbangan pembangunan wilayah;
- keterpaduan sistem transportasi lokal (dalam Kota);
- minimasi biaya atau memanfaatkan kondisi eksisting secara optimal; dan
- minimasi Konflik guna lahan baik dengan penduduk maupun dengan instansi.

Rencana struktur jaringan jalan di Kota Jambi pada dasarnya akan mengikuti rencana struktur ruang kota, berikut ialah substansi rencana tersebut:

- a) Pola Jalan Kota Jambi akan ditegaskan dengan pola jaringan jalan arteri mengelilingi Kota Jambi dan dihubungkan oleh jalan kolektor yang menghubungkan secara vertikal jaringan jalan arteri dengan pusat kota dan setiap pusat SWP'
- b) Pengembangan jaringan jalan Kota Jambi juga harus dapat mengakomodasi kepentingan regional yang lebih luas. Dalam hal ini peningkatan akses lama dan akses-akses baru bagi pergerakan yang berasal dari regional, ditambah lagi dengan akses terhadap simpul TOL Sumatera yang notabeneanya berada pada wilayah *hinterland*. Oleh karena itu diperlukan akomodasi perkembangan realisasi substansi rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan sistem transportasi Kota Jambi.
- c) Penyesuaian geometri jaringan jalan, penyesuaian yang dimaksud bermakna ganda, yakni penyeragaman minimal terhadap lebar jalan untuk setiap kelas jalan yang sama; serta peningkatan agar ketentuan geometri jalan dan ruang milik jalan sesuai dengan amanat PP 34/2006 mengenai jalan. Hal ini termasuk antisipasi terhadap perkembangan perumahan dan permukiman saat ini dan di masa datang yang membentuk suatu jalan lingkungan yang kemudian terhubung dengan jaringan jalan. Oleh karena itu perlu terdapat suatu mekanisme pengendalian agar jalan yang terbentuk dapat sesuai dengan rencana jaringan jalan dan tidak menimbulkan konflik lalu lintas. Berikut ketentuan umum untuk ragam jenis jalan di Kota Jambi :
 - * Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
 - * Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
 - * Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

- d) Penentuan kelas jalan lokal dan lingkungan bagi ruas – ruas di luar jalan arteri dan kolektor.

Penetapan fungsi – fungsi jaringan jalan Kota Jambi yang tertuang didalam Rencana Struktur Ruang pada RTRW Kota Jambi mengacu kepada Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jambi yang berpedoman kepada Kepmen PU No.631/2009, dimana didalam keputusan menteri tersebut telah menetapkan jaringan jalan arteri primer yang ada di Kota Jambi.

Penetapan fungsi-fungsi jaringan jalan Kota Jambi ini dirasa perlu ditinjau, karena fungsi-fungsi jaringan jalan akan mempengaruhi beberapa susbtansi dalam revisi RTRW ini, seperti rencana intensitas pemanfaatan ruang koridor ataupun peraturan zonasi pada ruang- ruang koridor tersebut. Penetapan fungsi-fungsi jaringan jalan dalam penyusunan materi teknis revisi RTRW ini sebaiknya lebih mempertimbangkan pendekatan kepada apa yang dihubungkan oleh masing-masing ruas jalan. Untuk meninjau kembali fungsi-fungsi jaringan jalan Kota Jambi, perlu diuraikan kembali terkait esensi kawasan primer, kawasan sekunder, jalan fungsi primer, dan jalan fungsi sekunder.

Kawasan Primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Fungsi primer sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terburakan. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.

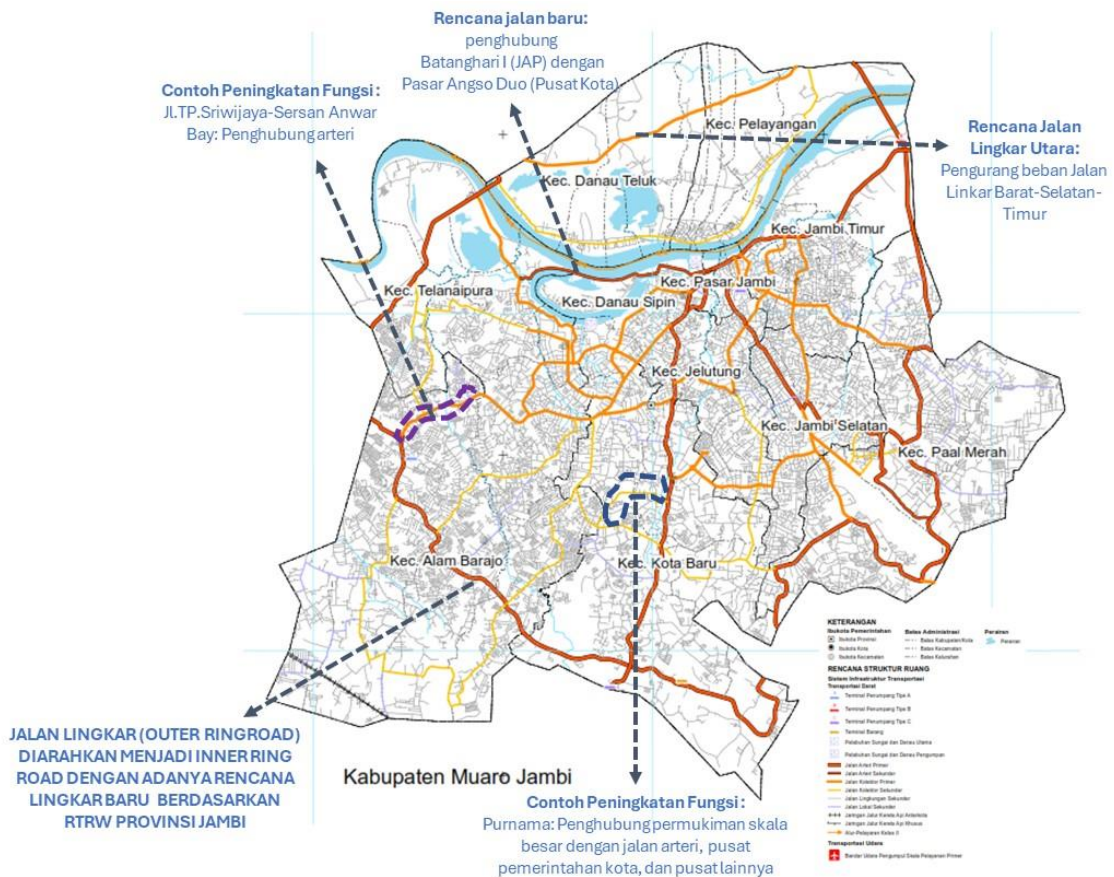
Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder yang bersifat khusus. Fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terburakan. fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.

Dari uraian diatas, dapat diringkas mengenai isu utama penyelenggaraan sistem jaringan jalan di Kota Jambi, yaitu:

- a) Penurunan tingkat pelayanan jalan utama sebagai dampak peningkatan pergerakan dan semakin terbatasnya kapasitas daya tampung jalan;
- b) Keterlambatan penetapan fungsi jalan yang berdampak terhadap penetapan intensitas bangunan di koridor jalan tidak berdasarkan fungsi, sehingga peningkatan dimensi semakin sulit diupayakan pada saat ini.

Untuk meningkatkan kinerja sistem jaringan jalan kota, konsepsi utama dalam pengembangan jaringan jalan di Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Penyesuaian Nomenklatur Status dan Fungsi berdasarkan Kepmen 367/2023 (kewenangan nasional) ;
- b) Peningkatan interseksi/penghubung antar jalan arteri atau jalan arteri dengan jalan kolektor, untuk mereduksi beban pada ruas jalan utama dan beban persimpangan sebidang.



Gambar 2.116
Konsepsi Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kota Jambi

Berdasarkan pertimbangan diatas, rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Jambi meliputi :

a. Jalan Arteri

1. Jalan Arteri Primer:

Penetapan ini didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu: Kepmen PUPR Nomor 367/2023 tentang Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:

- a. Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) – Bts Kota Jambi/ Sp. Rimbo;
- b. Sp. Pal Sepuluh – Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp.Gado-Gado);
- c. Sp. Gado-Gado –Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II);
- d. Sp. Sijenjang – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi;

- e. Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah – Sp. Pal Sepuluh – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
- f. Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru – Sp. Kenali Asam Bawah);
- g. Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat – Sp. Kota Baru);
- h. Jln. M. Yamin (Sp. Pulai – Sp. Kawat);
- i. Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Museum Perjuangan – Sp. Pulai);
- j. Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp. 3 Jl Fatmawati – Sp. Museum Perjuangan);
- k. Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp. 3 Jl Fatmawati – Sp. Duren);
- l. Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren – Sp. Sijenjang – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
- m. Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata – Sp. Tugu Pers);
- n. Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata – Sp. Jelutung);
- o. Jln. Jend.Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher);
- p. Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi);
- q. Jln. Rb Siagian - Sp.Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi);
- r. Sp. Mendalo Darat (lingkar Barat) – Bts. Kota Jambi;
- s. Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi);
- t. Bts. Kota Jambi – Tempino;
- u. Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) – Sp. Mendalo Darat; dan
- v. Jalan Lingkar Utara Kota Jambi.

2. Arteri Sekunder,

- a. Jalan Kop. Ud. Syaring; dan
- b. Jalan Buluran-Danau Sipin-Angso Duo.

b. Jalan Kolektor

Jalan kolektor di Kota Jambi terdiri atas Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) dan Jalan Kolektor Sekunder yang merupakan upaya peningkatan fungsi beberapa ruas jalan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan menurunkan beban jalan arteri, yang terdiri atas:

1. Jalan kolektor primer, terdiri atas :
 - a. Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. Jl. Raden Mattaher – Jln. M. Husni Thamrin;
 - c. Jln. Rangkayo Hitam - Jln. Abdul Kartawirana - Jln. Rangkayo Pingai - Jln. Sentot Alibasa;
 - d. Jln. Dr.Sutomo;
 - e. Jln. Dr.Setia Budi - Jln. KH. Hasyim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro;
 - f. Jln Gajah Mada - Jln. Hayam Wuruk;
 - g. Jln. Kol. Polisi M.Taher - Jln. GR.Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari - Jln. Brigjend Katamso;
 - h. Jln. Hos Cokro Aminoto;
 - i. Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo;
 - j. Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi,Ms - Jln. Yusuf Singedekane - Jln. H.A Manap - Jln. Arief Rahman Hakim;
 - k. Jln. RE. Martadinata - Jln. Jend.A.Yani - Jln. Jend. MT. Haryono;
 - l. Jln. Jend. Basuki Rahmat - Jln. H. Agus Salim - Jln. H. Adam Malik;
 - m. Jln. Abdul Rahman Saleh;
 - n. Jln. Kapten Patimura - Jln. Kapten Bakarudin;
 - o. Simp. Ahok (Kota Jambi) – Bts. Kab. Muaro Jambi;
 - p. Jalan Jend. Sudirman (Jambi) - Jln. Abdul Rahman Saleh;
 - q. Jln. Kol. Abunjani - Jln. Sumantri Brojonegoro;
 - r. Jln. Ade Irma Suryani - Jln. Dr. Siwabessy - Jln. Kh. Abdul Malik Jambi; dan
 - s. Jln. Amir Hamzah (Sei. Kambang).
2. Jalan Kolektor Sekunder (JKS), terdiri atas:
 - a. Jln. Ir. H. Juanda;
 - b. Jln. R.K. Sjahbuddin;
 - c. Jln. Let. Muda Sarniem;
 - d. Jln. Multatuli;

- e. Jln. Lirik;
- f. Jln. Dharma Wangsa;
- g. Jln. TP. Sriwijaya;
- h. Jln. Sersan Anwar Bay;
- i. Jln. Ismail Malik;
- j. Jln. Penerangan;
- k. Jln. Depati Purbo;
- l. Jln. Purnama;
- m. Jln. Sunan Drajat;
- n. Jln. DI Pandjaitan;
- o. Jln. Yoenis Sanis;
- p. Jln. Kms. M. Saleh;
- q. Jln. KH. Qodir Ibrahim;
- r. Jln. K.H. Tomok;
- s. Jln. Dr. Purwadi;
- t. Jln. Wali Songo;
- u. Jln. KH. Tumenggung Jafar;
- v. Jln. K.H. Madjid - batas kota;
- w. Jln. KH. Zaini Kadir;
- x. Jln. Penghubung Perumnas Aur Duri – Lingkar Barat (Padang Lawas);
- y. Penghubung Jln. Depati Purbo - Lingkar Barat (Padang Lawas);
- z. Jln. Sersan UD. Syawal;
- aa. Jln. Iswahyudi; dan
- bb. Jln. Kop. Ud. Syargawi/Bajuri I.

c. Jalan Lokal

Jalan lokal di Kota Jambi merupakan jalan lokal sekunder, yang terdiri atas :

- a. Jln. H. Muhammad Dahlan;
- b. Jln. Sumbiyono;
- c. Jln. Dr. Mawardi;

- d. Jln. Villa Kenali;
- e. Jln. Sari Bakti;
- f. Jln. Sultan Hasanuddin;
- g. Jln. Marene;
- h. Jln. Merpati Utama;
- i. Jln. Liposos II;
- j. Jln. Sersan Darpin;
- k. Jln. Konsolidasi Tl. Bakung;
- l. Jln. Gunung Jati;
- m. Jln. RB. Siagian;
- n. Jln. Sunan Giri;
- o. Jln. Tembus Sersan Bais Yulius Usman;
- p. Jln. Sersan Bais III;
- q. Jln. Sersan Bais;
- r. Jln. Pajajaran;
- s. Jln. Garuda 1;
- t. Jln. Gunung Semeru;
- u. Jln. Lingkaran BBH;
- v. Jln. Nurus Solihin;
- w. Jln. Lingkaran Bagan Pete; dan
- x. Jln. Pinang Merah - Bts. Muaro Jambi.

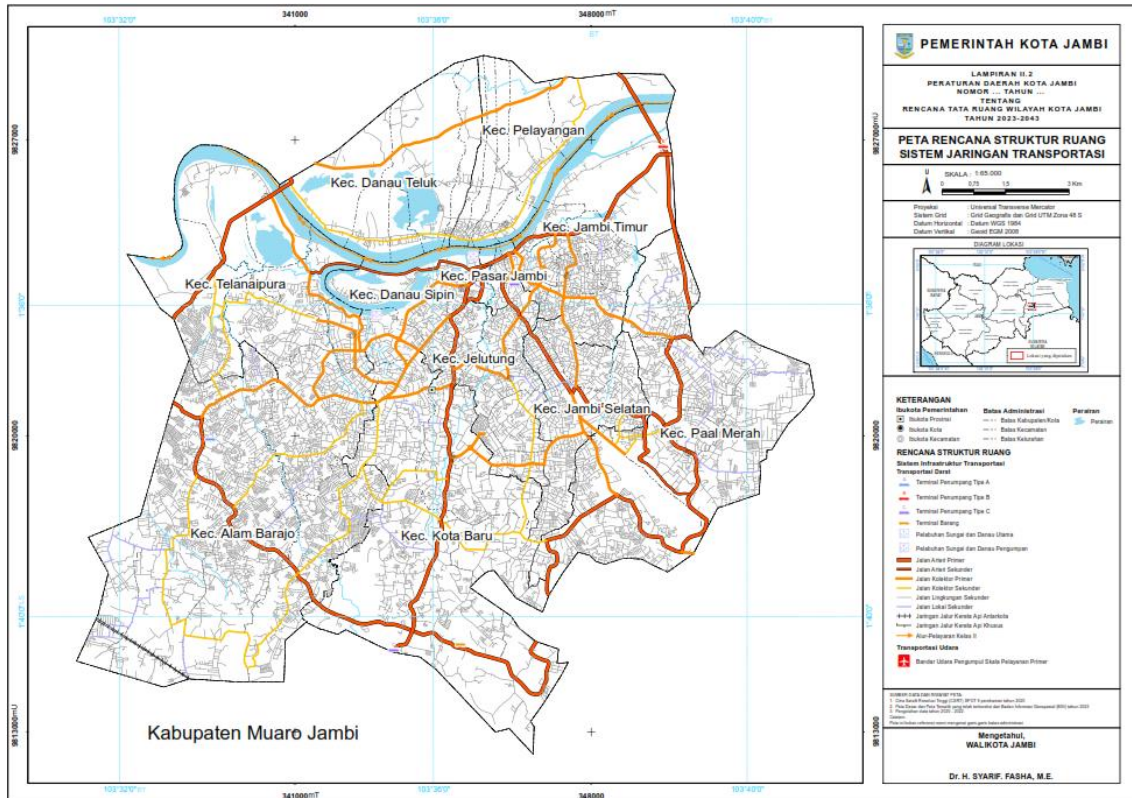
d. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan penghubung unit lingkungan dan/atau perumahan pada kawasan permukiman dalam wilayah Kota Jambi.

Dari rencana sistem jaringan jalan Kota Jambi tersebut diatas, dapat diringkas bahwa terdapat beberapa ruass Rencana pembangunan jalan baru. terdiri atas :

- a. Jalan lingkaran utara;
- b. Jalan layang Sudirman-Gatot Soebroto;
- c. Jalan layang Simpang Paal X;

- d. Jalan layang A. Bakaruddin;
- e. Jalan tembus menuju Sungai Bertam (Kabupaten Muaro Jambi);
- f. Jalan Buluran-Danau Sipin ke Angso Duo; dan
- g. penghubung Jalan Diparti Parbo-Lingkar Barat (Padang Lawas)



Gambar 2.117
Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

C. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;

- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa dinamika yang mempengaruhi perubahan rencana pola ruang Kota Jambi, meliputi:

- a. Perubahan batas administrasi yang mempengaruhi beberapa lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Perubahan struktur jaringan jalan penghubung pusat kegiatan regional di Kota Jambi;
- c. Pembangunan fasilitas skala kawasan di Seberang Kota Jambi;
- d. Rencana pengembangan jaringan energi kelistrikan regional; dan
- e. Dinamika kebutuhan pengembangan ekonomi kota terkait dengan peran dan fungsi Kota Jambi.

Rencana pola ruang merupakan aspek yang sangat penting dalam perumusan Rencana Tata Ruang ini, mengingat permasalahan yang banyak terjadi justru dalam penafsiran terhadap rencana pola ruang yang diatur pada suatu bagian wilayah. Rencana pola ruang sering menjadi polemik dikarenakan penzoningan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masih terbilang makro dan masih mengalami beberapa kendala untuk diimplementasikan. Beberapa kebijakan penataan ruang Kota Jambi yang berkaitan dengan rencana penataan ruang yang juga sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan konsep pola ruang nantinya, meliputi :

- a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, yang dilaksanakan dengan strategi mengembalikan fungsi dan merivitalisasi fungsi lindung pada kawasan seperti sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan resapan air lainnya;

- b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, yang dilaksanakan dengan strategi mempertahankan RTH, meningkatkan ketersediaan, dan mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH perkotaan tersebut.
- c. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, yang dilaksanakan dengan strategi memisahkan kegiatan permukiman dengan kegiatan industri, mengarahkan pengembangan permukiman pada kawasan cadangan pengembangan kota ;
- d. pengembangan ruang Kota yang terintegrasi dan efisien, yang dilaksanakan dengan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan CBD melalui pengembangan bangunan vertikal.

Secara lebih ringkas, distribusi pola ruang Kota Jambi dapat diuraikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.107
Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Jambi

Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	
Badan Air	950
Pemukaman	45
Rimba Kota	135
Ruang Terbuka Hijau	12
Taman Kelurahan	9
Taman Kota	66
Kawasan Perlindungan Setempat	2.121
sub	3.338
Kawasan Budi Daya	
Badan Jalan	72
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	112
Kawasan Hortikultura	53
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	28
Kawasan Pariwisata	2
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	16
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2.534
Kawasan Perkantoran	92
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	34
Kawasan Perumahan	9.333
Kawasan Peruntukan Industri	740
Kawasan Tanaman Pangan	459
Kawasan Transportasi	176
sub	13.651
total	16.989

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan
- h. kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota;
- i. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan
- j. strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- k. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- l. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
- m. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi, sementara Kawasan Strategis Kota terdiri atas Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi dan Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis kota berfungsi untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi daya dukung lingkungan hidup di wilayah kota; sebagai pertimbangan penyusunan indikasi program; serta sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kota.

a) Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi

cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi sektor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan energi, memiliki sumber daya yang strategis, serta dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam kota.

Kawasan strategis dari perspektif ekonomi bagi Kota Jambi adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Angso Duo. Secara fungsional kawasan ini meliputi seluruh SWP I. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Angso Duo merupakan kawasan yang didorong untuk menjadi pusat dari perdagangan dan jasa skala kota. Kawasan ini mencakup seluruh SWP I dengan luas kawasan 877,647 Ha. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi yang cepat tumbuh serta dukungan prasarana yang ada.

Strategi pengembangan kawasan ini antara lain adalah:

- a. mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub pusat – sub pusat kegiatan
- b. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan
- c. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi antara lain:

- a. Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi
- b. Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin
- c. Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
- d. Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan
- e. Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.

Sedangkan untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi antara lain:

- a. monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
- b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- e. pembangunan gedung parkir

b) Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya mencakup tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat/budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi konflik sosial, hasil cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri. Dalam hal ini kawasan strategis yang dipromosikan dengan perspektif sosial dan budaya meliputi kawasan cagar budaya yang terletak di SWP II dengan luas kawasan seluas 55,612 Ha.

Strategi pengembangan kawasan cagar budaya antara lain :

- a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
- b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

Kawasan Strategis Jambi Kota Seberang sebagai kawasan strategis dari perspektif sosial budaya didasarkan pada potensi pelestarian budaya masyarakat Kota Jambi meliputi proses dan produksi batik Jambi, peninggalan dan aktivitas pendidikan Islam yang telah berusia satu abad, Balai Kerajinan Masyarakat Jambi, dan aksesibilitas menggunakan perahu tradisional masyarakat Kota Jambi. Pengembangan kawasan ini memerlukan suatu perencanaan rinci lebih lanjut yang mengatur penataan ruang kawasan berupa

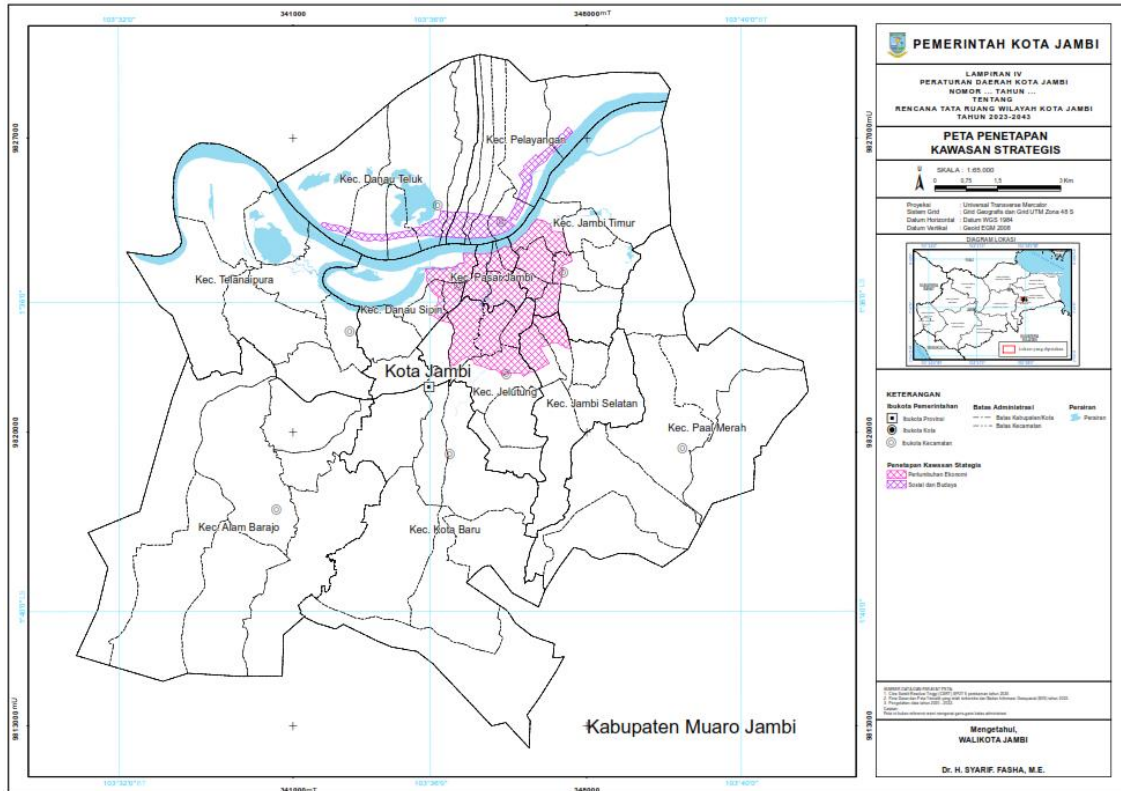
sentra – sentra obyek budaya yang dapat dijadikan komoditas pariwisata sekaligus memiliki fungsi pendidikan dan pelestarian. Untuk mendukung hal tersebut diarahkan pula pengembangan kawasan perumahan berkepadatan rendah di kawasan tersebut, untuk mendorong tumbuh kembangnya kegiatan kawasan.

Kawasan strategis sosial budaya berada di kelurahan yang ada di Kota Jambi antar lain:

- a. Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.
- b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.

Sedangkan untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain:

- a. pengendalian dan pengembangan kegiatan budidaya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukkan ciri khas lokal;
- b. penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
- b. pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
- c. pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.



Gambar 2.120
Kawasan Strategis Kota Jambi

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi ketidakseimbangan pembangunan terhadap aspek-

aspek perkotaan. Semakin pesat perkembangan akan berpotensi semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan masalah yang komprehensif, akurat, dan akuntabel. Selain bersumber dari data, informasi, dan masukan *stakeholders* dalam kegiatan Musrenbang dan questioner, pemetaan isu strategis juga bersumber dari isu strategis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Jambi yang sudah lebih dahulu disusun.

Tujuan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan saat ini dan yang akan datang di Kota Jambi dan berpotensi menghambat proses pembangunan dalam periode 2025-2045. Permasalahan Kota Jambi diidentifikasi dalam beberapa aspek, meliputi: aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola dengan melihat *gap* capaian indikator pembangunan ataupun bersumber dari penjarangan isu dan permasalahan di Kota Jambi.

A. ASPEK SOSIAL EKONOMI

Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi terutama untuk peran pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Arah-an arah kebijakan, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jambi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi. Beberapa arahan kebijakan eksternal tersebut yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi kedepan, diantaranya adalah: a). Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dimana pembangunan infrastruktur ini dapat berpengaruh baik terhadap perkembangan Kota Jambi, misalnya penurunan beban jalan lingkar saat ini, serta semakin meningkatnya aksesibilitas wilayah provinsi sekitar, sehingga dapat meningkatkan orientasi pelayanan Kota Jambi, namun demikian juga berpotensi terjadi penurunan pergerakan yang melintasi Kota Jambi dan berdampak penurunan interaksi ekonomi dari bangkitan perjalanan yang selama ini melintasi Kota Jambi; b). rencana pembangunan Jambi *outer ring road* yang selanjutnya akan berada di wilayah kabupaten berbatasan. Sama halnya dengan JTTS, dimana infrastruktur ini dapat membantu mereduksi beban pergerakan dan

percampuran antar moda di jalan lingkar saat ini, namun demikian pada masa yang akan datang, kegiatan industri besar dan pergudangan yang ada di Jalan Lingkar Selatan berkemungkinan akan tertarik ke jalan lingkar baru yang notabene berada di wilayah administrasi kabupaten berbatasan;c). arahan kebijakan nasional, pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi. Sampai saat ini, Kabupaten Muaro Jambi yang secara geografis mengelilingi Kota Jambi menyebabkan kabupaten ini masih menjadikan Kota Jambi sebagai orientasi utama kegiatan sosial dan ekonomi. Begitu juga nantinya dengan perkiraan dampak kedepan terkait dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking, dimana kawasan ini akan menarik pergerakan tenaga kerja dan perjalanan dengan orientasi konvensi, sehingga dapat berdampak terhadap pusat-pusat ekonomi dan jasa yang berada di Kota Jambi.

Secara internal, persoalan utama pembangunan utama Kota Jambi saat ini yaitu belum tercapainya indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat pengangguran terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 8,24%. Dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,05% per tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena trend angka kemiskinan tersebut dapat dikategorikan stagnan dan cenderung meningkat terutama pasca Pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 0,339 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 masih tinggi sebesar 8,27%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang dikendalikan dengan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktivitas di ruang publik turut andil membuat tingkat pengangguran di Kota Jambi meningkat. Selain itu kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industry juga berpengaruh. Kekurangan ini dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, selain meningkatkan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru, maka dibutuhkan penciptaan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari tenaga kerja saat ini juga menjadi tantangan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan *skill* yang mumpuni.

Peran Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini belum secara optimal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja. Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, dibutuhkan *link and match* antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam meningkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan

UMKM/IKM lokal seperti peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih harus menjadi perhatian di Kota Jambi. Pada periode 2018-2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Pemicu terbesar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi ekonomi perekonomian keluarga dan pernikahan dini yang menyebabkan anggota rumah tangga belum memiliki kesiapan dalam berkeluarga serta memiliki kondisi mental psikologis yang belum stabil.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situ/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan *output* yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota

Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah.

Selain dalam hal investasi, kurangnya peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi di kota Jambi juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta, maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan aktivitas dan taraf ekonomi ekonomi suatu daerah. Selain dalam hal perputaran ekonomi, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah, utamanya

Tabel 3.1
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi

Pusat Isu	Permasalahan
Sosial Ekonomi	1. Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan ketersediaan ruang yang tertata untuk perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
	2. Pembangunan pada wilayah eksternal kota, seperti: Tol Sumatera, jalan lingkar baru, dan kawasan industri dapat meningkatkan interaksi ekonomi terhadap Kota Jambi, namun juga memiliki potensi mereduksi interaksi antara pergerakan regional yang selama ini melewati wilayah Kota Jambi.
	3. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
	4. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pusat Isu	Permasalahan
	<p>5. Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (Terampil)</p> <p>6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.</p> <p>7. Kurangnya Pendidikan Vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang terampil</p> <p>8. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata</p> <p>9. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis cagar budaya dan religi</p> <p>10. Relatif masih tingginya kasus kejahatan terhadap anak</p>
Sumber Daya Ekonomi	<p>1. Rendahnya daya saing UMKM/IKM lokal</p> <p>2. Kurang optimalnya Tingkat penggunaan teknologi produksi oleh IKM</p> <p>3. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>4. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi pemasaran produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan produktivitas IKM</p> <p>6. Belum optimalnya penataan pasar dan pedagang K5</p> <p>7. Perlunya peningkatan Pembinaan dan pelatihan pengelola dan tenaga kerja IKM</p>
Dukungan Ekonomi	<p>1. Masih minimnya peran investasi luar negeri terhadap pengembangan Ekonomi</p> <p>2. Masih minimnya peran pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi</p>

Dalam aspek sosial ekonomi ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu:

- a. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim; dan
- b. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

B. Aspek Sumberdaya Manusia

Stunting masih menjadi fokus utama dalam upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat. Meskipun berada di bawah level nasional, prevalensi Stunting Kota Jambi tergolong tinggi, pada tahun 2022 berada di angka 14 %. Dari sisi penyediaan layanan kesehatan, Kota Jambi memiliki permasalahan terkait masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis serta tingkat profesionalisme tenaga kesehatan yang masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, rasio dokter per penduduk di Kota Jambi sebesar 22,186 per 100.000 penduduk. Angka ini jauh dibawah nasional yang berada pada angka 32 dokter per 100.000 penduduk. Salah satu implikasinya adalah penanganan kasus *Tuberculosis* (TBC) dan HIV/AIDS masih belum optimal karena keterbatasan dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja kesehatan yang memadai. Meskipun demikian persentase capaian *Treatment Coverage* (TC) untuk penderita TBC di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 persentase TC mencapai 35,15%, meningkat dari TC tahun 2022 sebesar 26,06%.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia juga terjadi di sektor pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu isu utama adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata yang ditandai dengan minimnya sertifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Rasio guru dan murid Kota Jambi masih berada di bawah level nasional yakni 0,057 untuk tingkat SD sederajat dan 0,066 untuk tingkat SMP dan sederajat pada tahun 2023.

Selain itu, kualitas infrastruktur pendidikan dari tingkat SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kota perlu untuk ditinjau kembali agar dapat benar-benar memadai dan mendukung proses pembelanjaan yang modern, berbasis teknologi dan bersifat inklusif. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta dalam sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Swasta dan Asuransi Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%. Untuk tahun 2023, penduduk Kota Jambi yang dilayani oleh Jamkesda meningkat menjadi 4,21% atau 26.469 jiwa.

Tabel 3.2
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia

Pusat Isu	Permasalahan
Kualitas Masyarakat Kesehatan	Masih terdapatnya kasus stunting
	Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS
	Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
	Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat
	Belum maksimalnya kepesertaan jaminan kesehatan
Kualitas Masyarakat Pendidikan	Persebaran kualitas tenaga pendidik yang belum merata
	Rasio tenaga pendidik dengan peserta didik yang masih

Pusat Isu	Permasalahan
	rendah Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan maju dan modern.

Dalam aspek sumberdaya manusia ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar).

C. Infrastruktur Daerah

Ketersediaan infrastruktur daerah terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Salah satu komponen infrastruktur daerah yang perannya strategis dalam mendorong kegiatan logistik adalah jalan. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga meningkat. Persoalan utama yang dihadapi terkait jalan adalah meningkatnya trafik dari transportasi batubara di jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Selama periode 2018-2022, rasio jalan berkondisi baik di Kota Jambi mengalami penurunan. Selain itu, terkait transportasi publik, isu yang dihadapi adalah belum tersedianya penyediaan transportasi publik perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Selain jaringan jalan, infrastruktur yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum dan listrik. Saat ini, pelayanan air minum perpipaan Kota Jambi masih berada pada Tingkat 69%-71%. Pelayanan yang fluktuatif beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kawasan perumahan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penyediaan/pengembangan pelayanan jaringan perpipaan. Pada dasarnya masih terdapat *idle capacity* air minum di Kota Jambi, namun untuk penyaluran masih terkendala oleh kondisi jaringan perpipaan di beberapa bagian wilayah merupakan jaringan lama yang tidak relevan untuk melayani penyaluran bertekanan tinggi. Selain itu, ketersediaan jaringan

perpipaan juga belum mencakup seluruh bagian wilayah kota. Pesatnya perkembangan daerah terbangun, menyebabkan pengembangan jaringan masih kalah cepat. Oleh karena itu, pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Jambi kedepan, selain peningkatan jaringan pada kawasan terbangun saat ini, juga perlu peningkatan kapasitas produksi IPA dan jangkauan pelayanan terhadap kawasan-kawasan yang akan menjadi cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi kedepan, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Untuk infrastruktur jaringan energi terutama kelistrikan, kebutuhan Kota Jambi dilayani oleh pembangkit di Payo Selincah dibantu oleh PLTMG Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sama halnya dengan jaringan air minum, dimana jaringan listrik pada beberapa bagian wilayah masih perlu peningkatan saluran tegangan rendah untuk distribusi ke konsumen, terutama pada kawasan cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi kedepan, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Peningkatan tutupan lahan juga berdampak terhadap peningkatan *run off* yang berbanding terbalik dengan kemampuan saluran drainase yang ada pada saat ini. Masih minimnya infrastruktur sumberdaya air, menyebabkan sekitar 1.301 ha lahan permukiman perkotaan sangat rentan terhadap bencana banjir.

Tabel 3.3
Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik
	Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan
	masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk mengurangi beban jalan utama
	belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan

Pusat Isu	Permasalahan
	Kebutuhan peningkatan dermaga penyeberangan sungai
Jaringan Utilitas Kota	Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi air minum dan listrik pada kawasan pengembangan permukiman kota
	Jaringan pipa gas rumah tangga belum merata
	Kebutuhan peremajaan jaringan pipa air minum eksisting
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem telekomunikasi jaringan tetap
	Sistem jaringan sumberdaya air yang belum memadai

Dalam aspek infrastruktur ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: kondisi jalan mantap.

D. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan intepretasi citra satelit tahun 2021, diperkirakan jumlah bangunan yang berada pada zona peruntukan lindung seperti sempadan sungai dan danau sebanyak 11.797 unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 ha.

Selain itu, pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan

ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalam melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalui aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi lahan yang lain. Semakin meningkat perkembangan kota, semakin meningkat pula bangkitan pergerakan, sementara prasarana jalan terlambat berkembang dan menimbulkan penurunan signifikan terhadap kemampuan pelayanan jalan-jalan utama kota, kemacetan, dan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Beberapa permasalahan lain terkait lingkungan di Kota Jambi misalnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *E.Choli* yang signifikan berasal dari limbah domestik.

Sementara itu, Belum semua bagian wilayah terlayani oleh sistem persampahan kota. Pelayanan persampahan saat ini 74,97%. 20 (dua puluh) tahun yang akan datang produksi timbulan sampah diperkirakan akan meningkat sekitar 496,08 ton/hari.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah domestik atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, serta Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien.

Untuk menjaga kondisi lingkungan yang layak hingga 20 tahun ke depan, pemerintah Kota Jambi perlu menindaklanjuti hal ini dengan pendekatan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon serta mengoptimalkan sampah sebagai salah satu sumber energi melalui kebijakan *waste to energy*.

Tabel 3.4
Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Ruang	Belum tersedia rencana rinci tata ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang
	Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan tidak sesuai daya dukung dan kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup
	Arah pengembangan perumahan yang belum terarah dengan baik
	Konflik ruang industri dengan perumahan
	Alih fungsi lahan pertanian perkotaan dan kebutuhan Kebutuhan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan
	Kebutuhan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mereduksi beban pusat eksisting
	Ketersediaan RTH Publik yang belum mencapai 20%.
Lingkungan Hidup	Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator

Pusat Isu	Permasalahan
	pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung greywater rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS.
	Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon
	Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.
	Permukiman dengan kualitas lingkungan kurang baik
	Peningkatan kerentanan bencana banjir. Dilihat pada peta sebaran kawasan rawan banjir, Kerentanan tidak lagi hanya terjadi di sekitar DAS Batanghari, melainkan juga pada sub DAS dan bahkan saluran sekunder. Kondisi ini disebabkan oleh karena semakin menurunnya bidang resapan dan meningkatnya runoff sehingga subDAS (sistem primer) dan saluran sekunder tidak lagi mampu melayani pengaliran dengan kecepatan ideal.
	Kerentanan bencana kebakaran di kawasan permukiman

Dalam aspek tata ruang dan lingkungan hidup ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu:

- a) persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi aman;
- b) persentase sampah terkelola; dan
- c) proporsi RTH perkotaan untuk semua.

E. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan

mandiri jika proporsi PAD terhadap total pendapatan minimal sebesar 50%. Kota Jambi pada periode 2018-2022 memiliki rata-rata proporsi PAD sebesar 23,06 yang menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mencapai kemandirian fiskal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, terdapat kendala dalam pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Kondisi sektor unggulan yang menjadi kontributor utama PAD bagi perekonomian daerah merupakan hal yang harus dijaga oleh Pemerintah, Secara langsung, Kota Jambi menjadi pusat transaksi atau penjualan komoditas perkebunan seperti Sawit dan Karet. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan dimaksud. Pemerintah perlu menyadari bahwa harga komoditas unggulan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada PAD atau perekonomian daerah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani secara langsung.

Tabel 3.5
Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Keuangan Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah

F. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan dalam hal Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik serta kualitas layanan yang akuntabel yang belum optimal.

Tabel 3.6
Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya implementasi <i>e-government</i> pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik
	belum optimalnya kualitas layanan yang akuntabel
	Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan

Dalam aspek tata kelola ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi adalah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan

pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 20 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama dalam pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Adanya kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa periode terakhir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian utama dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang mampu berdampak signifikan. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, yakni dengan memfokuskan pada program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang perlu difokuskan adalah memberikan akses kepada aset dan modal yang produktif.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Jambi. Penciptaan lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dukungan terhadap UMKM perlu menjadi perhatian terutama dukungan terkait permodalan, akses pasar, pemasaran secara digital, serta literasi keuangan.

3.2.2. Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendukung konektivitas mutlak diperlukan. Daerah yang memiliki konektivitas yang baik dapat

menurunkan biaya logistik khususnya yang tersambung pada kawasan-kawasan pusat industri. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pendukung aktivitas ekonomi seperti peningkatan kualitas jalan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik. Terlebih lagi karena sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Jambi.

Melihat kondisi saat ini, perkembangan kota semakin berdampak terhadap penurunan kemampuan pelayanan jalan utama. Sistem jaringan jalan yang belum terstruktur dengan baik untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, serta peluang peningkatan dimensi yang terbatas untuk menampung pergerakan yang semakin meningkat perlu menjadi perhatian untuk pengembangan jalan-jalan interseksi, pembangunan konektivitas baru, ataupun penataan persimpangan sebidang. Secara umum, dalam lingkup regional sudah ada rencana pembangunan jalan tol yang beberapa simpulnya berada di *hinterland* Kota Jambi, dan masih dalam lingkup kebijakan regional sudah ada rencana pembangunan *outer ring road* baru di wilayah kabupaten berbatasan, sehingga pergerakan, terutama untuk moda angkut barang akan berpindah dari jalan lingkar kota saat ini. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi ekonomi akibat adanya rencana Pembangunan *outer ring road* yang baru serta jalan Tol Trans Sumatera. Kondisi terkini Jalan Tol yang sedang dalam proses pembangunan tidak langsung melewati wilayah administrasi pemerintahan Kota Jambi. Tantangannya, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas jalan penghubung yang menghubungkan jalan Tol kepada pusat-pusat industri di Kota Jambi. Selain itu, penurunan kualitas jalan di dalam kota harus menjadi perhatian serius demi mampu mengoptimalkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain prasarana utama tersebut, aspek infrastruktur lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mempersiapkan perkembangan Kota Jambi ke depan adalah kebutuhan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan yang sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya dan juga upaya

menyiapkan pemenuhan pelayanan terhadap kawasan-kawasan perkembangan baru di Kota Jambi.

3.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM masih menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang daerah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Salah satu parameter yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penghapusan kasus gizi buruk, optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta optimalisasi penanganan PMKS di luar panti.

3.2.4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan hal yang krusial bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global. Kebijakan pembangunan sedapatnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan kualitas lingkungan kota. Kawasan berkarakteristik perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin pesat perkembangan kota, akan semakin tinggi dampak negatifnya terhadap kualitas lingkungan hidup di kota tersebut.

Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional, Isu terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat. Rumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian ruang kota menjadi tantangan bagi kedepan, agar pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi serta memenuhi hak masyarakat akan ruang kota yang nyaman dan layak huni.

3.2.5. Kualitas pelayanan publik dan praktik *Good Corporate Governance* dalam Pemerintahan Daerah.

Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan *e-governance*.

Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai pendukung, fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

B A B IV

VISI MISI DAERAH



Visi dan Misi pembangunan Kota Jambi adalah komponen penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi. Visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi tahun 2025-2045 merupakan gambaran masa depan Kota Jambi yang diinginkan, mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Jambi. Visi dan Misi Kota Jambi akan menjadi acuan perencanaan pembangunan untuk menjawab permasalahan, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Jambi.

4.1 VISI

Dengan mempertimbangkan kondisi, aspirasi dan amanat pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional yang diturunkan pada konteks pembangunan daerah Kota Jambi, maka visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi 2025-2045 adalah

“KOTA JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung makna dan sasaran sebagai berikut:

Kota Jambi Yang Maju mengandung arti bahwa seluruh Masyarakat Kota Jambi dapat terpenuhi hak-hak dan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menikmati kehidupan yang sehat dan berkualitas, serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

Kota Jambi yang Sejahtera, mengandung makna kesejahteraan lahir batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan. Kesejahteraan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kota Jambi yang Sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi melainkan juga batiniah. Sejahtera lahiriah yaitu terpenuhinya segala aspek kebutuhan dasar masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Jambi. Sejahtera batiniah, yaitu kondisi ketika masyarakat Kota Jambi dapat menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama menurut kepercayaannya masing-masing, termasuk melestarikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianut serta dijunjung tinggi akan membuat masyarakat Kota Jambi memiliki hidup yang lebih aman dan tentram.

Kota Jambi yang Adil, adalah kondisi yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Jambi dalam melakukan segala aktivitas dan keberlangsungan hidupnya.

Kota Jambi yang Berkelanjutan, ditandai oleh berbagai praktik dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang sebagai wilayah yang layak huni dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat.

4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun misi pembangunan dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah;
4. Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kota yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan transformasi Sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan.

Dalam mewujudkan misi, dibutuhkan upaya yang fokus, berkesinambungan, dan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional. Sejalan dengan konsepsi pembangunan jangka panjang nasional, Dimana dalam mewujudkan transformasi sosial ekonomi, dan tata kelola pemerintah yang inovatif, perlu didukung oleh kondisi ketertiban umum, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan pola kepemimpinan daerah yang mampu mensinergikan setiap elemen pembangunan

kota dalam melaksanakan pembangunan kota yang adil dan merata, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana yang bukan hanya tersedia secara standar kebutuhan melainkan juga dapat mendukung berbagai permasalahan perkotaan. Elemen-elemen tersebut membutuhkan jangka waktu Pembangunan yang panjang untuk diwujudkan, sehingga konsistensi Pembangunan juga menjadi kunci tercapainya visi pembangunan Kota Jambi kedepan.

Misi ke-1: mewujudkan transformasi sosial

Mewujudkan transformasi sosial adalah misi menciptakan manusia Kota Jambi yang sehat, cerdas, religius, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 transformasi sosial menjadi salah satu hal yang penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial. Selain itu, aspek religius menjadi aspek yang penting karena dengan moral dan akhlak yang mulia agar tercipta karakter masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing tinggi, profesional, dan religius dilakukan dengan dengan arah tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
2. Keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan dasar;
3. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Membentuk SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
5. Membangun Masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
6. Melindungi hak asasi manusia;
7. Menciptakan Pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
8. Meningkatkan peran Masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak Pembangunan; dan
9. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif.

Misi ke-2: mewujudkan transformasi ekonomi

Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat utama di Provinsi Jambi mempengaruhi karakteristik perkembangan ekonomi Kota Jambi saat ini dan waktu yang akan datang. Selain faktor peran dan fungsi kota, perkembangan arah kebijakan pada wilayah eksternal tentu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Kota Jambi. Transformasi ekonomi utamanya bertujuan untuk mensejajarkan perkembangan Kota Jambi dengan ibukota-ibukota provinsi lainnya di Pulau Sumatera dan menuntaskan berbagai permasalahan pada sektor ekonomi kota yang masih dihadapi hingga saat ini.

Dalam dua puluh tahun kedepan, dinamika pembangunan ekonomi Kota Jambi akan menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan pola perkembangan yang lebih besar yang juga membutuhkan transformasi ekonomi. Tantangan tersebut diantaranya adalah semakin berkembangnya jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional.

Transformasi ekonomi kota diharapkan dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. dan berkeadilan dalam distribusi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi serta ketidaksetaraan sosial, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. pengembangan Iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi;
Pembangunan ekonomi Kota Jambi harus mampu diiringi dengan pengembangan iptek dan peningkatan inovasi, sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Peningkatan produktivitas ekonomi dalam tujuannya menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang merata, mendorong sektor-sektor yang selama ini ikut handil dalam mendukung ketahanan ekonomi kota, seperti: produktivitas ekonomi kreatif, produktivitas tenaga kerja, serta produktivitas UMKM dan koperasi.
2. Penerapan ekonomi hijau:

Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (iv) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (v) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

3. Transformasi digital

Transformasi digital sebagai komponen transformasi ekonomi kota mengacu kepada pemenuhan kebutuhan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan, mengenai: (i) regulasi dan insitusi; (ii) Pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi; (iv) keterpaduan data; (v) modal investasi teknologi; (vi) riset dan inovasi.

4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional

Pengembangan kota sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kota layak huni dengan pelayanan berbasis digital, peningkatan akses air minum aman, penerapan *zero waste*, serta pengelolaan limbah yang berawasan lingkungan.

Misi ke-3: mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah

perkembangan jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional membutuhkan transformasi tata kelola pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan dan berbagai tantangan dua puluh tahun yang akan datang melalui regulasi dan tata

kelola yang berintegritas dan adaptif pula. Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, sasaran utama diarahkan kepada :

1. restrukturisasi dan penguatan perangkat daerah;
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien;
3. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang optimal;
4. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas; dan
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Misi ke-4: Meningkatkan Penegakan Hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Kepastian hukum, ketentraman, ketertiban umum yang diciptakan dengan tujuan mendukung terciptanya stabilitas ekonomi makro Kota Jambi. Untuk itu Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud dilaksanakan terhadap peraturan – peraturan, baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selanjutnya, stabilitas ekonomi makro juga akan berpengaruh terhadap penurunan angka kriminalitas.

Misi ke-5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Perkembangan kawasan perkotaan memiliki konsekuensi terhadap degradasi sosial, kebudayaan, dan ekologi. Selanjutnya degradasi sosial, kebudayaan, dan ekologi dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perkotaan. Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi membutuhkan keseimbangan untuk membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Sebagai komponen yang berada didalam suatu ekosistem, manusia dan lingkungan yang saling memberikan pengaruh. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi memberi dampak kepada penurunan kualitas sumberdaya alam tanah, air, dan udara. Sementara lingkungan yang menurun kualitasnya juga berpotensi memberi pengaruh terhadap kendala penciptaan ruang permukiman perkotaan yang layak huni.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dengan sasaran utama diarahkan kepada:

1. Penguatan peran agama dan pelestarian karakter sosial budaya:

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan perkotaan. menjaga karakter sosial budaya daerah yang juga menjadi landasan hubungan antar masyarakat yang beretika dan bermoral.

2. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif:

Kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dalam menghadapi setiap perkembangan dan tantangan tidak dapat lepas dari ketangguhan masyarakat yang terbentuk dari kualitas keluarga. Sementara pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial adalah untuk menciptakan jaminan bahwa tidak ada satu orangpun yang tertinggal dalam kesempatan Pembangunan karena alasan perbedaan gender.

3. Lingkungan hidup berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas diciptakan terutama dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan penegakan peraturan, sosialisasi untuk perubahan gaya hidup yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan air limbah, *zero waste*, pengendalian kualitas udara, penerapan insentif dan disinsentif, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan

4. Ketahanan energi dan air

Ketahanan energi dan air diwujudkan melalui peningkatan jaringan gas rumah tangga, peningkatan jaringan Listrik tegangan rendah ke kawasan-kawasan pengembangan permukiman, pemerataan distribusi stasiun pengisian energi, serta perlindungan sumberdaya air.

5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Resiliensi terhadap bencana pada dasarnya sejalan dengan sasaran lingkungan hidup berkualitas melalui pengendalian pemanfaatan lahan. Resiliensi terhadap perubahan iklim diarahkan untuk mendukung penurunan emisi GRK melalui peningkatan ruang terbuka hijau, penerapan efisiensi

energi, elektrifikasi transportasi, pengembangan industri hijau, penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku Masyarakat.

Misi ke-6: Pembangunan kota yang merata dan berkeadilan

Secara administrasi, Kota Jambi dibelah menjadi 2 (dua) bagian wilayah oleh aliran Sungai Batanghari, yaitu bagian Selatan dan bagian utara (kota Seberang). Kedua bagian wilayah ini memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dimana perkembangan cenderung lebih pesat pada bagian wilayah selatan, sementara wilayah bagian utara cenderung memiliki batasan fisik karena rentan tergenang banjir. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Pembangunan Kota Jambi sampai dua puluh tahun yang akan datang yang seimbang, namun berdasarkan karakteristik fisik dasar dan karakteristik sosial masyarakat. Pemerataan Pembangunan wilayah bagian utara dengan sasaran utama pengembangan pariwisata berbasis sosial budaya, pemerataan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Misi ke-7: Mewujudkan transformasi Sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan

Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan cita-cita mewujudkan ketahanan ekologi membutuhkan dukungan transformasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah lingkungan. Kualitas sarana, prasarana, dan utilitas juga dapat mempengaruhi keterwujudan misi untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Jambi. Saat ini Kota Jambi dihadapkan dengan berbagai permasalahan inefisiensi dan ketercukupan sarana dan prasarana, dimasa yang akan datang kota akan dihadapkan dengan dinamika pertumbuhan penduduk, peningkatan pergerakan sosial dan ekonomi yang membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum. Untuk menjaga konsistensi peran dan fungsi sebagai pusat utama Provinsi Jambi serta meningkatkan daya saing sebagai tujuan investasi sektor sekunder dan tersier, sasaran utama transformasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan perumahan yang layak huni dan memiliki sarana, prasarana, utilitas umum memadai:

Rumah adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan penduduk terhadap rumah harus terpenuhi dan dengan kondisi hunian yang berkualitas baik, yaitu: aman, nyaman, dan terpenuhi prasarana, sarana, utilitas.

2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

Peningkatan aksesibilitas diprioritaskan untuk mengurangi beban prasarana dengan membangun konektivitas-konektivitas baru dan pengembangan prasarana eksisting.

3. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial; Pemerataan dan peningkatan fasilitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kawasan-kawasan permukiman baru sebagai bentuk upaya mereduksi pergerakan pada beberapa pusat kegiatan. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga mendukung upaya transformasi sosial dan meningkatkan fungsi pelayanan kota sebagai pusat utama Provinsi Jambi dan sekitarnya.

4. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar dan lingkungan;

Sarana prasarana dasar meliputi: perumahan, sistem prasarana air minum, pengelolaan limbah domestik dan B3, sistem pengelolaan persampahan menuju *zero waste*.

Misi ke-8: Mewujudkan kesinambungan Pembangunan

Ketercapaian perwujudan Visi Kota Jambi dua puluh tahun yang akan datang membutuhkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan kaidah pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kota Jambi, peningkatan akuntabilitas pemerintah, penguatan pengendalian pembangunan, penguatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dan inovasi sumber pembiayaan Pembangunan.

B A B V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



5.1 ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi periode 2025-2045 diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Misi pembangunan periode 20 tahun tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir dari berbagai isu strategis dan masalah yang telah di himpun berlandaskan pada visi dan misi daerah.

5.1.1 Pentahapan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pentahapan pembangunan, meliputi:

A. Tahap Pertama (2025-2029):

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Tahap pertama memprioritaskan penguatan fondasi transformasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititik beratkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;
- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, terutama lembaga daerah yang berkaitan dengan sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan pelayanan publik;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
- e) Peningkatan regulasi penataan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
- f) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat; dan
- g) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak.

B. Tahap Kedua (2030-2034):

Tahap kedua ini, pembangunan daerah diarahkan untuk melakukan percepatan transformasi. Dengan arahan kebijakan memperkuat arah kebijakan tahap pertama. Arahan kebijakan tahap kedua adalah sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititik beratkan untuk penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas;
- b) Transformasi ekonomi selain memantapkan eksistensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan penerapan ekonomi hijau, juga diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin masif sampai skala UMKM.
- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk peningkatan perwujudan kelembagaan yang kolaboratif, efektif, efisien melalui penyederhaan regulasi berbasis teknologi;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan peningkatan kolaborasi bersama lembaga penegakan hukum dan pendekatan yang modern dan terpadu;
- e) Pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
- f) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat; dan
- g) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak dan pengembangan hunian modern.

C. Tahap Ketiga (2035-2039)

Tahap ketiga arah pembangunan diorientasikan dengan meningkatkan eksistensi sebagai salah satu Kota Maju yang memiliki peran dan fungsi

strategis di Pulau Sumatera. Pada tahap ini, sumberdaya manusia diharapkan sudah mampu bersaing secara regional, infrastruktur terbangun secara modern, digitalisasi segala bidang semakin berkembang, transisi energi sudah semakin terlaksana. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan kota pada tahap ketiga ini, meliputi:

- a) Penguatan daya saing sumberdaya manusia yang semakin produktif dan inovatif;
- b) Peningkatan pelayanan dan kualitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dengan standar yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya;
- c) Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya;
- d) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern dan transportasi publik yang nyaman;
- e) Melanjutkan proses transisi energi;
- f) Melanjutkan pengembangan hunian modern dan berwawasan lingkungan.

D. Tahap Keempat (2040-2045)

Tahap keempat, Kota Jambi mempertahankan konsistensi sebagai salah satu Kota Maju di Pulau Sumatera ditengah pertumbuhan penduduk, perkembangan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan pemenuhan kebutuhannya. arah kebijakan pembangunan kota pada tahap keempat ini, meliputi:

- a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing;
- b) Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya dan mampu menciptakan kota berpendapatan tinggi;
- c) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern dan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi;
- d) Perwujudan transisi energi yang semakin merata;
- e) Melanjutkan pengembangan hunian modern dan berwawasan

lingkungan.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
“KOTA JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKELANJUTAN”	transformasi sosial, menuju Masyarakat perkotaan dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan akses Pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui penguatan layanan PAUD • Peningkatan Fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standard • Peningkatan kuantitas & kualitas SDM bidang kesehatan • Peningkatan kualitas tenaga pendidik • Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan • Penguatan pendidikan keagamaan • Menurunkan angka kemiskinan • Peningkatan kualitas dan kuantitas manfaat program perlindungan sosial • Peningkatan kualitas data PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan akses fasilitas kesehatan yang memadai & memenuhi standar • Pemerataan kuantitas & kualitas SDM bidang kesehatan • Peningkatan jumlah dan pemerataan kualitas tenaga pendidik • Pemantapan kondisi sarana & prasarana pendidikan yang maju dan modern • Penguatan pembelajaran digital • Pemenuhan perlindungan sosial yang inklusif untuk semua masyarakat • Menurunkan angka kemiskinan • Peningkatan kualitas dan kuantitas manfaat program perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bidang kesehatan • Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (<i>Science, Technology, ngineering, Art, and Mathematics</i>) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan • pengembangan pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan prpduktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja malalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri. • Penyediaan jaminan perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bidang kesehatan • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan • pelatihan kepemimpinan dan dukungan untuk pertumbuhan karir, sehingga sumber daya manusia dapat mengambil peran kepemimpinan yang efektif. • Pemberdayaan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas PMKS untuk mengentaskan permasalahan sosial

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	Transformasi ekonomi, untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, Sejahtera, adil, merata, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi terkini • Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi • Inovasi pengembangan sumber energi baru terbarukan • Regulasi insentif dan disinsentif pengembangan ekonomi hijau • Pengembangan kelembagaan, infrastruktur, dan SDM untuk pengembangan transformasi digital • Pengembangan infrastruktur digital yang merata • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis • Pembangunan infrastruktur strategis dalam mendukung perekonomian • Optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang sesuai peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas unggulan UMKM dan koperasi yang memiliki daya saing di pasar domestik dan luar negeri • Peningkatan jangkauan pasar dan koperasi UMKM melalui digitalisasi • Peningkatan cakupan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja • Pengembangan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru • Pengembangan fasilitas penyaluran energi baru terbarukan • Pengoptimalan digitalisasi dan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, dan efisiensi produksi • Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian • Peningkatan konektivitas transportasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya tarik destinasi wisata • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata sosial budaya • Pemantapan integrasi potensi wisata budaya, alam, dan belanja • Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan EBT • Peningkatan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi • Digitalisasi sektor pelayanan public • Mengoptimalkan keterkaitan antar infrastruktur yang ada dalam meningkatkan aktivitas ekonomi • Peningkatan kualitas transportasi publik yang nyaman dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi • Peningkatan produktivitas tenaga kerja • Pengembangan transportasi ramah lingkungan • Pemantapan digitalisasi sektor pelayanan publik dan aktivitas ekonomi • Memanfaatkan infrastruktur yang handal dan berkualitas untuk menjadikan keunggulan utama daerah • Pemantapan kualitas transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan transportasi publik 			
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang professional, transparan, dan modern	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan terhadap perangkat daerah yang berkaitan dengan pengembangan sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif • harmonisasi pelaksanaan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan harmonisasi antar perangkat daerah; • Peningkatan kapasitas manajerial, pembagian tugas, pokok, dan fungsi pada seluruh instansi pemerintahan • Penyusunan rencana digitalisasi/ pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka • Peningkatan kapasitas kompetensi ASN pengelola keuangan daerah • Peningkatan pemahaman SPIP kepada seluruh OPD terkait serta menyusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur TI/digitalisasi pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien • Pemantapan digitalisasi/ penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah • Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan • Peningkatan kompetensi APIP secara optimal • Pengembangan kompetensi dan nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan • Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian dan pemanfaatan IT/digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan • Penciptaan inovasi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien • Pengembangan berkelanjutan pada SPIP • Memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta reward and punishment • Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan tata laksana pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis digital dan teknologi informasi • Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien • Pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP • Peningkatan standar kualitas dan kinerja ASN • Pemantapan pelayanan publik yang prima

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN • Pemantapan pemahaman dan kapasitas kebijakan pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintahan 			
	Meningkatkan Penegakan Hukum, Ketentraman, ketertiban Umum, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan regulasi hukum daerah sesuai ketentuan perundangan dan dinamika lokal terkini • Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum dengan instansi penegak hukum negara. • Penguatan OPD penegak hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan ideologi Pancasila dan kebhinekaan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum dengan instansi penegak hukum negara. • Penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum dengan instansi penegak hukum negara. • Penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum dengan instansi penegak hukum negara. • Penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif
	Ketahanan Sosial Budaya dan Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendidikan karakter dan penanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan nilai-nilai karakter dan penanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Membudayakan nilai-nilai religius dalam masyarakat

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	Ekologi Yang Berkelanjutan.	<p>nilai-nilai religius dalam masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan • Perlindungan kawasan berkarakteristik sosial budaya Melayu Jambi • Peningkatan fasilitas penunjang aktivitas kepemudaan dan pelatihan di bidang olahraga, kesenian, budaya dan kewisusahaan • Penguatan kebijakan pengarus utamaan gender • Peningkatan kapasitas perempuan dalam aktifitas perekonomian • Peningkatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional • Penurunan angka kejahatan lingkungan • Penataan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Peningkatan dan penataan RTH publik • Peningkatan sosialisasi dan intervensi kesadaran 	<p>religius dalam masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kurikulum pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan • Perlindungan kawasan berkarakteristik sosial budaya Melayu Jambi • Peningkatan dukungan pengembangan organisasi kepemudaan • Penguatan tata kelola penyelenggaraan pengarus utamaan gender • Peningkatan pembangunan manusia berbasis gender • Pengembangan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan • Penataan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Peningkatan dan penataan RTH publik • Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas umum yang mendukung 	<p>nilai-nilai religius dalam masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan • Perlindungan kawasan berkarakteristik sosial budaya Melayu Jambi • Peningkatan peran organisasi kepemudaan. • Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan • Pemanfaatan dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah dan persampahan • Pencegahan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Peningkatan dan penataan RTH public • Peningkatan kapasitas produksi air minum • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membudayakan nilai-nilai karakter dan religius untuk siswa di seluruh jenjang pendidikan • Perlindungan kawasan berkarakteristik sosial budaya Melayu Jambi • Peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional di bidang olahraga, kesenian, kebudayaan, dan kewisusahaan • Pemantapan kesetaraan gender dalam pembangunan • Pemantapan manajemen dan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler • Pencegahan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Peningkatan dan penataan RTH public • Peningkatan kapasitas produksi air minum • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		masyarakat terhadap kebersihan lingkungan rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sumberdaya air • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pengendalian, perlindungan, serta pengembangan, Kawasan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan; • Peningkatan dukungan layanan irigasi untuk petani • Peningkatan kapasitas daerah untuk penanganan risiko bencana melalui mitigasi dan mekanisme penanggulangan bencana • Peningkatan kapasitas daerah untuk mengembangkan alternatif pembangunan rendah karbon 	aktivitas ramah lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sumberdaya air • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pemanfaatan dan pengembangan kerja sama dengan mekanisme <i>corporate farming</i>, • Peningkatan layanan infrastruktur pertanian, • Peningkatan upaya diversifikasi dan keterjangkauan pangan • Pengembangan Early Warning System untuk peringatan kebencanaan; • Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi 	produktivitas sektor pertanian, <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi Early Warning System yang andal dan terintegrasi • Peningkatan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pemantapan ketahanan dan keterjangkauan pangan dengan upaya diversifikasi, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi yang memadai • Pemantapan ketahanan dan kapasitas daerah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim
	Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Merata dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan rencana rinci tata ruang • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kota seberang dan kawasan pengembangan baru 			
	Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman • Pengendalian pengembangan perumahan • Integrasi pengembangan perumahan terhadap sistem prasarana, sarana, dan utilitas kota • Penataan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Pengembangan jaringan jalan eksisting dan penataan persimpangan • Penataan Pasar tradisional • Perlindungan sumberdaya air • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Peningkatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan perumahan • Penataan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan interseksi, penghubung jalan arteri-kolektor, antar jalan kolektor, dan penghubung kawasan permukiman baru • Pembangunan dan pengembangan pasar skala sub pusat • Perlindungan sumberdaya air • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pengembangan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan perumahan • Pencegahan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan interseksi, penghubung jalan arteri-kolektor, antar jalan kolektor, dan penghubung kawasan permukiman baru • Pembangunan dan pengembangan pasar skala sub pusat • Pembangunan dan pengembangan pasar skala lingkungan • Peningkatan kapasitas produksi air minum • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pemanfaatan dan pengembangan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan perumahan • Pencegahan kawasan permukiman dan perumahan kumuh • Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan interseksi, penghubung jalan arteri-kolektor, antar jalan kolektor, dan penghubung kawasan permukiman baru • Pembangunan dan pengembangan pasar skala sub pusat • Pembangunan dan pengembangan pasar skala lingkungan • Peningkatan kapasitas produksi air minum • Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan • Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		<p>domestik (mikro) hingga regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan drainase eksisting; • Pembangunan kolam retensi' • Pembangunan pintu ai 	<p>pengelolaan limbah dan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan drainase eksisting; • Pembangunan jaringan drainase baru • Pembangunan kolam retensi' • Pembangunan pintu air 	<p>pengelolaan limbah dan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan drainase eksisting; • Pembangunan jaringan drainase baru • Pembangunan kolam retensi' 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah • Pemantapan manajemen dan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler • Peningkatan jaringan drainase eksisting; • Pembangunan jaringan drainase baru
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perodesasi perencanaan pembangunan daerah • Pemutakhiran dokumen rencana sektoral • Peningkatan pendapatan asli daerah dan pengembangan sumber pembiayaan inovativ • Peningkatan implementasi pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan asli daerah dan pengembangan sumber pembiayaan inovativ • Pemutakhiran dokumen rencana sektoral • Peningkatan implementasi pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan • Perkuatan pengendalian pembangunan melalui manajemen resiko • Peningkatan implementasi pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan implementasi pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan

5.2 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 5.2
Sasaran Visi RPJPD Kota Jambi 2025-2045

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Pendapatan Per Kapita					
	a. PDRB Perkapita	75,73 juta	105,65 juta	153,38 juta	218,48 juta	275 – 315 juta
	b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	10,25	11,30	12,35	13,40	14,25-15
	c. Kontribusi PDRB Sektor Jasa (%)	27,5	28,58	29,27	30,16	31-32
2	Pengetasan kemiskinan dan Ketimpangan					
	a. Tingkat Kemiskinan	8,07 %	6,8-7,1%	5,8-6,1%	4,8-5,1%	3,8 – 4,1%
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,33	0,32	0,30	0,28	0,26-0,28
	c. Kontribusi PDRB Kota Jambi terhadap Provinsi (%)	13,89	14,14	14,39	14,64	14,89 – 15
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (dapat disesuaikan dengan sasaran kepemimpinan daerah)					
	Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,12	4,35	4,57	4,62-4,93
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
	Indeks Pembangunan Manusia	80,93	81,75-82,25	83,00-83,50	84,25-84,75	85,00-86,50
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>					
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	0,131	0,069	0,035	0,017	0,008

Tabel 5.3
Indikator Utama Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
1	Kesehatan Untuk Semua	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75	75,2-75,7	76-76,5	76,85-77,35	77,93-78,43	
			2. Kesehatan Ibu dan Anak						
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	4	0- 4	0 - 3	0 - 2	0 - 1	
			b. Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	10	7,5 - 8	5 - 5,5	2,5 - 3	0 - 1	
			3. Penanganan Tuberkulosis						
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	80	85-100	90-100	95-100	97-100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	87,5	90-100	92,5-100	95-100	97-100	
			4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	97,62 - 100	97,87 - 100	98,11 - 100	98,36 - 100	98,60 - 100	
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata	5. Hasil Pembelajaran						
			a. Persentase Pendidikan Dasar (SD sederajat) kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:						
			l. Literasi Membaca	84,82	85,02	85,15	85,17	85,2	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
			II. Numerasi	65,32	73,32	75,82	75,95	76,1	
			b. Persentase Pendidikan Dasar (SMP sederajat) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
			I. Literasi Membaca	67,45	75,45	77,95	78,08	78,23	
			II. Numerasi	65,32	73,32	75,82	75,95	76,1	
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang belum Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,5	23,25	28,74	33,06	38-43	
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	51,5	52,25	53,75	55,25	57-60	
			8. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun (tahun)	11,57	12,27	13,02	13,87	14,70-14,90	
			9. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,86	16,54	17,09	17,59	18,13	
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif	10. Tingkat Kemiskinan (%)	8,07%	6,8-7,1%	5,8-6,1%	4,8-5,1%	3,8-4,1%	
			11. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	62,45	72,5	83	94	98-100	
			12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	27	34,75	42,5	50,25	58	
4	Iptek, Inovasi, dan	pengembangan Iptek, peningkatan	13. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,25	11,30	12,35	13,40	14,25-15	
			14. Pengembangan Pariwisata:						

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
	Produktivitas ekonomi	inovasi, dan produktivitas ekonomi	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,08	3,52	4,02	4,47	4,77	
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	6163	6286	6409	6532	6656	
			15. Kontribusi PDRB Sektor Jasa (%)	27,5	28,58	29,27	30,16	31-32	
			16. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,46	12,75	14,03	15,32	16,6	
			b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan menengah (%)	3,45	4,84	6,23	7,61	9	
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,19	6,89	8,6	10,3	12	
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	2,54	3,84	5,18	6,5	
			e. Return on Asset (RoA) BUMD (%)	3,37	3,54	3,71	3,88	4	
			17. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	7,59	6,91	6,23	5,55-6,5	
			18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,54	50,67	52,80	54,93	57,06-59	
			19. Tingkat Penguasaan IPTEK:						
						a. pengeluaran iptek dan inovasi dibandingkan APBD (%)	8,07	9,07	11,07
			b. Indeks Inovasi Daerah (Angka)	64,16	65,96	67,76	69,56	70,12-75,20	
5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan ekonomi hijau	20. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)						
6	Transformasi Digital	Transformasi digital	21. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9	6,25	6,6	6,95	7,3	
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan pondasi ekonomi lokal mendukung ekonomi regional dan nasional	22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	21,34	23,44	25,54	27,64	29,74	
			23. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80-4,0	
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional	24. Kota dan Desa Maju, Inklusif , dan Berkelanjutan						
			a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota Jambi Terhadap Provinsi (%)	13,89	14,14	14,39	14,64	14,89 – 15	
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	97,93	98,39	98,80	99,20	99,60-100	
9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Restrukturisasi dan Penguatan Perangkat Daerah	25. Indeks Reformasi Hukum	73	78	83	88	93	
		Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien	26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,27	4.34	4.42	4.49	4.57	
		Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan	27. Indeks Pelayanan Publik	3,9	4,01 (A-)	4,15 (A-)	4,40 (A-)	4,50 – 4,70	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
		pemerintah yang optimal							
		Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas	28. Indeks Integritas Nasional	74,57	75.01	74.45	75.90	76.34	
10	Meningkatkan penegakan hukum dan ketertiban umum	Meningkatkan penegakan hukum	29. Indeks Kriminalitas						
			30. Proporsi Penduduk yang merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	64,67	67,23	68,73	69,79	70-72	
			31. Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatkan ketertiban umum	32. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,47	2,52	3,57	4,62	5,67-7	
			33. Tingkat Inflasi (%)	3,27	3,24	3,21	3,18	3,15+1	
			34. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
			a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	18,5	27,87	37,25	46,62	56	
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	
			c. Nilai Transaksi Saham Kota Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan*	2.219,83	5.312,00	8.545,00	11.224,0	14.126,16	
			d. Total Kredit/PDRB (%)	18	27	36	45	54	
			35. Inklusi Keuangan (%)	91,35	93,26	95,18	97,1	99,02	
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Penguatan daya saing daerah	36. Peringkat Daya Saing Daerah dalam Provinsi	1	1	1	1	1	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan peran agama dan pelestarian karakter sosial budaya	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,81	57,52-57,73	60,21-60,84	63,54-64,01	66,98-67,53	
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,81	67,40-67,79	68,99-69,67	70,58-71,54	72,18-73,42	
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,48	70,48	72,48	74,48	74,48	
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20-0,22	
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas	41. Kualitas Lingkungan Hidup						
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,09	57,67	58,24	58,82	59,39-60,10	
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12	21,5	31	40,5	50	
			c. Pengelolaan Sampah						
			I. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17	63	80	100	100	
			II. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	24,89	43,67	62,45	81,22	100	
16	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Ketahanan energi, air, dan ketahanan pangan	42. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
			a. Ketahanan Energi						
			I. Komsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	342,324,580	359,838,960	374,528,440	386,341,852	395,357,014	
			b. Prevalensi Ketidakcukupan	11,57	10,70	9,84	8,97	8,11-8,40	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Keterangan
					2029	2034	2039	2045	
			Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)						
			c. Ketahanan Air						
			I. Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	32,861	35,362	38,404	41,175	43,947-45.000	
			II. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	78	80	85	92	95-100	
17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	43. Indeks Resiko Bencana (IRB)	133,49	127,31	121,14	114,96	108,79	
			44. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
			• Tahunan	0,131	0,069	0,035	0,017	0,008	

B A B VI

PENUTUP



6.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah turunan, baik jangka menengah daerah, maupun jangka pendek yang selaras dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Jambi 2024, yaitu: “ Mewujudkan Kota Jambi Yang Maju, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan”. Selain peran Pemerintah Kota Jambi, perwujudan visi juga membutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran masing-masing dengan kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling sinergis dan berkesinambungan, meliputi: 1). konsistensi perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah; 2).kerangka pengendalian; 3). Sistem insentif; dan 4) mekanisme perubahan.

A. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Salah satu tantangan yang menjadi faktor belum tercapainya visi dan misi pembangunan adalah permasalahan konsistensi antara perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk menjaga konsistensi agar penyelenggaraan pembangunan daerah lebih terarah, efektif, dan efisien dan memberi pengaruh signifikan terhadap perwujudan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota melalui program-program pembangunan yang selaras dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, ekonomi, dan keseimbangan lingkungan perkotaan.

B. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Dalam sistem perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan posisi tertinggi sebagai pedoman baik terhadap dokumen perencanaan turunannya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dokumen turunan ini menjadi pedoman penganggaran, termasuk bagi APBD.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk menjaga konsisten dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi, maka kaidah yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
- b. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.

- c. Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator pembangunan RPJPD mengacu pada Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi.
- d. Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
- e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD, dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW serta KLHS RPJMD.
- f. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
- h. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
- i. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

6.2 Prinsip Kerangka Kerja Dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan Kerangka Kerja Logis (KKL) ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan Kerangka Kerja Logis (KKL) juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan Kerangka Kerja Logis (KKL) dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik dimaksudkan terhadap penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial merupan penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam bentuk lokasi penerapan di Wilayah Kota Jambi.
3. Holistik adalah dimana penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

6.3 Kerangka Pengendalian

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien adalah tujuan utama dari penggunaan keuangan negara. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga berprinsip akuntabel dan transparan dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan diwujudkan dengan juga mengoptimalkan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta tentunya efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang, proses pengendalian tentunya dilaksanakan terutama terhadap pembangunan jangka menengah daerah, dan jangka pendek. Pengendalian juga dilaksanakan dengan pertimbangan dinamika pembangunan dan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam mencapai tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan.

Dinamika pembangunan yang dimaksud selain dinamika internal kota, juga arah kebijakan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, yaitu: arah kebijakan nasional dan provinsi melalui RPJMN dan RPJPD Provinsi.

Untuk melaksanakan pengendalian terhadap dinamika pembangunan dan kemungkinan resiko-resiko yang mungkin terjadi, dilaksanakan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu: pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

1. Pengendalian Pada Tahap Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Perumusan dan penetapan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas yang diiringi

dengan indikator keberhasilan yang terukur dan selaras dengan pembangunan jangka panjang.

- c. Perkiraan resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya
Resiko diidentifikasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pemetaan resiko dilaksanakan dengan mengidentifikasi penyebab resiko, kategori resiko, sumber resiko, dan dampak resiko, kemudian dirumuskan rencana pengendalian untuk meminimalisir tingkat resiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pengendalian Pada Tahap Pelaksanaan

Bagian yang tidak kalah penting dari tingkat ketercapaian tujuan pembangunan adalah bagaimana mengendalikan penganggaran pembangunan agar tetap implementatif terhadap perencanaan telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, yang mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.4 Sistem Insentif

Telah disampaikan sebelumnya, bahwa selain peran Pemerintah Kota Jambi, perwujudan visi juga membutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran masing-masing. Pelaku kepentingan pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Untuk meningkatkan keterlibatan pelaku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan, diperlukan sistem insentif. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.5 Mekanisme Perubahan

Selain implementatif, dokumen perencanaan juga harus menerapkan prinsip adaptif terhadap rencana yang memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.6 Komunikasi Publik

Komunikasi publik merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan ditengah keterbukaan dan keluasaan akses informasi saat ini. Komunikasi Publik yang baik akan memberi dampak positif terhadap perwujudan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.